

RANCANGAN AWAL

RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH

DAERAH

PROVINSI GORONTALO

TAHUN 2025-2029



www.gorontaloprov.go.id



[Pemerintah Prov Gorontalo](https://www.youtube.com/PemerintahProvGorontalo)



[@pemerintahgorontaloprov](https://www.instagram.com/pemerintahgorontaloprov)



[@pemprov_Gtlo](https://twitter.com/pemprov_Gtlo)



[pemprovgorontalo](https://www.tiktok.com/pemprovgorontalo)



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 dengan penuh komitmen dan tanggung jawab. Dokumen ini menjadi peta jalan strategis untuk mewujudkan visi "**Gorontalo Maju dan Sejahtera**".

Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo dalam kaitannya dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) guna mendorong akselerasi pembangunan, meningkatkan konektivitas, dan membuka peluang investasi. Selain itu, penanggulangan kemiskinan menjadi prioritas utama melalui program-program inklusif yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas juga akan terus diupayakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tidak kalah penting, nilai-nilai luhur "Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah" akan dijadikan sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat, menciptakan harmonisasi antara adat, agama, dan pembangunan yang berkelanjutan.

RPJMD 2025-2029 disusun dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, akademisi, pelaku usaha, organisasi masyarakat, hingga masyarakat umum. Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi semua pihak dalam proses penyusunan dokumen ini. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Mari kita bersama-sama bekerja keras, bahu-membahu, untuk mewujudkan Gorontalo yang maju, sejahtera, dan bermartabat.

Akhir kata, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah dan upaya kita dalam membangun Gorontalo yang lebih baik.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR GORONTALO

GUSNAR ISMAIL



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xxx
DAFTAR GRAFIK	xxxi
BAB I PENDAHULUAN	I-1
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH	III-1
BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	IV-1
BAB V VISI MISI TUJUAN SASARAN.....	V-1
BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	VI-1
BAB VII KERANGKA PENDANAAN.....	VII-1
BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VIII-1
BAB IX PENUTUP	IX-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan daerah. Sesuai Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD).

Berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024, dan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih akan dilaksanakan pada Februari 2025, sebagaimana diatur pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Jadwal pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara serentak pada 27 (dua puluh tujuh) hari kerja setelah hari terakhir penetapan hasil rekapitulasi oleh komisi pemilihan umum provinsi. Berdasarkan hal tersebut, Kepala Daerah terpilih harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yaitu dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

Sebagaimana Pasal 47 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa salah satu tahapan dalam penyusunan RPJMD adalah penyusunan rancangan awal RPJMD. Rancangan Awal RPJMD merupakan penyempurnaan dari rancangan teknokratik RPJMD yang sebelumnya disusun dan telah dijadikan pedoman pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk merumuskan visi, misi serta program prioritas. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan

perencanaan, dengan mencakup penjabaran visi dan misi Kepala Daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan program pembangunan Daerah, perumusan program Perangkat Daerah, serta sinkronisasi dengan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Gorontalo.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

- 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 20. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyesuaian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW;
 21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);
 22. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4);

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan nasional, provinsi, maupun daerah sekitarnya. Dalam UU Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan yang erat dan saling terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD berpedoman

pada RPJM Nasional, RPJPD Provinsi Gorontalo, RTRW Provinsi, RIPJPID, KLHS RPJMD, serta Evaluasi Capaian Pembangunan 5 Tahun terakhir, dengan memperhatikan dokumen manajemen resiko pembangunan. Gambar 1.1. menunjukkan keterkaitan antara dokumen Rancangan Awal RPJMD dengan dokumen rencana lainnya baik pusat maupun daerah. Dengan keterkaitan tersebut diharapkan akan tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah.

Gambar 1.1



Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 disusun dan berpedoman pada substansi dalam:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045, meliputi permasalahan, isu strategis, visi dan misi pembangunan jangka panjang, sasaran pokok, arah kebijakan pembangunan daerah, dan indikator kinerja pada Tahap I RPJPD dengan tema “Penguatan Landasan Transformasi”;
2. RPJM Nasional Tahun 2025-2029 meliputi keselarasan dalam sasaran, arah kebijakan transformasi, indikator dan target kinerja;
3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, meliputi substansi gambaran umum kondisi daerah berdasarkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (TPB/SDGs), daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, perumusan permasalahan dan isu strategis serta tujuan sasaran strategis;
4. RTRW Provinsi, meliputi tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang, dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi;
5. Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID), meliputi Sinkronisasi kebijakan RIPJPID dengan prioritas pembangunan daerah, pengembangan ekosistem Riset dan Inovasi Daerah, kajian Permasalahan Utama Daerah serta optimalisasi Produk Unggulan Daerah (PUD).

6. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah, serta yang telah menjadi perhatian dan pedoman dalam penyusunan RPJPD.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 adalah penyiapan rencana pembangunan 5 (lima) tahun kedepan meliputi data dan informasi capaian kinerja pembangunan daerah, gambaran keuangan daerah, permasalahan dan isu strategis, visi misi tujuan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta kerangka pendanaan dan program perangkat daerah.

Tujuan disusunnya Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah untuk dipergunakan sebagai bahan diskusi dengan pemangku kepentingan pada Forum Konsultasi Publik.

1.5 Sistematika

Dokumen Rancangan Awal RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang; dasar hukum; hubungan antardokumen; maksud dan tujuan; serta sistematika.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat kondisi umum daerah dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, dan aspek pelayanan umum.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran singkat kondisi keuangan daerah, baik kondisi keuangan daerah dalam lima tahun terakhir maupun gambaran proyeksi keuangan daerah untuk lima tahun ke depan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Memuat permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis daerah yang merupakan hasil analisis dari gambaran umum kondisi daerah dengan memperhatikan kondisi tantangan pembangunan.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Memuat visi dan misi Kepala Daerah sebagai solusi atas isu strategis daerah, serta tujuan dan sasaran sebagai elaborasi lebih terperinci untuk mendukung pencapaian visi dan misi.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat strategi dan arah kebijakan sebagai penjabaran dari sasaran daerah, serta identifikasi program daerah dalam upaya mengatasi permasalahan daerah.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT

DAERAH

Memuat kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan pembangunan daerah, yang dipilah berdasarkan bidang urusan dan program perangkat daerah.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

Memuat hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan di periode RPJMD sebelumnya, untuk memperoleh gambaran utuh dan terperinci hasil pelaksanaan pembangunan guna dijadikan landasan untuk pelaksanaan pembangunan di periode selanjutnya.

BAB IX PENUTUP

Memuat arah keberlanjutan pembangunan dan komitmen implementasi dari setiap pemangku kepentingan, serta harapan untuk kolaborasi berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Memuat juga ketentuan penggunaan dokumen pada masa transisi ke periode pembangunan jangka menengah selanjutnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

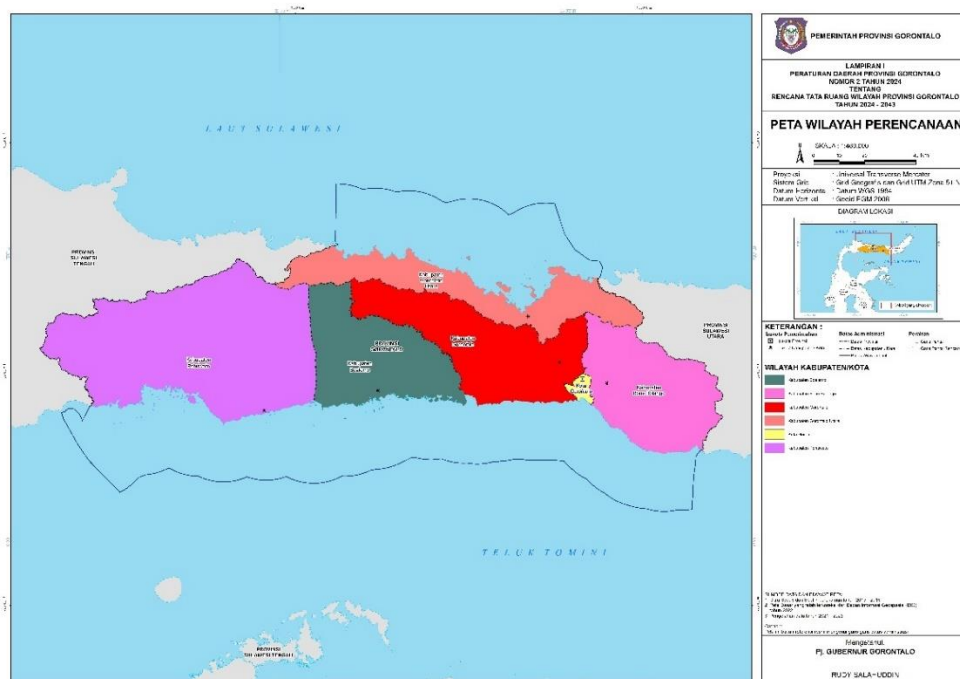
2.1.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografi

Provinsi Gorontalo dibentuk pada tanggal 5 Desember Tahun 2000, dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo tanggal 22 Desember 2000. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 72 tahun 2019, Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah sebesar 11.257,07 Km², atau sebesar 0,59 persen dari luas wilayah Indonesia. Sedangkan cakupan wilayah perencanaan RTRW Provinsi seluas kurang lebih 2.107.785 Ha, meliputi wilayah darat dan wilayah laut.

Wilayah Administrasi Provinsi berada pada posisi geografis 0°6' 18" – 1°15' 25" Lintang Utara dan 121°9' 40" – 123°33' 99" Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangat strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur.

Gambar 2.1
Peta Administrasi Provinsi Gorontalo



Sumber: RTRW Provinsi Gorontalo tahun 2024-2043

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah

terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.370,359 km² atau sebesar 36,34 %, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 70,933 km² atau sebesar 0,59%.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota

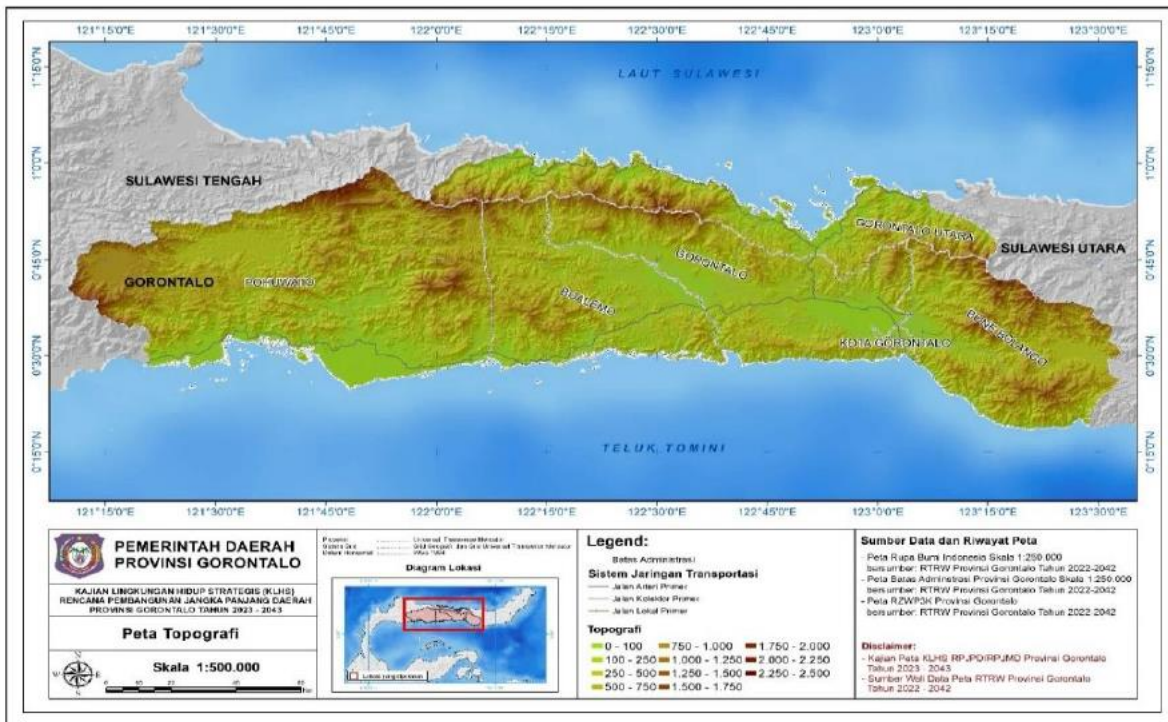
Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	2.160,364	17,97
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	84	84	1.830,865	15,23
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.888,998	15,71
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.370,359	36,34
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	123	124	1.703,628	14,17
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	70,933	0,59
75	Provinsi Gorontalo	77	72	657	729	12.025,147	100

Sumber: Kepmendagri 100.1.1-1667 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

A. Kondisi Topografi

Berdasarkan topografinya wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Provinsi Gorontalo



Sumber : Revisi RTRW Provinsi Gorontalo 2010-2030

Wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumoling (377 m). Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjalur kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuartar.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub paralel. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

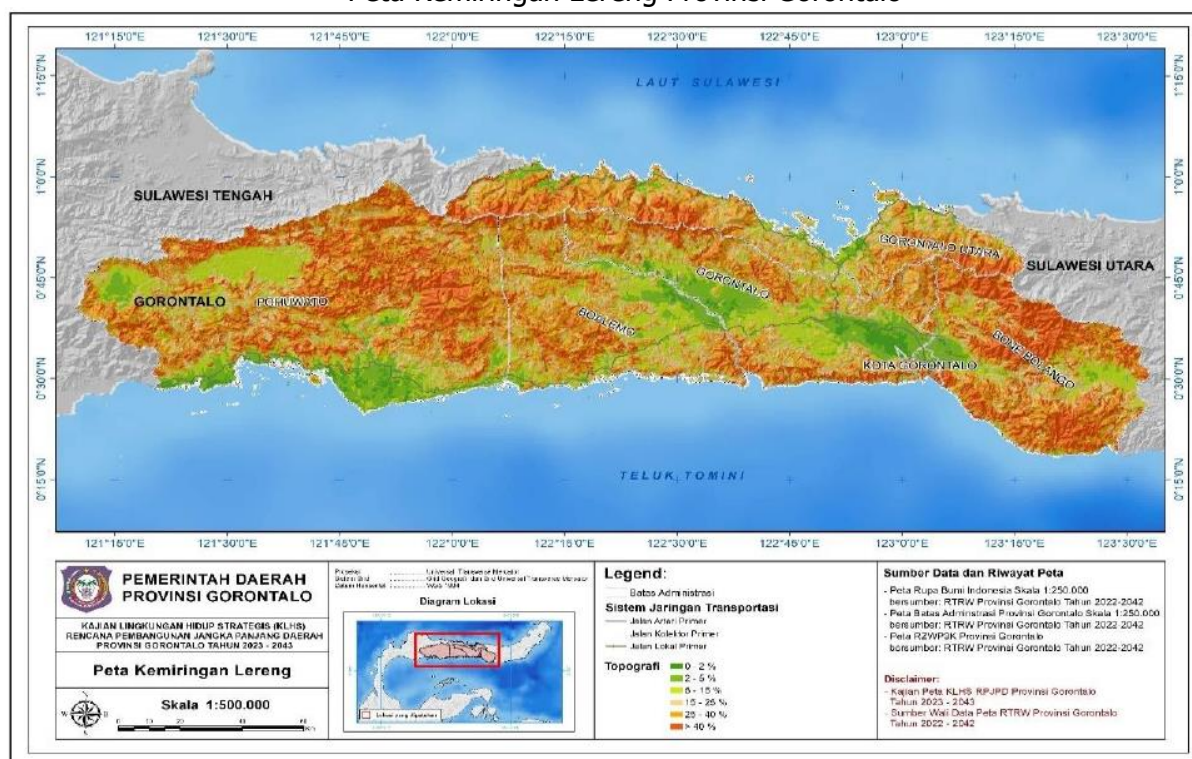
Tabel 2.2
Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	22.043,96	1,83
B	2 – 5	100.302,18	8,33
C	5 – 15	189.728,33	15,76
D	15 – 25	183.796,47	15,26
E	25 – 40	400.774,82	33,29
F	>40%	307.414,80	25,53
Jumlah		1.204.060,56	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa wilayah dengan kemiringan paling sedikit yaitu 0 – 2 % yaitu 22.043,96 ha, kemudian kemiringan 2 – 5 % yaitu 100.302,18, sedangkan wilayah kemiringan paling banyak yaitu antara 25>40% atau seluas 708.189,62 ha.

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo



Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

B. Geologi

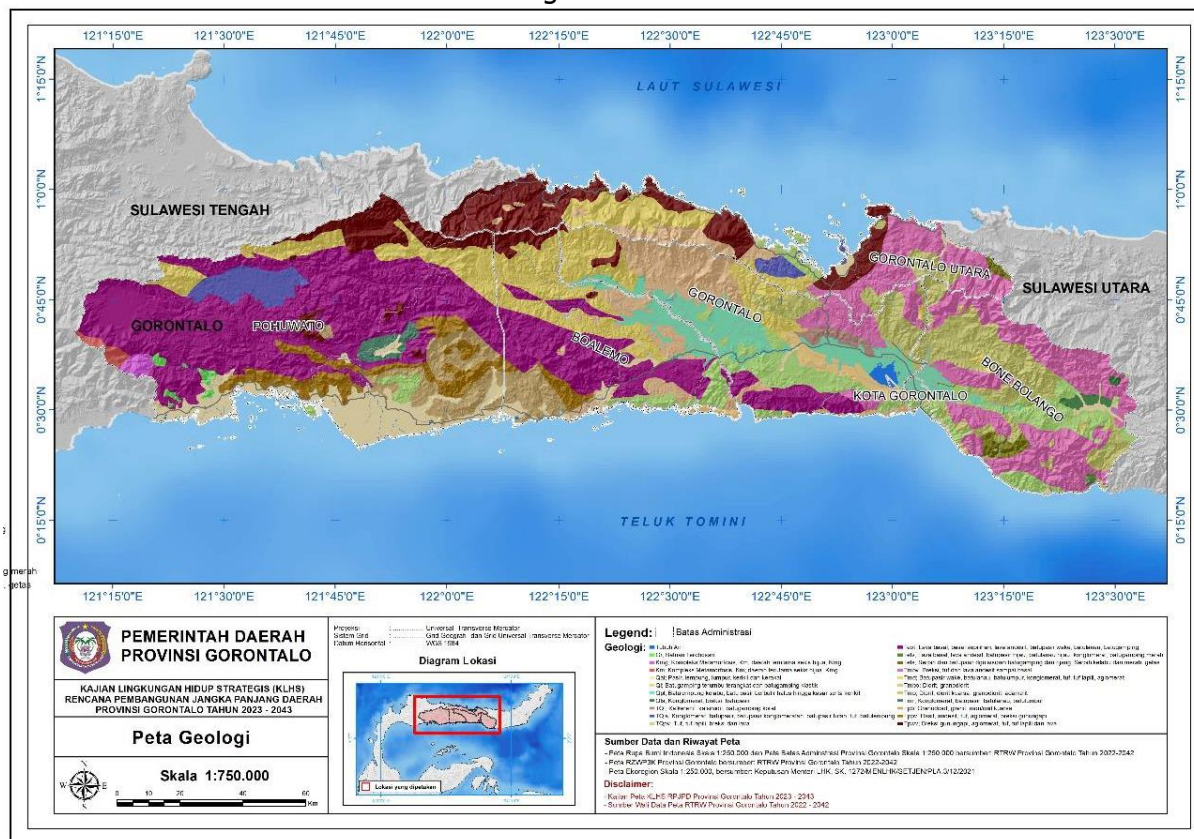
Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuannya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuartar. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen.

- Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokopa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.
- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Diatas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQI) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batu gamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batu gamping terumbu (QI) yang dimulai pada Plistosen Atas – Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat mengangan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik).

Gambar 2.4
Peta Geologi Provinsi Gorontalo



Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

C. Klimatologi

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Stasiun Klimatologi Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2024 adalah 27,69°C. Suhu terendah terjadi di bulan Agustus yaitu 21,10°C. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2024 sebesar 83,38 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2024 yaitu sebesar 1.595,70 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Agustus, yaitu mencapai 359,40 mm. Pada tahun 2024, rata-rata kecepatan angin tercatat sebesar 1,74 knot.

D. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Wilayah Provinsi Gorontalo dibagi kedalam tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, masing-masing DAS Randangan, DAS Paguyaman dan DAS Limboto Bolango Bone. Diluar dari ketiga DAS utama tersebut, juga terdapat Daerah Aliran Sungai Kecil lainnya yang umumnya terdapat dihampir seluruh wilayah pegunungan dipinggiran kawasan pantai. Air dari DAS-DAS kecil bermuara di Teluk Tomini untuk DAS dibagian Selatan Provinsi dan dilaut Sulawesi untuk DAS dibagian utara Provinsi.

Tabel 2.3
Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	KODE	LUAS (Km ²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.05.A2	456.944,03
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.485,65
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	3.945

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.4
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Di Provinsi Gorontalo

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
WS Paguyaman	WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)		WS Randangan
1. DAS Paguyaman,	1. DAS Tolinggula,	38. DAS Waluhu	1. DAS Randangan
2. DAS Limba,	2. DAS Potanga,	39. DAS Bilolantunga	2. DAS Beringin
3. DAS Olibuhu,	3. DAS Limbato	40. DAS Tombulilato	3. DAS DingaMotolohu,
4. DAS Tumba,	4. DAS Biawu,	41. DAS Ombulo	4. DAS Patihu,
5. DAS Bolangga,	5. DAS Bulolila,	42. DAS Momungaa	5. DAS Sidorukun,
6. DAS Bubaa,	6. DAS Bulontio,	43. DAS Bangahu	6. DAS Sukadamai,
7. DAS Tumbihi,	7. DAS Boliohulu	44. DAS Mopuya	7. DAS Wonggarasi,
8. DAS Limbatihu,	8. DAS Boliyohuto,	45. DAS Kaidundu	8. DAS Lemito,
9. DAS Tabongo,	9. DAS Baladu,	46. DAS Uabanga	9. DAS Lomuli,
10. DAS Dulupi,	10. DAS Mooti,	47. DAS Tongo	10. DAS Milangodaa,
11. DAS Sambat,	11. DAS Sipatana,	48. DAS Bilungala	11. DAS Popayato,
12. DAS Tilamuta,	12. DAS Dulukapa,	49. DAS Tamboo	12. DAS Dudeulo,
13. DAS Lamu,	13. DAS Deme I,	50. DAS Tolotio	13. DAS Molosipat,
14. DAS Botumoito,	14. DAS Dunu,	51. DAS Olele	14. DAS Moutong
15. DAS Tapadaa,	15. DAS Bubalango,	52. DAS Oluhuta	
16. DAS Salilama,	16. DAS Tengah,	53. DAS Molotabu	
17. DAS Tabulo,	17. DAS SOgu,	54. DAS Botutonuo	
18. DAS Bumbulan,	18. DAS Monano,	55. DAS Modelamo	
19. DAS Libuo	19. DAS Tudi,	56. DAS Buluango	

20. DAS Marisa	20. DAS Tolango, 21. DAS Datahu, 22. DAS Popalo, 23. DAS Tolangio, 24. DAS Pontolo, 25. DAS Buda, 26. DAS Posso, 27. DAS Bubode, 28. DAS Sanbungo, 29. DAS Tolotapo, 30. DAS Butoimola, 31. DAS Samia 32. DAS Tapaibuhu 33. DAS Soklat 34. DAS Sapawea 35. DAS Imana 36. DAS Taludaa 37. DAS Sogitia	57. DAS Huangobutu 58. DAS Inengo 59. DAS Leato 60. DAS Bolango-Bone 61. DAS Limboto 62. DAS Pohe 63. DAS TanjungKramat 64. DAS Bongo 65. DAS Lopo 66. DAS Kayu Bulan 67. DAS Bilihu Timur 68. DAS Langgula 69. DAS Lamu 70. DAS Limo'o 71. DAS Lobuto Timur 72. DAS Lobuto 73. DAS Biluhu Barat 74. DAS Huangobutu	
----------------	---	--	--

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa dari total 245.000 Ha lahan DAS Limboto-Bone Bolango, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik disungai maupun didanau Limboto. Dalam kurun waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha diwilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi kawasan permukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koefisien pengaliran dan indeks Erosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep waterfront city. Hal ini menyebabkan tingginya kerawasan banjir di Kota Gorontalo, dimana 57% masyarakat tinggal dikawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo

2) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain :

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

3) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

E. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu:

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung seluas kurang lebih 575.415 Ha, yang meliputi :

a. Badan Air

Badan air memiliki luas kurang lebih 7.192 Ha, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

b. Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) memiliki luas kurang lebih 202.053 Ha, tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.

c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS)

Kawasan Perlindungan Setempat dengan luas kurang lebih 2.703 Ha, tersebar diwilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

d. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 279.403 Ha, terdiri dari :

1. Cagar Alam Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Cagar Alam Panua di Kabupaten Gorontalo;
3. Cagar Alam di Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo;
5. Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
6. Kawasan Konservasi teluk Gorontalo di Laut;
7. Suaka Margasatwa Nantu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Taman Hutan Raya di Kabupaten Gorontalo;
9. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Sedangkan Kawasan konservasi yang berada di Wilayah Laut diatur berdasarkan arahan zona kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

e. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut

Kawasan pencadangan konservasi di Laut (KPL) memiliki luas kurang lebih 82.551 Ha, yang terdiri atas:

1. Kawasan konservasi Dulangka di Laut;
2. Kawasan konservasi Gorontalo Utara di Laut;

3. Kawasan konservasi Maruangi Mabasar di Laut;
4. Kawasan konservasi Monduli di Laut;
5. Kawasan konserbasi Olinggobe di Laut
6. Kawasan konservasi Sumalata di Laut;. Dan
7. Kawasan Konservasi Tolinggula di Laut.

Kawasan pencadangan konservasi di Laut yang berada di wilayah Laut diatur dalam arahan zona kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

f. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya memiliki luas kurang lebih 26 Ha, yang terdiri atas :

1. Bangunan Indis Rumah Keluarga Hiola di Kabupaten Gorontalo
2. Bangunan Indis Rumah Keluarga Nelly Yusuf di Kabupaten Gorontalo;
3. Bangunan Indis Rumah Tinggi di Kota Gorontalo;
4. Bangunan Kantor Pos Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
5. Benteng Maas di Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Benteng Orange di Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Kantor Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)/Kantor PT Pelayaran Nasional di Kota Gorontalo;
8. Makam Herman Christiaan Knappert di Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Makam Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango;
10. Makam Raja Blongkod di Kabupaten Bone Bolango;
11. Masjid Ar-Rahman Bulila di Kabupaten Gorontalo;
12. Masjid Tua Hunto Sultan Amay di Kota Gorontalo;
13. Pillbox 1 di Kabupaten Gorontalo Utara;
14. Rumah Dulohupa di Kota Gorontalo;
15. SDN 56 Kota Timur di Kota Gorontalo;
16. Situs Benteng Otanaha, Benteng Ulupahu, Benteng Otahiya di Kota Gorontalo;
17. SMA Negeri 1 Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
18. Struktur Makam Raja Tabala-Bala di Kabupaten Gorontalo;
19. Kompleks Makam Hubulo (Gobel) di Kabupaten Bone Bolango; dan
20. Makam Hilmuhu (Talo Tahangi Lipu) di Kabupaten Bone Bolango.

g. Kawasan Ekosistem Mangrove

Kawasan Ekosistem Mangrove memiliki luas kurang lebih 1.486 Ha, terdapat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Laut. Kawasan Ekosistem Mangrove yang berada di wilayah Laut diatur dalam arahan zona kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

2) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya meliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, memiliki luas kurang lebih 1.532.370 Ha, yang terdiri atas :

a. Kawasan hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi (KHP) terdapat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boelamo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan hutan produksi konversi.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2018 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan dibagi kedalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.5
Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2021

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Jumlah luas hutan dan perairan
Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03
Bone Bolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,10	-	140.144,13
Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
Provinsi Gorontalo	202.348,52	196.522,47	252.663,30	90.092,02	23.254,95	764.881,27

Sumber : Gorontalo Dalam Angka Provinsi Gorontalo, 2024

Sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Pasal 38 Ayat (1) Penggunaan kawasan untuk kepentingan Pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung, tanpa mengubah pokok kawasan hutan. Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan Kegiatan Perhutanan Sosial.

- b. Kawasan Budidaya lainnya yaitu meliputi Kawasan Pertanian (KP), Kawasan Perikanan (IK), Kawasan Pergaraman (KEG), Kawasan Pertambangan dan Energi (TE), Kawasan Peruntukan Industri (PI), Kawasan Pariwisata (W), Kawasan Permukiman (PM), Kawasan Transportasi (TR), dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

F. Potensi Wilayah

1) Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain :

- Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedede, kacang tanah dan kacang hijau). Tahun 2024, luas panen padi sawah adalah 46.952 ha dan produksi padi sebesar 234.863 ton, dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten

Gorontalo sekitar 20.931 ha (44,58 persen). Luas panen jagung adalah 133.002 ha dengan 625,97 ribu ton produksi.

- Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, bawang daun, bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, melon, petsai/sawi, semangka, terung, tomat dan wortel) dan buah-buahan (alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya, rambutan, salak, sawo, sirsak dan sukun). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen 1.993 hektar dengan produksi sebanyak 147.292 ton. Dari komoditas buah-buahan, pisang adalah yang utama dengan produksi 131.664 kw.

Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 1.302.650 yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 32.488 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 999.471 Ha, dan Lahan Bukan Pertanian sebesar 270.691 Ha.

Kota Gorontalo, memiliki Pertanian lahan basah seluas ± 796 Ha berada di 7 (tujuh) Kecamatan dari 9 (sembilan) Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Kawasan tanaman pangan lahan basah untuk tanaman padi berada di Kecamatan Duingingi, Kota Timur, kota Utara, kota tengah, dan Sibatana. Lahan sawah di Kota Gorontalo hanya berupa lahan sawah irigasi teknis. Pertanian lahan kering seluas ± 157 Ha. Kawasan tanaman pangan lahan kering dikembangkan untuk berbagai jenis tanaman antara lain: jagung di Kecamatan kota Barat, Duingingi, Kota Timur dan Kota Utara; tanaman buah mangga dan pisang di hampir seluruh wilayah kecamatan; tanaman buah nangka berada di Kecamatan Kota Barat, Kota Timur, Dumbo Raya, Kota Utara dan Sibatana; tanaman Buah pepaya di Kecamatan Kota Barat, Kota utara dan Sibatana. Kawasan hortikultura, berada di Kecamatan Kota Barat, duingingi, dan Kota Utara dengan Komoditi cabe dan tomat.

Kabupaten Boalemo, Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo untuk lahan sawah irigasi berada di 5 kecamatan yaitu Mananggu, Botumoito, Paguyaman, Wonosari dan Dulupi dengan jenis komoditi berupa padi sawah. Sementara untuk Kawasan perkebunan di Kabupaten Boalemo diarahkan pada pengembangan perkebunan dengan komoditi yang potensial untuk dikembangkan yaitu cengkeh, kakao, kelapa, kelapa sawit dan tebu dengan menyesuaikan ketinggian lahan.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelei, ubi jalar dan ubi kayu; Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang; Komoditas tanaman perkebunan antara-lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala, Cengkih, Kopi, Aren, Vanili, Kayu Manis; dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat, Belimbing, duku, langsung, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Siam/Kepron, Jeruk Besar, mangga, Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun.

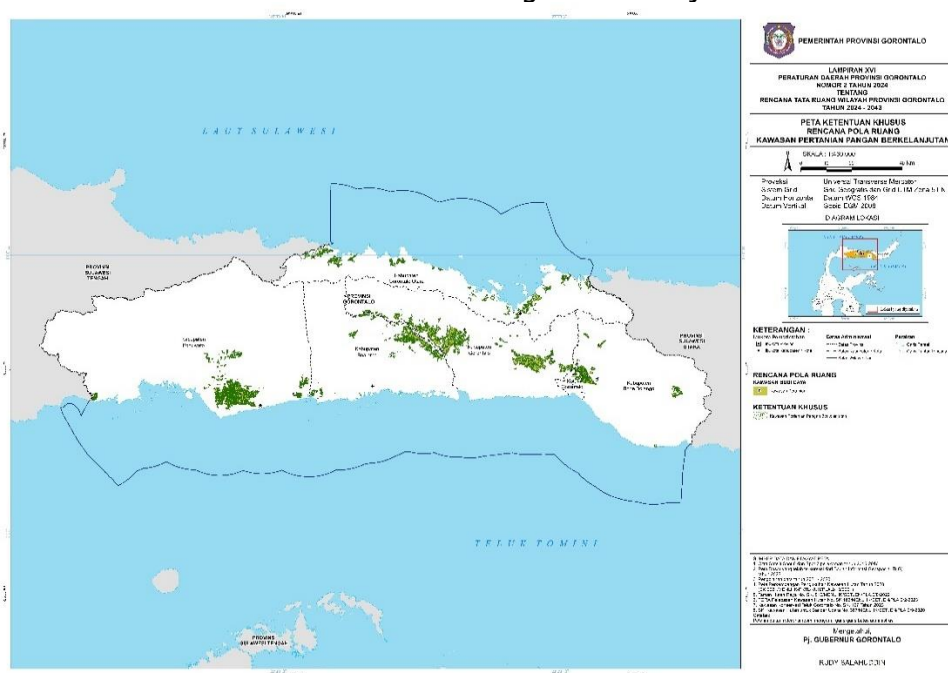
Kabupaten Gorontalo, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 kawasan yaitu kawasan agropolitan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto Barat Tabongo, Dungaliyo, Batudaa, Pulubala, Tibawa Mootilango, Asparaga, Tolangohula, Boliyohuto, Telaga Jaya, Tilango, Bilato dan Limboto; dan di kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Batudaa Pantai, Biluhu, Bilato, Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat, Tabongo, Bongomeme, Dungaliyo, Pulubala, Tibawa, Mootilango, Boliyohuto, Tolangohula dan Asparaga. Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 11.856 ha.

Kabupaten Gorontalo Utara, Komoditas yang termasuk pada tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Gorontalo Utara tersebar di seluruh kecamatan. Kabupaten Gorontalo Utara juga memiliki produksi beberapa komoditas hortikultura. Komoditas hortikultura yang berupa tanaman sayur antara lain cabai rawit, tomat, terung, kacang panjang, dan kangkung. Tanaman sayuran yang paling banyak tumbuh dan tersebar merata di setiap kecamatan adalah cabai rawit, dengan luas panen seluas 529 hektar dan produksi mencapai 20.349 Ton pada tahun 2023. Untuk tanaman buah-buahan yang paling banyak adalah durian yang produksinya mencapai 10.951 Ton. Kecamatan Atinggola merupakan produsen buah durian terbanyak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Pohuwato, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai *brand* daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 41.212 ha, atau sebesar 9,71% dari luas wilayah kabupaten. Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti kopi, kakao, mete, kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, panili dan kemiri serta buahan-buahan seperti durian, jeruk dan mangga. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 48.481 ha dengan areal pengembangannya merata ke segenap wilayah Kabupaten Pohuwato. Luas Panen Padi di Kabupaten Pohuwato Tahun 2024 sebesar 7.000 Ha, yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya seluas 4.068 Ha.

Dalam rangka menjamin kedaulatan pangan berkelanjutan, maka dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 40.121 Ha, yang tersebar di wilayah Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Gambar 2.5
Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2043

Peta KP2B sangat diperlukan untuk menjadi dasar acuan dalam setiap tahap pembangunan, terkait perijinan dan pengendalian pemanfaatan lahan. Dengan adanya pemetaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, diharapkan juga menjadi dasar perencanaan bagi pembuat kebijakan di bidang pertanian.

Adapun beberapa rekomendasi tindak lanjut pemetaan LP2B, yaitu (1) Perlu dibuat program peningkatan produktifitas lahan melalui penerapan sapta usaha yang meliputi pemakaian benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pengelolaan air, pemakaian pupuk berimbang dan pengendalian hama dan penyakit serta penanganan pasca panen dan pemasaran. (2) Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jaringan irigasi baru (jaringan irigasi sederhana: jaringan berskala kecil, menggunakan teknologi sederhana, cepat berfungsi, serta murah biayanya dengan kemampuan membawa air dari sumbernya ke tempat pemanfaatan dengan cara sesederhana mungkin), peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi – untuk mencapai tingkat kinerja jaringan irigasi yang andal, optimal dan berkelanjutan. (3) Masalah regenerasi petani, disebabkan rendahnya pendapatan di bidang pertanian dan makin menyusutnya lahan pertanian perlu ditangani dengan upaya-upaya misalnya memberikan perlindungan stabilitas harga di tingkat usahatani yang disesuaikan dengan biaya produksi serta melindungi lahan pertanian khususnya lahan pangan agar tidak beralih fungsi.

2) Potensi Peternakan

Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 mencapai 266.728 ekor,

sementara populasi ternak kambing 2022 sebesar 109.673 ekor. Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bone Bolango : potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Populasi ternak sapi pada tahun tahun 2022 mencapai 49.471 Ekor. Peningkatan populasi sapi disebabkan Pelaksanaan Inseminasi Buatan melebihi target yang telah ditetapkan pada program SIKOMDAN sejumlah 2.400 Ekor.

Kabupaten Boalemo : Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Manangu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman Dan Kecamatan Paguyaman Pantai. Populasi peternakan di wilayah kabupaten ini meliputi sapi potong, kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 43.216 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini.

Kabupaten Gorontalo : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme).

Kabupaten Pohuwato : Potensi di sektor peternakan meliputi ternak ruminansia dan unggas. Untuk ruminansia dominan yang dikembangkan adalah ternak sapi dan kambing. Sedangkan untuk unggas terdiri dari ayam ras dan buras serta itik.

Kabupaten Gorontalo Utara : Potensi di sektor peternakan adalah sapi potong dan kambing sekaligus sebagai komoditas unggulan. daerah yang menjadi penghasil hewan ternak non unggas terbesar jenis sapi potong yaitu di Kecamatan Kwandang dan Anggrek, Kambing di Sumalata Timur dan Anggrek, Babi di Gentuma dan Kuda di Kecamatan Atinggola. Sedangkan pada jenis unggas, ayam kampung sebagai unggas terdominan di Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo : Pengembangan ternak dan unggas diarahkan pada lahan pertanian sawah bukan irigasi, pertanian lahan kering dan hortikultura. Rencana Kawasan ini di Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Kota Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango.

3) Potensi Perikanan

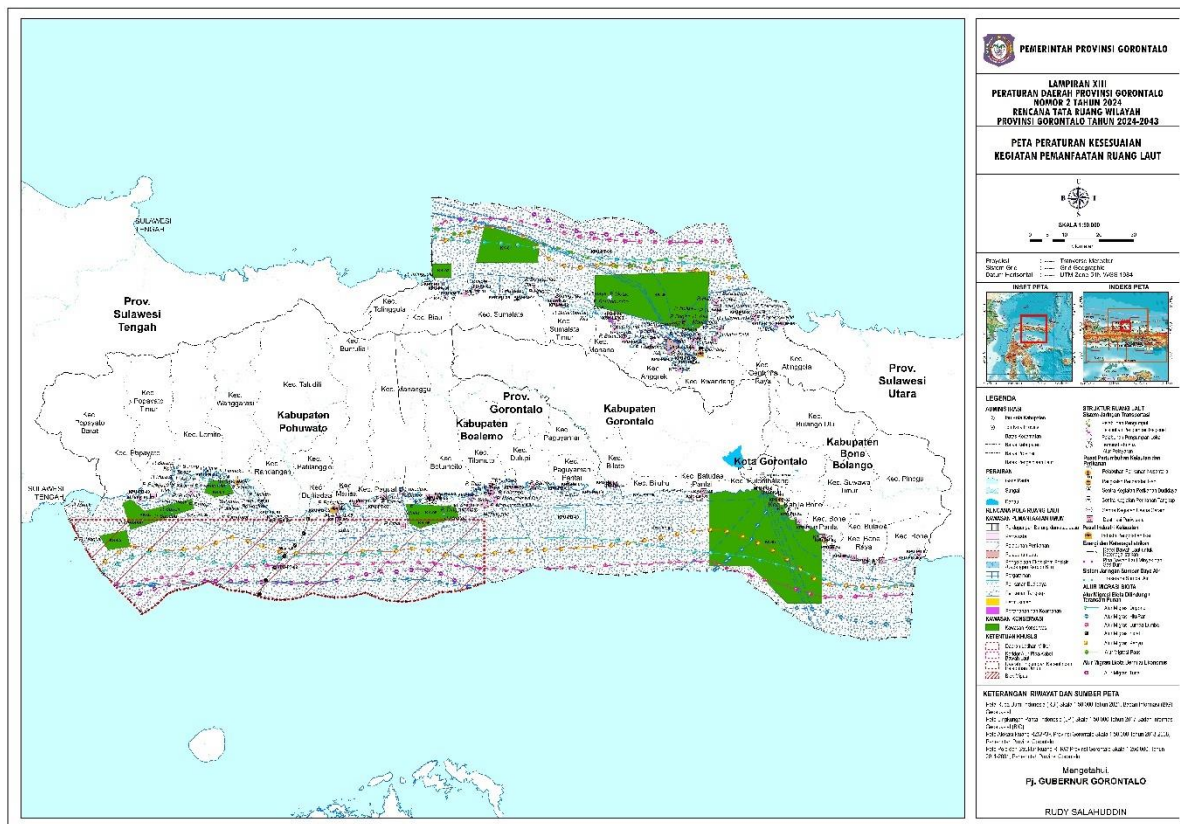
Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 9.638.44 Km² yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu:

1. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya : 1.242.526 ton per tahun.
2. WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) potensi perikanan tangkapnya: 597.139 ton per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut.

Sebagaimana RTRW, Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya dilaksanakan sebagaimana ketentuan pengelolaan kawasan dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut sesuai RTRW Provinsi Gorontalo

Gambar 2.6
Peta Kawasan Pemanfaatan Ruang Laut



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2043

Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2022 sebesar 130.916 ton. Produksi perikanan terbesar berada di Kabupaten Pohuwato yaitu 27.084 ton atau sekitar 19 persen. Hasil perikanan terbesar diperoleh dari budidaya perikanan darat yaitu sebesar 49.378 ton dengan produksi ikan bandeng terbesar di Kabupaten Pohuwato sebanyak 15.740 ton.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone

Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang. Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Bone Bolango sebesar 10.991 ton/tahun.

Kota Gorontalo, Budidaya perikanan darat yang sudah berkembang di Kota Gorontalo meliputi keramba jaring apung yang terletak di wilayah Danau limboto Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Utara, sedangkan budidaya berupa kolam ikan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Sebagian kecamatan di Kota Gorontalo juga merupakan produsen perikanan tangkap. Kecamatan yang menjadi produsen perikanan adalah Hulontalo dan Dumbo Raya dengan hasil produksi perikanan laut pada Kecamatan Hulontalo sebesar 17.190 Ton dan Kecamatan Dumbo Raya 12.188 ton.

Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Tilamuta, Mananggu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai. Sedangkan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah).

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 % dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km² yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir. Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha. Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha).

Kabupaten Gorontalo Utara, Komoditas unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah ikan cakalang. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 25.831 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan).

Kabupaten Pohuwato, Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo dimana dari 13 kecamatan yang ada, 10 kecamatan berada diwilayah pesisir. Pencarian masyarakat disektor ini terdiri dari dua yakni pada perikanan tangkap

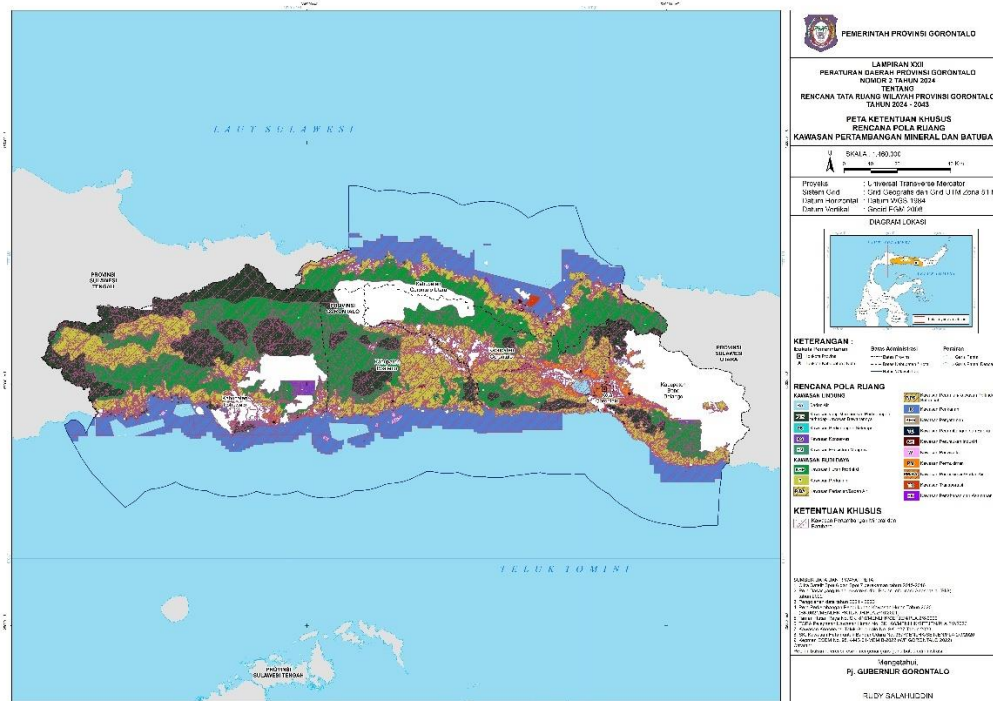
dan perikanan budidaya. Jenis ikan tangkap yang dominan diperoleh nelayan adalah ikan tongkol, cakalang, tuna, udang dan jenis lainnya. Sedangkan untuk jenis budidaya ikan air tawar melalui kolam belum masiv dilaksanakan padahal ikan air tawar mudah dikembangkan.

4) Potensi Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi; sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dll.

Sesuai RTRW Provinsi Gorontalo, ditetapkan wilayah pertambangan mineral dan batubara yang tersebar di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Gorontalo.

Gambar 2.7
Peta Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Gorontalo



Sumber : Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Provinsi 2024-2043

Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Propinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut :

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan:

- Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).
- Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri.

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang belum dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan.

Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit).

Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.

- Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembaga dengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m³ tersebar di Kecamatan Boliyohuto.
- Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai; Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 m³), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai; Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto; Felspar (jumlah cadangan sekitar 1.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai; dan Andesit (jumlah cadangan sekitar 1.050.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.
- Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi sumberdaya pertambangan logam meliputi: emas, perak, tembaga dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam adalah; granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengalir wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Kabupaten Pohuwato, Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas; Sirtu (13.313.250 m³); Batu Andesit (13.350.810 m³); Batu Dasit (24.227.775 m³); Batu Granodiorit (1.279.299.750 m³); Batu Granit (1.064.226.900 m³); dan Toseki (10.771.431 m³). Kesemuanya tersebar di Kecamatan Marisa, Taluditi, Paguat, Buntulia, Randangan, Wonggarasi, Popayato dan Patilanggio.

Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya: Kecamatan Dengilo, Taluditi, Popayato Barat, Buntulia dan Kec. Patilanggio. Meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Dalam hal pengolahan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

5) Potensi Industri

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan (*forward linkage*), maupun keterkaitan kebelakangan (*backward linkage*). Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka Provinsi Gorontalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan.

Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo **Kabupaten Gorontalo Utara**, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu :

- Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km². Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kg/tahun;
- Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
- Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah aren dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dsb.;
- Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture; Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi. Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro.

Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan *home industry*). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian; Industri Aneka; Industri Logam; dan Industri Perikanan.

Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah

- Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan *nata de coco* di Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik ini telah meluncurkan ekspor tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet.
- Pabrik Gula Tolangohula berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. Pabrik Gula Tolangohula pada setiap tahun memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat se Provinsi Gorontalo sejumlah 12.000 Ton, sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangkat 1.800 karyawan ditambah 4.000 orang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi.
- Pabrik Rumput Laut. Sebagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan. Kapasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil rumput laut dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara, Boalemo dan juga Pohuwato.

6) Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:

1. *Wisata Pantai* : Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Pantai Karang Putih, Pantai Diyonumo, Pantai Pulau Popaya-Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantai Pohon Cinta, Pantai Langala, Pantai Mananggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenai, Pantai Dunu dan Pantai Ratu Tenilo.
2. *Wisata Laut dan Pulau* : Obyek wisata Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo), Laut Torosiaje (Kabupaten Pohuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara)

adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: Objek Wisata Hiu Paus (*whale shark*), Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli dan Pulau Mohinggito.

3. *Wisata Alam dan Pegunungan* : Obyek wisata Hutan Pinus Dulamayo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air terjun Taludaa, Air terjun Ayuhulalo, Air Terjun Tilamuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo.
4. *Wisata Adat dan Situs Sejarah* : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah Objek Wisata Religi Bubohu, Tumbila Tohe; Rumah Adat Dulohupa; Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), Pendaratan Soekarno dan Pusat Kerawang.

Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan dilapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam jenis *outbond* (*hiking, tracking, climbing* dan *rafting*). Garis pantai Bonebol ada di daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele dan Botubarani. Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha, Owista Lamahu (Kampung Digital), Owista Huntu Selatan, Pantai Botutonuo, Pantai Molotabu, dsb. Tercatat sebanyak 25 Objek Wisata di Bone Bolango.

Kota Gorontalo. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan.

Kabupaten Boalemo. Beberapa objek wisata lain yang dikembangkan di Kabupaten Boalemo meliputi : Pulau Bitila, wisata pantai Kramat, danau teratai, di Kecamatan Mananggu; Pantai Boalemo Indah, pemandian air panas Dulangea, Taman Laut Pulau Monduli di Kecamatan Botumoito; Pulau Cinta, Pulau Pasir Putih, Pulau Mohupomba, wisata alam air terjun Ayuhulalo, air terjun Dulamayo dan air terjun Tenilo di Kecamatan Tilamuta; Taman Polohungo, air terjun Tangga Barito di Kecamatan Dulupi; Taman laut Pulau Limba,

teluk Bubaa di Kecamatan Paguyaman Pantai; dan Ekowisata Sungai Paguyaman, Sungai Moliliulo, dan Hutan Nantu di Kecamatan Wonosari.

Kabupaten Gorontalo. Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Teluk Paguyaman sepanjang Batudaa Pantai; Hutan Suaka Marga Satwa Nantu di Kecamatan Tolangohula; Cagar alam Tangale; Rumah Adat/Banthayo Poboide; Danau Limboto; Pentadio Resort; Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan; dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu.

Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pulau Diyonumo, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Ponelo dan Pulau Dudepo; Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/*Orange Fortress*, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630; dan Kawasan pariwisata Kota Jin sebagai situs Geopark di Kec. Atinggola.

Kabupaten Pohuwato. Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalah Air Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito; Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat; Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat; Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat *cottage-cottage* di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat; Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa; dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

G. Kondisi Kebencanaan

1. Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik.

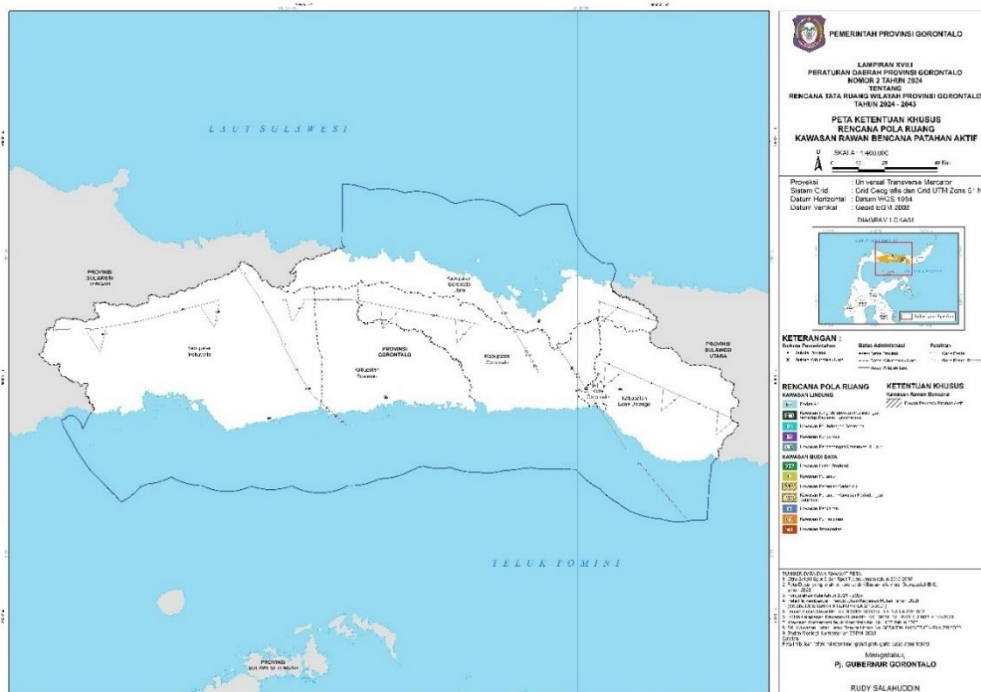
Potensi bahaya gempa di Provinsi Gorontalo berada dalam kriteria potensi sedang. Hampir seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan rawan gempa karena

kondisi Geologi Gorontalo yang merupakan jenis batuan tua yang memiliki banyak patahan. Namun secara umum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- Wilayah sebelah Utara merupakan kawasan rawan gempa yang bersifat merusak.
- Wilayah sebelah selatan merupakan kawasan rawan gempa yang tidak terlalu merusak.

Wilayah Gorontalo juga dilalui oleh 2 (dua) patahan lempeng aktif yang berpotensi menimbulkan gempa. Keberadaan patahan/sesar Gorontalo terbagi menjadi 2 segmen. Pertama, segmen jalur patahan pantai utara yang mengiris wilayah Gorut hingga ke Laut Sulawesi yang merupakan batas sisi utara daerah ini. Segmen yang kedua, merupakan jalur patahan pantai selatan yang membentang dari arah tenggara di Teluk Tomini ke arah barat laut, memotong Kota Gorontalo hingga sisi timur Kabupaten Gorontalo, termasuk di Danau Limboto. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. Tatanan tektonik geologi yang kompleks ini menjadikan sebagian besar Provinsi Gorontalo dikategorikan sebagai kawasan rawan bencana gempa bumi menengah dengan prakiraan intensitas guncangan berkisar antara VII-VIII (skala MMI/*Modified Mercally Intensity*).

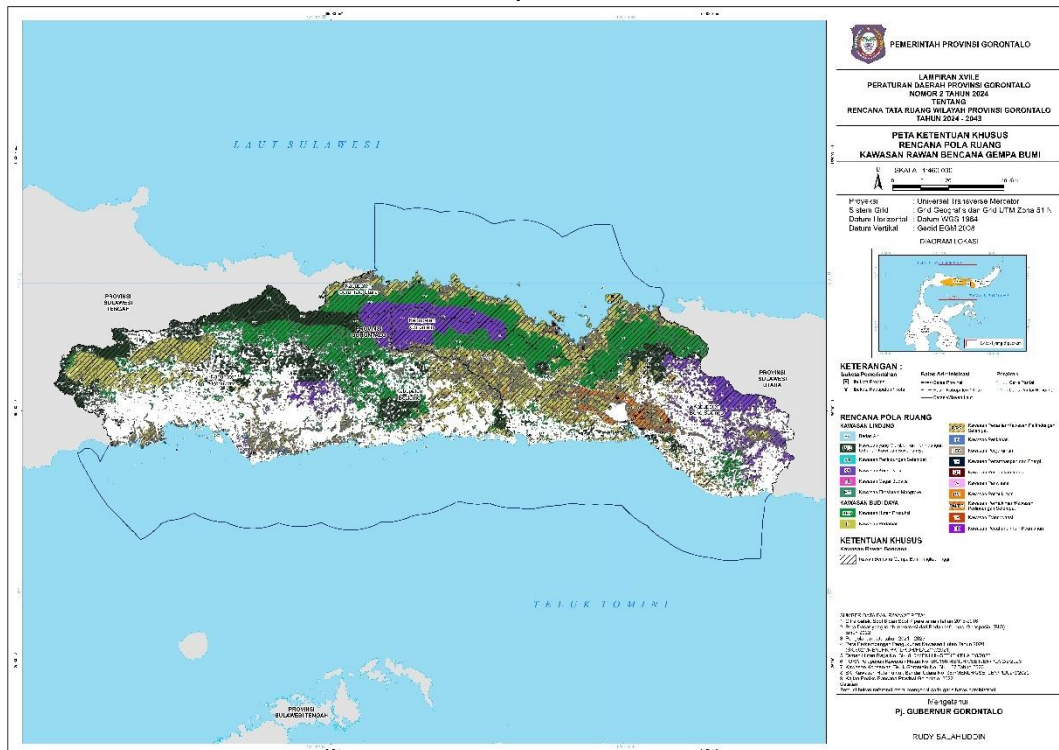
Gambar 2.8
Peta Patahan Provinsi Gorontalo



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2043

Berdasarkan analisis peta geologi lembar Gorontalo, sesar/patahan Gorontalo merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik. Sesar Gorontalo tersebut menyerupai garis diagonal tunggal mulai dari Leato sampai Kwandang, yang berpotensi terjadinya gempa tektonik endogen yang menyebabkan patahan. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. Kawasan rawan bencana patahan aktif dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang telah teridentifikasi jalurnya sebagai zona bahaya deformasi sesar aktif.

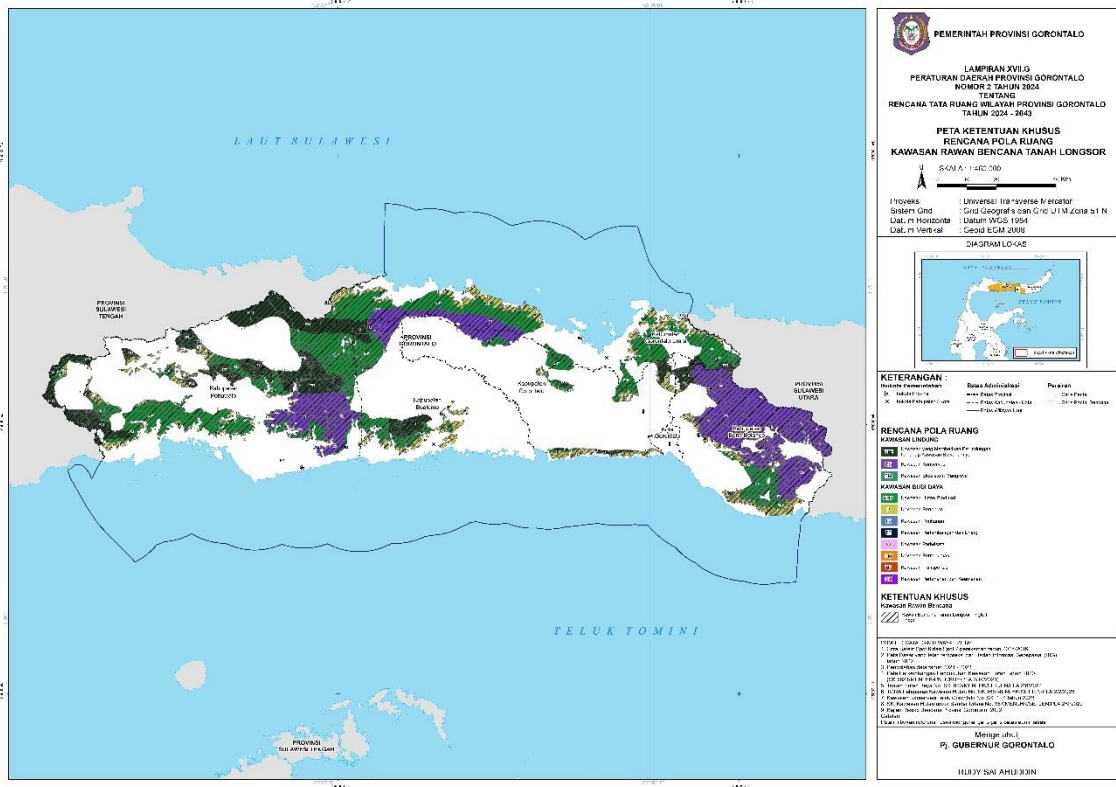
Gambar 2.9
Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Gorontalo



Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolanghula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilmuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Di Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

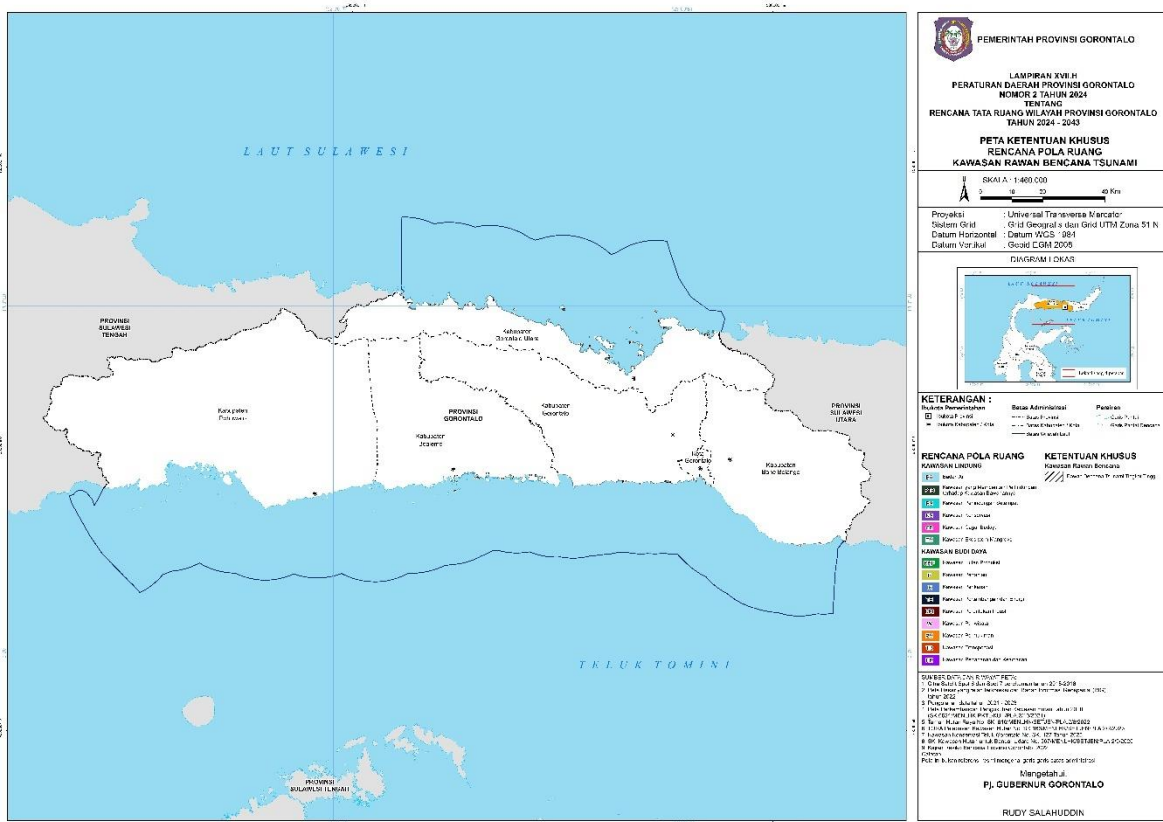
Gambar 2.10
Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Gorontalo



Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Provinsi Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman tsunami karena memiliki panjang garis pantai ± 655,8 km dan terdapat jalur patahan. Wilayah-wilayah yang memiliki resiko tinggi terhadap tsunami di kabupaten Boalemo adalah Kecamatan Botumoito, Manangu, Paguyaman Pantai dan Tilamuta. Seluruh wilayah Kabupaten Gorontalo Utara beresiko tinggi terhadap tsunami. Wilayah Kota Gorontalo yang beresiko tinggi terhadap tsunami adalah Kecamatan Dumbo Raya dan wilayah Kabupaten Pohuwato adalah Kecamatan Marisa, Kecamatan Paguat dan Kecamatan Randangan.

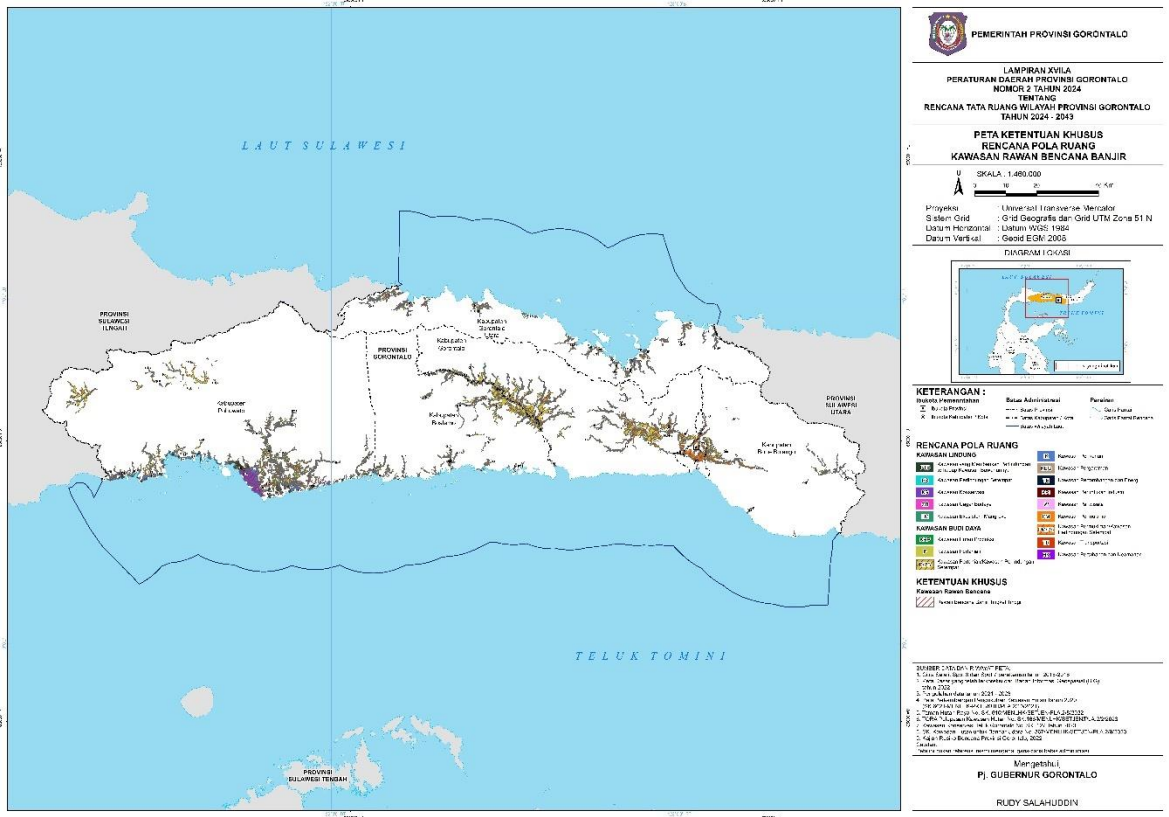
Gambar 2.11
Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Gorontalo



Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

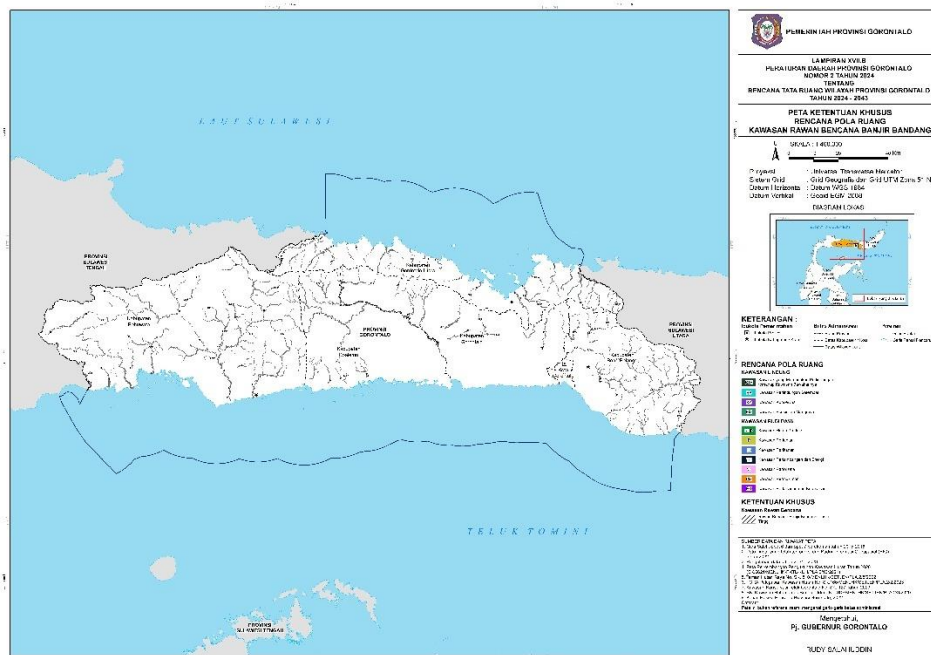
Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Talamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

Gambar 2.12
Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Gorontalo



Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Gambar 2.13
Peta Risiko Bencana Banjir Bandang di Provinsi Gorontalo

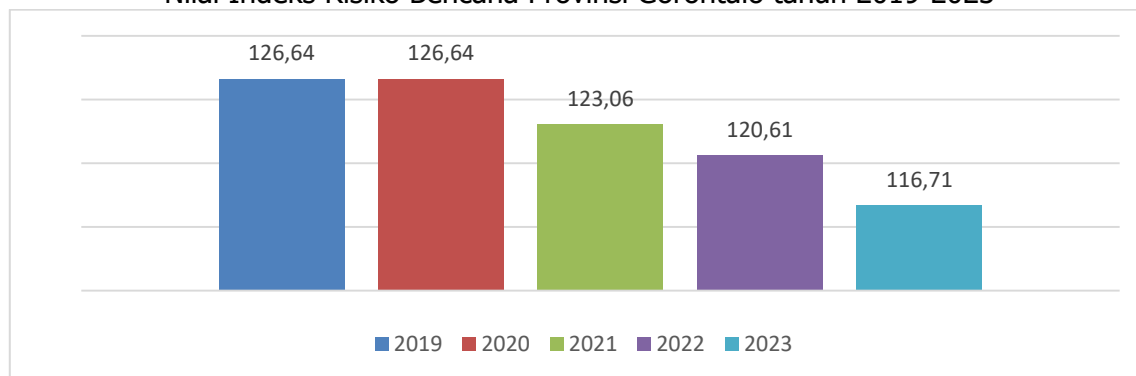


Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Secara Nasional, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan dari data yang dihimpun dari DIBI BNPB data dari BPBD selama periode 10 tahun terakhir provinsi Gorontalo, dari tahun 2018-2023, telah mengalami sebanyak 222 kejadian bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023 Provinsi

Gorontalo memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 116,71 turun dibanding tahun 2022 sebesar 120,61. Indeks risiko bencana meliputi kelompok bahaya, kerentanan dan kapasitas. Komponen bahaya maupun kerentanan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan faktor-faktor alam, lingkungan dan aktifitas manusia, seperti , peningkatan jumlah penduduk, degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan peningkatan pembangunan. Oleh karena itu upaya penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan kapasitas (capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana.

Grafik 2.1
Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Gorontalo tahun 2019-2023



Sumber: Buku IRBI 2023

Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah yang mengatur penanggulangan bencana yang menjadi urusan wajib daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Gorontalo dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2022 sebesar 0,51, nilai menunjukkan Tingkat kapasitas daerah Sedang. IKD Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun sebelumnya 2021 sebesar 0,38. Capaian ini menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Provinsi Gorontalo telah tercapai dan didukung oleh kebijakan sistematis, tetapi capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Tabel 2.6
Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2022

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,82	0,51	SEDANG
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,47		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,45		
4.	Penanganan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,45		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,46		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,56		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,41		

Sumber : Kajian Resiko Bencana, 2022-2026

H. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Oleh karenanya, keberadaan lingkungan alam menjadi sebuah keharusan untuk terus dijaga dalam eksistensinya terhadap daya dukung alam agar memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) berupa DDDTLH air dan pangan di Provinsi Gorontalo, dengan memperhatikan jasa ekosistem penyedia air dan pengaturan tata air dan banjir.

a. Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.

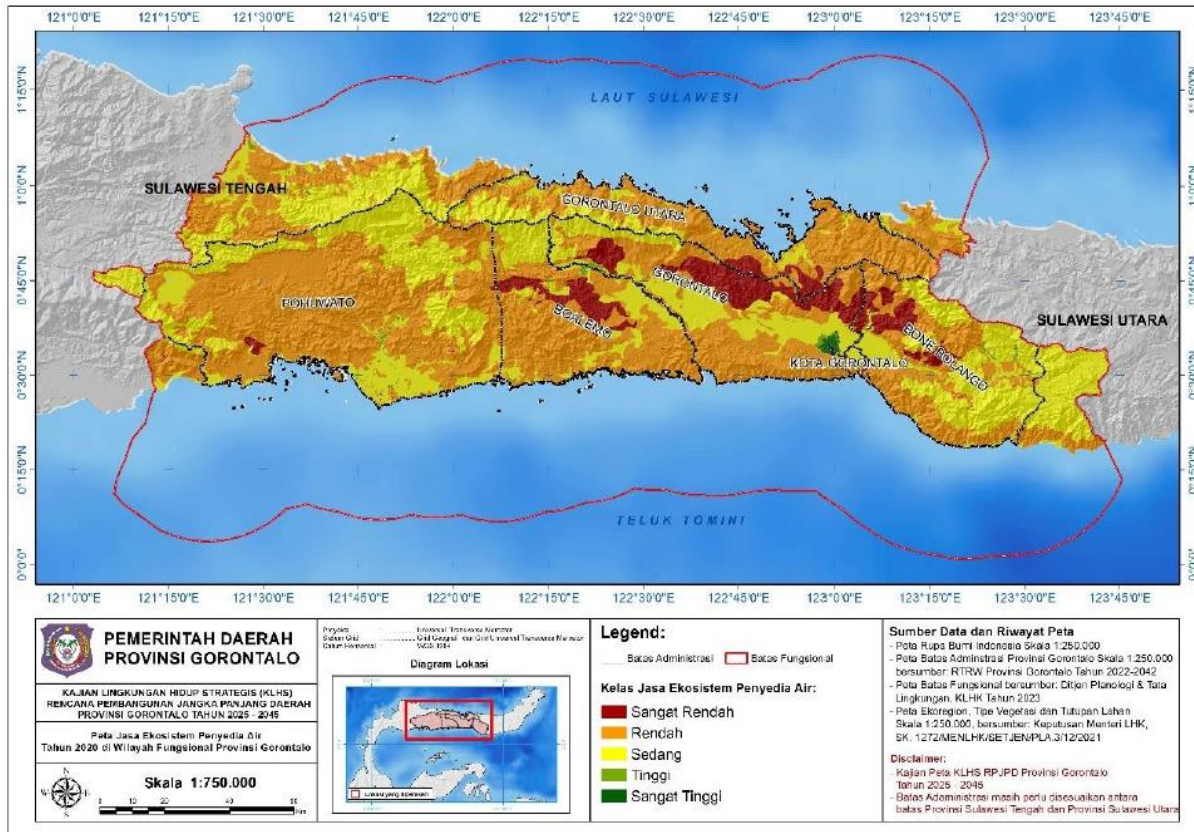
- Jasa Ekosistem Penyedia Air

Peta jasa ekosistem penyedia air Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyediaan air kelas rendah dan sedang terdapat diseluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Perhitungan jasa ekosistem penyediaan air menggunakan tiga sumber data yaitu bentang lahan, vegetasi alami dan penutup lahan. Berdasarkan bobot yang diberikan yaitu bentang lahan 0.28, vegetasi alami 0.12 dan penutup lahan 0.6 maka faktor yang paling berpengaruh pada nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air adalah penutup lahan. Hasil *overlay* antara peta jasa ekosistem penyediaan air dan peta penutup lahan menunjukkan bahwa jasa ekosistem dengan kelas tinggi dan sangat tinggi terdapat pada penutup lahan badan air, rawa, dan pertanian lahan kering campur.

Kondisi ketersediaan air di Provinsi Gorontalo Tahun 2020, masih didominasi pada kondisi ketersediaan air kelas rendah (berkategori sangat rendah dan rendah) dan kelas sedang. Dengan persentase sebesar 55,08 persen kelas rendah dan 26,39 persen kelas sedang dari total persentase luas wilayah fungsional. Wilayah fungsional ketersediaan air yang paling kecil masih tetap kelas tinggi dengan persentase sebesar 0,79 persen dari total

persentase luas wilayah fungsional. Berdasarkan pembagian administrasi kabupaten/kota jasa ekosistem penyediaan air kelas berkategori sangat tinggi terluas berada di Kabupaten Gorontalo dan jasa ekosistem penyediaan air kelas sangat rendah berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 4974,67 hektar atau sebesar 0,41%.

Gambar 2.14
Distribusi Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Daratan Provinsi Gorontalo Tahun 2020



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Tabel 2. 7
Distribusi Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Wilayah	Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2020				
	Rendah	Sedang	Tinggi	NA	Jumlah
Provinsi Gorontalo	55,08%	26,39%	0,70%	0,0127%	82,19%
Kabupaten Boalemo	9,43%	2,96%	0,09%	0,0005%	12,49%
Kabupaten Bone Bolango	6,57%	6,18%	0,14%	0,0028%	12,88%
Kabupaten Gorontalo	9,92%	4,50%	0,31%		14,74%
Kabupaten Gorontalo Utara	9,20%	2,53%	0,02%	0,0009%	11,76%
Kabupaten Pohuwato	19,71%	10,00%	0,12%	0,0085%	29,84%
Kota Gorontalo	0,25%	0,22%	0,01%		0,48%
Sulawesi Tengah	6,43%	6,13%	0,07%	0,0017%	12,63%
Buol	5,50%	5,91%	0,07%	0,0016%	11,47%
Parigi Moutong	0,93%	0,22%	0,00%	0,0001%	1,16%
Sulawesi Utara	1,82%	3,34%	0,02%	0,0019%	5,18%
Bolaang Mongondow Selatan	0,68%	2,98%	0,00%	0,0009%	3,66%
Bolaang Mongondow Utara	1,14%	0,36%	0,02%	0,0011%	1,52%
Jumlah Wilayah Fungsional	63,33%	35,86%	0,79%	0,02%	100,00%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

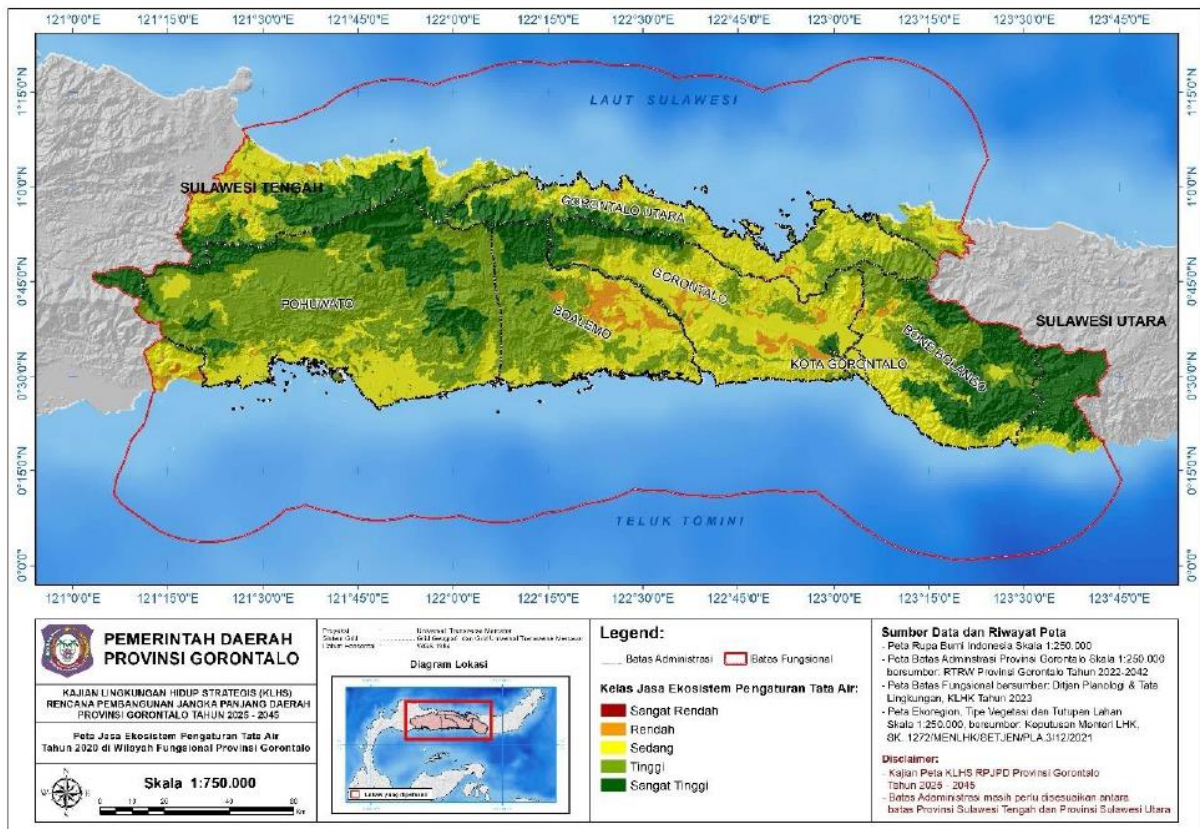
- *Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air*

Kondisi pengaturantata air di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi pengaturantata air kelas tinggi dengan total persentase luas sebesar 64,57% dari total persentase luasan Wilayah Fungsi Provinsi Gorontalo. Pengaturan tata air dengan luasan terbesar kedua disusul oleh ketersediaan air rendah dengan total luasan 450.483,41 hektar atau sebesar 37,44% dan ketersediaan air yang paling kecil adalah ketersediaan air tinggi dengan luas 2295,04 hektar atau sebesar 0,19% dari total luas Provinsi Gorontalo. Berdasarkan pembagian administrasi kabupaten/kota jasa ekosistem penyediaan air kelas sangat tinggi terluas berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 2415,64 hektar atau sebesar 0,20% dan jasa ekosistem penyediaan air kelas sangat rendah berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 4974,67 hektar atau sebesar 0,41%.

Kondisi jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi dengan total luasan sebesar 665,171.88 hektar atau sebesar 55,28% dari total luas Provinsi Gorontalo. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dengan luasan terbesar kedua yaitu jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir kelas rendah dengan luasan 391,554.98 hektar atau sebesar 32,54%. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air yang paling kecil luasannya adalah jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir pada kategori sangat rendah dengan luas 8,917.53 hektar atau sebesar 0,74% dari total luas Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.15

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air di Provinsi Gorontalo Tahun 2020



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Tabel 2.8
Luasan dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Wilayah	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Tahun 2020				
	Rendah	Sedang	Tinggi	NA	Jumlah
Provinsi Gorontalo	2,66%	29,92%	52,26%	0,0127%	82,19%
Kabupaten Boalemo	1,27%	5,12%	7,36%	0,0005%	12,49%
Kabupaten Bone Bolango	0,13%	3,58%	9,30%	0,0028%	12,88%
Kabupaten Gorontalo	0,98%	9,45%	5,28%		14,74%
Kabupaten Gorontalo Utara	0,18%	5,69%	6,07%	0,0009%	11,76%
Kabupaten Pohuwato	0,08%	5,64%	24,19%	0,0085%	29,84%
Kota Gorontalo	0,03%	0,43%	0,05%		0,48%
Sulawesi Tengah	0,52%	5,32%	7,29%	0,0017%	12,63%
Buol	0,28%	4,30%	7,17%	0,0016%	11,47%
Parigi Moutong	0,24%	1,03%	0,12%	0,0001%	1,16%
Sulawesi Utara	0,07%	1,41%	3,77%	0,0019%	5,18%
Bolaang Mongondow Selatan	0,00%	0,57%	3,09%	0,0009%	3,66%
Bolaang Mongondow Utara	0,07%	0,84%	0,68%	0,0011%	1,52%
Jumlah Wilayah Fungsional	3,25%	36,66%	63,32%	0,02%	100,00%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

- *Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air*

Status daya dukung dan daya tampung air, menunjukkan bahwa kebutuhan air lebih didominasi oleh kebutuhan untuk lahan yaitu sebesar Ro. 2.719.722.,705 m³/tahun. sedangkan kebutuhan air untuk domestik sebesar 100.904.314 m³/tahun. Perhitungan ambang batas ketersediaan air dilakukan untuk mengetahui populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan airnya secara alamiah oleh karakteristik wilayah di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil kajian KLHS menunjukkan bahwa jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air secara alamiah di Provinsi Gorontalo 111.036.732 jiwa. Berdasarkan jumlah populasi penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yaitu 1.167.874 jiwa, maka status daya dukung penyediaan air bagi penduduk di Provinsi Gorontalo Belum Melampaui.

Tabel 2.9
Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Gorontalo Tahun 2020

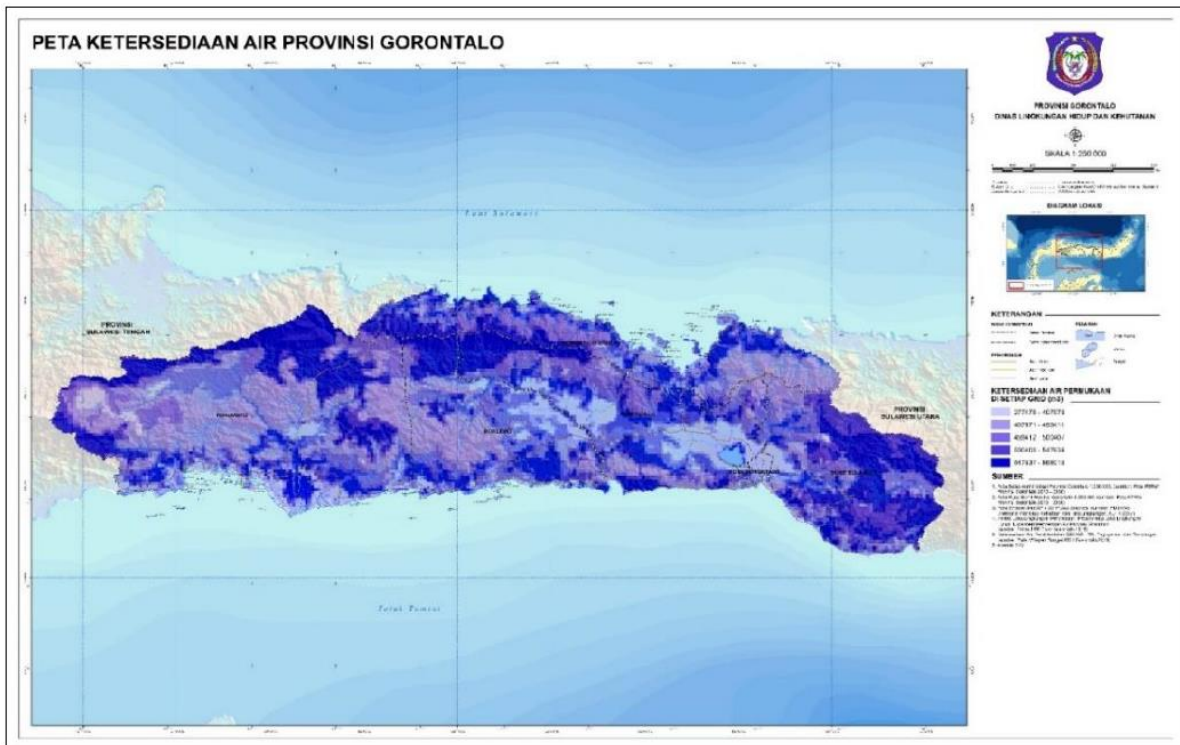
KABUPATEN/KOTA	DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN AIR PROVINSI GORONTALO								PERSENTASE WILAYAH MASIH MENDUKUNG	PERSENTASE WILAYAH TIDAK MENDUKUNG
	MODEL (POPULASI PERGRID)	KEBUTERSEDIAAN (SUPPLY)	KEBUTUHAN LAHAN (DEMAND)	KEBUTUHAN DOMESTIK (DEMAND)	DEMAND TOTAL	AMBANG BATAS	SELISIH			
	Jiwa	m3/Tahun	m3/Tahun	m3/Tahun	m3/Tahun	Jiwa	Jiwa	%		
Boalemo	158.351	1.113.975.694	592.864.421	13.681.526	606.545.947	12.062.802	11.904.451	13,27%	2,02%	
Bone Bobngo	157.152	1.223.737.157	260.341.341	13.577.933	273.919.274	22.300.758	22.143.606	15,02%	0,67%	
Gorontalo	374.813	1.343.057.524	951.605.946	32.383.843	983.989.789	9.061.340	8.686.527	14,69%	3,82%	
Gorontalo Utara	112.836	1.185.912.044	379.888.649	9.749.030	389.637.679	18.657.962	18.545.126	13,95%	0,66%	
Pohuwato	153.937	2.607.144.422	504.196.258	13.300.157	517.496.414	48.679.378	48.525.441	32,76%	2,51%	
Kota Goiontab	210.785	42.734.226	30.876.092	18.211.824	49.087.916	274.492	63.707	0,38%	0,25%	
TOTAL	1.167.874	7.516.561.068	2.719.722.705	100.904.314	2.820.677.019	111.036.732	109.868.858	90,07%	9,93%	

Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo, 2020.

Total ketersediaan air Provinsi Gorontalo sebesar 7.516.561.068 m³/tahun. Total Kebutuhan air Provinsi Gorontalo yaitu 2.820.677.019 m³/tahun. Ketersediaan air terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato yaitu sebesar 2.607.144.422 m³/tahun dan ketersediaan air

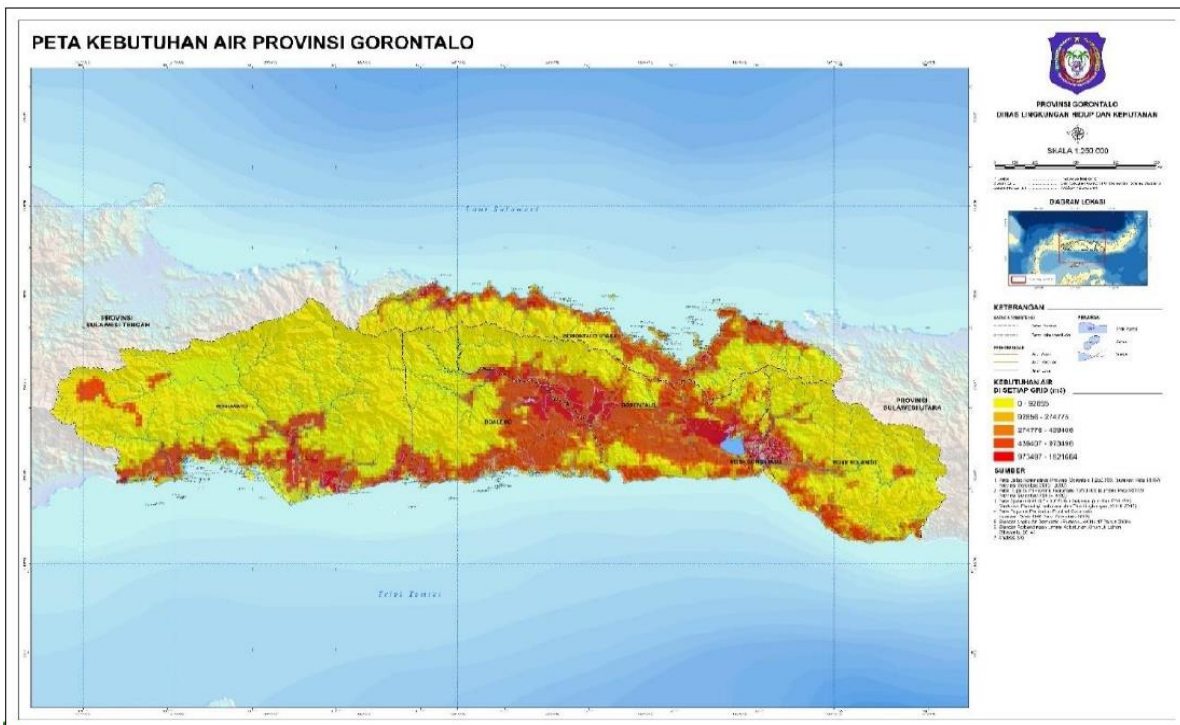
terkecil terdapat di Kota Gorontalo sebesar 42.734.226 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air terbesar di Kabupaten Gorontalo, dan kebutuhan air terkecil di Kabupaten Gorontalo Utara.

Gambar 2.16
Peta Ketersediaan Air Provinsi Gorontalo



Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Gambar 2.17
Peta Kebutuhan Air Provinsi Gorontalo Tahun 2020



Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Jika dirinci per administrasi kabupaten/kota, maka ambang batas tertinggi penyediaan air yaitu Kabupaten Pohuwato sebesar 48,679,378 jiwa, ambang batas terendah yaitu di Kota Gorontalo sebesar 274,492 jiwa. Selisih antara ambang batas penyediaan air dan populasi di

Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 109,868,858 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa ketersediaan air di Provinsi Gorontalo masih dapat mencukupi kebutuhan air bagi sejumlah 109,868,858 jiwa diluar populasi yang ada. Data per kabupaten/kota menunjukkan bahwa selisih ambang batas ketersediaan air dan jumlah populasi tertinggi yaitu Kabupaten Pohuwato dengan nilai selisih 48,525,441 jiwa. Selisih antara ambang batas ketersediaan air dan populasi yang terendah yaitu di Kota Gorontalo yaitu sebesar 63,707 jiwa. Wilayah yang telah melampaui ambang batas ketersediaan air Provinsi Gorontalo meliputi Kabupaten Gorontalo sebesar 3,82%, Kabupaten Pohuwato 2,51%, Kabupaten Boalemo sebesar 2,02%, Kabupaten Bone Bolango 0,67%, Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,66% dan Kota Gorontalo sebesar 0,25% dari total luas Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil analisis status daya dukung air Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa 90.07% wilayah Provinsi Gorontalo masih belum melampaui ambang batas ketersediaan air dan 9.93% wilayahnya sudah melampaui ambang batas ketersediaan air. Secara rinci berdasarkan administrasi kabupaten/kota, luasan wilayah yang belum melampaui ambang batas berturut-turut dari wilayah yang paling luas hingga terendah yaitu kabupaten pohuwato seluas 408,143.74 hektar atau 32.76% dari total luas provinsi gorontalo, kabupaten bone bolango seluas 187,203.14 hektar atau sebesar 15.02% wilayah provinsi gorontalo, kabupaten gorontalo seluas 183,051.44 hektar atau sebesar 14.69% , kabupaten gorontalo utara seluas 173,878.42 hektar atau sebesar 13.95%, kabupaten boalemo seluas 165,300.04 hektar atau sebesar 13.27% dan kota gorontalo seluas 4751.44 hektar atau sebesar 0.38% dari total wilayah Provinsi Gorontalo.

Tabel 2.10
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Provinsi Gorontalo

Kabupaten/ Kota	Status Daya Dukung Daya Tampung Air			Jumlah
	Belum Terlampaui	Terlampaui	NA	
Kabupaten Boalemo	8,34%	6,86%	0,00%	15,19%
Kabupaten Bone Bolango	12,09%	3,58%	0,00%	15,68%
Kabupaten Gorontalo	7,23%	10,69%	0,00%	17,93%
Kabupaten Gorontalo Utara	9,41%	4,89%	0,00%	14,31%
Kabupaten Pohuwato	28,76%	7,51%	0,03%	36,30%
Kota Gorontalo	0,16%	0,43%	0,00%	0,59%
Jumlah	66,00%	33,96%	0,04%	100,00%

Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 diolah Tim Ahli KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Gambar 2.18
Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Gorontalo 2023



Sumber: SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 diolah Tim Ahli KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Gambaran daya dukung dan daya tampung air Nasional dengan sumber peta Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, Wilayah Provinsi Gorontalo secara keseluruhan telah terlampaui sebanyak 33,6%. Kabupaten tertinggi telah terlampaui daya dukung dan daya tampung air yakni Kabupaten Gorontalo sebanyak 10,6% dan belum terlampaui sebanyak 7,23%. Selanjutnya Kabupaten Tanahbata Telah terlampaui 6,86% dan belum terlampaui sebanyak 8,34%.

b. Daya dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting. Berdasarkan hasil analisis ketersediaan pangan Provinsi Gorontalo sebesar 3.219.492.120,142 Kkal, sementara total kebutuhan pangan Provinsi Gorontalo yaitu 916.489.121.500 Kkal. Ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato dan Ketersediaan pangan terkecil terdapat di Kota Gorontalo. Sedangkan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan pangan terbesar yaitu di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 294.134.501.750 Kkal dan kebutuhan pangan terkecil yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 88.548.051.000 Kkal.

Kajian status daya dukung penyediaan pangan menunjukkan bahwa ambang batas penduduk terkait ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo adalah 4,100,184 jiwa. Hasil kajian jumlah populasi penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yaitu 1,167,874 jiwa maka daya dukung penyediaan pangan bagi penduduk Provinsi Gorontalo pada BELUM MELAMPAUI.

Tabel 2.11**Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Provinsi Gorontalo**

DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN PANGAN PROVINSI GORONTALO

KABUPATEN/KOTA	MODEL (POPULASI PERGRID)	KETERSEDIAAN (SUPPLY)		KEBUTUHAN (DEMAND)		AMBANG BATAS	SELISIH	PERSENTASE	PERSENTASE	
		Jiwa	kkal	kkal	Jiwa			Jiwa	WILAYAH	WILAYAH
									MASIH	TIDAK
								MENDUKUNG	MENDUKUNG	
								%	%	
Boalemo	158.351	489,784,197,841	124.265.947.250	623.773	465422	15,12%	0,17%			
Bone Bolango	157.152	499,813.185.055	123.325.032.000	636.436	479284	13,94%	1,75%			
Gorontalo	374.813	554,756.973.095	294.134.501.750	706.508	331695	13,69%	4,83%			
Gorontalo Utara	112.836	492,853.605.556	88.548.051.000	627.827	514991	14,61%	0,00%			
Pohuwato	153.937	1.164.590.991.104	120.802.060.750	1.483.097	1329160	35,06%	0,20%			
Kota Gorontalo	210.785	17.693.167.490	165.413.528.750	22.543	-188242	0,10%	0,53%			
TOTAL	1.167.874	3.219.492.120.142	916.489.121.500	4.100.184	2.932.310	92,52%	7,48%			

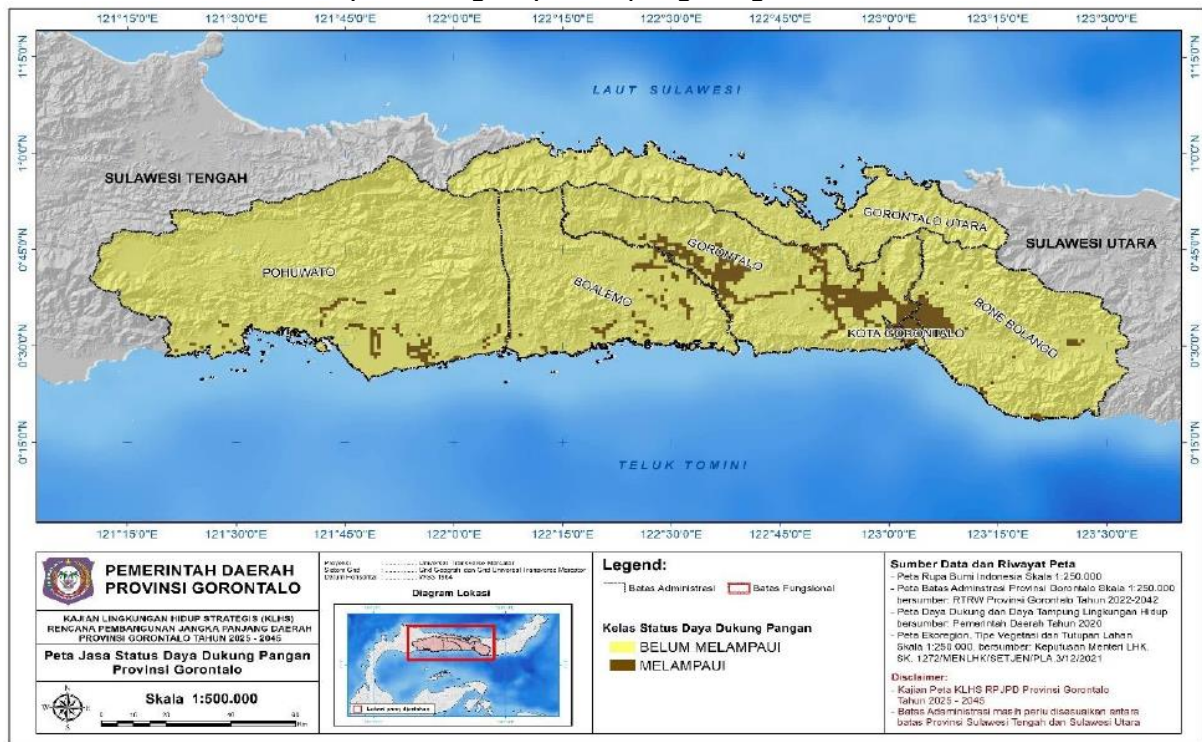
Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo, 2020

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo masih dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi 2.932.310 jiwa luar populasi yang ada. Selisih ambang batas ketersediaan pangan dan jumlah populasi tertinggi yaitu Kabupaten Pohuwato dengan nilai selisih 1.329.160 jiwa. Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah wilayah yang memiliki nilai selisih terendah yaitu Kota Gorontalo dimana nilai selisihnya adalah -188.242 jiwa (minus). Ambang batas ketersediaan pangan di Kota Gorontalo hanya dapat mencukupi 22.543 jiwa, sedangkan jumlah populasi mencapai 210.785 jiwa.

Analisis status daya dukung pangan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa 92,52% wilayah Provinsi Gorontalo masih belum melampaui ambang batas ketersediaan bahan pangan dan 7,48% wilayahnya sudah melampaui ambang batas ketersediaan bahan pangan. Secara rinci berdasarkan administrasi kabupaten/kota, luasan wilayah yang belum melampaui ambang batas berturut-turut dari wilayah yang paling luas hingga terendah yaitu Kabupaten Pohuwato seluas 436,911.38 hektar atau 35,06% dari total luas Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo seluas 188,359.03 hektar atau sebesar 15,12% wilayah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara seluas 182,030.76 hektar atau sebesar 14,61%, Kabupaten Bone Bolango seluas 173,739.85 hektar atau sebesar 13,94%, Kabupaten Gorontalo seluas 170,579.29 hektar atau sebesar 13,69% dan Kota Gorontalo seluas 1,188.96 hektar atau sebesar 0,10% dari total wilayah Provinsi Gorontalo.

Wilayah yang melampaui ambang batas ketersediaan pangan Provinsi Gorontalo terdistribusi di Kabupaten Gorontalo sebesar 4,83%, Kabupaten Bone Bolango 1,75%, Kota Gorontalo 0,53%, Kabupaten Pohuwato 0,20%, Kabupaten Boalemo sebesar 0,17%, dan Kabupaten Gorontalo Utara seluas 9,87 hektar atau sebesar 0,001% dari total luas Provinsi Gorontalo. Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa distribusi spasial wilayah yang sudah melampaui ambang batas ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan perkotaan dengan penutup lahan umumnya berupa permukiman dan atau lahan terbangun.

Gambar 2.19
Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Provinsi Gorontalo



Sumber: DDDTLH Provinsi Gorontalo, 2020

Kondisi ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi ketersediaan pangan tinggi dengan total luasan sebesar 702,367.82 ha atau sebesar 58,37% dari total luas provinsi gorontalo.

I. Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity*)

Keanekaragaman hayati merupakan keragaman organisme hidup dari semua sumber termasuk antara lain ekosistem darat, laut dan akuatik. Dalam periodisasi pembangunan jangka panjang, salah satu hal penting dan strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu aspek keberlanjutan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Keanekaragaman hayati merupakan komponen penyusun ekosistem alam yang memiliki peranan yang sangat besar baik dari segi ekologi, sosial, ekonomi maupun budaya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan sumber daya alam hayati juga meningkat, sehingga jika tidak dikelola secara lestari maka akan memiliki dampak terhadap lingkungan dan mengakibatkan degradasi sumberdaya hutan. Oleh karenanya kebutuhan akan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas utama.

Berbagai keanekaragaman hayati yang dimiliki Provinsi Gorontalo, diantaranya 81 jenis burung endemic Pulau Sulawesi, 21 jenis mamalia endemic Pulau Sulawesi, 17 jenis reptile endemic Sulawesi, 9 jenis amphi endemic. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menetapkan Menteri LHK kembali menegaskan perwujudan Gorontalo sebagai Provinsi konservasi. Dimana terdapat beberapa areal konservasi seperti Taman Nasional Bogani Nani Wartabone, Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohatu, Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Selain itu ada Cagar Alam Mas Popaya Raja dan Cagar Alam Tangale.

Salah satu upaya pembangunan berkelanjutan adalah menjamin pelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam periode pembangunan jangka panjang dalam pemanfaatan dan pengelolaan komponen keanekaragaman hayati untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. Untuknya, sebagai modal dasar pembangunan dan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka salah satu ukuran yang dapat digunakan yaitu melalui Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang merupakan salah satu tolok ukur utama untuk mengukur aksi/kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam rangka pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Indeks Pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 0,524 (nilai indeks).

J. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas-gas di atmosfer yang berfungsi menyerap radiasi infra merah dan ikut menentukan suhu atmosfer. Gas ini yang terdiri dari Karbon Dioksida (CO₂), Metana (CH₄), *Dinitrogen Mono Oksida* (N₂O), *Hidro Fluorocarbon* (HFCs), *Sulfur Hexafluorida* (SF₆), *Perfluoro Karbon* (PFCs), dan gas-gas turunan lainnya. Pemerintah telah berkomitmen ikut serta dalam pengendalian perubahan iklim dengan menurunkan emisi GRK. Inventarisasi GRK dilakukan untuk monitoring dan evaluasi efektifitas pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD GRK) yang telah dilakukan. Emisi GRK Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 mencapai sekitar 1.407,27 Gg CO₂e.

Pelaksanaan inventarisasi GRK menggambarkan seluruh emisi maupun riset yang dihasilkan. Upaya-upaya pengendalian melalui pelaksanaan RAD GRK dapat menurunkan jumlah emisi GRK tetapi belum tentu menurunkan emisi GRK secara keseluruhan jika sektor-sektor lain yang terkait tidak dikendalikan emisi GRK-nya. Informasi ini hanya dapat diketahui apabila dilakukan inventarisasi emisi GRK yang mencakup berbagai sektor, baik yang dikendalikan maupun tidak.

Upaya inventarisasi emisi GRK ini dapat dikuantifikasikan untuk menjadi pertimbangan bagi arah pengendalian emisi GRK yang lebih efektif. Penyusunan inventarisasi emisi GRK dilakukan menurut Pedoman Inventarisasi Emisi GRK Nasional sesuai dengan Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021. Sesuai peraturan ini, penyusunan inventarisasi GRK menjadi kewajiban pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Secara agregat, emisi GRK di Provinsi Gorontalo pada periode tahun 2017 -2022 mengalami fluktuatif. Jumlah ini terus mengalami kenaikan pada tahun 2022 emisi agregat GRK Gorontalo mencapai 1.407,27 Gg CO₂e. Pada tahun 2017, emisi GRK agregat mencapai 387,52 Gg CO₂e. Hal ini menunjukkan dalam kurun waktu 6 tahun, kenaikan emisi GRK di Gorontalo mencapai 1.019,75 Gg CO₂e. Urutan sektor penyumbang emisi GRK pada tahun 2022 adalah sektor pertanian, sektor energi, sektor limbah. Sedangkan sektor kehutanan menghasilkan penyerapan emisi GRK.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Gorontalo menduduki peringkat ke 32 dari 38 provinsi di Indonesia. Keseluruhan penduduk tersebar ke dalam 5 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk 2020-2050 hasil Sensus Penduduk 2020 (Pertengahan tahun/Juni), jumlah penduduk Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebanyak 1.227.794 ribu jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 1,20 persen dari tahun 2020. Pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020, di masa pandemi Covid-19, dimana jumlah penduduk mengalami penurunan hingga 2,57 persen.

Grafik 2.2
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak kurang lebih 409.509 ribu jiwa, sedangkan laju pertumbuhan tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo Utara yang tumbuh sebesar 1,53 persen.

Tabel 2.12

Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin Penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2024

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribuan Jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per KM persegi (KM ²)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Boalemo	153,3	1,25	84	103,7
Gorontalo	409,5	1,03	190	101,2
Pohuwato	153,8	1,23	35	103,1
Bone Bolango	170,7	1,19	90	101,0
Gorontalo Utara	132,8	1,53	78	103,8
Kota Gorontalo	207,8	1,15	2.390	99,3
Provinsi Gorontalo	1.227,8	1,18	102	101,7

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Data empiris menunjukkan wilayah Kota Gorontalo merupakan wilayah yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibanding wilayah lainnya di Provinsi Gorontalo. Dengan luas wilayah Kota Gorontalo sebesar 79,59 km² kepadatan penduduk mencapai 2.930 jiwa per km². Padatnya penduduk Kota Gorontalo terkait erat dengan fungsi sentral Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi (pusat pemerintahan) dan juga pusat kegiatan ekonomi, pusat kesehatan, dan pendidikan.

Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Pada tahun 2024, persebaran penduduk Provinsi Gorontalo yang tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 33,35 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo. Sementara wilayah dengan

penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 10,81 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

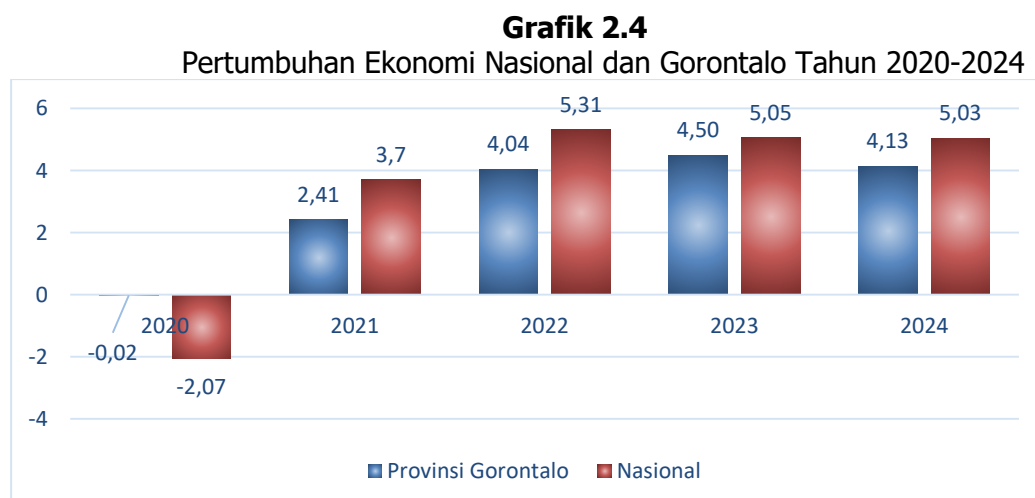
Pada tahun 2024, jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja sebanyak 652.588 jiwa dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 69,95 persen. Dengan demikian, angka beban tanggungan penduduk usia produktif (*dependency ratio*) sebesar 43,65. Kondisi ini menunjukkan bahwa penduduk usia produktif di Gorontalo semakin meningkat dan menjadi salah satu pendorong utama pembangunan daerah.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. Fokus Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo dalam lima tahun terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Ekonomi Gorontalo di tahun 2024 tumbuh mencapai 4,13 persen. Sementara di tahun 2020 gejolak ekonomi akibat pandemi Covid19 mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan, sehingga ekonomi Gorontalo berada pada level minus 0,02 persen. Akan tetapi dalam 4 (empat) tahun terakhir ekonomi Gorontalo tumbuh positif meskipun masih berada dibawah rata-rata Nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Kinerja perekonomian Gorontalo ditunjang oleh beberapa kebijakan strategis dalam upaya mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2024 mencapai 32.949,62 Milyar Rupiah atau meningkat 4,1 persen dibanding tahun sebelumnya. PDRB Provinsi Gorontalo memberikan kontribusi terhadap Sulampua sebesar 2,52 persen dan menyumbang sebesar 0,25 persen dari total PDRB Nasional yang mencapai 12.920,3 Triliun Rupiah.

Tabel 2.13
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2020 -2024 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha		Harga Berlaku					Harga Konstan				
		2020	2021	2022	2023*	2024**	2020	2021	2022	2023*	2024**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.188,20	17.082,24	18.073,20	19.386,98	20.344,28	10.478,78	10.663,64	10.907,95	11.365,50	11.719,48
B	Pertambangan dan Penggalian	468,20 4	483,23	519,28	562,13	608,56	332,18	339,34	353,96	375,69	399,12
C	Industri Pengolahan	1.799,86	1.936,07	2.170,69	2.273,93	2.396,85	1.172,89	1.235,29	1.332,27	1.338,40	1.381,62
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,44	22,00	23,96	25,65	26,07	25,01	25,67	27,24	28,95	29,48
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	26,18	26,88	27,76	29,20	31,00	18,21	18,10	18,49	19,18	19,91
F	Konstruksi	4.399,36	4.597,26	5.189,74	5.717,04	6.186,44	3.059,83	3.097,66	3.274,17	3.464,07	3.686,20
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.100,30	5.386,86	6.220,17	7.074,66	7.757,16	3.326,04	3.439,37	3.757,01	4.128,18	4.437,00
H	Transportasi dan Pergudangan	2.245,90 2	2.325,32	2.668,65	3.040,11	3.296,35	1.551,39	1.578,04	1.693,94	1.798,58	1.887,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	964,41	1.008,94	1.076,17	1.156,14	1.250,17	659,74	685,98	720,53	761,86	810,81
J	Informasi dan Komunikasi	1.145,00	1.184,00	1.286,08	1.370,73	1.463,12	997,07	1.029,70	1.095,92	1.140,60	1.193,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.869,83	2.140,55	2.192,18	2.070,44	2.123,19	1.266,77	1.380,46	1.302,73	1.206,46	1.216,34
L	Real Estate	778,97	756,47	820,71	820,26	862,84	563,73	543,51	566,46	557,15	576,27
M, N	Jasa Perusahaan	36,49	37,54	42,80	42,33	42,98	24,86	25,16	27,66	26,51	26,80
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	2.628,24	2.644,99	2.802,94	2.985,00	3.139,57	2.077,50	2.076,81	2.165,30	2.244,67	2.319,03
P	Jasa Pendidikan	1.947,54	2.018,20	2.124,00	2.249,90	2.276,92	1.328,14	1.360,67	1.415,29	1.474,89	1.455,94
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.528,89	1.642,19	1.711,67	1.896,89	2.049,84	1.105,94	1.161,38	1.176,97	1.238,43	1.301,69
R, S,T ,U	Jasa lainnya	581,08	600,53	616,29	665,35	699,15	437,30	447,15	448,33	474,67	488,20
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		41.729,89	43.893,26	47.566,29	51.366,74	54.554,50	28.425,38	29.107,91	30.282,21	31.643,79	32.949,62

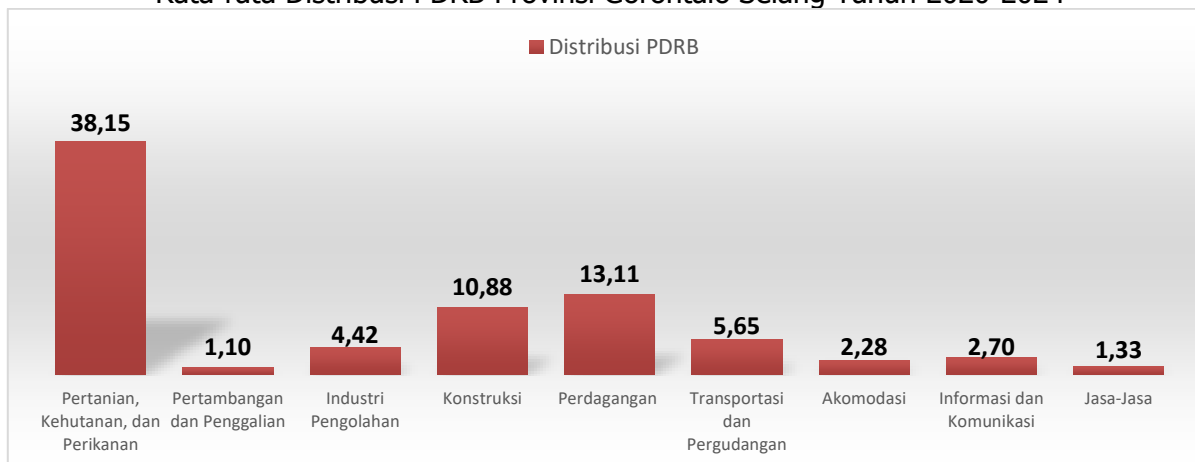
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

* Angka Sementara

Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo sebagian besar masih berasal dari sektor Primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang masih memberikan kontribusi rata-rata 38,15 persen pertahunnya, diikuti perdagangan barang dan jasa rata-rata sebesar 13,11 persen, konstruksi rata-rata sebesar 10,88 persen. Sementara sektor transportasi dan pergudangan hanya berkontribusi rata-rata sebesar 5,65 persen dari total PDRB lapangan usaha.

Grafik 2.5

Rata-rata Distribusi PDRB Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (diolah, 2025)

Dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi rumah tangga rata-rata sebesar 62,07 persen (selang tahun 2020-2024) dengan nilai PDRB mencapai 54.554,50 Milyar Rupiah (ADHB). Dari sisi Pengeluaran PMTB kontribusi sebesar 27,30 persen, pengeluaran konsumsi Pemerintah 17,35 persen, dan ekspor sebesar 28,52 persen. Disisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif tinggi sebesar 37,37 persen di tahun 2024.

Tabel 2.14

Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK
Menurut Pengeluaran, Tahun 2020-2024

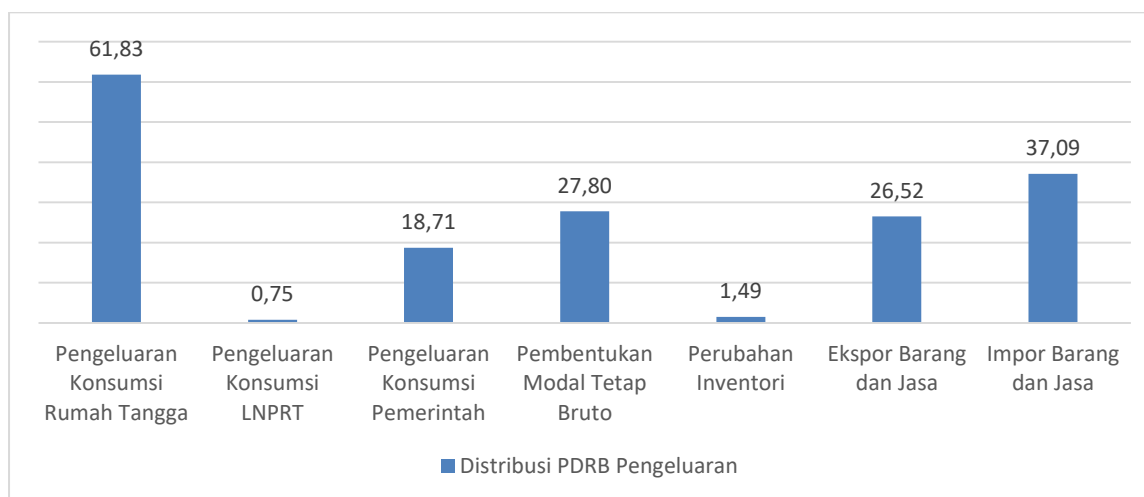
Lapangan Usaha	ADHB					ADHK				
	2020	2021	2022	2023*	2024**	2020	2021	2022	2023*	2024**
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	25.860,22	27.104,89	29.262,80	31.733,41	33.863,07	17.463,23	17.878,94	18.598,13	19.394,13	20.188,16
2 Pengeluaran Konsumsi LNPRT	310,49	321,78	349,11	381,49	429,72	219,13	221,81	231,69	243,32	266,10
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8.247,78	8.680,32	8.903,58	9.208,25	9.467,29	5.272,83	5.412,01	5.418,28	5.446,93	5.466,82
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	11.691,59	12.383,79	13.225,57	14.207,97	14.893,44	8.474,68	8.714,44	8.874,28	9.188,43	9.516,56
5 Perubahan Inventori	731,45	644,81	685,41	738,72	727,47	372,74	320,17	327,07	338,25	339,11
6 Ekspor Barang dan Jasa	10.089,96	11.641,64	12.794,76	13.879,90	15.561,66	6.102,35	6.776,30	7.261,31	7.755,53	8.409,63
7 Impor Barang dan Jasa	15.201,61	16.883,96	17.651,58	18.775,34	20.388,15	9.479,59	10.215,75	10.426,46	10.718,98	11.236,76
Produk Domestik Regional Bruto	41.729,89	43.893,26	47.569,65	51.374,40	54.554,50	28.425,38	29.107,91	30.284,29	31.647,60	32.949,62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

* Angka Sementara

Grafik 2.6

Rata-rata Distribusi PDRB dari Sisi Pengeluaran selang Tahun 2020-2024

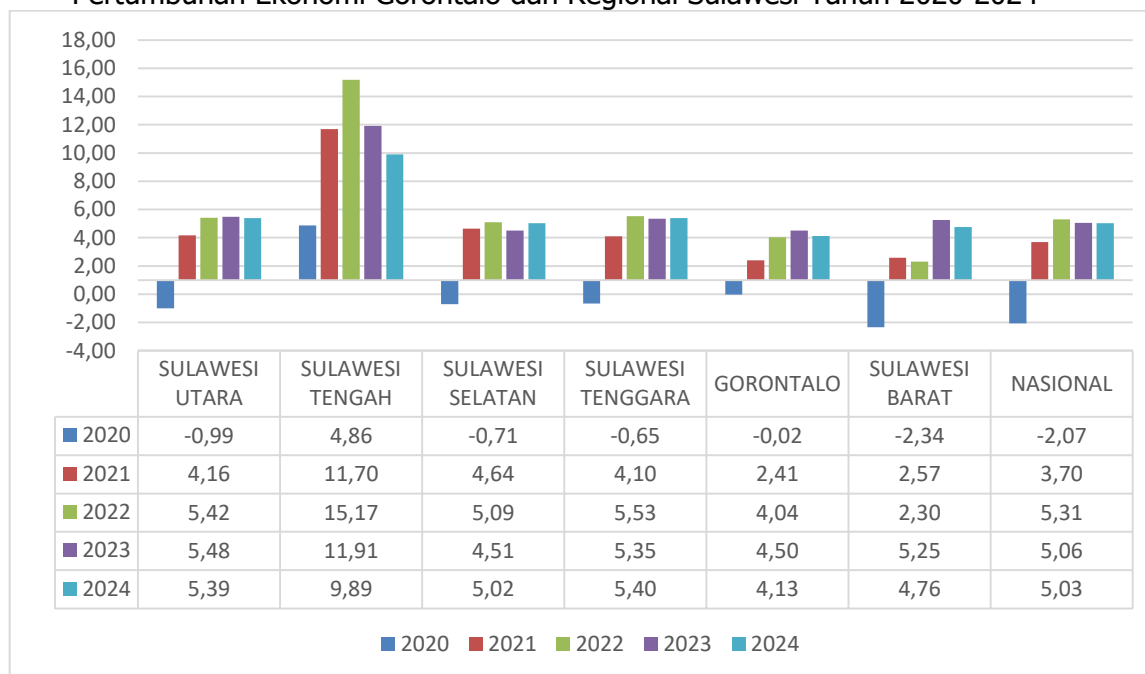


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (diolah, 2025)

Jika dilihat secara regional, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2024 berada di urutan kedua terbawah setelah Sulawesi Barat. Kedua Provinsi ini masih bergantung pada kontribusi sektor Primer dalam struktur PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer, memiliki laju pertumbuhan yang cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan pada sektor sekunder industri manufaktur.

Grafik 2.8

Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo dan Regional Sulawesi Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional dan Gorontalo, (diolah 2025)

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari intervensi pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota yang saling bersinergi dan saling mendukung dalam rangka pencapaian target-target makro pembangunan. Hingga tahun 2023 pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kota Gorontalo yang tumbuh sebesar 4,52 persen dengan rata-rata laju pertumbuhan Provinsi Gorontalo selang tahun 2019 – 2023 sebesar 3,46 persen.

Tabel 2.15

Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023

Kabupaten/Kota	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata Pertumbuhan
Kabupaten Boalemo	6,7	-0,21	2,04	3,05	4,42	3,2
Kabupaten Gorontalo	6,22	-0,01	2,43	3,93	4,51	3,41
Kabupaten Pohuwato	6,28	-	2,21	3,08	4,40	3,99
Kabupaten Bone Bolango	6,35	-0,06	2,20	4,02	4,47	3,39
Kabupaten Gorontalo Utara	6,77	-0,02	2,21	3,30	4,31	3,31
Kota Gorontalo	6,95	-0,02	2,83	4,11	4,52	3,67
Provinsi Gorontalo	6,40	-0,02	2,40	4,04	4,50	3,46

Sumber: Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah 2024)

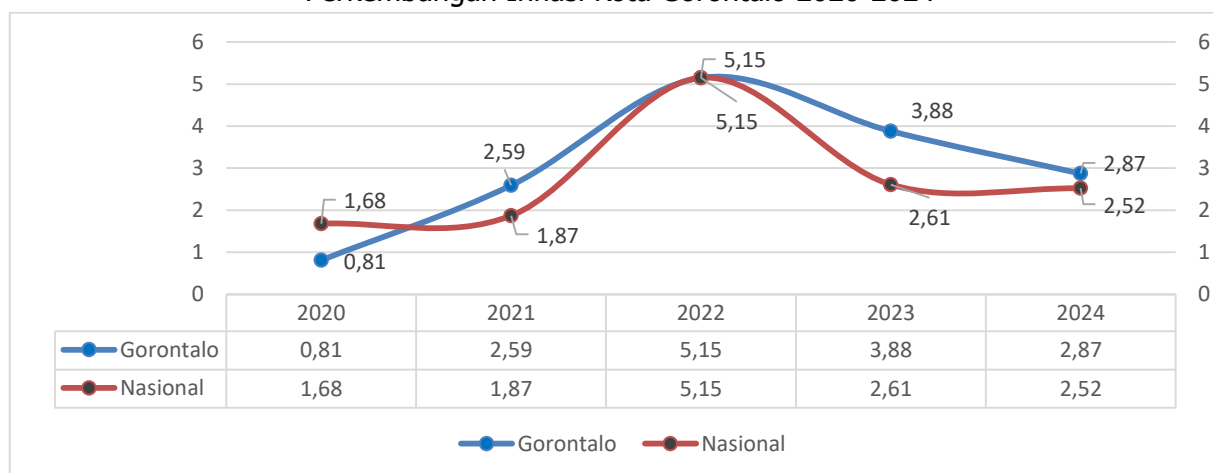
Jika dilihat secara menyeluruh, struktur ekonomi dari sisi lapangan usaha di Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten/Kota masih bergantung pada sektor primer dalam hal ini pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sementara dari sektor strategis lainnya seperti industri pengolahan, kontribusi sektor masih sangat kecil. Hal ini karena selain potensi wilayah Gorontalo, juga karena disebabkan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo yang lebih besar bekerja disektor pertanian. Sementara dari sisi pengeluaran, masih didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga dengan kisaran diatas 60 persen, sedangkan kontribusi PMTB dan ekspor masih sangat kecil dan fluktuatif. Olehnya upaya transformasi ekonomi perlu kembali didorong, dengan menjadikan sektor-sektor primer sebagai katalisator dalam mendorong sektor-sektor industri dan UMKM, melalui penguatan rantai nilai (*value chain*) masing-masing sektor dan berintegrasi dalam memperkuat perdagangan barang dan jasa serta ekspor.

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menunjukkan baik/buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi tinggi, menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi terjadinya deflasi tidak selalu menggambarkan hal yang positif. Angka inflasi yang stabil menunjukkan bahwa indikator perekonomian semakin baik.

Grafik 2.9

Perkembangan Inflasi Kota Gorontalo 2020-2024



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Selama lima tahun terakhir, Inflasi Tahunan terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 0,81, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid19 yang berlangsung sejak Bulan Februari 2020 dan Inflasi Tahunan tertinggi terjadi pada Tahun 2023 sebesar 5,15.

Tingkat inflasi Kota Gorontalo *yoy* Desember 2023 dan Desember Tahun 2024 (Januari-Desember) menunjukkan adanya penurunan dibandingkan Tahun 2023. Laju Inflasi Tahun 2023 sebesar 3,88 persen turun menjadi 2,87 persen pada Tahun 2024. Untuk inflasi Nasional, di Tahun 2024 inflasi Nasional juga menurun dibandingkan Tahun 2023, dimana tahun 2023 sebesar 2,61 persen dan pada tahun 2024 tercatat sebesar 2,52 persen.

Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Gorontalo selama Desember 2024 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Desember 2024 terjadi deflasi *year on year (yoy)* sebesar 0,79 persen, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,45 pada Desember 2023 menjadi 106,60 pada Desember 2024.

Deflasi *y-on-y* Provinsi Gorontalo terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks pada empat kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 3,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,93 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; dan kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,79 persen. Enam kelompok pengeluaran mengalami inflasi *y-on-y* yaitu kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,79 persen; kelompok kesehatan sebesar 1,37 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,02 persen; kelompok pendidikan sebesar 0,54 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,30 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 3,20 persen. Sementara kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga tidak mengalami perubahan indeks secara signifikan.

Dari segi Komoditas beberapa barang yang dominan memberikan andil/sumbangan deflasi *y-on-y* pada Desember 2024, antara lain: makanan ringan/snack, mie kering instant, ikan cakalang/ikan sisik, ikan ekor kuning, ikan layang/ikan benggol, ikan teri, ikan tuna, pepaya, pisang, apel, bayam, kangkung, tomat, cabai merah, cabai rawit, tahu mentah, tempe, susu bubuk untuk balita, air kemasan, bahan bakar rumah tangga, pengharum cucian/pelembut, sabun cair/cuci piring, sabun detergen bubuk, bensin, angkutan udara, telepon seluler, sabun mandi, deodorant, krim wajah, dan popok bayi sekali pakai/diapers. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan inflasi *y-on-y*, antara lain: beras, daging ayam ras, cumi-cumi, minyak goreng, bawang merah, kue basah, kopi bubuk, sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM) dan emas perhiasan.

Meskipun ada fluktuasi dalam harga komoditas, secara keseluruhan Tingkat inflasi di Kota Gorontalo pada Desember 2024 menunjukkan tren yang relative stabil dengan kontribusi deflasi yang cukup besar.

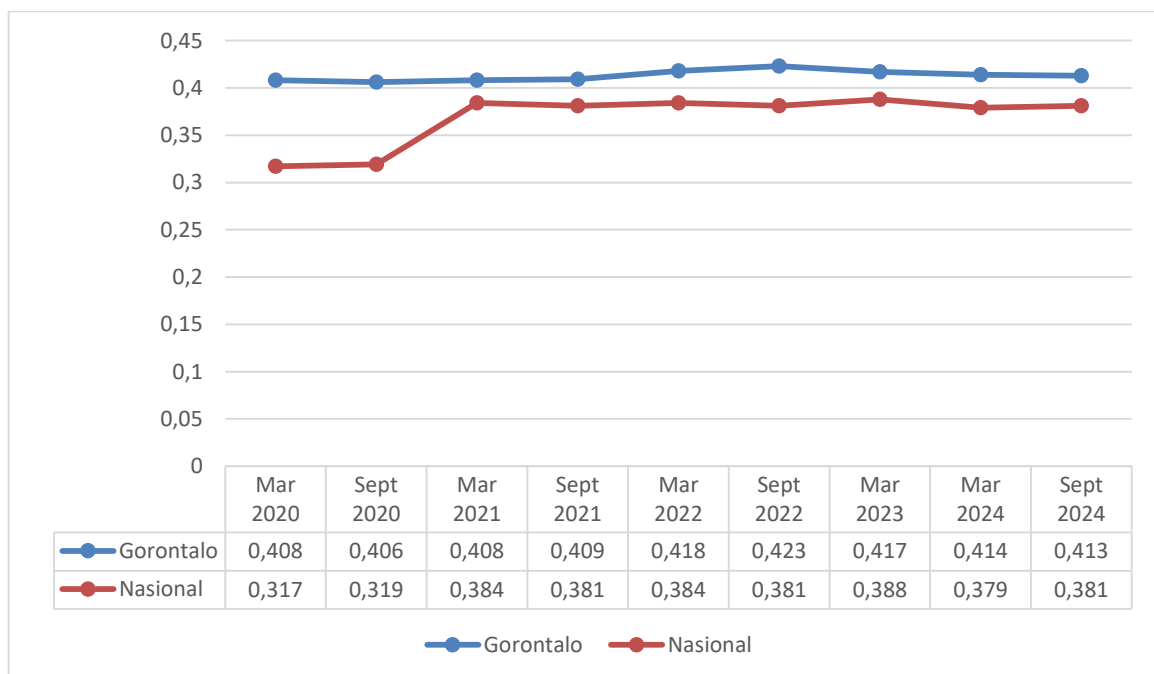
c. Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Angka Gini Rasio sebagai ukuran

pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukkan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna).

Nilai Gini Ratio Gorontalo selama periode Maret 2020 – September 2024 terus mengalami fluktuasi. Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Gorontalo yang diukur oleh Gini Ratio sebesar 0,413. Angka ini menurun sebesar 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang tercatat sebesar 0,414.

Tabel 2.
Indeks Gini Provinsi Gorontalo dan Nasional
periode Maret 2019- September 2024



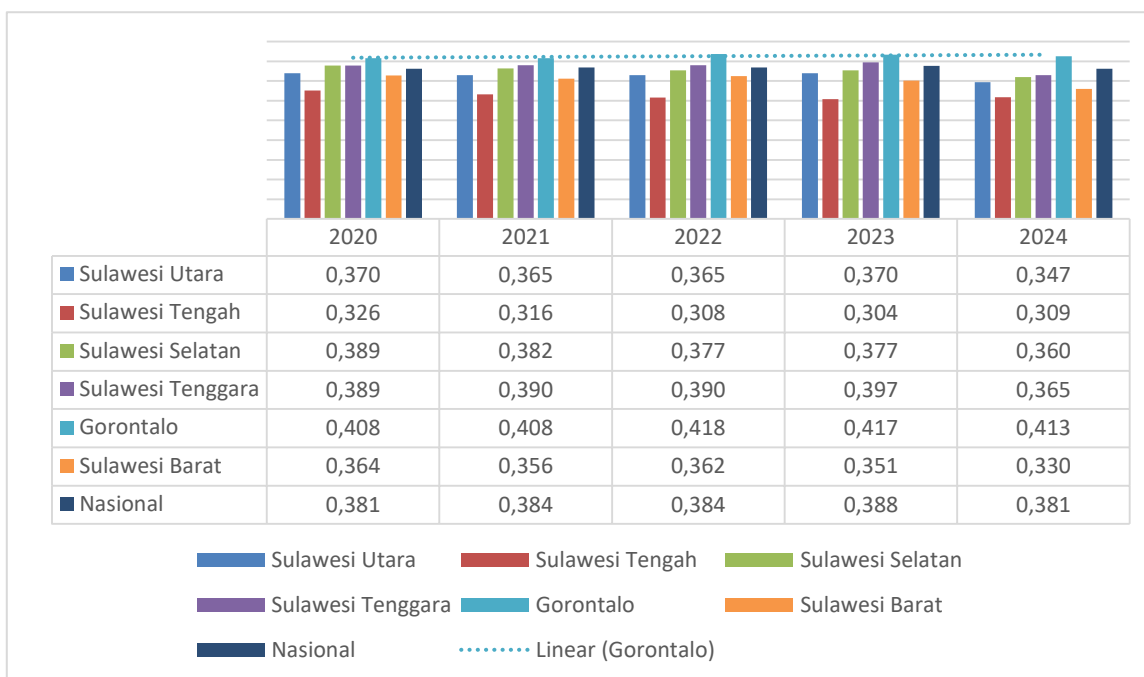
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (diolah)

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen.

Pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perkotaan sebesar 17,71 persen dari total konsumsi penduduk perkotaan Gorontalo. Sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di perdesaan tercatat sebesar 16,63 persen dari total konsumsi penduduk perdesaan Gorontalo. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan share konsumsi pada kelompok ini di wilayah perkotaan sedangkan penurunan share konsumsi di wilayah perdesaan dibandingkan Maret 2024. Menurut kriteria Bank Dunia, ketimpangan yang terjadi di wilayah perkotaan Gorontalo termasuk rendah sedangkan wilayah perdesaan tergolong sedang.

Grafik 2.11

Gini Rasio Provinsi se-Sulawesi tahun 2020-2024



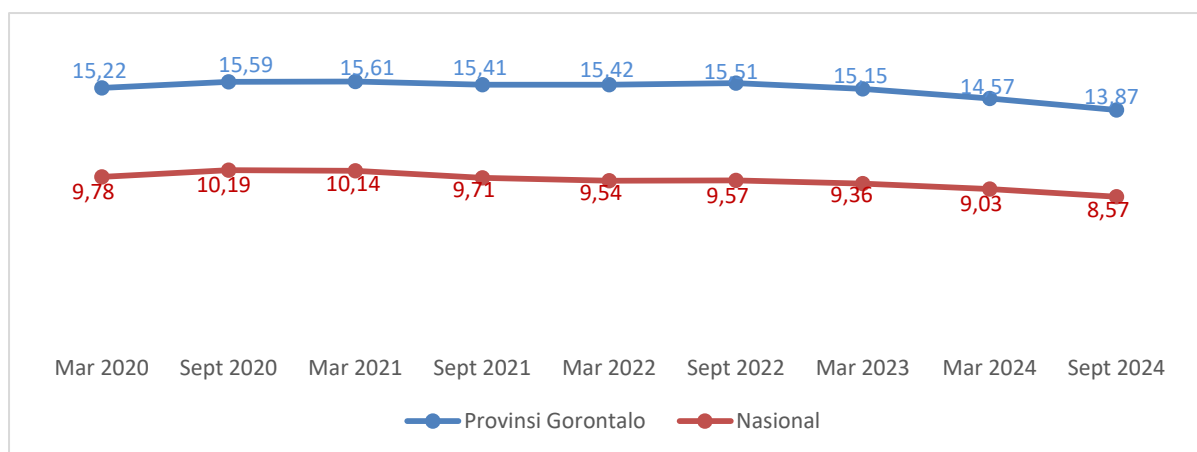
Sumber : Badan Pusat Statistik, (diolah 2024)

Selain itu, jika dibandingkan dengan kondisi Nasional nampaknya tingkat kesenjangan di Provinsi Gorontalo masih tergolong tinggi dibanding wilayah lainnya se-Sulawesi. Selama periode 2020-2024 tingkat kesenjangan di Provinsi Gorontalo juga lebih tinggi daripada Nasional.

d. Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kemiskinan Provinsi Gorontalo selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Persentase Kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 14,57 persen pada Maret 2024, menjadi 13,87 persen pada September 2024. Angka ini merupakan Penurunan tingkat kemiskinan terendah sepanjang berdirinya Provinsi Gorontalo. Meski saat Pandemi Covid-19 melanda angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo sempat naik, namun secara umum angka kemiskinan Provinsi Gorontalo dari waktu ke waktu mengalami penurunan. Selain itu, persentase kemiskinan Provinsi Gorontalo masih berada diatas rata-rata Nasional dan masih termasuk salah satu dari 10 Provinsi termiskin di Indonesia.

Grafik 2.11
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Gorontalo pada September 2024 mencapai 107,03 ribu orang. Bila dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebanyak 7,96 ribu orang.

Bila dilihat menurut wilayah tempat tinggal, pada Maret 2024 dibandingkan September 2024, jumlah penduduk miskin perkotaan naik sebesar 3,03 ribu orang, sedangkan di perdesaan turun sebesar 10,99 ribu orang. Persentase kemiskinan di perkotaan naik dari 4,57 persen menjadi 4,99 persen. Sementara itu, di perdesaan turun dari 22,97 persen menjadi 21,62 persen.

Garis Kemiskinan Provinsi Gorontalo pada Maret 2024 tercatat sebesar Rp473.006,- per kapita per bulan dan pada September 2024 mengalami kenaikan menjadi Rp487.578,- per kapita per bulan, yang berarti naik sebesar Rp14.572,- per kapita per bulan, atau naik sebesar 3,08 persen. Pada September 2024, GKM untuk wilayah perkotaan tercatat sebesar Rp372.700,- dan perdesaan sebesar Rp385.233,-. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola konsumsi makanan di wilayah perdesaan kurang mengandung kalori dibandingkan pola konsumsi di perkotaan, sehingga untuk mendapatkan kalori yang standar (2100 kkal/hari) diperlukan harga yang lebih mahal.

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar melihat berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan yang disajikan dalam bentuk indeks. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

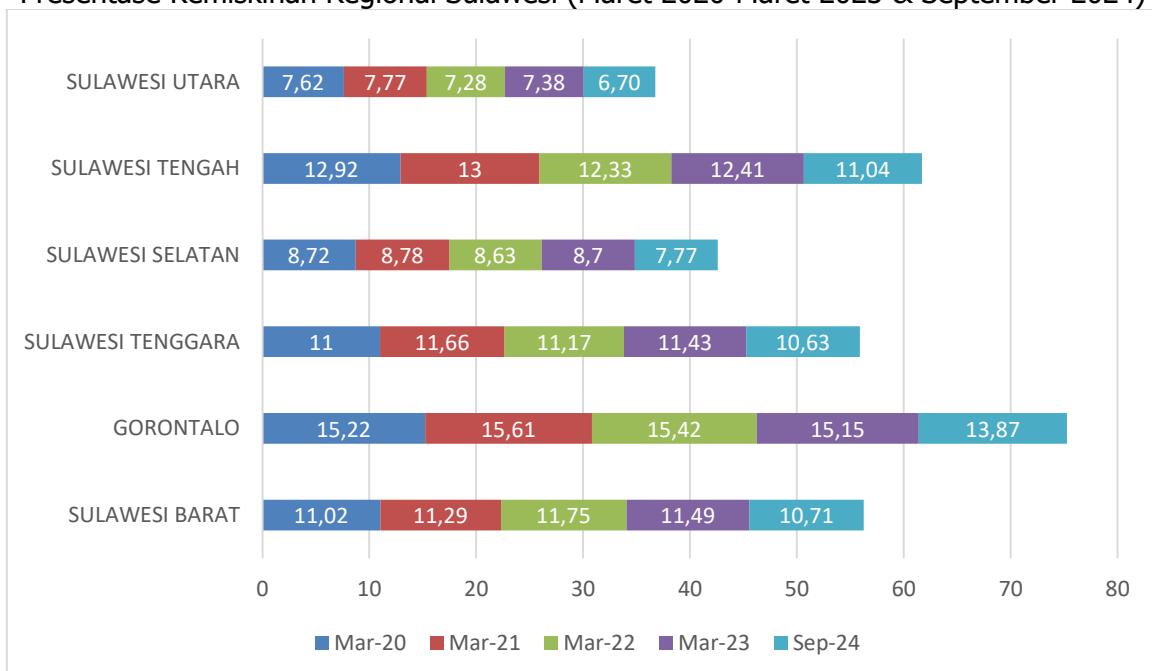
Pada periode Maret 2023-Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan sedangkan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan pada Maret 2024 tercatat sebesar 2,879 turun 0,039 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 2,918. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk yang berada jauh garis kemiskinan tahun 2024 cenderung lebih sedikit dan terus berkurang dibandingkan tahun 2023. Sementara Indeks Keparahannya Kemiskinan Maret

2024 tercatat sebesar 0,776 naik 0,036 poin dibandingkan kondisi Maret 2023 yang tercatat sebesar 0,740.

Jika dibandingkan menurut wilayah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perdesaan lebih tinggi daripada di perkotaan. Pada September 2024 nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk perkotaan tercatat sebesar 0,395 sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 3,957. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di perkotaan tercatat sebesar 0,061, sedangkan di perdesaan tercatat sebesar 1,041.

Berdasarkan data, bila dibandingkan dengan 5 provinsi lainnya yang ada di Sulawesi, angka kemiskinan Provinsi Gorontalo masih yang tertinggi pada selang tahun 2020-2024. Hal ini disebabkan perekonomian Gorontalo digerakkan oleh sektor pertanian dan tidak bertumpu pada sektor jasa.

Grafik 2.13
Presentase Kemiskinan Regional Sulawesi (Maret 2020-Maret 2023 & September 2024)



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, (diolah 2024)

69

Setiap Tahun angka Kemiskinan Ekstrem di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan. Penurunan Kemiskinan Ekstrem yang cukup signifikan terjadi di bulan Maret 2023. Berdasarkan data SUSENAS, Penduduk miskin ekstrem pada Maret 2024 sebesar 1,46% (17,41 ribu jiwa) turun 0,98% terhadap maret 2023. Capaian ini masih lebih tinggi dibandingkan target pemerintah pusat terkait kemiskinan ekstrem di tahun 2024 sebesar 0%.

Tabel 2.16

Kemiskinan Ekstrim di Provinsi Gorontalo, tahun 2021-2023

Kabupaten/ Kota	2021		2022		2023		2024	
	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim (ribu)	Penduduk Miskin Ekstrim (%)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim (ribu)	Penduduk Miskin Ekstrim (%)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim (ribu)	Penduduk Miskin Ekstrim (%)	Jumlah Penduduk Miskin Ekstrim (ribu)	Penduduk Miskin Ekstrim (%)
Boalemo	5,88	3,51	6,29	3,68	3,74	2,15	n/a	n/a
Gorontalo	32,69	8,7	26,03	6,92	17,86	4,74	n/a	n/a
Pohuwato	4,97	3,07	8,05	4,91	3,38	2,03	n/a	n/a
Bone Bolango	7,51	4,75	5,12	3,23	2,44	1,53	n/a	n/a
Gorontalo Utara	2,4	2,13	5	4,45	1,7	1,51	n/a	n/a
Kota Gorontalo	2,18	1	1,04	0,47	0,42	0,19	n/a	n/a
Provinsi Gorontalo	55,63	4,66	51,52	4,28	29,54	2,44	17,41	1,46

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2024

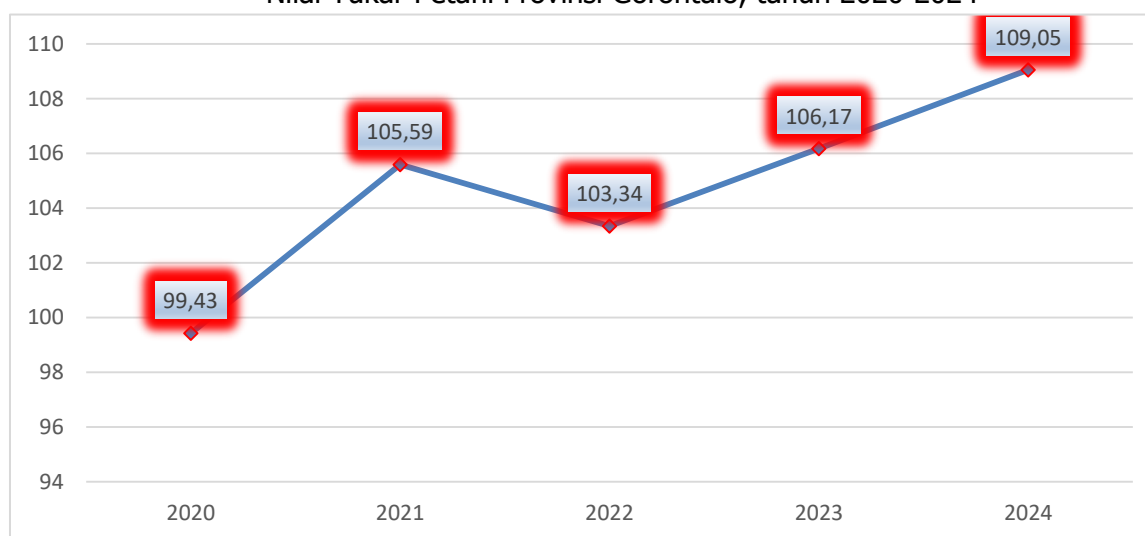
Upaya penurunan kemiskinan ekstrim dilakukan melalui berbagai strategi diantaranya penurunan beban pengeluaran, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, bantuan usaha dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.

e. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) serta Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Nilai tukar petani merepresentasikan kondisi kesejahteraan petani. NTP menunjukkan daya tukar (*terms of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Berikut ini menunjukkan tren NTP Provinsi Gorontalo 5 tahun terakhir.

Grafik 2.

Nilai Tukar Petani Provinsi Gorontalo, tahun 2020-2024

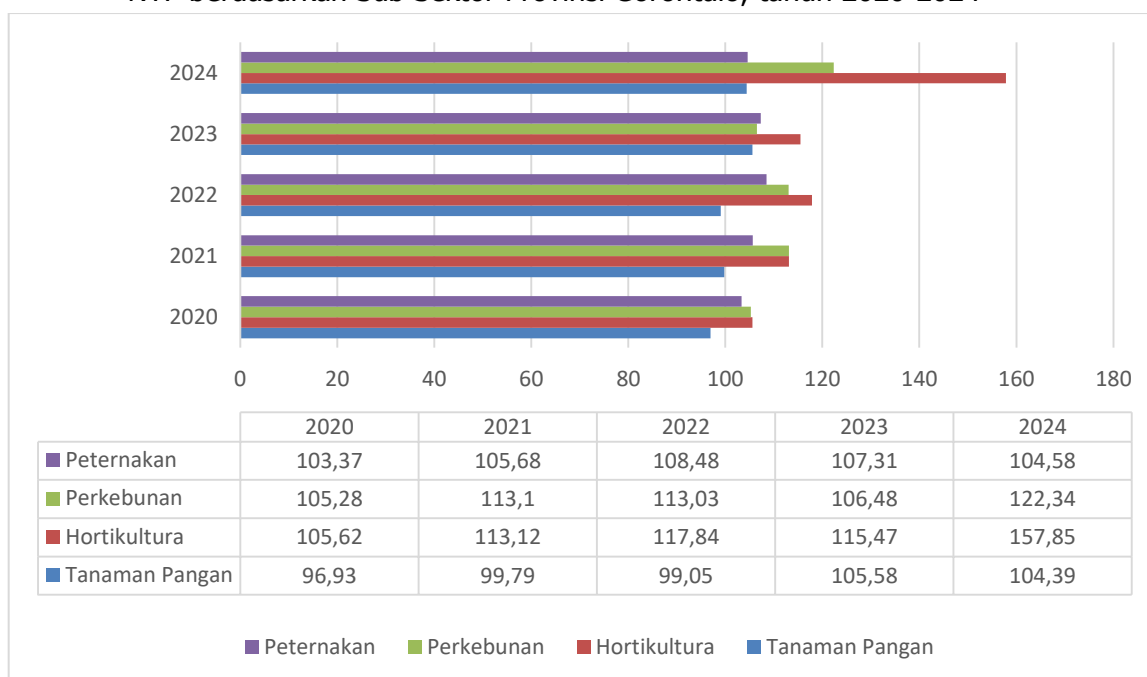


Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, (diolah 2024)

Berdasarkan grafik diatas, dapat dilihat bahwa NTP Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi cenderung meningkat berada pada angka diatas 100. Walaupun berada posisi diatas 100, namun angka ini belum mencerminkan kondisi yang ideal harapan.

Ada berbagai asumsi yang bisa menjelaskan kondisi pada grafik tersebut. Diantaranya bahwa terjadi dinamika peningkatan kebutuhan konsumsi RT petani dan produksi yang tidak diimbangi oleh perbaikan pendapatan petani, harga produk pertanian anjlok dengan kapasitas produksi yang menurun ataupun biaya produksi yang terus meningkat yang tidak disertai dengan kebijakan perbaikan harga. Pada prinsipnya capaian NTP Provinsi Gorontalo setiap tahunnya telah melampaui dari target yang ditetapkan, dimana diakhir periode targetnya hanya 105,89 %. Selanjutnya, jika kita memotret lebih dalam lagi sub sektor hortikultura dan perkebunan rakyat yang berkontribusi signifikan terhadap angka NTP sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.14
NTP berdasarkan Sub Sektor Provinsi Gorontalo, tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional, (diolah 2024)

Berdasarkan data capaian bulanan di periode tahunan masa lampau, evaluasi capaian Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) menggambarkan dinamika yang mencerminkan adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan. Fluktuasi dan pertumbuhan yang diamati menawarkan wawasan penting mengenai stabilitas dan adaptabilitas sektor ini. Refleksi nyata tergambar pada data tahun 2020 – 2023 yang relatif stabil dengan tren pertumbuhan perlahan sepanjang tahun. Meskipun perubahan bulanan kecil, akumulasi tersebut mengindikasikan adaptasi sektor terhadap perubahan ekonomi. Tahun 2023 mencatat kenaikan yang signifikan, menunjukkan stabilitas dan adaptabilitas sektor terhadap kondisi yang lebih mapan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menggambarkan kemampuan sektor pertanian untuk beradaptasi dengan tantangan seperti dampak pandemi dan perubahan pasar, menghasilkan stabilitas dan perkembangan yang berdampak positif pada ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan.

Produksi perikanan tangkap adalah produksi perikanan yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan baik di perairan laut maupun di perairan umum (Danau Limboto). Produksi perikanan tangkap merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan dan nilai tukar Nelayan (NTN). Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2022 sebesar

130.916 Ton. Pada periode Januari 2019 – Desember 2023, NTN Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada Februari 2019 sebesar 107,36 dan terendah terjadi pada November 2020 sebesar 90,24.

Nilai Tukar Nelayan dan pembudidaya (NTN-P) adalah nilai angka perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan/pembudidaya dengan indeks harga yang dibayar nelayan/pembudidaya yang dinyatakan dalam persentase. Indeks yang diterima adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi nelayan/pembudidaya. Sedangkan indeks yang dibayar nelayan/pembudidaya adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi perikanan. NTN-P (Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya). Pada periode Januari 2019 – Desember 2023, NTN-P Provinsi Gorontalo tertinggi terjadi pada Februari 2019 sebesar 100,94 dan terendah terjadi pada November 2020 sebesar 90,80.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2022 sebesar 76.529,34 ha. Kawasan konservasi perairan daerah yang turut menjadi pengembangan Potensi wisata bahari di wilayah Perairan Laut Sulawesi & Teluk Tomini antara lain : Olele, Leato, Botubarani (Lokasi Hiu Paus), Ex Kurenai, Pulau Mohupomba Daa, Pulau Monduli, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Torosiaje, Pulau Bungkil, Pulau Dokokayu Daa, Pulau Huha, Pulau Lampu, Pulau Mohinggito, Pulau Ponelo, Pulau Saronde, Pulau Bogisa, Pulau Dudepo dan Pulau Raja.

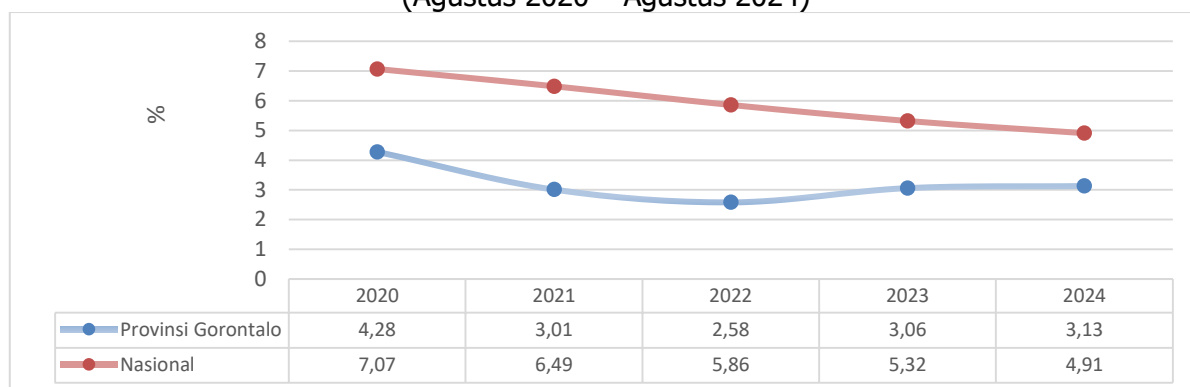
2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT Provinsi Gorontalo hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 3,13 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3-4 orang penganggur. Selama lima tahun terakhir, terjadi kenaikan TPT saat awal pandemi Covid-19 (Agustus 2020), kemudian TPT menunjukkan tren menurun hingga Agustus 2022 dan sedikit meningkat hingga Agustus 2024. Pada Agustus 2024, TPT mengalami kenaikan sebesar 0,07 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023.

Grafik 2.14

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional
(Agustus 2020 – Agustus 2024)



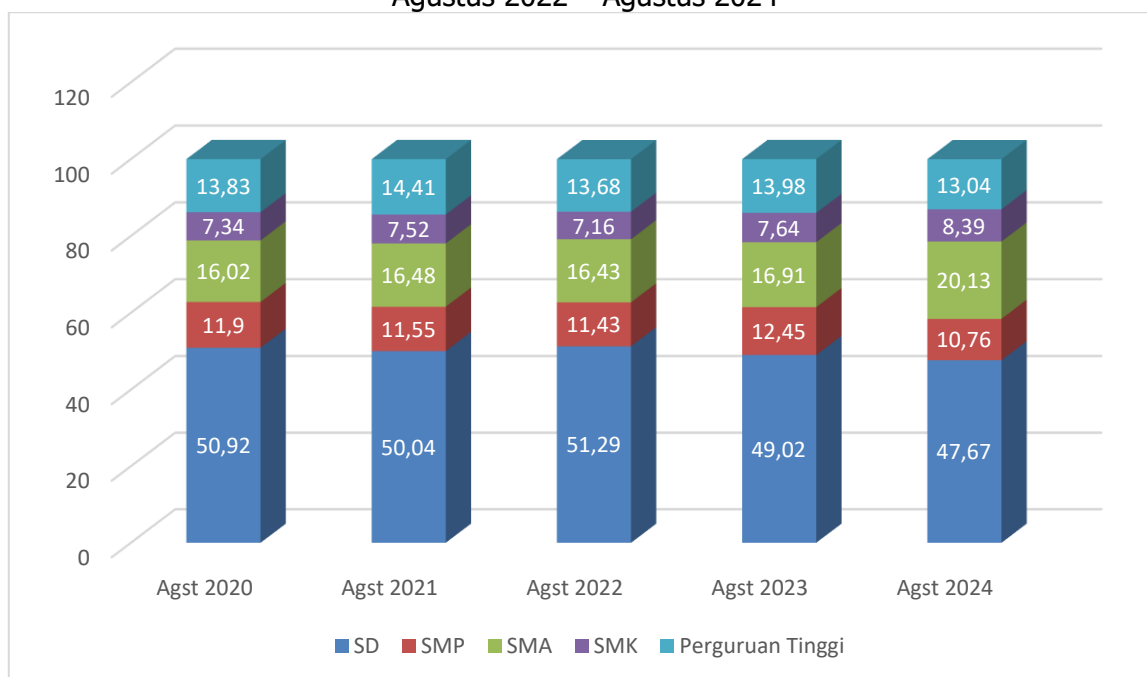
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah 2024)

Secara tren capaian Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo selalu berada pada posisi di bawah nasional sehingga memberikan kontribusi positif dalam pencapaian indikator ketenagakerjaan secara nasional. Hal ini disebabkan antara lain jumlah penyerapan tenaga kerja yang berada pada sektor pertanian yang masih cukup tinggi mengingat PDRB Provinsi Gorontalo didominasi oleh Lapangan Usaha dari sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang sampai tahun 2024 pada angka 37,29%. Yang perlu menjadi perhatian adalah dengan rendahnya angka pengangguran belum memberikan kontribusi signifikan pada angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Data menunjukkan capaian angka persentase kemiskinan pada 13,87% dan Provinsi Gorontalo berada pada 10 daerah dengan peringkat terbawah. Hal ini berarti bahwa dengan banyaknya angkatan kerja yang bekerja belum bisa memberikan pendapatan yang cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja masih relatif rendah, yang dapat disebabkan karena tingkat produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo yang juga cenderung masih rendah.

Dari seluruh penduduk berkerja pada Agustus 2024, status pekerjaan utama yang terbanyak adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai, yaitu sebesar 35,54 persen, diikuti status berusaha sendiri (24,89 persen), sementara yang paling sedikit berstatus berusaha dibantu buruh tetap dan dibayar, yaitu sebesar 3,01 persen. Dibandingkan Agustus 2023, status pekerjaan yang mengalami peningkatan terbesar adalah buruh/karyawan/pegawai sebesar 1,67 persen poin. Sementara itu, untuk status pekerjaan yang mengalami penurunan terbesar terdapat pada status berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebesar 1,45 persen poin.

Grafik 2.15

Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan (persen), Agustus 2022 – Agustus 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah 2024)

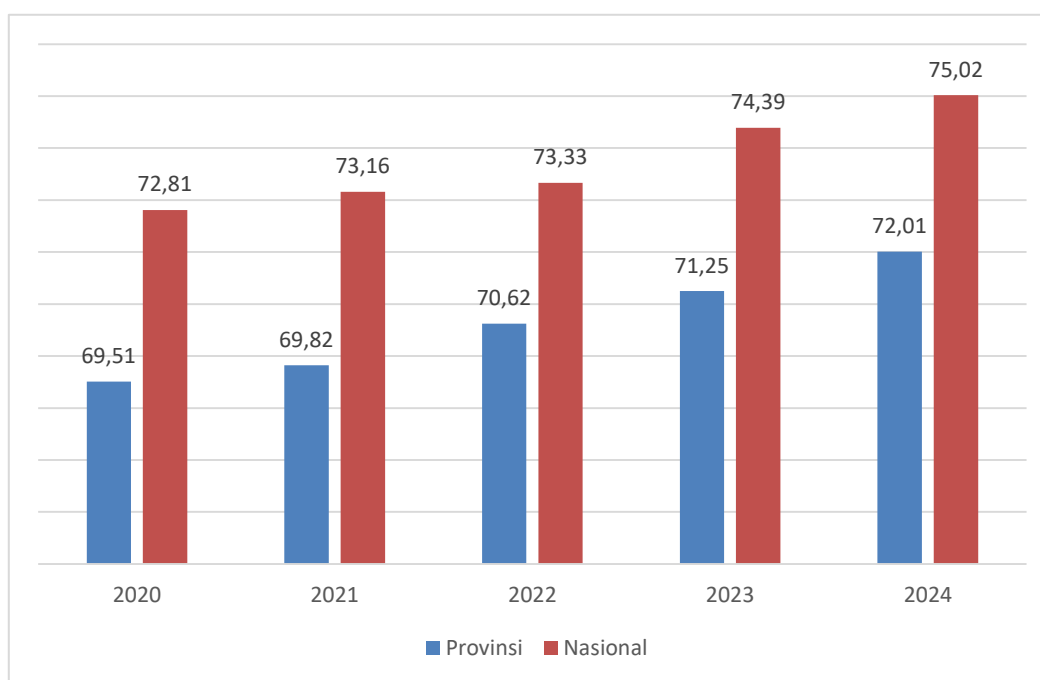
Gambar di atas menunjukkan nilai TPT menurut tingkat Pendidikan yang ditamatkan, secara garis besar bahwa TPT di Provinsi Gorontalo didominasi oleh tamatan SD ke bawah (tidak/belum pernah sekolah/belum tamat SD/tamat SD) yaitu sebesar 47,67 persen. Diikuti oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 20,13 persen, Perguruan Tinggi sebesar 13,04 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 10,76 persen, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar 8,39 persen. Distribusi penduduk bekerja menurut pendidikan masih menunjukkan pola yang sama dengan Agustus 2022 dan Agustus 2023. Hal ini dapat diartikan bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah cenderung untuk mau menerima pekerjaan apa saja, sedangkan untuk yang berpendidikan lebih tinggi cenderung untuk memilih pekerjaan yang lebih sesuai (cenderung untuk memilih – milih jenis pekerjaan). Selain itu di Provinsi Gorontalo belum tersedia banyak industri atau jenis usaha yang mampu untuk langsung menyerap lulusan SMA / SMK terutama dengan bidang keahlian spesifik yang dihasilkan oleh lulusan pada tingkat Pendidikan Menengah.

b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Pembangunan manusia di Provinsi Gorontalo terus mengalami kemajuan. Selama 2020–2024, IPM Provinsi Gorontalo rata-rata meningkat sebesar 0,89 persen per tahun, dari 69,51 pada tahun 2020 menjadi 72,01 pada tahun 2024.

Grafik 2.16

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Gorontalo dan Nasional tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Dalam kurun waktu tersebut IPM Provinsi Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,89 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan tersebut relatif lebih cepat dibandingkan rata-rata IPM Indonesia yang tumbuh sebesar 0,75 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Gorontalo pada periode 2023-2024, yaitu mencapai 1,07 persen. Sementara pada IPM Indonesia, pertumbuhan pada periode 2023-2024 sebesar 0,85 persen. Meskipun secara rata-rata pertumbuhan IPM Gorontalo cenderung lebih cepat dibandingkan nasional, namun secara level, IPM Gorontalo masih di bawah IPM Indonesia. Gorontalo masuk ke dalam kategori IPM "TINGGI" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) bersama dengan 30 provinsi lainnya di Indonesia.

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan. Dua indikator mengalami percepatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) sebesar 4,25 persen dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 2,35 persen. Sementara itu, pertumbuhan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir sedikit melambat dari 0,40 persen menjadi 0,33 persen. Demikian juga pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (HLS) melambat dari 0,30 persen menjadi 0,08 persen.

Tabel 2.12
IPM Provinsi Se-Sulawesi Tahun 2020 - 2024

Propinsi Se-Sulawesi	2020	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Utara	73,67	74,03	74,52	75,04	75,03
Sulawesi Selatan	73,08	73,38	73,96	74,60	74,05
Sulawesi Tenggara	71,61	71,82	72,38	72,94	73,48
Sulawesi Tengah	70,31	70,54	71,01	71,66	71,56
Gorontalo	69,51	69,82	70,62	71,25	72,01
Sulawesi Barat	68,40	68,64	69,19	69,80	68,20

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

Capaian IPM Provinsi Gorontalo tahun 2024 meningkat dengan dimensi Angka Harapan Hidup Saat Lahir di Gorontalo mencapai 70,73 tahun. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 70,73 tahun. Secara rata-rata, penduduk Gorontalo usia 25 tahun ke atas meningkat 0,19 tahun dari 8,10 tahun menjadi 8,29 tahun pada tahun 2024 sudah menempuh 8,29 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II). Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,17 tahun atau setara dengan Diploma I. Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan dengan pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan). Pada tahun 2024, pengeluaran riil per kapita per tahun (yang disesuaikan) Provinsi Gorontalo mencapai 11,54 juta rupiah per tahun. Capaian ini meningkat 470 ribu rupiah atau 4,25 persen dibandingkan tahun sebelumnya, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan 2020-2023 yang sebesar 3,39 persen per tahun.

Tabel 2.13
Perkembangan Dimensi Penyusun IPM Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2020-2024

Dimensi/ Indikator	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
GORONTALO						
Umur Panjang dan hidup sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	69,83	69,93	70,22	70,50	70,73
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,08	13,11	13,12	13,16	13,17
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,82	7,90	8,02	8,10	8,29
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah		10.157	10.687	11.069	11.539
NASIONAL						
Umur Panjang dan hidup sehat						
Umur Harapan Hidup saat Lahir (UHH)	Tahun	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Ribu Rupiah	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

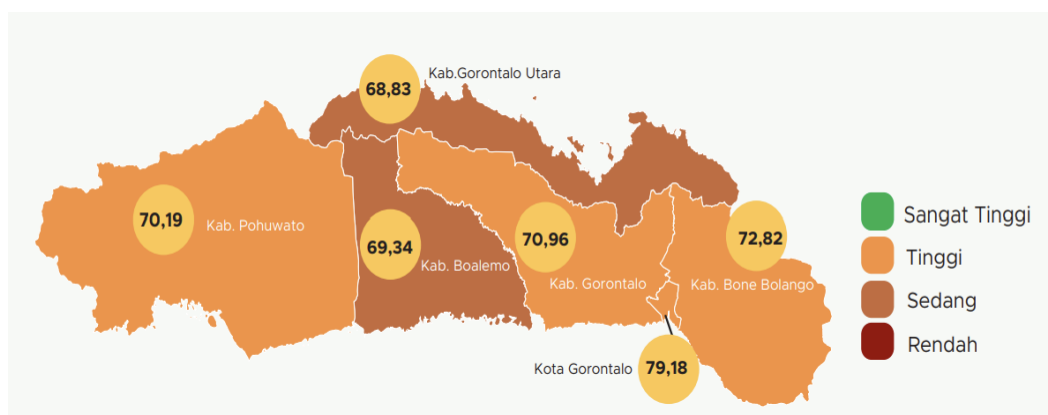
Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2024

Capaian dimensi IPM Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 masih berada dibawah rata-rata capaian nasional. Dari dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, indikator Usia Harapan Hidup tahun 2024 sebesar 70,73 tahun sedangkan capaian nasional adalah 74,15 tahun. Dimensi pengetahuan, capaian indikator HLS Provinsi Gorontalo tahun 2024 sebesar 13,17 tahun dan RLS 8,29 tahun. Adapun capaian nasional yaitu HLS sebesar 13,21 tahun dan RLS sebesar 8,85 tahun. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Provinsi Gorontalo, dengan indikator Pengeluaran Riil per

Kapita tahun 2024 sebesar 11.539 ribu rupiah, berada dibawah capaian Nasional yang mencapai 12.341 ribu rupiah. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan capaian indikator penyusun IPM Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024, pertumbuhan terbesar pada capaian indikator pengeluaran riil perkapita. Hal ini seiring dengan kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo dalam mendorong peningkatan kualitas SDM dan terbukanya lapangan kerja.

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. IPM pada level kabupaten/kota berkisar antara 68,83 (Kab. Gorontalo Utara) hingga 79,18 (Kota Gorontalo). Pada tahun 2024, status pembangunan manusia di Kabupaten Pohuwato meningkat dari "sedang" menjadi "tinggi", dengan capaian IPM sebesar 70,19. Dengan peningkatan status pembangunan manusia tersebut, jumlah wilayah berstatus pembangunan manusia "tinggi" ($70 \leq \text{IPM} < 80$) menjadi sebanyak 4, berstatus "sedang" ($60 \leq \text{IPM} < 70$) sebanyak 2.

Gambar 2.14
Status IPM Kab/Kota se-Province Gorontalo tahun 2024



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2024

c. Kesetaraan Gender (IPG, IDG, IKG)

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo sejak Provinsi ini resmi berdiri. Perempuan merupakan salah satu unsur yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga kondisi dan kualitas perempuan menjadi hal penting untuk ditingkatkan.

Kondisi dan kualitas Perempuan ditunjukkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Kedua indikator ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren positif. Sampai dengan tahun 2023 IPG Provinsi Gorontalo berada pada angka 88,25. Sementara IDG Provinsi Gorontalo pada tahun yang sama sebesar 71,11.

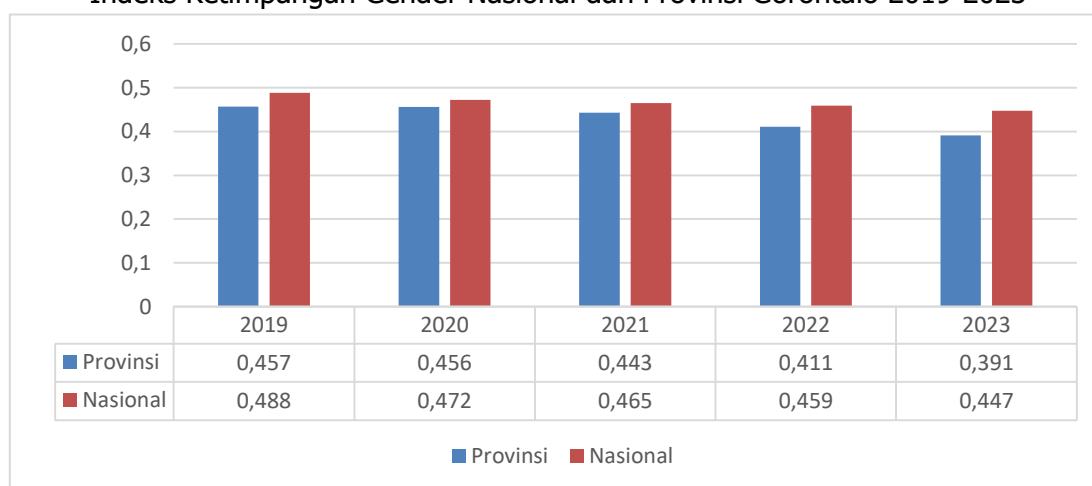
Untuk mengukur perkembangan pencapaian kesetaraan, juga digunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian Pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki (Bappenas, 2023). Terdapat tiga dimensi pembentuk IKG, yaitu dimensi Kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja.

Secara nasional, IKG Provinsi Gorontalo lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini secara konsisten, dimana IKG Provinsi Gorontalo lebih rendah dan terus menunjukkan penurunan sejak tahun 2019. IKG tahun 2023 sebesar 0,391.

Kinerja yang meningkat ini dikontribusi oleh dimensi pemberdayaan yang menunjukkan peningkatan persentase perempuan berpendidikan SMA ke atas. Selain itu peningkatan ibu hamil 15-49 yang melahirkan di fasilitas kesehatan serta TPAK Perempuan. Namun yang masih perlu perhatian pada peningkatan proporsi perempuan yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun.

Grafik 2.18

Indeks Ketimpangan Gender Nasional dan Provinsi Gorontalo 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Secara regional, untuk tahun 2022 nilai Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Gorontalo termasuk baik, yaitu kedua yang terendah setelah Sulawesi Selatan sebesar 0,411. Bila dilihat di wilayah kabupaten dan kota, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki poin paling baik yaitu 0,226 sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Bone Bolango dengan nilai 0,523.

Tabel 2.20

Indeks Ketimpangan Gender Regional Sulawesi 2019-2023

Provinsi	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Utara	0,453	0,431	0,439	0,444	0,422
Sulawesi Tengah	0,518	0,520	0,497	0,477	0,469
Sulawesi Selatan	0,460	0,427	0,410	0,390	0,366
Sulawesi Tenggara	0,565	0,559	0,554	0,490	0,491
Gorontalo	0,457	0,456	0,443	0,411	0,411
Sulawesi Barat	0,554	0,543	0,543	0,510	0,494

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

d. Tingkat Pengangguran Terbuka

Penduduk usia kerja (PUK) merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Penduduk usia kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2024 sebanyak 932.926 orang, naik sebanyak 12.653 orang dibandingkan Agustus 2023. Sebagian besar penduduk usia kerja merupakan angkatan kerja, yaitu 652.588 orang, sisanya termasuk bukan angkatan kerja sebanyak 280.338 orang.

Komposisi angkatan kerja Provinsi Gorontalo pada Agustus 2024 terdiri dari 632.184 orang penduduk bekerja dan 20.404 orang pengangguran. Apabila dibandingkan Agustus 2023, jumlah angkatan kerja meningkat sebanyak 1.163 orang, penduduk bekerja bertambah sebanyak 663 orang, sementara pengangguran bertambah sebanyak 500 orang.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi sejak Agustus 2020 sampai dengan Agustus 2024. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 69,95 persen, turun 0,84 persen poin dibanding Agustus 2023. TPAK adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah.

Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,50 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,23 persen. Ini mengindikasikan bahwa terjadi kesenjangan partisipasi perempuan di lapangan kerja. Faktor penyebab kesenjangan TPAK adalah budaya patriarki yang masih sangat besar dalam masyarakat kita serta kondisi sosial ekonomi Masyarakat.

Tabel 2.
Penduduk Usia Kerja dan Angkatan Kerja, Agustus 2020-Agustus 2024

Status Keadaan Ketenagakerjaan	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022	Agustus 2023	Agustus 2024	Perubahan Agst 2023- Agst 2024	
	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Orang	Persen
Penduduk Usia Kerja (PUK)	883.318	893.745	905.361	914.951	920.273	12.653	1.37
Angkatan Kerja	595.223	593.973	596.968	630.534	651.425	1.163	0.18
- Bekerja	572.841	568.563	579.009	614.250	631.521	663	0.10
- Pengangguran	22.382	25.410	17.959	16.284	19.904	500	2.51
Bukan Angkatan Kerja	288.095	299.772	308.393	284.417	268.848	11.490	4.27
	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen	Persen Poin
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	67,38	66.46	65.94	68.91	70.79	-0.835	-0.835
- Laki-laki	84,77	83.02	81.60	85.30	85.34	-0.841	-0.841
- Perempuan	50.03	49.95	50.41	52.64	56.07	-0.842	-0.842

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, .

Tantangan dalam sektor ketenagakerjaan adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo masih rendah, masih terdapat Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan, rendahnya cakupan angkatan kerja yang memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan, pengukuran produktivitas ketenagakerjaan belum dilakukan secara maksimal, persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan masih rendah.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

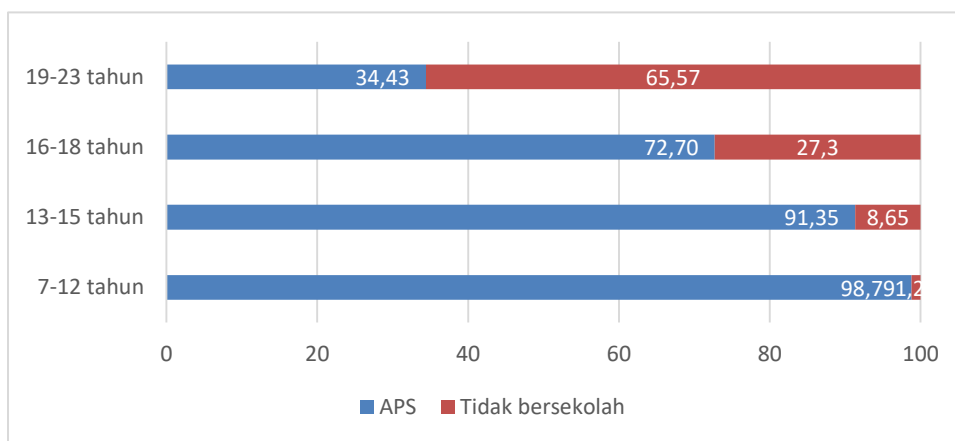
Pendidikan merupakan bagian dalam upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Pendidikan sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar beroleh pengaturan dalam UU 23 Tahun 2014 yang membagi kewenangan berdasarkan jenjang

pendidikan, dimana intervensi pemerintah Provinsi berada pada jenjang pendidikan menengah dan khusus (SMA, SMK, dan SLB). Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan upaya perbaikan, hal ini didorong dengan implementasi berbagai kebijakan dari perbaikan kualitas dan mutu layanan pendidikan.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang mengakses fasilitas pendidikan. Angka Partisipasi Sekolah (APS) tertinggi di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 terdapat pada kelompok umur 7-12 tahun yang merupakan kelompok umur pada jenjang SD/ sederajat sebesar 98,79 persen yang artinya 99 anak sedang menjalani pendidikan.

Grafik 2.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Gorontalo menurut kelompok umur tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

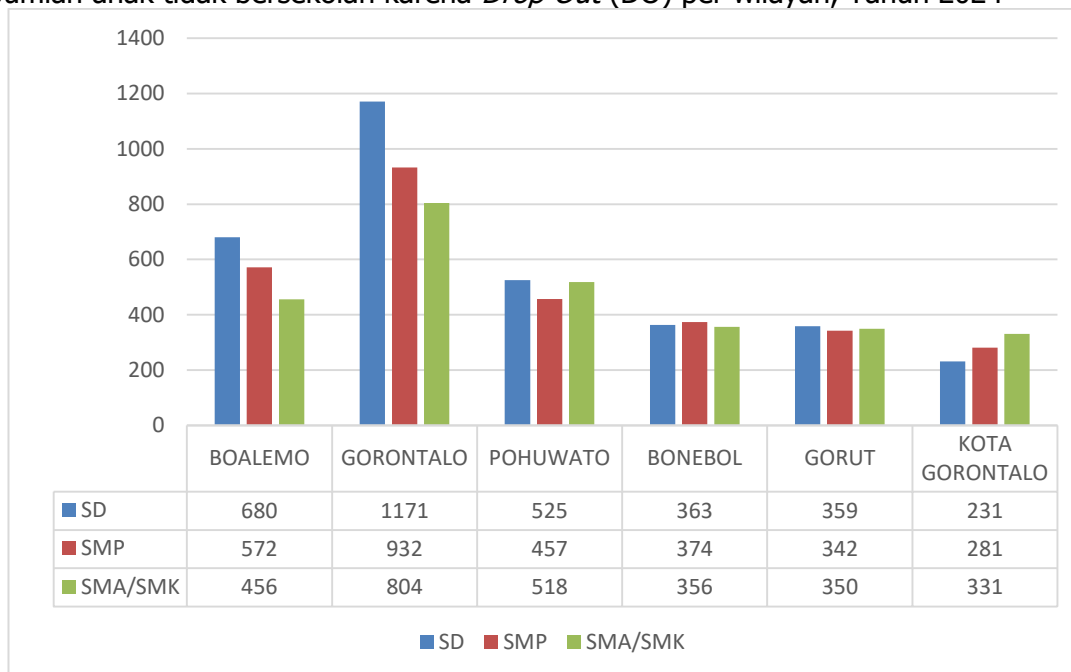
Grafik diatas menunjukkan bahwa semakin meningkat kelompok umur sesuai jenjang sekolah, maka APS semakin rendah. Artinya tidak semua penduduk usia sekolah melanjutkan jenjang Pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Pada kelompok 7-12 tahun masih terdapat 1,21 persen penduduk yang tidak bersekolah dan pada kelompok 13-15 tahun terdapat 8,65 persen penduduk yang tidak bersekolah. Perbedaan terbesar terjadi pada kelompok umur 19-23 tahun yang bersesuaian dengan jenjang perguruan tinggi.

Berdasarkan rapor mutu Pendidikan tahun 2023, APS penyandang disabilitas pada kelompok umur 4-18 tahun sebanyak 33,93%.

Partisipasi penduduk dalam Pendidikan tinggi dapat dipengaruhi oleh banyak factor seperti ketersediaan infrastruktur perguruan tinggi, baik dari sisi jumlah maupun jarak, factor ekonomi dan biaya yang relative tinggi, serta masih adanya anggapan bahwa Pendidikan hingga Tingkat menengah atas sudah cukup untuk mencari kerja.

Grafik 2.22

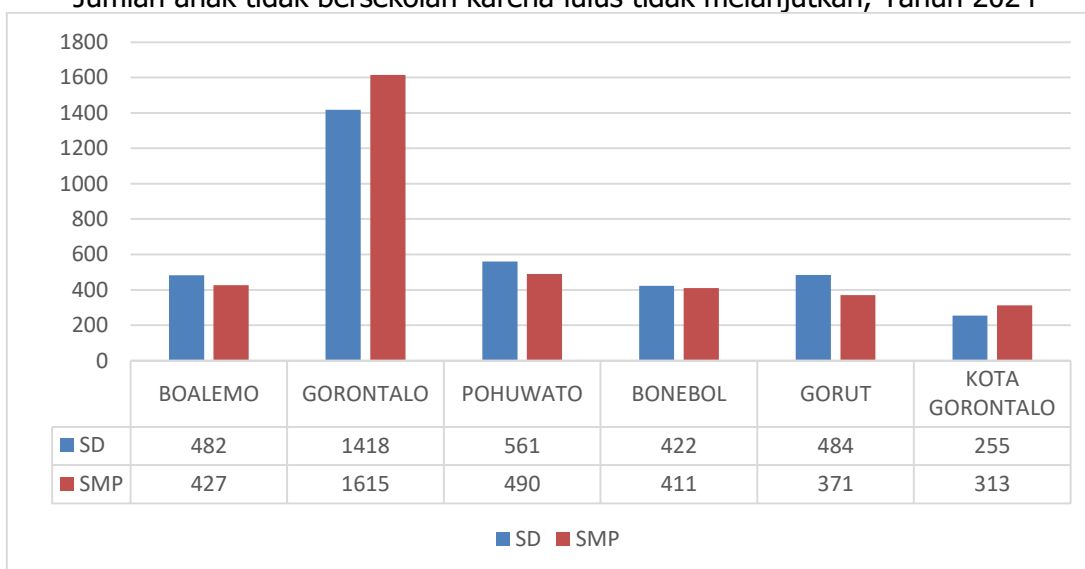
Jumlah anak tidak bersekolah karena *Drop Out* (DO) per wilayah, Tahun 2024



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Grafik 2.23

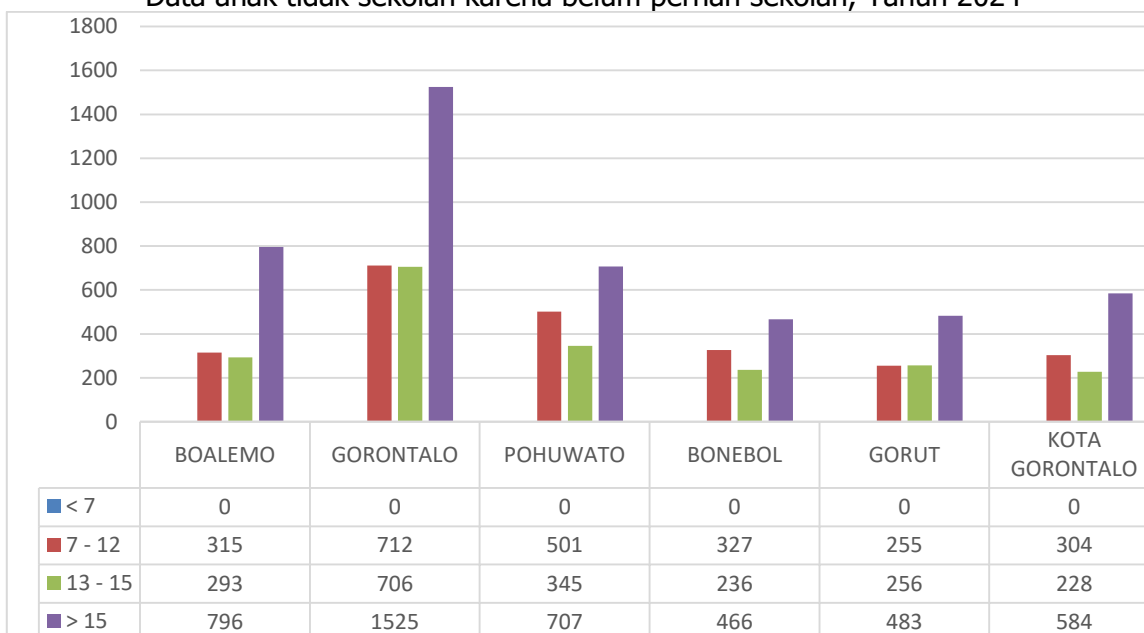
Jumlah anak tidak bersekolah karena lulus tidak melanjutkan, Tahun 2024



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Grafik 2.24

Data anak tidak sekolah karena belum pernah sekolah, Tahun 2024



Sumber: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Dari grafik diatas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo merupakan penyumbang terbesar anak tidak sekolah baik karena DO, tidak melanjutkan sekolah maupun tidak sekolah karena belum pernah bersekolah.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Secara umum, APK digunakan sebagai indicator yang paling sederhana untuk mengukur keberhasilan program Pembangunan Pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam Pendidikan. Sedangkan APM menunjukkan partisipasi Pendidikan penduduk pada Tingkat tertentu yang sesuai dengan umurnya. APM juga dapat melihat penduduk umur sekolah yang bersekolah tepat waktu. Bila dilihat APM akan selalu lebih rendah dari APK karena APK memperhitungkan jumlah penduduk diluar umur sekolah pada jenjang Pendidikan yang bersangkutan.

Tabel.2.21

APK dan APM Provinsi Gorontalo
menurut jenjang Pendidikan (persen) tahun 2024

GORONTALO	SD/ sederajat	SMP/ sederajat	SMA/ sederajat
APK	105,52	82,15	89,80
APM	98,20	72,51	61,23

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2025

Bila disandingkan dengan APK, selisih antara APK dan APM tersebut menunjukkan besaran penyimpangan yang terjadi terhadap batasan usia sekolah pada jenjang yang semestinya (proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah).

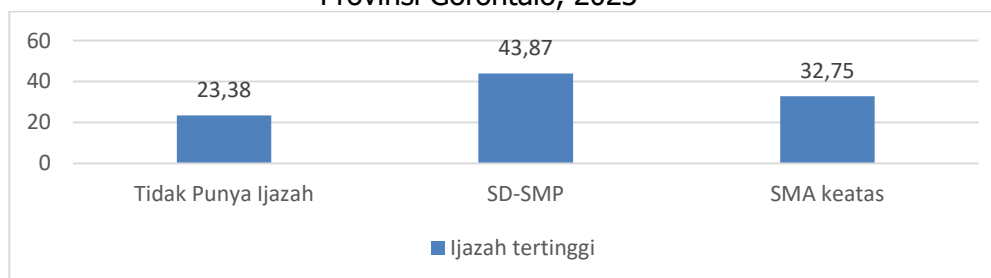
Secara total, hanya APK SD/sederajat yang telah melewati target nasional tahun 2024 dengan capaian 105,52 persen. Sementara itu, APK SMP/sederajat Provinsi Gorontalo baru mencapai 82,15 persen, sedangkan APK SMA/sederajat Provinsi Gorontalo baru sebesar

89,80 persen. APK jenjang perguruan tinggi hampir mencapai target nasional sebesar 45% ditahun 2035 dengan capaian 36,23 persen.

Bila dilihat, APM semua jenjang pendidikan, mulai dari SD/ sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi, belum mencapai angka 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang berumur sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut belum seluruhnya bersekolah sesuai dengan jenjangnya. Nilai APM dari SD/ sederajat sampai dengan Perguruan Tinggi selalu menurun tiap jenjangnya menunjukkan setiap tahunnya jumlah anak dengan usia yang sesuai yang bersekolah ke jenjang yang lebih tinggi selalu berkurang.

Grafik 2.25

Persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah tertinggi yang dimiliki Provinsi Gorontalo, 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Hal tersebut juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Tahun 2023 persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Provinsi Gorontalo terbanyak berada pada kategori SMP ke bawah, yaitu sebesar 76,62 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah masih memiliki porsi yang cukup besar yaitu 23,38 persen.

3. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2024 telah mencapai 13,17 Tahun yang memiliki arti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Gorontalo berpeluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I. Peningkatan harapan lama sekolah tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan partisipasi sekolah di Gorontalo yang artinya bahwa semakin banyak penduduk Gorontalo yang bersekolah.

Tabel 2.

Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024

Wilayah	Harapan Lama Sekolah (tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Boalemo	12,44	12,45	12,46	12,48	12,49
Gorontalo	13,17	13,18	13,19	13,21	13,22
Pohuwato	12,37	12,38	12,39	12,46	12,48
Bone Bolango	13,57	13,65	13,66	13,67	13,69
Gorontalo Utara	12,45	12,46	12,47	12,49	12,50
Kota Gorontalo	14,34	14,50	14,57	14,58	14,59
Provinsi Gorontalo	13,08	13,11	13,12	13,16	13,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

4. Rata-rata Lama Sekolah

Angka Rata-Rata Lama Sekolah (*mean years school/mys*) merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Tetapi jumlah tahun bersekolah ini tidak mengindahkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya.

Angka ini bisa memberikan gambaran secara sederhana pemenuhan penduduk terhadap akses pendidikan. Keterbandingan besaran rata-rata lama sekolah antar wilayah atau waktu, dapat mengetahui perbedaan atau perkembangan tingkat kualitas sumber daya manusia. Angka rata-rata lama sekolah memberikan gambaran tingkat Pendidikan penduduk suatu wilayah.

Tabel 2.21
Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024

Kabupaten/ Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Boalemo	6,82	7,00	7,03	7,30	7,31
Gorontalo	7,13	7,30	7,61	7,79	7,95
Pohuwato	7,12	7,26	7,35	7,59	7,78
Bone Bolango	8,31	8,32	8,33	8,35	8,52
Gorontalo Utara	7,03	7,15	7,16	7,17	7,40
Kota Gorontalo	10,36	10,37	10,39	10,40	10,41
Provinsi Gorontalo	7,82	7,90	8,02	8,10	8,29

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan upaya perbaikan, hal ini didorong dengan implementasi berbagai kebijakan dari perbaikan kualitas dan mutu layanan pendidikan. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah tahun 2024 mencapai 8,29 tahun. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahunnya, rata-rata lama sekolah di Provinsi Gorontalo, masih relatif sama selama 5 tahun terakhir. Rata-rata lama sekolah Provinsi Gorontalo berada pada kisaran 7-8 tahun.

5. Ketersediaan Sekolah, tenaga pendidik dan peserta didik

Keberlangsungan pendidikan tidak lepas dari ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, utamanya adalah ketersediaan sekolah yang memadai dan terjangkau. Berdasarkan data BPS Provinsi Gorontalo tahun 2024, Provinsi Gorontalo telah memiliki fasilitas pendidikan mulai dari Taman kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi namun yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi hanya pada jenjang SMA/SMK/MA dan SLB.

Tabel 2.24

Jumlah sekolah, guru dan murid SMA, SMK dan SLB tahun 2024 menurut Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo

Kabupaten/ Kota	SMA			SMK			SLB		
	Jumlah Sekolah	Jumlah guru	Jumlah murid	Jumlah Sekolah	Jumlah guru	Jumlah murid	Jumlah Sekolah	Jumlah guru	Jumlah murid
Boalemo	20	580	10.104	15	425	35.569	1	33	121
Gorontalo	9	360	5.683	7	455	5.640	2	50	264
Pohuwato	12	286	3.840	10	237	1.959	2	41	144
Bone Bolango	8	248	3.504	12	226	1.786	1	30	98
Gorontalo Utara	11	219	3.943	6	227	1.609	1	14	295
Kota Gorontalo	11	260	4.203	9	111	682	1	28	81
Provinsi Gorontalo	71	1.953	31.277	59	1.681	47.245	8	196	1.003

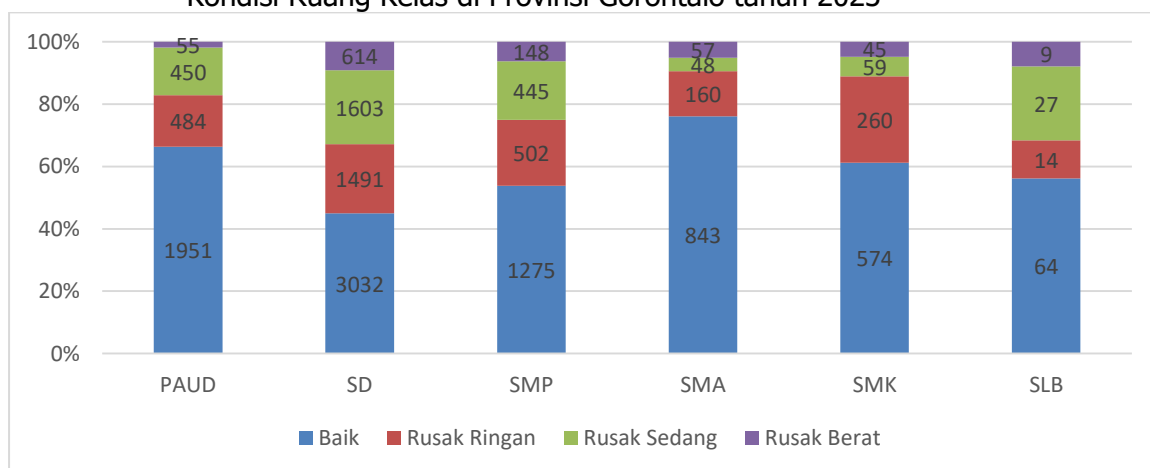
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah 2024)

Dari tabel diatas menunjukkan belum optimalnya penyelenggaraan layanan pendidikan terutama pada jenjang pendidikan khusus.

Pelaksanaan pendidikan ditunjang dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah, dan ruang kelas yang memadai. Tidak hanya masalah ketersediaan, aksesibilitas juga menjadi fokus perhatian pembangunan dibidang pendidikan dalam rangka peningkatan angka partisipasi sekolah. Peningkatan kapasitas pendidikan, pembangunan serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan khususnya didaerah terpencil dan sulit dijangkau penting dalam memperluas akses layanan pendidikan, agar semua anak didik dapat mengenyam pendidikan dan khususnya dapat memberantas buta huruf.

Grafik 2.26

Kondisi Ruang Kelas di Provinsi Gorontalo tahun 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa lebih dari separuh ruang kelas SD yang ada di Provinsi Gorontalo dalam kondisi rusak (ringan, sedang, berat). Sebanyak 3.708 ruang kelas SD tidak dalam kondisi yang baik (kurang layak digunakan untuk proses belajar mengajar) dari 6.740 ruang kelas yang tersedia. Sedangkan ruang kelas untuk jenjang SMA sebagian besar dalam kondisi yang baik.

6. Rasio Guru

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2023 rasio siswa per kelas SMA/MA sebesar 1 : 31 dan untuk SMK rasio sekolah 1 : 20. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 31 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 20 peserta didik. Data ini menunjukkan bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan.

7. Rasio Murid

Selain sarana dan prasarana, ketersediaan dan pemerataan distribusi guru penting menjadi perhatian. Ketersediaan guru juga menjadi faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Data Neraca Pendidikan Daerah tahun 2023 sebanyak 2.006 pendidik guru SMA, 1.706 pendidik guru SMK dan sebanyak 363 tenaga didik SMA, 278 tenaga didik SMK yang tersebar di kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo, dengan perbandingan rasio guru per siswa SMA/MA tahun 2023 sebesar 1:31, sementara rasio guru per siswa SMK 1 : 19. Ketersediaan guru tidak hanya dilihat dari aspek kuantitasnya, melainkan yang menjadi fokus pemerintah provinsi adalah tingkat sebaran, dan tingkat kesejahteraan guru khususnya guru yang mengabdikan di daerah sulit dijangkau, agar pelaksanaan pemerataan kualitas maupun layanan pendidikan juga dapat lebih maksimal.

Indikator keberhasilan pendidikan digambarkan dari capaian Indeks SPM Pendidikan, untuk Provinsi Gorontalo hasil rapor pendidikan 2023 menunjukkan capaian sebesar 62,23% atau kategori "Tuntas Muda". Berikut ini persentase capaian per indikator dalam raport mutu pendidikan.

Tabel 2.25
Persentase Capaian Indikator Rapor Mutu Pendidikan, tahun 2023

Indikator Prioritas	SMA umum	SMK Umum	SDLB	SMPLB	SMALB
Kemampuan Literasi	62.17	55.11	22.21	33.32	4.34
Kemampuan Numerasi	58.71	52.95	16.67	33.32	34.78
Penyerapan Lulusan SMK		73.16			
Kepuasan Dunia Kerja terhadap kompetensi lulusan		75.55			
Kualitas Pembelajaran	62.79	61.1	61.78	57.88	57.88
Iklm Keamanan Satpen	71.09	69.48	60.88	55.59	58.53
Iklm Kebhinekaan	73.95	71.79	65.43	59.21	62.64
Iklm Inklusivitas	55.75	54	50.64	49.46	51.31

Sumber : Rapor Mutu Pendidikan , 2023

Berdasarkan data diatas beberapa indikator yang perlu beroleh perhatian antara lain: Kemampuan literasi dan numerasi khususnya pada jenjang pendidikan khusus, kualitas pembelajaran pada seluruh jenjang, iklim keamanan Satpen dan iklim kebhinekaan khususnya pada jenjang SMP LB dan SMA LB, Iklim Inklusivitas pada semua jenjang kecuali SMA Umum, Proporsi Guru Penggerak yang diangkat menjadi kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah serta Angka Partisipasi Sekolah jenjang pendidikan menengah dan khusus yang masih rendah.

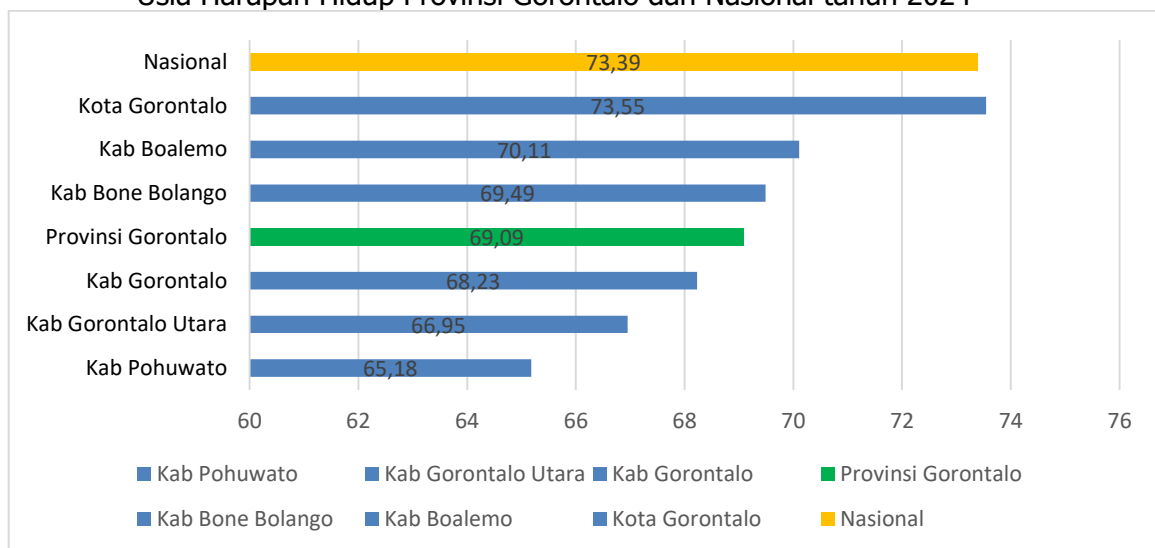
b. Kesehatan

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan sangat penting untuk memiliki kualitas yang baik. Sebagai upaya untuk mencapai hal tersebut, arah kebijakan sektor kesehatan diarahkan pada upaya promotif, preventif maupun kuratif melalui peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas, aspek kesehatan dasar, edukasi pencegahan, kesadaran lingkungan dan pola hidup sehat.

1. Usia Harapan Hidup

Secara umum tingkat keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi dapat dilihat dari peningkatan Usia Harapan Hidup (UHH). UHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dalam 5 tahun terakhir, Usia Harapan Hidup penduduk Provinsi Gorontalo menunjukkan trend peningkatan. Tahun 2020 sebesar 68,07 menjadi 69,09 tahun ditahun 2024. Peningkatan UHH ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Gorontalo.

Grafik 2.27
Usia Harapan Hidup Provinsi Gorontalo dan Nasional tahun 2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah) 2024

Hingga tahun 2024 Usia Harapan Hidup di Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan dan masih berada dibawah rata-rata Nasional. Terdapat 5 Kabupaten yang memiliki angka Usia Harapan Hidup dibawah angka Nasional yaitu Kab

Boalemo, Kab Bone Bolango, Kab Gorontalo, Kab Gorontalo Utara dan Kab Pohuwato, 3 diantaranya berada dibawah angka Provinsi.

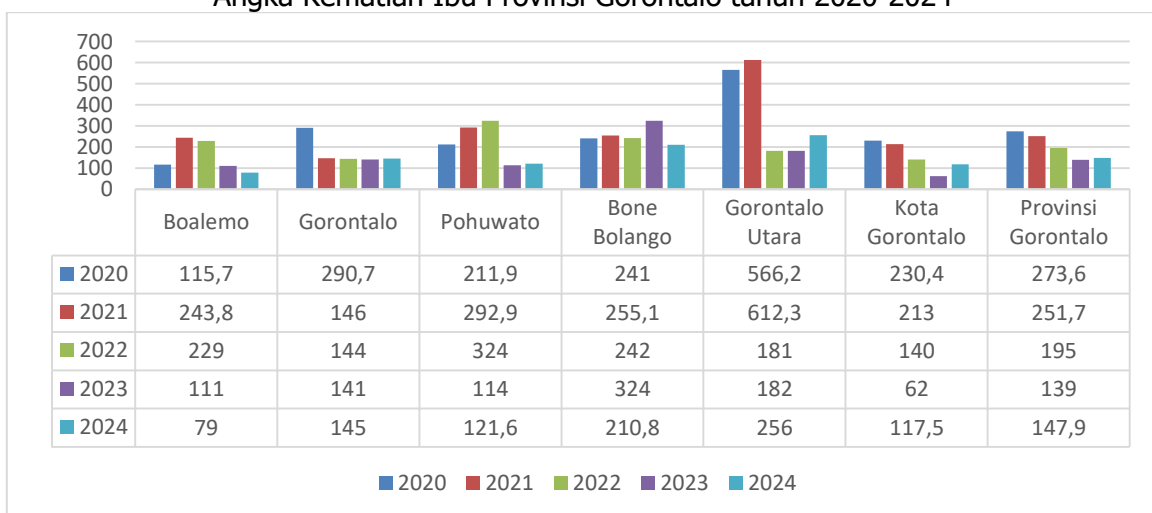
Faktor lain yang mempengaruhi Usia Harapan Hidup adalah faktor sosial ekonomi. Keterbatasan pendapatan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab kemiskinan yang seringkali mengakibatkan keterbatasan akses terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas dan makan yang bergizi.

2. Angka Kematian Ibu

Indikator untuk menetapkan derajat kesehatan masyarakat di suatu wilayah salah satunya adalah Angka Kematian Ibu (AKI)/ *Maternal Mortality Ratio* (MMR). Apabila di suatu wilayah memiliki tingkat AKI yang cenderung tinggi maka dapat meningkatkan pembiayaan pemeliharaan sosial seperti biaya pelayanan kesehatan dan biaya yang disebabkan pendapatan yang menurun serta keproduktifan suatu keluarga. Selain untuk menilai program kesehatan ibu, indikator ini juga mampu menilai derajat kesehatan masyarakat karena sensitivitasnya terhadap perbaikan pelayanan kesehatan, baik dari sisi aksesibilitas maupun kualitas.

Tingginya kematian maternal di suatu wilayah pada dasarnya menggambarkan derajat kesehatan masyarakat yang rendah dan dapat menyebabkan penurunan ekonomi dan sosial pada rumah tangga ibu maupun sekitarnya. Angka Kematian Ibu (AKI) yaitu banyaknya kematian perempuan pada saat hamil, saat melahirkan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain (seperti terjatuh, kecelakaan, dll), per 100.000 kelahiran hidup. Angka kematian ibu juga dapat menunjukkan tingkat kesehatan dan kualitas perempuan di suatu wilayah.

Grafik 2.28
Angka Kematian Ibu Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2024

Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup (KH) Provinsi Gorontalo dalam 5 tahun terakhir masih fluktuatif. Pada Tahun 2024, capaian AKI mencapai 147,9 naik dibanding tahun 2023 yaitu sebesar 139 per 100.000 Kelahiran Hidup yang menunjukkan

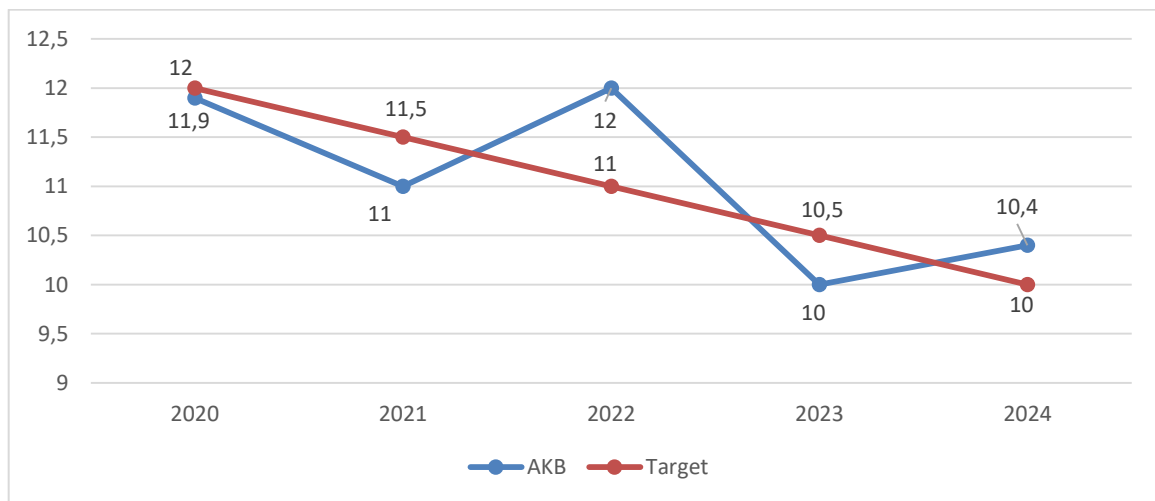
bahwa dalam 100.000 kelahiran hidup terdapat 139 ibu yang meninggal dunia. Angka ini masih berada di bawah angka rata-rata nasional, jika dibandingkan dengan angka kematian ibu nasional pada tahun 2024 yakni sebesar 183/100.000 KH. Target ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024.

Pada tingkat kabupaten/kota, dapat dilihat bahwa Kabupaten Gorontalo Utara menjadi wilayah dengan AKI tertinggi, sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Boalemo. Kondisi ini mencerminkan bahwa kualitas pelayanan ibu yang belum memadai, kondisi ibu hamil yang tidak sehat dan faktor determinan lainnya. Penyebab utama kematian ibu masih tetap perdarahan selain hipertensi dalam kehamilan dan perdarahan *post partum* juga komplikasi jantung dan paru yang masih menjadi masalah.

3. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting yang menggambarkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. AKB Provinsi Gorontalo tahun 2024 mencapai 10,4 per 1.000 KH di Provinsi Gorontalo naik 0,4% dari tahun sebelumnya. Gambaran Angka Kematian Bayi Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 2.29
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup
Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2024

Intervensi langsung Pemerintah Provinsi dalam upaya menekan AKI, AKB dan percepatan penurunan stunting yaitu melalui Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak, yaitu dengan Screening anemia remaja putri, Konsumsi tablet tambah darah pada remaja putri, Pemeriksaan kehamilan, Konsumsi tablet tambah darah pada ibu hamil, Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK, Pemantauan tumbuh kembang balita, ASI Eksklusif, Pemberian makanan tambahan protein hewani bagi baduta, Tata laksana balita

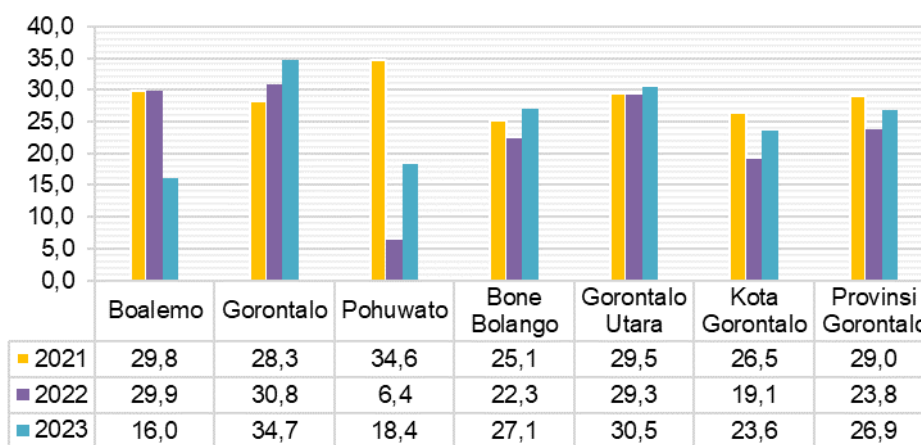
dengan masalah gizi, Peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi serta Edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita.

4. Prevalensi Stunting

Stunting pada anak-anak mencerminkan efek yang luas dari kekurangan gizi yang kronis dan menderita penyakit berulang yang disebabkan oleh latar belakang sosial dan ekonomi yang buruk. Stunting pada anak-anak dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak, dan bukti menunjukkan bahwa efek dari stunting pada usia muda, khususnya pada perkembangan otak, sulit untuk memperbaikinya pada usia lanjut walaupun jika anak menerima gizi yang tepat. Selain itu anak yang mengalami stunting beresiko lebih besar menderita penyakit menular dan tidak menular pada usia dewasa seperti jantung, diabetes, dan penyakit pembuluh darah. Oleh karena itu, indikator ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya memberikan gizi yang cukup untuk anak-anak.

Grafik 2.30

Prevalensi Status Gizi Balita menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, SKI 2023



Sumber : Survei Kesehatan Indonesia, 2023

Angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 berdasarkan SKI sebesar 26,9%, mengalami kenaikan sebesar 3,1% dibandingkan tahun 2022 dan masih berada di atas angka rata-rata prevalensi nasional. Jika dilihat berdasarkan urutan per provinsi, Provinsi Gorontalo berada pada urutan 26 dari 34 provinsi. Jika dilihat pada tingkat kabupaten/kota, hanya Kabupaten Boalemo yang mengalami penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2023 dan menjadi wilayah dengan angka prevalensi terendah se- Provinsi Gorontalo, sedangkan Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan angka prevalensi tertinggi.

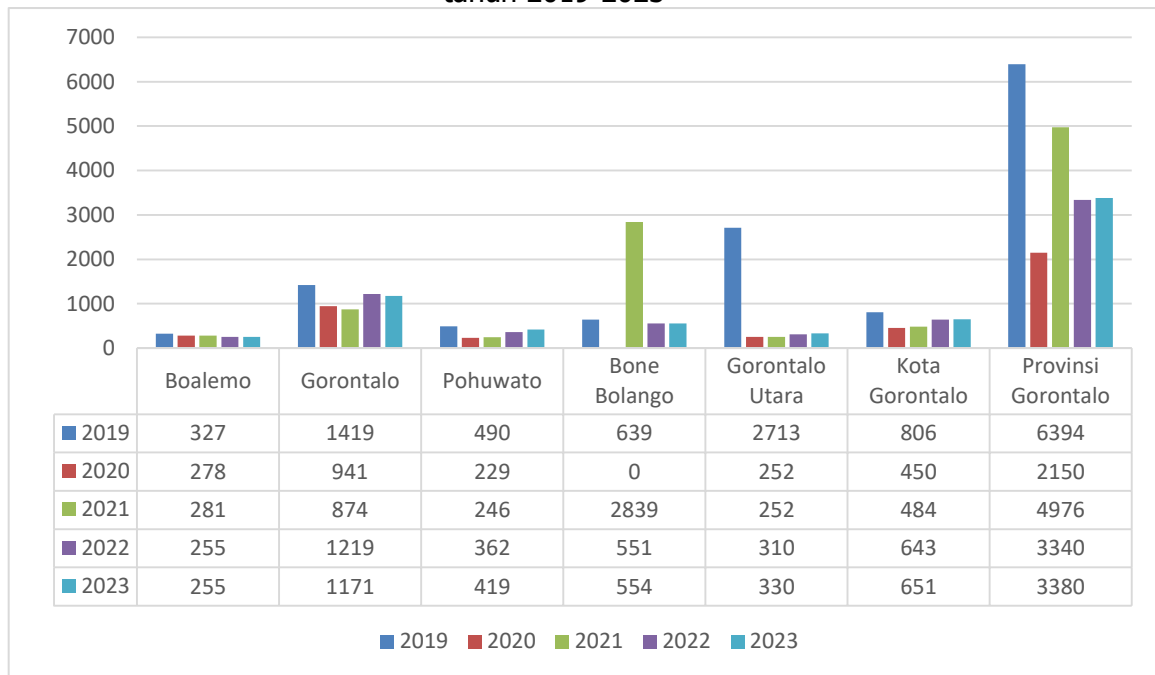
5. Insidensi Tuberculosis

Untuk kondisi penyakit tidak menular di Provinsi Gorontalo sesuai data Riskesdas, Provinsi Gorontalo menduduki peringkat 2 (dua) nasional penyakit jantung, sementara kanker di urutan ke-3 tertinggi nasional. Adapun penyakit ginjal nomor 4 nasional disusul stroke dan hipertensi urutan ke-6 nasional dan diabetes melitus di urutan ke 8. Bahkan

persentase merokok pada penduduk Umur \geq 15 Tahun sejak 2015 diatas rata-rata nasional. Hal ini tentunya memerlukan perhatian yang intens dari pemerintah dan masyarakat agar penambahan usia harapan hidup dibarengi juga dengan kondisi 327Kesehatan yang baik.

Grafik 2.31

Jumlah kasus Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk di Provinsi Gorontalo, tahun 2019-2023



Sumber : Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2024

Angka Insidensi TB Provinsi Gorontalo dalam rentang waktu 5 tahun terakhir terus mengalami penurunan, meskipun di tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Dari 531,7/100.000 penduduk di tahun 2019, menjadi 275,6/100.000 penduduk di tahun 2023. Artinya jumlah kasus Tuberculosis di Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan Dimana dari 100.000 penduduk, terdapat 275 penduduk yang mengalami tuberculosis. Jika dilihat berdasarkan Kabupaten/Kota, Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan jumlah kasus tuberculosis tertinggi di Provinsi Gorontalo dengan jumlah 1.171 orang dan terendah di Kabupaten Boalemo dengan jumlah 255 orang.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberculosis (*treatment coverage*) di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 67% sedangkan angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (*treatment success rate*) berada diangka 92%. Tingginya angka insiden tuberkolosis di Gorontalo mengindikasikan masih tingginya risiko penduduk terjangkit tuberkulosis. Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi salah satu cara untuk mengurangi tuberkulosis di masyarakat.

6. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo adalah program kesehatan yang prima diantaranya meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Gorontalo meraih prestasi terbaik kelima secara nasional untuk kategori provinsi dengan jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai *Universal Health Coverage (UHC)* atau cakupan kesehatan menyeluruh. Hingga Juli 2024 jumlah peserta JKN di Gorontalo sebanyak 1.201.443 jiwa atau mencapai 97,1 persen dari total penduduk Gorontalo.

Tabel 2.27
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Kabupaten/ Kota	2019 target UHC 95%		2020 target UHC 95%		2021 target UHC 95%		2022 target UHC 95%		2023 target UHC 95%		2024 target UHC 98%	
	Total Peserta		Total Peserta		Total Peserta		Total Peserta		Total Peserta		Total Peserta	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Boalemo	133.681	91	111.598	75,3	115.679	77,95	147.941	99,28	145.704	96,81	148.331	97,84
Gorontalo	369.167	92.8	329.812	82.2	363.415	89.77	364.376	89.86	404.817	97.45	407.598	97.45
Pohuwato	137.862	94.1	108.795	73.8	119.960	79.31	151.473	98.73	150.072	95.19	153.433	95.78
Bone Bolango	161.860	98.5	145.729	87.9	173.699	104.03	167.440	99.88	162.189	95.25	165.832	96.25
Gorontalo Utara	122.101	97.2	102.373	81.2	104.868	83.42	109.592	86.82	124.036	96.17	125.907	96.55
Kota Gorontalo	188.522	94.2	193.033	96.0	199.599	99.01	198.816	98.36	197.016	96.95	200.342	97.99
Provinsi Gorontalo	1.147.103	97.7	991.340	83.3	1.077.220	89.86	1.139.638	94.7	1.183.834	96.6	1.201.443	97.1

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo

7. Indeks Kualitas Keluarga

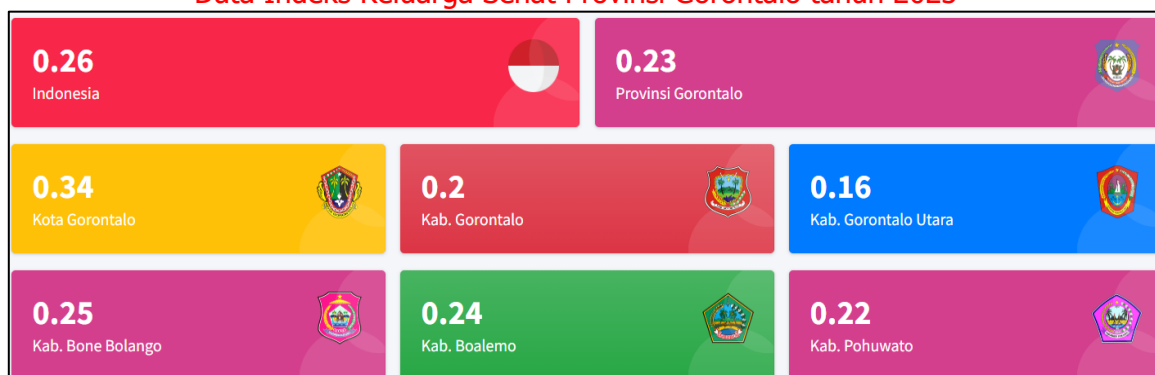
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan ukuran yang baru di kembangkan pada tahun 2023 untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemudian menjadi ukuran juga di daerah dalam mendukung pencapaian nasional.

Capaian Indeks Kualitas Keluarga di Provinsi Gorontalo di tahun 2023 sebesar 78,08 naik dari tahun sebelumnya yaitu 77,03. Dari Capaian Indeks Kualitas Keluarga nasional tahun 2023 sebesar 77 mengalami kenaikan dari tahun 2022 yaitu 76,08. Namun dalam capaian komponen IKK Provinsi Gorontalo terdapat 3 dimensi pembentuk IKK yang masih buruk yaitu: Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Catatan terkait capaian 3 dimensi yang buruk adalah terkait PoU (Prevalensi Kurang Gizi) untuk semua umur mengalami peningkatan, rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi

mengalami penurunan, rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan mengalami penurunan, rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah mengalami peningkatan, rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja mengalami penurunan, rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir juga mengalami penurunan.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Sementara itu, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator lain yang digunakan untuk mengukur kesehatan masyarakat. AHH adalah perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang pada suatu populasi tertentu. Indikator ini dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kematian dan kelahiran.

Gambar 2.23
Data Indeks Keluarga Sehat Provinsi Gorontalo tahun 2023



Sumber : Dashboard Data Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2023

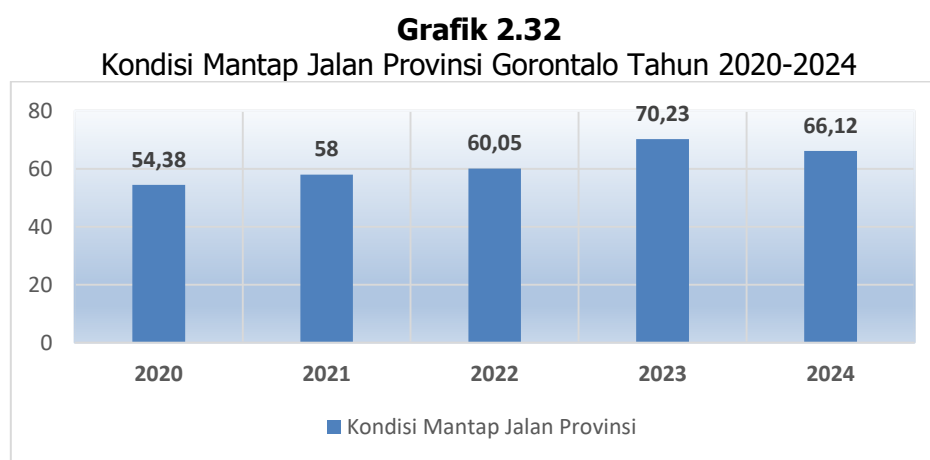
Berdasarkan data di atas capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Gorontalo masih berada di bawah capaian nasional dengan nilai 0,23. Capaian tertinggi ditempati oleh Kota Gorontalo dengan skor 0,34 , Kab Bone Bolango 0,25 dan Kab Boalemo 0,24. Daerah yang masih di bawah peringkat Provinsi adalah Kab Gorontalo dengan skor 0,2, Kab Gorontalo Utara 0,16 dan Kab Pohuwato 0,22.

c. Pekerjaan Umum

1. Jalan dan Jembatan

Infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar 66,12 persen, menurun dibanding tahun 2023 sebesar 70,23 persen. Sedangkan untuk kondisi mantap Jalan Nasional mencapai 95,27 persen dari total panjang jalan kewenangan Nasional di Provinsi Gorontalo 716,26 Km.



Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2024

Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu kondisi Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat. Tahun 2019 panjang jalan dengan kondisi baik yaitu sebesar 197,02 Km atau 42,17 persen. Selanjutnya tahun 2023 dari total panjang jalan kewenangan Provinsi sebesar 467 Km kondisi jalan baik meningkat mencapai 302,736 Km atau sebesar 64,72%.

Tabel 2.28
Panjang Jalan Provinsi Gorontalo berdasarkan

Kategori Jalan	Panjang Jalan KM (%)				
	2019	2020	2021	2022	2023
BAIK	185,47 Km (39,70%)	217,6 Km (46,58%)	256,2 Km (54,84%)	231,85 Km (49,63%)	302,36 Km (64,72%)
SEDANG	37,27 Km (7,98%)	36,46 Km (7,80%)	11,39 Km (2,44%)	48,90 Km (10,47%)	15,41 Km (3,30%)
RUSAK RINGAN	56,48 Km (12,09%)	101,66 Km (21,76%)	51,83 Km (11,09%)	29,69 Km (6,35%)	12,09 Km (2,59%)
RUSAK BERAT	187,95 Km (40,23%)	111,45 Km (23,86%)	147,75 Km (31,63%)	156,74 Km (33,55%)	137,31 Km (29,39%)

Sumber : Dinas Pekerjaan Provinsi Gorontalo, 2024

Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan tingkat peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya meningkat rata-rata 0,12 persen pertahun.

2. Sumber Daya Air dan Irigasi

Ketersediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi sangat mempengaruhi perkembangan sektor pertanian. Luas lahan sawah irigasi di Provinsi Gorontalo dibedakan berdasarkan kewenangan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat kewenangan, yaitu:

- a) Kewenangan pusat dengan luas lahan sawah > 3.000 ha. Sampai dengan tahun 2022 sudah terdapat 4 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat dengan total luas sebesar 22.371 Ha.
- b) Kewenangan provinsi dengan luas lahan sawah antara 1.000 – 3.000 ha. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 7 DI. Dengan total luasan sebesar 10.313 Ha.
- c) Kewenangan kabupaten dengan luas lahan sawah < 1.000 ha. Total luas DI. Kewenangan Kabupaten sebesar 17. 892 Ha.

Lahan sawah terdiri dari lahan sawah irigasi dan lahan sawah non irigasi. Sebagian besar lahan sawah di Provinsi Gorontalo merupakan lahan sawah irigasi. Pada tahun 2019 luas sawah irigasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 2.420 ha. Pada tahun 2023 luas lahan sawah di Provinsi Gorontalo sebesar 33.131 ha, yang terdiri dari luas sawah irigasi sebesar 25.572 Ha, dan luas sawah non irigasi sebesar 4.015 Ha.

3. Air Minum dan Sanitasi

Akses terhadap air minum dan pelayanan dasar merupakan prioritas nasional dan daerah, dan hal itu sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Hingga tahun 2022 rumah tangga di Provinsi Gorontalo yang mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, meskipun masih di bawah target nasional. Walaupun akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun di Provinsi Gorontalo. Meskipun angka proyeksi pada tahun 2030 menyatakan bahwa akses terhadap sumber air minum layak sudah universal, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman dan sistem persediaan air perpipaan. Akses Air Minum Layak 100% pada tahun 2024 dan 2030. Akses terhadap air minum aman ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2024 dan 43,15% pada tahun 2030. Sementara itu, akses terhadap sistem persediaan air perpipaan ditargetkan mencapai 30,54% pada tahun 2024, dan 53,94% pada tahun 2030.

Tabel 2.

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Air Minum Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Boalemo	94,85	94,21	95,14	95,41	95,37
Gorontalo	95,56	95,11	96,80	94,81	96,20
Pohuwato	87,21	93,19	95,93	96,05	96,20
Bone Bolango	96,73	93,72	94,87	98,50	96,05
Gorontalo Utara	87,55	86,23	89,47	90,14	90,71
Kota Gorontalo	97,43	99,62	100	99,86	99,37
Provinsi Gorontalo	94,16	94,57	96,16	96,00	96,13

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Provinsi Gorontalo selama 2020-2024 meningkat dari 94,16% menjadi 96,13%. Namun cakupan dari cadangan air yang dikelola secara aman masih rendah. Jumlah rumah tangga dengan kriteria air minum aman 8,3% pada tahun 2023. Akses air minum perpipaan di 24,12% pada tahun 2023. PDAM merupakan satu-satunya perusahaan yang berperan dalam menyalurkan air bersih di Provinsi Gorontalo. Jumlah pelanggannya pun kian meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Upaya pemenuhan air bersih di Provinsi Gorontalo diupayakan melalui peningkatan kapasitas produksi air bersih, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber bahan baku lainnya, serta pengoptimalisasian sistem distribusi air bersih khususnya di kawasan perkotaan. Pengembangan prasarana air bersih akan lebih difokuskan pada penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini 3,84% dari target nasional belum terlayani jaringan air bersih di Provinsi Gorontalo yaitu dengan adanya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota (SPAM Regional Gorontalo Raya). Intervensi yang kuat, seperti penyediaan air minum, dapat berkontribusi sebesar 70% terhadap pencegahan stunting. Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya ini merupakan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang untuk saat ini direncanakan melayani 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan pekerjaan pembangunan dilakukan 4 (empat) tahap. Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya masih pada tahapan perencanaan persiapan pembangunan berupa telah disusunnya dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (Risgam) dan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) air minum pada tahun 2022, tahapan selanjutnya adalah proses pengadaan tanah, sebagai upaya pencapaian pemerintah provinsi dalam Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya.

Senada dengan akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkungan. Khususnya, kurangnya akses terhadap sanitasi layak akan menurunkan kualitas air dan berpengaruh terhadap meningkatkan prevalensi stunting pada anak-anak dengan koefisien korelasi sebesar 0,66 (Riskesdas, 2013). Selain akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap sanitasi yang aman juga

merupakan bagian dari agenda 2030. Akses terhadap sanitasi layak 90% pada tahun 2024 dan 100% pada tahun 2030. Akses terhadap sanitasi aman ditargetkan mencapai 20% dan menurunkan BABS hingga 0% pada tahun 2024 dan 53,71% pada tahun 2030.

Tabel 2.

Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sanitasi Layak menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo, 2020-2024

Kabupaten/ Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Boalemo	63,19	68,82	74,62	69,91	73,11
Gorontalo	78,18	76,82	75,14	80,56	82,32
Pohuwato	66,03	76,20	78,32	82,42	82,04
Bone Bolango	77,22	73,57	76,75	78,15	79,99
Gorontalo Utara	71,80	79,03	81,80	81,37	84,07
Kota Gorontalo	87,61	92,9	92,09	94,48	93,89
Provinsi Gorontalo	75,68	78,58	79,82	81,72	82,99

Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2025

Jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan sanitasi di Provinsi Gorontalo cenderung meningkat pada tahun 2020 ke tahun 2024, yaitu dari 75,68% menjadi 82,99%. Sementara itu Ketersediaan sanitasi layak untuk memenuhi rumah sehat juga semakin meningkat karena kesadaran masyarakat untuk hidup sehat juga semakin tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan kewenangannya berusaha menyediakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat. Sebagai upaya dalam pengelolaan dan pengembangan SPALD Regional, pada tahun 2023 telah dianggarkan Penyusunan Dokumen Rencana Induk SPALD Provinsi Gorontalo serta kegiatan koordinasi Bersama *stakeholder* terkait dan penguatan kelembagaan Pokja PKP.

d. Perumahan Rakyat dan Permukiman

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo, maka pertumbuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat juga akan mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan pokok mendasar di kalangan masyarakat. Untuk menanggapi masalah tersebut tentu masyarakat berusaha memperbaiki kondisi permukimannya relatif besar. Akan tetapi karena berbagai keterbatasan dari tingkatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan tanah serta Prasarana Sarana Umum (PSU) seringkali mengakibatkan kondisi permukiman yang tidak memenuhi syarat. Akibatnya di satu sisi telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi namun di sisi lain pertumbuhan kawasan kumuh dan tidak layak huni juga semakin meningkat.

Dalam rangka penuntasan kawasan kumuh sebagaimana mendukung program pemerintah melalui program 100, 0, 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak). Untuk menurunkan luasan kawasan kumuh di Provinsi

Gorontalo, ditangani melalui kegiatan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh seluas 26 Ha dari target 19 Ha Kawasan kumuh ditahun 2023 dengan beberapa program antaranya Pembangunan Rumah Plus Jamban, Advokasi Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat, Fasilitasi Pokja PKP dan Penanganan Fisik Kawasan Kumuh. Tahun 2023 luas Kawasan Kumuh di Provinsi Gorontalo direview kembali oleh masing-masing Kabupaten Kota sebagaimana SK yang ditetapkan yakni 459 Ha. Sehingga Rencana Pembangunan Daerah akan menangani 37 kawasan yang terdapat dalam SK bupati/walikota terbaru dengan luas total keseluruhan kawasan tersebut adalah 459 Ha. Saat ini tahun 2024 sedang dilakukan pemutakhiran SK kawasan kumuh dengan melihat intervensi penanganan di tahun – tahun sebelumnya, proses pemutakhiran sedang di verifikasi oleh Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo Kementerian PUPR RI.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin keamanan dan ketertiban. Semakin maju dan berkembangnya suatu wilayah, dan semakin terbukanya akses informasi maka tingkat kejahatan dimasyarakat semakin meningkat, sehingga hal ini menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan. Pemerintah hadir dalam memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat hidup aman dan nyaman, salah satunya diukur melalui seberapa besar penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk provinsi Gorontalo, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya mencapai 51,72 persen di tahun 2020.

Pembangunan keamanan dan ketertiban juga diarahkan pada upaya untuk mendorong kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah.

Tabel 2.29
Jumlah Kejahatan yang dilaporkan menurut Kepolisian Resort di Provinsi Gorontalo, Tahun 2020-2024

Kepolisian Resort	Jumlah kejahatan yang dilaporkan				
	2020	2021	2022	2023	2024
Polres Boalemo	269	235	267	252	341
Polres Gorontalo	780	563	557	549	503
Polres Pohuwato	401	338	356	441	403
Polres Bone Bolango	335	352	383	296	309
Polres Gorontalo Utara	147	638	197	203	211
Polres Kota Gorontalo	786	224	616	728	620
Polda Gorontalo	251	242	296	441	437
Provinsi Gorontalo	2.969	2.592	2.672	2.910	2.824

Sumber : Gorontalo Dalam Angka, BPS 2024

Berdasarkan data tahun 2020-2024, dapat dilihat bahwa jumlah kejadian kejahatan di Provinsi Gorontalo setiap tahun cenderung mengalami fluktuatif. Tahun 2024 sebanyak 2.824 kejahatan yang dilaporkan menurun dari tahun sebelumnya. Menurunnya jumlah kejadian kejahatan, berbanding lurus dengan menurunnya tingkat resiko kejahatan dari 240 tahun 2023 menjadi 230 per 100.000 penduduk di tahun 2024. Sedangkan capaian persentase penyelesaian tindak pidana pada rentang waktu 2020-2024, rata-rata persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Gorontalo masih mulai meningkat yakni sebesar 74%. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sulawesi, jumlah kejadian kejahatan di Provinsi Gorontalo ditahun 2023 berada pada posisi ke-9 tertinggi setelah Sulawesi Tenggara.

Tingginya komitmen pemerintah dalam membangun demokrasi dan politik Indonesia harus didukung oleh data empirik yang dapat dijadikan sebagai landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Bahkan saat ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan salah satu indikator di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) 2015-2030. Capaian IDI Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 79,71 berada diatas IDI Nasional sebesar 79,51 namun berada dibawah IDI Pusat sebesar 83,14. Capaian kinerja demokrasi Provinsi Gorontalo tersebut masih berada pada kategori sedang (berkisar antara 60-80). Sementara itu, IDI Provinsi Gorontalo tercatat berada di posisi ke-12 diantara 34 provinsi di Indonesia.

Berdasarkan hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama pada periode 2020-2024 terjadi fluktuasi, tahun 2021 mencapai 71,9. Capaian ini menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara, dalam menjalankan agama, serta bekerja sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

f. Sosial

Pembangunan bidang kesejahteraan sosial adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari usaha untuk mencapai tujuan pembangunan. Sasaran utama pembangunan Kesejahteraan Sosial adalah meningkatnya perlindungan social bagi Masyarakat. Dalam upaya meningkatkan perlindungan social masyarakat Provinsi Gorontalo melaksanakan berbagai program kegiatan diantaranya melalui program perlindungan dan jaminan sosial, program pemberdayaan social dan program rehabilitasi sosial.

Dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, dilakukan melalui Program perlindungan dan jaminan social melalui kegiatan pemberian bantuan sosial pangan kepada 451.196 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo di tahun 2024. Sedangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan usaha produktif melalui pemberian bantuan sosial Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Upaya preventif lainnya melalui Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek). Program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun, juga berupaya menjamin jika terjadi risiko kehilangan pekerjaan yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja. Mengambil hikmah dampak pandemi Covid-19 yang mengancam jiwa pekerja dan menghantam ekonomi pekerja, peran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yakni memberikan perlindungan kepada pekerja dengan nilai manfaat yang diterima dapat digunakan untuk melanjutkan kehidupan pekerja ataupun keluarganya. Oleh karena itu BPJS Ketenagakerjaan harus terus memperluas cakupan kepesertaan untuk pekerja Indonesia, meningkatkan kecepatan dan akses pelayanan serta terus berinovasi untuk memberikan perlindungan yang maksimal sehingga meningkatkan kesiapan pekerja untuk menghadapi pasar kerja di masa depan serta mengangkat keluarga dari perangkap kemiskinan.

Tabel 2.30
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi

Kabupaten/Kota	Kepesertaan Aktif, Juni 2024				
	Potensi	Pencapaian	%	Sisa	%
Boalemo	53.249	20.162	37,86	33.087	62,14
Gorontalo	125.569	87.388	69,59	38.181	30,41
Pohuwato	64.811	32.172	49,64	32.639	50,36
Bone Bolango	102.316	66.054	64,56	36.262	35,44
Gorontalo Utara	38.088	12.834	33,70	25.254	66,30
Kota Gorontalo	82.335	45.521	55,29	36.814	44,71
Provinsi	466.368	264.131	56,64	202.237	43,36

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan, 2024

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa pekerja yang sudah menjadi peserta Jamsostek sebesar 264.131 jiwa dari 466.368 total pekerja yang menjadi potensi. Capaian ini menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan Jamsostek Provinsi Gorontalo baru berkisar 56,64% dan masih terdapat 43,36% pekerja yang belum menjadi peserta Jamsostek. Capaian ini juga masih cukup jauh dari target *Universal Coverage* Provinsi Gorontalo di tahun 2025 yakni sebesar 85%.

Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang diikuti Peraturan Pemerintah No. 52 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Konteks kesejahteraan sosial tersebut di atas juga menyiratkan bahwa hak-hak penyandang disabilitas untuk dapat hidup layak dan berpartisipasi dalam masyarakat dilindungi dan harus dipenuhi oleh pemerintah dan masyarakat. Penyandang disabilitas seperti halnya masyarakat lainnya yang berada dalam kondisi memerlukan bantuan dan dukungan, berhak mendapatkan layanan yang dapat di akses oleh mereka dengan mudah sebagai warga negara Indonesia.

Dampak disabilitas dapat menjadi sebuah fenomena yang kompleks dimana ketika kebutuhan individu dengan keterbatasan fungsi tidak dapat terakomodasi oleh lingkungannya (menjadi hambatan), kondisi ini akan menghambat partisipasi penyandang disabilitas. Tingkat partisipasi yang rendah memiliki implikasi terhadap angka kemiskinan yang selanjutnya dapat meningkatkan risiko penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diperlukan pemenuhan hak berupa pelayanan sosial untuk mengeliminasi hambatan agar penyandang disabilitas dapat memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya serta dapat berpartisipasi di masyarakat.

Tabel 2.31
Persentase Penyandang Disabilitas yang bekerja di sektor Formal dan Informal

Kabupaten/ Kota	Jumlah disabilitas bekerja	Formal*	%	Informal*	%
Boalemo	1.240	368	29,7	872	70,32
Gorontalo	2.822	903	32,0	1.919	68,00
Pohuwato	1.032	307	29,7	725	70,25
Bone Bolango	929	245	26,4	684	73,63
Gorontalo Utara	862	234	27,1	628	72,85
Kota Gorontalo	680	259	38,1	421	61,91
Provinsi	7.565	2.316	30,6	5.249	69,39

Sumber: REGSOSEK (Analisis SEPAKAT), 2022

***Sektor Formal:** Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, Buruh/karyawan/pegawai swasta, PNS/TNI/Polri/BUMN/BUMD/anggota legislatif

***Sektor Informal:** Berusaha sendiri, Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, Pekerja bebas pertanian, Pekerja bebas non-pertanian, Pekerja keluarga/tidak dibayar

Sebanyak 69% penyandang disabilitas (1,37 juta orang) bekerja di sektor informal. Mayoritas pekerja difabel (penyandang disabilitas) bekerja di sektor informal karena kerap ditolak sektor formal lantaran latar belakang pendidikan mereka. Cukup banyak penyandang disabilitas yang bekerja di sektor pertanian dan pedesaan, bekerja sendiri atau menjadi pekerja temporer, bahkan tidak dibayar. Penyandang disabilitas lebih banyak yang bekerja tidak jauh dari tempat bekerja, dan cukup banyak yang bekerja di rumah.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

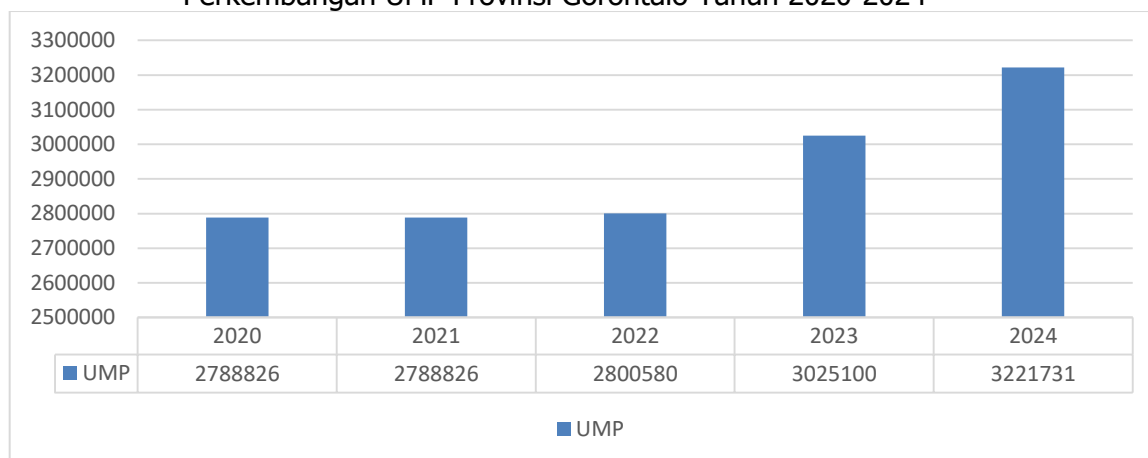
a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan mempunyai korelasi positif yang cukup erat terhadap suksesnya proses pembangunan. Sektor ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran. Dalam pengembangan potensi tenaga kerja, diperlukan pengembangan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas potensi tenaga kerja, diantaranya melalui penyediaan lapangan kerja, penciptaan usaha kecil dan menengah yang memberdayakan potensi daerah, penyiapan tenaga kerja siap pakai untuk penempatan di perusahaan pengguna, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan kerja, yang didukung dengan sistem Informasi Pasar kerja yang memadai, maka akan tercipta kesempatan kerja dan perluasannya. Untuk menghadapi tantangan di atas, maka perlu kebijakan dalam pembangunan ketenagakerjaan yang proaktif dan menyeluruh.

Tingkat pendidikan dapat mengindikasikan kualitas dan produktivitas tenaga kerja. Dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka ia akan mampu menghasilkan pekerjaan yang lebih baik atau lebih produktif. Penyerapan tenaga kerja hingga Agustus 2024 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan SMP ke bawah sebanyak 58,43% (47,67% pekerja berpendidikan SD atau belum/tidak tamat sekolah; 10,76% pekerja berpendidikan SMP sederajat). Kondisi seperti ini juga terjadi pada periode-periode sebelumnya di mana penduduk bekerja di Provinsi Gorontalo mayoritas mengenyam pendidikan SMP ke bawah. Namun demikian, persentase pekerja berpendidikan SMP kebawah menunjukkan tren yang menurun menunjukkan perbaikan kualitas pekerja di Gorontalo. Hal ini diikuti oleh peningkatan pekerja berpendidikan di atasnya. Serapan tenaga kerja pada jenjang pendidikan SMA dan SMK sebesar 20,13% dan 8,39%, dan 13,04% pekerja sudah menamatkan pendidikan jenjang diploma dan perguruan tinggi.

Untuk penjaminan hak-hak tenaga kerja, setiap perusahaan di daerah Provinsi Gorontalo diwajibkan untuk mengikuti asuransi Jamsostek, dan tunduk pada peraturan pemerintah daerah termasuk penentuan upah minimum provinsi (UMP). Upah Minimum Provinsi ditetapkan melalui SK Gubernur Gorontalo Nomor 446/32/XI/2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Gorontalo. Dalam SK Penetapan UMP tersebut, menetapkan UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2024 sebesar Rp 3.221.731 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 3.025.100.

Grafik 2.33
Perkembangan UMP Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2024



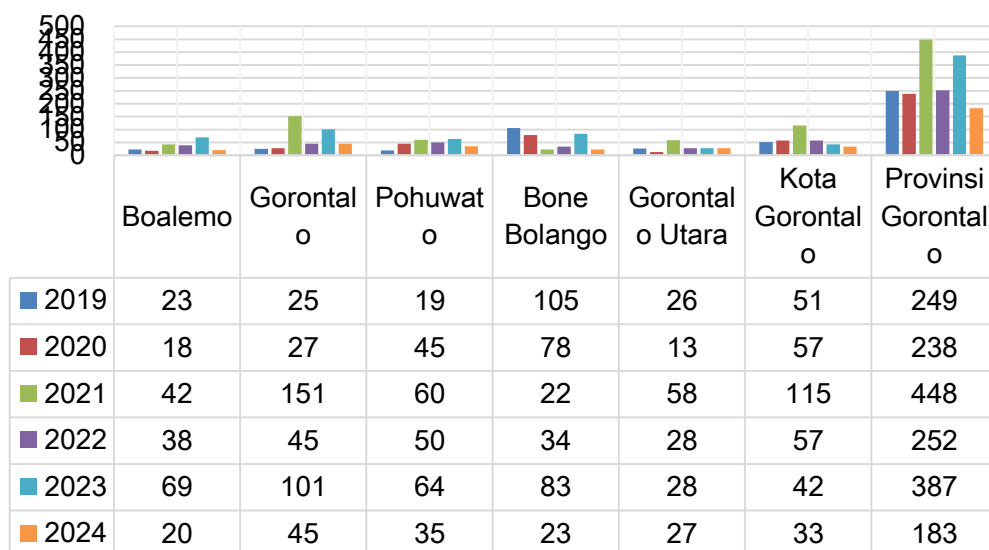
Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo, 2024

b. Perlindungan Perempuan dan Anak

Kebijakan Pembangunan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diarahkan pada peningkatan peran perempuan dalam berbagai strata kehidupan dan peningkatan perlindungan terhadap anak melalui Peningkatan keterampilan dan pengetahuan perempuan; Peningkatan kesetaraan gender; Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak dan Peningkatan kelembagaan perempuan dan perlindungan anak, dalam rangka peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan hak-hak perempuan dan anak.

Grafik 2.34

Jumlah Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak di Provinsi Gorontalo tahun 2019-2024



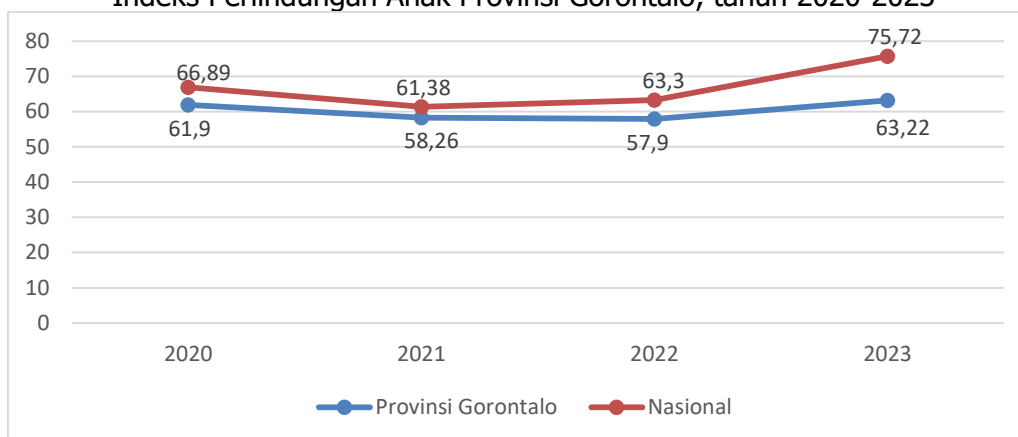
Sumber: SIMFONI, Kemen PPPA, 2024
*Data Tahun 2024 per Oktober

Berdasarkan data 5 (lima) tahun terakhir, jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi dan fluktuatif setiap tahunnya, dimana jumlah kekerasan tertinggi terjadi di tahun 2021 dengan 448 kasus kekerasan. Pada tahun 2024 berdasarkan data bulan oktober, tercatat bahwa jumlah kekerasan di Provinsi Gorontalo mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023, dimana Kabupaten Gorontalo menjadi wilayah dengan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Gorontalo dengan mayoritas kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak adalah kekerasan fisik dan seksual.

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan anak merupakan isu yang krusial dalam pembangunan. Dalam upaya untuk mencapai generasi emas, perlindungan dan pemenuhan atas hak anak sangat menentukan kualitas generasi penerus pembangunan. Untuk melihat perkembangannya, Indeks Pelindungan Anak (IPA) digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur pembangunan perlindungan anak dengan memperhatikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Grafik 2.35

Indeks Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo, tahun 2020-2023



Sumber: Kementerian PPA RI, 2024

Tingginya kasus – kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak. Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan Pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui Indeks Perlindungan Anak. Berdasarkan data dari KemenPPA Gorontalo termasuk dalam 3 Provinsi Indonesia yang delta pertumbuhannya menurun yaitu Papua dan Nusa Tenggara Timur sehingga diperlukan perhatian khusus untuk isu ini terutama di Kabupaten Boalemo yang pada 2023 memiliki capaian indeks terendah se Provinsi Gorontalo yaitu 49,74.

Terdapat 5 klaster pembentuk indikator ini yaitu klaster I Hak Sipil dan kebebasan, Klaster II Lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif, Klaster III Kesehatan dasar dan kesejahteraan, Klaster IV Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klister ke V adalah perlindungan khusus.

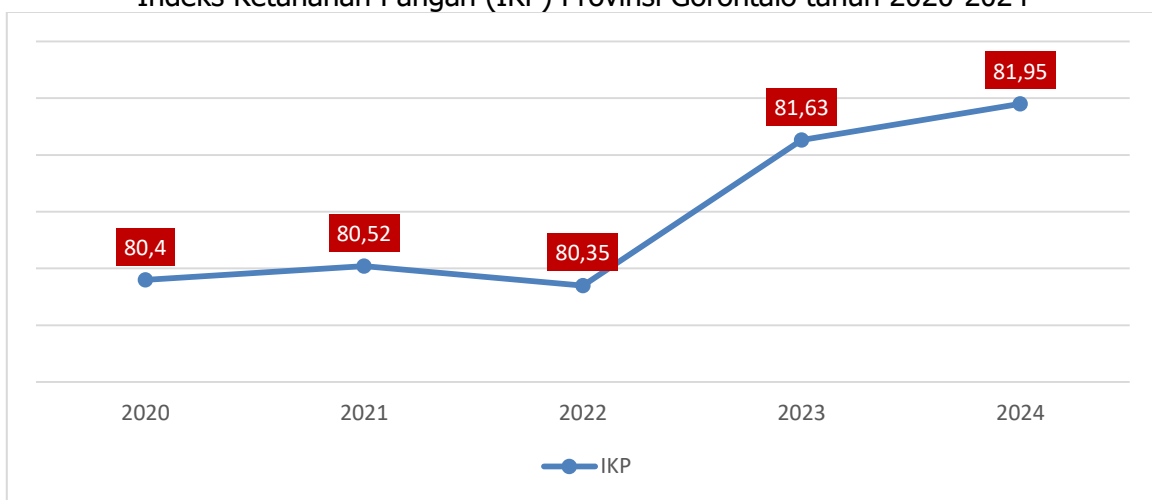
Provinsi Gorontalo memiliki nilai yang rendah pada klaster IV yaitu sebesar 26,10 pada tahun 2022. Klaster IV terdiri atas 5 indikator yaitu (1) persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak sekolah, (2) persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia, (3) persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar), (4) persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler dan (5) persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni.

Berdasarkan wilayah, tahun 2022 Kota Gorontalo menjadi daerah yang memiliki persentase tertinggi untuk IPA yaitu 80,94 persen berada diatas rata-rata provinsi. Kabupaten Boalemo adalah daerah yang memiliki persentase terendah yaitu 49,74 persen. Selain Kabupaten Boalemo, terdapat 2 daerah lainnya yang memiliki persentase dibawah rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Pohuwato (54,96) dan Kabupaten Gorontalo Utara 58,10 persen.

c. Pangan

Pemenuhan pangan yang cukup dan terjangkau untuk setiap kalangan merupakan hak setiap orang. Salah satu wujud bentuk kepedulian pemerintah terhadap isu pangan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Upaya ini tentunya sejalan dengan tujuan pertama dan kedua dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu mengakhiri kelaparan mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendukung pertanian berkelanjutan. Untuk mengetahui tingkat ketahanan pangan digunakan indikator Indeks Ketahanan Pangan yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.

Grafik 2.36
Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024



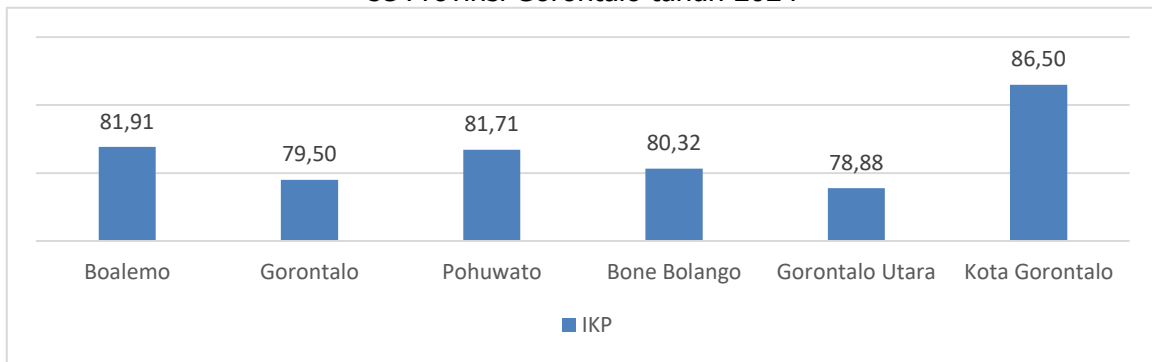
Sumber: Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan, 2024

Berdasarkan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2024, Provinsi Gorontalo kembali menunjukkan pencapaian positif dalam sektor ketahanan pangan dengan nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada periode 2023-2024, ketahanan pangan di Gorontalo tercatat berada di atas angka 81%, sebuah angka yang menggambarkan kemajuan signifikan.

Analisis ketahanan pangan tahun 2024, hasil FSVA menunjukkan tidak ada lagi kecamatan di Kabupaten se-Provinsi Gorontalo yang masuk dalam kategori rentan pangan. Hal ini menjadi indikasi bahwa program-program ketahanan pangan yang dilaksanakan telah berjalan dengan baik, dengan pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih merata di seluruh wilayah.

Skor IKP pada level Kabupaten/Kota di Gorontalo juga bervariasi. Pada tahun 2024, wilayah dengan Indeks Ketahanan Pangan tertinggi adalah Kota Gorontalo. Sedangkan wilayah dengan Indeks Ketahanan Pangan terendah adalah Kabupaten Gorontalo Utara. Penyebab rendahnya nilai IKP antara lain produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang), prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Penanganan kerentanan pangan yang komprehensif perlu diprioritaskan pada daerah tersebut sesuai dengan faktor penyebabnya.

Grafik 2.37
Skor Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota se Provinsi Gorontalo tahun 2024



Sumber: Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan, 2025

Status ketahanan pangan yang berbeda antar wilayah menunjukkan bahwa akses rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan masih belum merata. Salah satu indikator yang menggambarkan situasi kerawanan pangan adalah Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment* (PoU). PoU adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif. PoU pada level nasional pada 2023 mencapai 8,53 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 10,21. Artinya, pada tahun 2023 sekitar 8 dari 100 orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Pola serupa juga terjadi di Provinsi Gorontalo. PoU di Provinsi Gorontalo pada 2023 sebesar 15,10 menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 18,63.

Grafik 2.38
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Provinsi Gorontalo Tahun 2022-2023



Sumber: Badan Pangan Nasional, Indeks Ketahanan Pangan, 2023

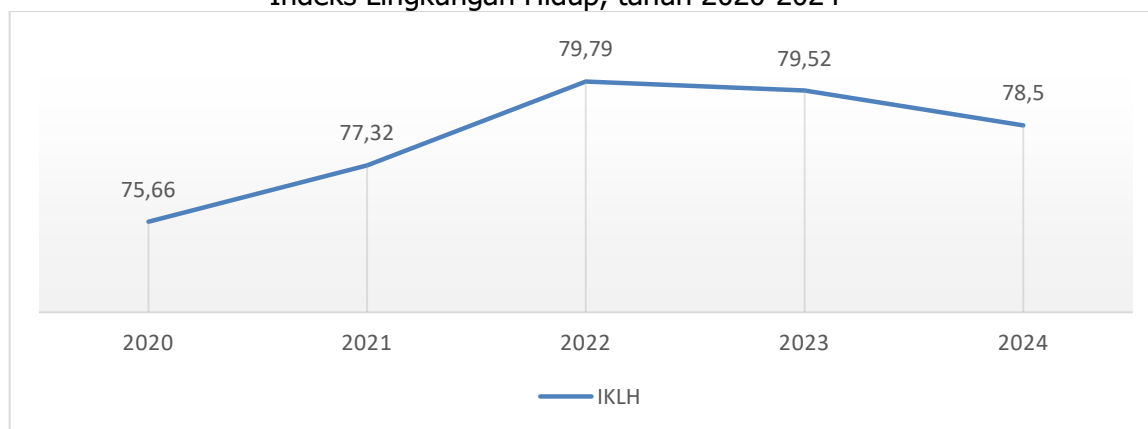
Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa tahun 2023 terdapat sekitar 15 dari 100 orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan energi untuk hidup normal, aktif, dan sehat di Provinsi Gorontalo. Hasil analisis kerawanan pangan Provinsi Gorontalo menunjukkan terdapat 8 karakteristik rumah tangga yang beresiko menyebabkan kerawanan pangan

yaitu kemiskinan, pendidikan tamat SD, Pendidikan Tamat SMP-SMA, Pendidikan Taman PT, Rumah tangga lanjut usia, topografi puncak, kejadian bencana dan tidak ada pasar permanen. Karakteristik terbesar yang beresiko menyebabkan kerawanan pangan di Provinsi Gorontalo yaitu kemiskinan dan pendidikan.

d. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan alat untuk mengukur kinerja setiap daerah dalam melakukan pengelolaan lingkungan. Sesuai dengan RPJMN KLHK Tahun 2020 – 2024 bahwa perhitungan nilai IKLH mengalami perubahan perhitungan, sejak tahun 2020 perhitungan nilai IKLH menambah parameter Indeks Kualitas Air Laut, selanjutnya untuk perhitungan nilai Indeks Kualitas Udara yang semula menggunakan 2 parameter NO₂ dan SO₂, di tahun ini menambahkan nilai PM 2.5, sementara untuk parameter kualitas air yang menjadi parameter kunci untuk perhitungan nilai IKA bertambah dari 7 parameter bertambah menjadi 8 parameter, demikian juga untuk perhitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang keseluruhannya menggunakan hasil perhitungan KLHK sehingga nilai IKTL dan IKAL menggunakan hasil perhitungan IKLH Nasional. Pemantauan kualitas udara di Provinsi Gorontalo masih menggunakan 2 parameter SO₂ dan NO₂, namun untuk kualitas air telah memenuhi parameter yang diperhitungkan saat ini.

Grafik 2.39
Indeks Lingkungan Hidup, tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo 2024

Berdasarkan grafik diatas dapat dilihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Gorontalo cenderung fluktuatif selama 5 tahun terakhir. Tahun 2023 IKLH sebesar 79,52 menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 78,5 namun masih termasuk pada kategori BAIK. Meskipun demikian berdasarkan ketiga indeks komposit pembentuk IKLH, indeks Kualitas Air capaiannya masih sangat rendah yaitu berada pada angka 58,14 atau dengan kategori cemar sedang.

Berbagai masalah yang masih menjadi perhatian dari kualitas lingkungan di Provinsi Gorontalo yaitu kerusakan hutan dan lahan, terumbu karang dan mangroove, kebersihan dan penghijauan kota yang belum merata di setiap Kabupaten/Kota, masih adanya

penambangan emas tanpa izin (PETI), longsor dan banjir yang masih sering terjadi, serta masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Selain itu terjadinya penurunan kualitas air dipermukaan, serta kerusakan dan penurunan kualitas air Danau Limboto. Penurunan kualitas air berdampak pada tingginya sedimentasi, dan proses eutrofikasi atau pencemaran air yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogen dan fosfor di dalam perairan. Permasalahan lainnya yaitu pertumbuhan enceng gondok yang tumbuh semakin tidak terkendali yang menyebabkan pendangkalan danau, selain itu juga pencemaran limbah cair dan padat akibat aktifitas masyarakat di sekitar danau, meningkatnya laju erosi dari di hulu sungai serta meningkatnya aktifitas perikanan Kerambah Jaring Apung (KJA), serta persoalan sampah domestik juga turut mengancam kelestarian danau Limboto.

Danau Limboto merupakan salah satu asset sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo saat ini. Berada dilokasi yang sangat strategis yang membentang pada 2 (dua) wilayah yaitu 30 % di Kota Gorontalo dan 70% di Kabupaten Gorontalo. Danau Limboto sangat potensial sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, pencegah banjir, sumber air pengairan dan obyek wisata. Berdasarkan hasil penelitian total nilai manfaat ekosistem Danau Limboto adalah Rp 581.919.234.588/tahun.

Namun demikian, nilai manfaat Danau Limboto yang sangat besar sangat kontras dengan kondisi danau. Pengukuran yang dilakukan oleh *Laja* pada tahun 2016 dengan menggunakan data citra satelit memotret perubahan luasan danau dan vegetasi air periode 2000-2015. Luas Danau Limboto pada Tahun 2000 sebesar 4.019 ha dan pada Tahun 2015 sebesar 2.943 ha. Selama Tahun 2000-2015 luas Danau Limboto berkurang sebesar 1.076 ha dengan rata-rata penyusutan sebesar 71,73 ha atau 1,79% pertahunnya. Luas penyusutan terbesar terjadi pada bagian barat, timur dan utara danau. Pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau Limboto ± 30 meter dengan luas 8.000 Dalam kurun waktu 52 tahun luas danau limboto berkurang sekitar 4.304 Ha atau 62,60 % dari total luas danau. Tahun 2012-2018 kedalaman danau Limboto hanya $\pm 2,5$ meter dengan luas yang tersisa yaitu ± 2.537 Ha. Berdasarkan luas lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto, data menunjukkan bahwa tahun 2013 luas lahan kategori sangat kritis tahun 2013 sebesar 23.871,48 Ha, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 94.834 Ha.

Seiring dengan makin berkurangnya luasan danau, vegetasi air mengalami perluasan dari 1.148 ha dengan persentase tutupan 28,56% dari luas danau pada Tahun 2000 meningkat menjadi 1.811 ha pada Tahun 2015 dengan persentase tutupan 61,53% dari luas danau Tahun 2015. Selama kurun waktu 15 tahun vegetasi air bertambah 663 ha dengan rata-rata perluasan sebesar 44,2 ha atau 3,85% per tahunnya. Penyebaran vegetasi air pada Tahun 2000 berada disekitar pinggiran danau. Sementara pada Tahun 2015, nampak sebagian vegetasi air sudah menyebar ke tengah danau. Vegetasi air yang menyebar ke tengah danau didominasi oleh eceng gondok.

Selain pelestarian danau Limboto, persoalan di bidang lingkungan hidup lainnya adalah terkait dengan persampahan. Dalam hal penanganan sampah, Pemerintah Provinsi

Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga baik yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Menurut data Sistem Informasi Pengolahan Sampah Nasional (SIPSN), produksi sampah di Gorontalo rata-rata mencapai diatas 30.000 ton pertahun, yang dihitung dari rata-rata buangan sampah pada TPA Talumelito sebagai pembuangan akhir sampah untuk wilayah Kota Gorontalo, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Sementara total laju timbulan sampah untuk seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo mencapai rata-rata 110.715,37 ton/tahun (2019-2023). Tahun 2023 volume sampah mencapai 152.050 ton. Pembangunan Fasilitas limbah B3 di Provinsi Gorontalo saat ini telah terbangun pada tahun 2023 dan untuk pengembangan tempat pengelolaan Limbah B3, seluruh dokumen pendukung baik dokumen DED, Dokumen Lingkungan serta lahan sudah tersedia.

Persentase Rumah Tangga dengan akses sanitasi aman perkotaan dan perdesaan meningkat dari tahun 2020 sebesar 2,98% dan pada tahun 2023 mencapai 4,14%. Kondisi pengelolaan sampah di Provinsi Gorontalo Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah pada tahun 2019 sebesar 125.774,51 ton/tahun dan pada tahun 2023 sebesar 152,050.93 ton/tahun, hal ini menunjukkan bahwa pemilahan sampah di sumber belum maksimal. Pada tahun 2022 Proporsi Rumah Tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah baru sebesar 23% dengan timbulan sampah terkumpul 0,452 ton/hari dimana Daur Ulang Sampah (*Recycling*) hanya sebesar 16,36% dan Residu Sampah di Lahan Urug Residu hanya sebesar 0,20%. Hal ini sangat berpengaruh pada kemampuan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang saat ini sudah tidak memadai.

e. Administrasi dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam dalam bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya pada tata kelola data Kependudukan, sementara pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil menjadi kewenangan ditingkat Kabupaten/kota. Oleh karenanya melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Provinsi Gorontalo melakukan Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil antara lain melalui Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk, Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pencatatan Sipil dan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Penduduk.

f. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

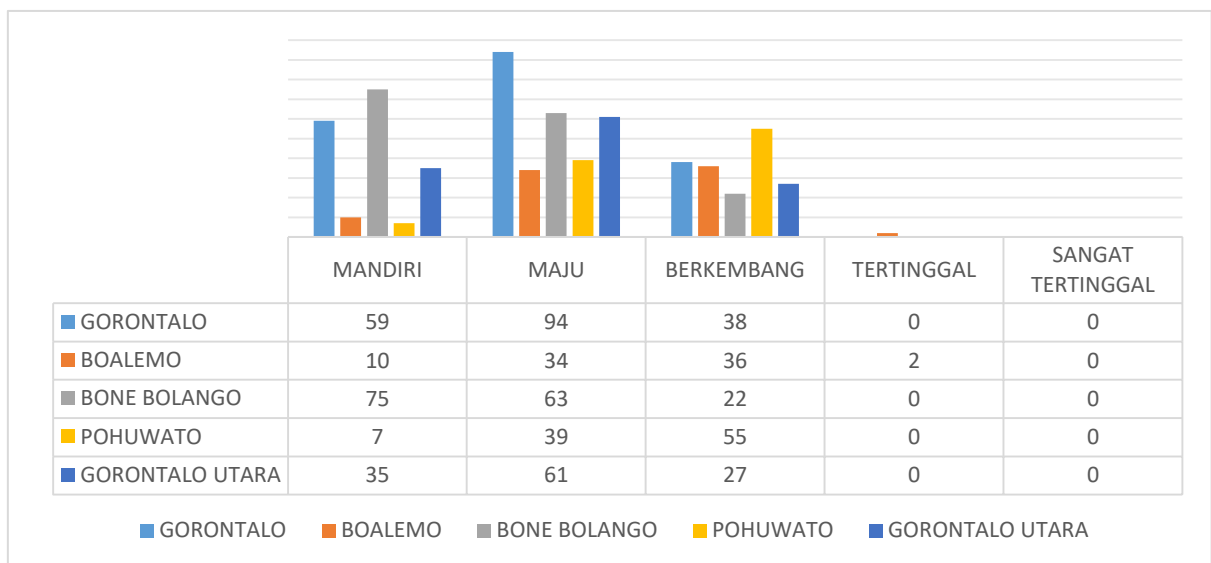
Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu program pemerintah dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada agar dapat berkembang serta dapat membantu proses kemajuan desa. Sasaran pemberdayaan masyarakat dan desa yaitu: Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan dan masyarakat, terwujudnya perkembangan desa dan kelurahan, terwujudnya kelembagaan masyarakat yang berkualitas, serta Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan prima berbasis reformasi birokrasi.

Upaya ini dilakukan melalui program pengembangan desa, Program Peningkatan Kerja sama Desa, Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Berbagai kegiatan yang dilaksanakan diantaranya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Data Kementerian Desa, menunjukkan Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi Gorontalo sejak tahun 2022 tidak ada lagi desa dengan status sangat tertinggal. Secara keseluruhan IDM dengan status mandiri pada tahun 2024 sebanyak 186 desa, desa maju sebanyak 291 desa, desa berkembang menjadi 178 desa, dan desa tertinggal 2 sebanyak desa.

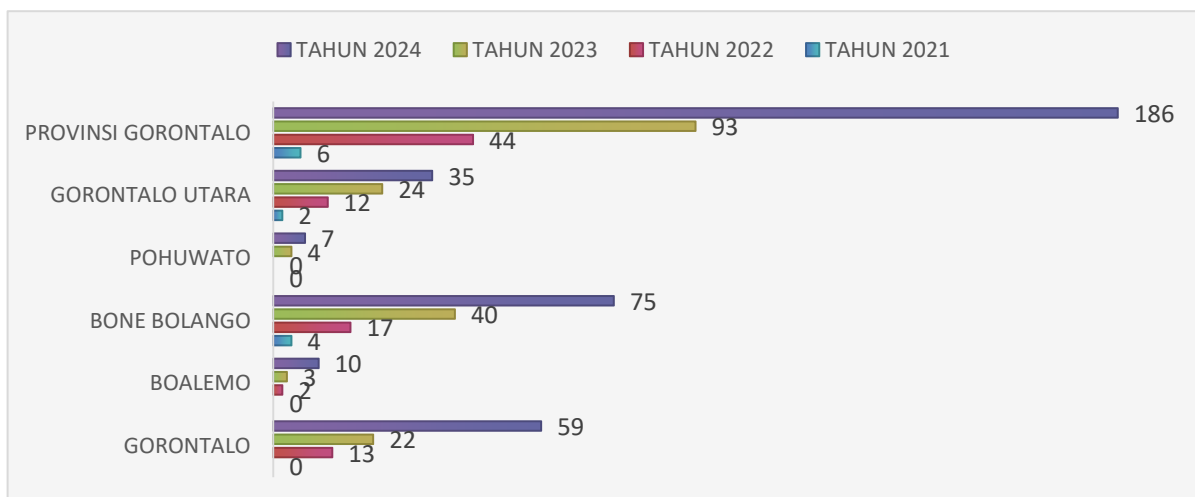
Grafik 2.40
Status IDM Provinsi Gorontalo Per Wilayah Tahun 2024



Sumber : Kementerian Desa dan PDT RI

Grafik 2.41

Data Perkembangan Status Desa Mandiri Provinsi Gorontalo tahun 2021-2024



Sumber : Kementerian Desa dan PDT RI

Berdasarkan grafik di atas, status Desa Mandiri di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejak tahun 2021. Pada Tahun 2021 Capaian status Desa Mandiri tahun Provinsi Gorontalo sebesar 0,91% atau hanya 6 desa dari total jumlah desa di Provinsi Gorontalo yaitu 657, dengan kerja sama dan kolaborasi semua pihak pada tahun 2024 Capaian Desa Mandiri Provinsi Gorontalo meningkat sebesar 27,39% di tahun 2024 menjadi 28,31% yaitu sejumlah 186 Desa.

g. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berbicara mengenai kependudukan, fertilitas dan mortalitas menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Keduanya menjadi salah satu penyebab dinamika perubahan jumlah penduduk. Fertilitas memiliki pengaruh positif terhadap laju pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah kelahiran akan mengakibatkan pertumbuhan penduduk menjadi semakin tinggi. Sedangkan mortalitas berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk. Semakin meningkat jumlah kematian maka pertumbuhan penduduk akan semakin rendah. Fertilitas Provinsi Gorontalo mengalami penurunan yang cukup signifikan dalam 22 tahun terakhir. Angka Kelahiran Total/Total Fertility Rate (TFR) merupakan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan selama masa usia subur (15-49 tahun). Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 angka TFR Provinsi Gorontalo mencapai 2,70 yang artinya rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan sekitar 2-3 anak selama masa reproduksinya. Sementara Long Form SP2020 mencatat TFR Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebesar 2,30 yang berarti rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang perempuan hanya sekitar 2 anak selama masa produksinya.

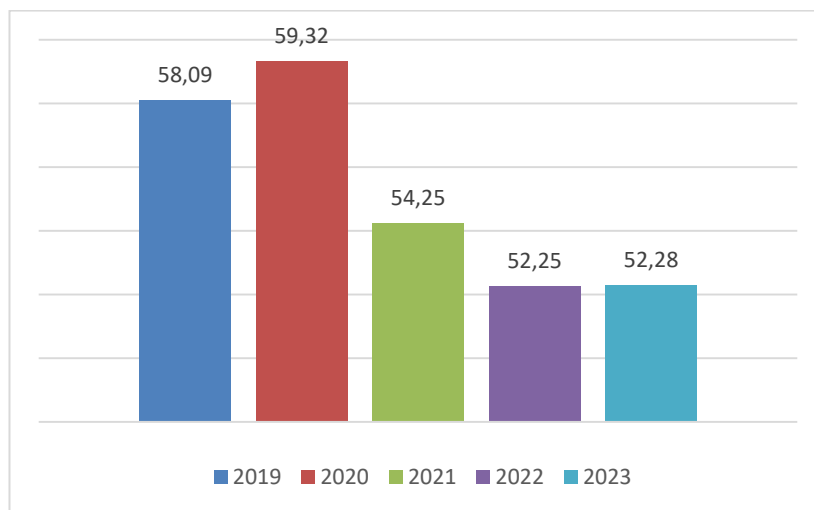
Berdasarkan data Susenas, usia kawin pertama tahun 2022 dari perempuan di Gorontalo masih didominasi oleh perempuan usia 21 tahun ke atas. Usia 19-20 tahun pun masih menduduki posisi yang sama sebagai peringkat kedua yaitu mencapai 23,91%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat untuk tidak menikah muda mengalami peningkatan.

Fenomena fertilitas juga sangat berhubungan dengan program pembatasan anak dan jarak kelahiran dalam keluarga. Partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah menangani masalah kependudukan adalah berupa kesadaran masyarakat untuk menyukseskan program Keluarga Berencana (KB). Salah satu tujuan program ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak, serta mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pengaturan jarak kelahiran.

Grafik 2.42

Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun dan Berstatus Pernah Kawin yang sedang Menggunakan Alat/Cara KB di Provinsi Gorontalo, 2019-2023



Sumber : Statistik Kesejahteraan Rakyat 2022, BPS Provinsi Gorontalo, 2023

Program tersebut dapat dilihat dari penggunaan alat KB oleh pasangan. Persentase wanita berumur 15-49 tahun berstatus kawin yang menggunakan alat KB mengalami peningkatan menjadi 52,28% tahun 2023 dari 52,25 pada tahun 2022. Dalam jangka panjang, peningkatan penggunaan alat KB akan berdampak pada penurunan angka kepadatan penduduk, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dan lain sebagainya. Berdasarkan alat atau cara penggunaan KB, jenis KB suntikan masih menjadi alat kontrasepsi yang paling banyak digunakan di tahun 2023 dengan persentase pengguna sebesar 43,15%, angka ini meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 41,19%. Selain KB Suntikan, susuk KB juga banyak digunakan dengan persentase pengguna sebesar 28,56% di tahun 2023. Manfaat implementasi KB sangat berdampak baik dari segala bidang. Selain dapat meningkatkan status kesehatan ibu dan anak dan mengurangi risiko kematian bayi, KB juga mampu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga jarak kelahiran dapat direncanakan dengan matang. Dari segi ekonomi, KB juga mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga karena dengan jumlah anak yang sedikit dapat menjamin anak menikmati fasilitas kesehatan dan pendidikan yang lebih berkualitas.

h. Perhubungan

Dalam pengembangan suatu wilayah untuk mendukung sektor-sektor yang lain, pembangunan infrastruktur jaringan transportasi mempunyai peran penting. Ketersediaan aksesibilitas ataupun keterjangkauan pelayanan infrastruktur transportasi dapat lebih mempererat dukungan antar wilayah maupun pemerataan pembangunan wilayah.

Transportasi Laut

1. Pelabuhan Gorontalo

Jumlah kapal yang keluar masuk melalui Pelabuhan Gorontalo pada tahun 2023 tercatat sebanyak 840 unit. Jumlah ini mengalami penurunan sebesar 8,1 persen dibandingkan jumlah kapal pada tahun 2022 yang sebanyak 914 unit.

Sepanjang tahun 2023, jumlah penumpang yang naik kapal melalui Pelabuhan Gorontalo tercatat sebanyak 34.588 orang, meningkat 39,98 persen dibandingkan dengan tahun 2022 yang sebanyak 24.710 orang. Peningkatan juga terjadi pada jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Gorontalo tahun 2023 dibandingkan tahun 2022. Dalam rentang tahun 2023, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Gorontalo tercatat sebanyak 42.402 orang atau 52,6 persen lebih banyak dibandingkan penumpang tahun 2022 yang berjumlah 27.787 orang.

Pada tahun 2023, kegiatan bongkar barang di Pelabuhan Gorontalo mengalami penurunan sebesar 86,14 persen, dari 690.435 ton pada tahun 2022 menjadi 95.663 ton pada tahun 2023. Searah dengan itu, barang yang dimuat di Pelabuhan Gorontalo juga turun dengan persentase sebesar 92,10 persen dari 228.443 ton pada tahun 2022 menjadi 18.046 ton pada tahun 2023.

2. Pelabuhan Kwandang

Pada tahun 2023, jumlah kapal yang keluar masuk Pelabuhan Kwandang mengalami peningkatan sebesar 38,69 persen dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 168 unit pada tahun 2022 menjadi 233 unit di tahun 2023.

Banyaknya penumpang yang naik kapal melalui Pelabuhan Kwandang tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 31,57 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 1.115 orang pada tahun 2022 menjadi 1.467 orang pada tahun 2023. Searah dengan hal tersebut, jumlah penumpang yang turun di Pelabuhan Kwandang juga meningkat 27,70 persen dibandingkan tahun sebelumnya yaitu dari 722 orang pada tahun 2022 menjadi 922 orang pada tahun 2022.

Kegiatan bongkar dan muat barang di Pelabuhan Kwandang pada tahun 2023 mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 26,44 persen dan 2.079,61 persen (Lampiran 6). Jumlah barang yang dibongkar naik dari 346.905 ton pada tahun 2022 menjadi 438.627 ton pada tahun 2023, sedangkan kegiatan muat barang naik dari 1.494 ton pada tahun 2022 menjadi 32.555 ton pada tahun 2023.

3. Pelabuhan Anggrek

Jumlah kapal yang keluar masuk melalui Pelabuhan Anggrek pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,93 persen, yaitu dari 214 unit pada tahun 2022 menjadi 216 pada tahun 2023.

Sepanjang tahun 2022 dan 2023, tidak ada penumpang yang naik dan turun melalui Pelabuhan Anggrek. Sementara itu, kegiatan bongkar barang di Pelabuhan Anggrek meningkat 4,28 persen dari 384.312 ton pada tahun 2022 menjadi 400.770 ton pada tahun 2023. Sebaliknya, kegiatan muat barang di Pelabuhan Anggrek turun 11,37 persen dari 482.896 ton pada tahun 2022 menjadi 428.013 ton pada tahun 2023.

4. Pelabuhan Tilamuta

Pada tahun 2023, jumlah kapal yang keluar masuk melalui Pelabuhan Tilamuta sebanyak 53 unit, jumlah ini mengalami penurunan sebesar 95,98 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebanyak 1.319 unit.

Jumlah penumpang yang turun melalui Pelabuhan Tilamuta pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 37,62 persen yaitu dari 1.175 orang pada tahun 2022 menjadi 1.617 orang pada tahun 2023. Jumlah penumpang yang naik melalui Pelabuhan Tilamuta meningkat 68,16 persen dari 1.294 orang pada tahun 2022 menjadi 2.176 orang pada tahun 2023.

Kegiatan bongkar barang di Pelabuhan Tilamuta berkurang 67,29 persen yaitu dari 20.700 ton pada tahun 2022 menjadi 7.753 ton pada tahun 2023. Sementara itu, kegiatan muat barang turun 62,94 persen dari 41.754 ton pada tahun 2022 menjadi 15.472 ton pada tahun 2023.

5. Pelabuhan Penyeberangan

Jumlah penumpang yang naik dan turun melalui pelabuhan penyeberangan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya (Lampiran 12). Penumpang naik berkurang dari 36.902 orang pada tahun 2022 menjadi 36.629 orang pada tahun 2023. Sedangkan, penumpang yang turun berkurang dari 35.362 orang pada tahun 2022 menjadi 35.107 orang pada tahun 2023.

Transportasi udara

Secara umum, lalu lintas pesawat dan jumlah penumpang di Bandara Jalaluddin pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022. Jumlah pesawat yang berangkat meningkat 39,36 persen, sedangkan pesawat yang tiba di Bandara Jalaluddin meningkat 41,72 persen. Jumlah pesawat yang berangkat bertambah dari 1.255 unit pada tahun 2022 menjadi 1.749 unit pada tahun 2023, sedangkan jumlah pesawat yang tiba bertambah dari 1.256 unit pada tahun 2022 menjadi 1.780 unit pada tahun 2023.

Penumpang yang berangkat dan tiba di Bandara Jalaluddin mengalami peningkatan masing-masing sebesar 14,34 persen dan 19,87 persen. Jumlah penumpang yang berangkat bertambah dari 148.561 orang pada tahun 2022 menjadi 169.868 orang pada tahun 2023, sedangkan jumlah penumpang yang tiba bertambah dari 145.255 orang pada tahun 2022 menjadi 169.759 orang pada tahun 2023.

Kegiatan bongkar dan muat barang yang melalui Bandara Jalaluddin berasal dari tiga kategori yaitu kargo, bagasi, dan pos/paket. Untuk kegiatan bongkar dan muat dari kargo pada tahun 2023 mengalami kenaikan masing-masing sebesar 32,48 dan 64,91 persen. Kegiatan bongkar barang dari kargo naik dari 2.637.158 kg pada tahun 2022 menjadi 3.493.743 kg pada tahun 2023, sedangkan kegiatan muat barang dari kargo bertambah dari 371.454 kg pada tahun 2022 menjadi 612.548 kg pada tahun 2023.

Kegiatan bongkar barang dari bagasi mengalami peningkatan 14,85 persen dari 1.663.030 kg pada tahun 2022 menjadi 1.909.978 kg pada tahun 2023. Di sisi lain, kegiatan muat barang dari bagasi berkurang 2,44 persen dari 1.480.499 kg pada tahun 2022 menjadi 1.444.372 kg pada tahun 2023 (Lampiran 16). Untuk kegiatan pos/paket, tidak tercatat ada bongkar dan muat barang di Bandara Jalaluddin sejak tahun 2021 hingga 2023.

Secara keseluruhan, pada tahun 2023 kegiatan bongkar barang (kargo, bagasi, dan pos/paket) melalui Bandara Jalaluddin mengalami kenaikan sebesar 25,66 persen, sedangkan kegiatan muat barang (kargo, bagasi, dan pos/paket) mengalami peningkatan sebesar 11,07 persen (Lampiran 17). Kegiatan bongkar barang (kargo, bagasi, dan pos/paket) naik dari 4.300.188 kg pada tahun 2022 menjadi 5.403.721 kg pada tahun 2023, sedangkan kegiatan muat barang (kargo, bagasi, dan pos/paket) naik dari 1.851.953 kg pada tahun 2022 menjadi 2.056.920 kg pada tahun 2023.

Transportasi darat

Jalan raya merupakan salah satu prasarana penting dalam transportasi darat. Hal ini karena fungsi strategis yang dimilikinya, yaitu sebagai penghubung antar satu daerah dengan daerah lain. Jalan sebagai penghubung antara sentra-sentra produksi dengan daerah pemasaran sangat dirasakan sekali manfaatnya dalam rangka meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Data panjang jalan disajikan menurut kewenangan pembinaan (pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota), jenis permukaan, serta kondisi jalan. Pada tahun 2023, panjang jalan negara, provinsi, dan kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo masing-masing adalah 752 km, 467,17 km, dan 4.292,81 km. Menurut jenis permukaannya, sebagian besar jalan provinsi dan kabupaten/kota sudah diaspal.

Berdasarkan Buku Saku Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo, rasio konektivitas Provinsi Gorontalo sebesar 0,553.

i. Komunikasi dan Informatika

Integrasi system dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Salah satu cara untuk dapat mencapai birokrasi dan pelayanan public yang berkinerja tinggi adalah dengan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sejak tahun 2018, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Gorontalo hanya berada di angka 1,8

poin, kemudian di tahun 2024, berada di angka 4,13 poin dengan kategori baik. Teknologi informasi yang semakin canggih menuntut Pemerintah Provinsi Gorontalo untuk segera menyusul provinsi lain dalam memberikan layanan berbasis elektronik yang efektif kepada masyarakat.

j. Koperasi dan UKM

Sasaran Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah yakni meningkatnya kapasitas usaha kecil menengah, meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah serta meningkatnya nilai ekspor. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian.

Pada Tahun 2021 Jumlah UMKM tercatat sebanyak 94.829 unit dan menurun pada Tahun 2022 menjadi 81.042 unit Jumlah usaha kecil dan menengah (UKM) di Provinsi Gorontalo pada tahun 2024 naik 28% dari tahun 2023, Perkembangan UMKM di Provinsi Gorontalo terjadi peningkatan yang signifikan jumlah UMKM di Provinsi Gorontalo dari tahun ke tahun. Pada Tahun 2021 Jumlah UMKM tercatat sebanyak 94.829 unit dan menurun pada Tahun 2022 menjadi 81.042 unit.

Berdasarkan data UMKM per skala usaha di Provinsi Gorontalo, di dominasi yang pada kategori usaha mikro. Dari total 105.509 UMKM, sebanyak 99.757 unit atau sekitar 94,5% merupakan usaha mikro. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha di Gorontalo memulai bisnis dengan skala yang relatif kecil yang dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.32
Proporsi Usaha Kecil dan Menengah di Provinsi Gorontalo, Tahun 2021-2024

WILAYAH	2021				2022				2023				s.d Agustus 2024			
	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
KOTA GORONTALO	11.415	2.692	400	14.507	11.415	2.692	400	14.507	11.560	2.692	400	14.652	17.227	2.692	400	20.319
KABUPATEN GORONTALO	43.124	422	13	43.559	29.596	419	12	30.027	30.285	419	12	30.716	37.897	419	12	38.328
KABUPATEN BOALEMO	10.227	1.499	202	11.928	10.193	1.493	202	11.888	10.201	1.493	202	11.896	11.925	1.493	202	13.620
KABUPATEN POHUWATO	10.684	240	104	11.028	10.914	85	19	11.018	11.629	87	19	11.735	13.184	87	19	13.290
KABUPATEN BONE BOLANGO	7.862	205	37	8.104	7.699	174	26	7.899	7.830	174	26	8.030	11.174	174	26	11.374
KABUPATEN GORONTALO UTARA	5.475	213	15	5.703	5.475	213	15	5.703	5.475	213	15	5.703	8.350	213	15	8.578
JUMLAH	88.787	5.271	771	94.829	75.292	5.076	674	81.042	76.980	5.078	674	82.732	99.757	5.078	674	105.509
Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)		5,56%	0,81%			6,26%	0,83%			6,14%	0,81%			4,81%	0,64%	

Sumber: Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, 2023

Kewirausahaan merupakan motor penggerak utama dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing suatu negara, Kewirausahaan bukan sekedar membangun bisnis, tapi tentang inovasi, kreativitas, dan keberanian melihat peluang di tengah tantangan. Mayoritas para pelaku usaha melakukan usahanya dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari (*necessity driven*), masih sedikit para pelaku usaha yang memiliki keinginan untuk tumbuh. Hal ini terlihat dari rasio kewirausahaan yang didasarkan pada proporsi pekerja pekerja dibantu buruh tetap dibandingkan dengan angkatan kerja pada tahun 2023 hanya sebesar 3,04% dan capaian Rasio Kewirausahaan Nasional Tahun 2024 sebesar 3,35% (berdasarkan Data SAKERNAS

BPS Februari 2024) untuk capaian Rasio Kewirausahaan Provinsi Gorontalo tahun 2024 adalah 2,79 % masih di bawah Rasio Kewirausahaan Nasional.

Volume Usaha Koperasi Menurut Provinsi Tahun 2021 sebesar 268.169 juta (berdasarkan data BPS), data koperasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan dinamika antara tahun 2022 dan 2023, terjadi peningkatan jumlah koperasi aktif, namun juga ada koperasi yang nonaktif. Jumlah koperasi aktif naik 4,66% menunjukkan pertumbuhan positif dan kesadaran masyarakat akan manfaat koperasi dan terjadi penurunan koperasi nonaktif sebesar 14,46% mengindikasikan upaya pembinaan dan dukungan yang lebih baik. Adapun kenaikan rata-rata keanggotaan per koperasi sebesar 9,79% mencerminkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat yang lebih besar. Perbedaan Antar Wilayah Kabupaten/Kota menunjukkan variasi dalam pertumbuhan koperasi, menunjukkan perbedaan faktor pendukung dan tantangan di setiap daerah. Meskipun ada peningkatan, perkembangan koperasi di Provinsi Gorontalo masih perlu perhatian. Dibutuhkan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas, stabilitas dan daya saing koperasi, sehingga dapat berkontribusi optimal pada perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Gorontalo memiliki 1 (satu) BUMD yaitu Gorontalo Fitrah Mandiri (GFM) yang berdiri berdasarkan Akta Notaris Gunawan Budiarto, S.H nomor 95 tanggal 30 Oktober 2009, Modal dasar Perusahaan berjumlah Rp.45.000.000.000 yang terbagi dari 18.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.2.500.000,- per saham. Modal ditempatkan dan disetor oleh pemegang saham sebanyak 17.966 lembar saham (Rp.44.915.000.000). Perusahaan mengalami kerugian terus menerus dalam usahanya, sehingga mengakibatkan akumulasi kerugian yang signifikan per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing (Rp37.195.434.635,- dan (Rp30.247.643.992,-)

Dari hasil audit eksternal oleh akuntan publik didapatkan hasil sebagai berikut:

- a. Likuiditas Perusahaan rendah karena kemampuan Perusahaan memenuhi kewajiban keuangan jangka pendek atau yang harus segera dibayar dalam jangka pendek rendah. Nilai Aset Lancar Rp.2.139.146.822,- sementara utang jangka pendek Rp.4.358.150.761. Hal tersebut karena menurunnya aset lancar khususnya persediaan dan rendahnya kas dan setara kas sebagai akibat dari operasional Perusahaan yg sudah tdk berjalan dengan normal dan rendahnya tingkat ketertagihan piutang
- b. Dari sisi solvabilitas Perusahaan yaitu kemampuan Perusahaan untuk membayar semua utang (Rp.5.484.412.783) dengan menggunakan total asset yang dimiliki senilai Rp.13.045.618.897,-, Perusahaan masih dapat menalangi walaupun belum dapat mencerminkan kemampuan Perusahaan dalam mengelola kewajiban untuk menambah asset karena akumulasi penyusutan yang cukup besar Rp.5.189.778.528
- c. Berdasarkan hasil audit Kantor Akuntan Publik, terkait keberlangsungan usaha Perusahaan mengalami kerugian terus menerus sehingga menyebabkan akumulasi kerugian yang signifikan

- d. Perusahaan sudah tidak memiliki kemampuan yang memadai dalam melakukan penagihan piutang untuk mengubah menjadi kas Perusahaan
- e. Pengendalian internal dan sistem pelaporan keuangan Perusahaan tidak cukup memadai, karena masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu mendapat perbaikan antara lain
 - Penghapusan asset tetap belum sesuai mekanisme Permendari 153 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan barang Daerah Yang Dipisahkan
 - Perusahaan sudah menghapus persediaan barang yang tidak diketemukan lagi
 - Piutang Usaha tidak dapat tertagih seluruhnya sudah dilakukan penyisihan, namun belum dihapus bukukan.

k. Penanaman Modal

Pembangunan investasi berpengaruh penting dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah. Namun demikian, investasi di Provinsi Gorontalo memang masih dinilai belum begitu berkembang. Berbagai upaya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka meningkatkan jumlah dan minat investor di Provinsi Gorontalo yaitu melalui Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Program Pelayanan Penanaman Modal.

Grafik 2.43

Realisasi Investasi Provinsi Gorontalo, tahun 2022-2024



Sumber: Dinas PMESDM Provinsi Gorontalo, 2024

Tahun 2019 Nilai realisasi investasi Provinsi Gorontalo Meningkat dari tahun 2018 yaitu dari Rp. 2,102 Triliun menjadi Rp.3,413 Triliun pada tahun 2019. Pada tahun 2020 realisasi investasi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dimana pada tahun 2019 realisasi investasi sebesar Rp.3,413 pada tahun 2020 turun menjadi Rp.1,656 Triliun. Penurunan realisasi investasi timbul akibat adanya pandemi covid 19 yang terjadi mulai tahun 2020 sudah ada pembatasan pelaksanaan kegiatan.

Tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 nilai realisasi investasi di Provinsi Gorontalo mengalami fluktuasi, dimana nilai realisasi investasi pada tahun 2023 sebesar Rp.5,515 Triliun dan namun mengalami penurunan menjadi Rp.3,56 Triliun pada tahun 2024.

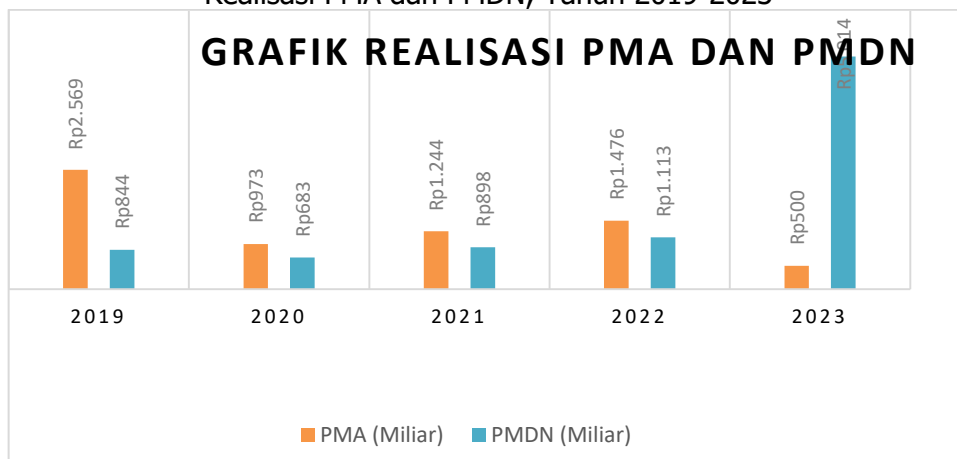
Realisasi investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), uraian realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33
Realisasi Investasi PMA dan PMDN, Tahun 2019 – 2023

NO	TAHUN	REALISASI		TOTAL
		PMA	PMDN	
1	2019	Rp 2.569.598.768.670	Rp 844.372.900.000	Rp 3.413.971.668.670
2	2020	Rp 973.250.244.578	Rp 683.565.100.000	Rp 1.656.815.344.578
3	2021	Rp 1.244.608.762.684	Rp 898.557.750.015	Rp 2.143.166.512.699
4	2022	Rp 1.476.582.028.994	Rp 1.113.462.200.000	Rp 2.590.044.228.994
5	2023	Rp 500.847.767.539	Rp 5.014.654.832.181	Rp 5.515.502.599.720
TOTAL		Rp 3.222.038.559.217	Rp 7.026.674.782.196	Rp 10.248.713.341.413

Sumber: Dinas PMESDM Provinsi Gorontalo, 2024

Grafik 2.44
Realisasi PMA dan PMDN, Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas PMESDM Provinsi Gorontalo, 2024

Tahun 2023 Pusat Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menerbitkan izin sebanyak 2.040 yang terdiri atas izin di sektor pertanian, peternakan dan perkebunan sebanyak 22 izin, sektor perikanan dan kelautan sebanyak 371 izin, sektor Perindustrian sebanyak 249 izin, sektor Perdagangan sebanyak 0 izin, sektor Perhubungan sebanyak 11 izin, sektor Kesehatan sebanyak 5 izin, sektor Pendidikan sebanyak 2 izin, sektor Pariwisata sebanyak 24 izin, sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebanyak 1321 izin, sektor ESDM sebanyak 35 izin, dan sektor PUPR sebanyak 0 izin.

Grafik 2.45

Realisasi Izin dan Non Izin, Tahun 2019-2023



Sumber: Dinas PMESDM Provinsi Gorontalo

Jumlah izin yang terbit sebagaimana uraian diatas merupakan izin yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Gorontalo Tidak termasuk realisasi izin yang diterbitkan oleh Kabupaten/Kota. Peningkatan jumlah izin yang terbit tersebut terjadi karena semua proses perizinan sudah mudah diakses oleh pelaku usaha melalui aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Sistem dapat diakses dimana saja, pelaku usaha tidak harus datang ke kantor Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Gorontalo. Selain itu peningkatan ini juga terjadi karena pelaku usaha atau masyarakat sudah mulai memahami dan menyadari pentingnya izin sebagai bukti legalitas kegiatan/usaha yang dijalankan.

Pemerintah Provinsi terus meningkatkan pelayanan dengan memberikan kemudahan berinvestasi, serta promosi investasi. Tahun 2023 nilai realisasi Investasi sebesar 3.397 Triliun terlihat telah melebihi target 2,6 Triliun yang ditetapkan.

I. Kepemudaan dan Olahraga

Pencapaian pembangunan di bidang sosial dan budaya juga ditunjukkan oleh Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Saat ini Indonesia sedang berada di fase penting dimana persentase usia produktif lebih besar dibandingkan persentase usia tidak produktif yang didapatkan melalui bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030. Pemuda dengan jumlah yang besar tersebut diharapkan menjadi motor penggerak produktivitas sehingga dapat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan.

Melihat peningkatan IPP sejak tahun 2020 hingga tahun 2022 yang menjadi tahun saat pandemi Covid-19 dengan berbagai keterbatasan aktivitas menunjukkan jika pembangunan pemuda telah berada di jalur yang positif. Walaupun jika mengacu pada angka yang didapatkan, nilai ini masih jauh dari nilai tertinggi yaitu 100. Nilai IPP Provinsi Gorontalo tahun 2023 naik sebesar 53,83 poin. Selain naik signifikan, capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Provinsi Gorontalo juga lebih baik dari level nasional, sebesar 5 poin di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, domain pendidikan serta domain partisipasi

dan kepemimpinan lebih rendah dari capaian nasional. Meskipun nilai capaian kedua indikator tersebut lebih rendah dibanding level nasional, namun keduanya merupakan penyumbang terbesar terhadap IPP Provinsi Gorontalo.

Pembangunan dalam bidang Kepemudaan dan olahraga terus dilakukan dengan mendorong agar masyarakat gemar berolahraga, kreatif dan inovatif melalui penataan dan menyempurnakan sistem pembinaan dan pengembangan pemberdayaan olahraga, membangun keserasian dan keharmonisan program, mekanisme dan hasil pembangunan keolahragaan kabupaten/kota, serta memfasilitasi dan mengembangkan jaringan serta akses kemitraan disektor olahraga tingkat provinsi sampai kabupaten/kota.

Peningkatan prestasi siswa dibidang akademik dan non akademik terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Gorontalo. Strategi peningkatan prestasi dilakukan secara bertahap dan berjenjang serta memperhatikan bakat dan minat siswa terhadap jenis dan lomba tersebut. Pembinaan Pemuda dan Olahraga dilakukan melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan serta Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dengan memfasilitasi para pelajar dalam mengikuti berbagai kejuaraan baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional. Sebanyak 377 orang Pemuda dan 60 Olahraga yang dibina dan memperoleh Medali Olahraga Pelajar baik ditingkat Regional, Nasional maupun Internasional dari berbagai cabang olahraga yang diikuti, yaitu dari cabang atletik, sepak takraw, pencak silat, taekwondo dan karate.

Berbagai prestasi tersebut cukup menggembirakan, hingga kedepan akan terus dilakukan peningkatan kesadaran berolahraga di kalangan masyarakat luas, pembibitan olahraga dan peningkatan jumlah ruang publik untuk olahraga yang bisa dimanfaatkan oleh lembaga pendidikan dan masyarakat luas. Diharapkan dengan peningkatan ruang publik untuk olahraga, pembibitan olahraga dan pemasyarakatan olahraga akan memudahkan pencarian dan penemuan bibit unggul daerah di bidang olahraga dan bisa membudayakan olahraga di masyarakat.

m. Statistic

Pembangunan di bidang statistik diarahkan agar mampu mengakomodasi berbagai tantangan yang berkembang, seperti reformasi yang mendukung keterbukaan informasi, otonomi daerah yang mengandung tantangan keanekaragaman data informasi statistik pada tingkatan wilayah kecil, perkembangan teknologi informasi yang mengarah kepada peningkatan kemudahan akses masyarakat akan data dan informasi serta mempersiapkan SDM penyelenggaraan statistik. Informasi data statistik yang akurat secara series dan berkesinambungan sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Data statistik menjadi parameter bagi pemerintah dalam evaluasi dan perencanaan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data

dan informasi, sehingga program dan kegiatan dalam urusan statistik yakni Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Dalam pengelolaannya, telah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimasing-masing OPD sebagai penanggungjawab dan penyedia informasi data sektor dimasing-masing OPD. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi keterisian data sektor dimasing-masing OPD.

Dukungan statistic lainnya adalah melalui penyusunan Buku Profil Daerah, Buku Data Statistik Sektor Provinsi Gorontalo yang bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, yang diterbitkan setiap 5 tahun.

n. Persandian

Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian. Di era keterbukaan informasi, setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk mengakses informasi seperti yang tertuang dalam undang-undang keterbukaan informasi public. Namun bukan berarti kebebasan itu tanpa batas, akan tetapi informasi itu haruslah diamankan untuk menjaga stabilitas negara. Pemanfaatan ilmu dan teknologi persandian dapat digunakan untuk menjamin keamanan informasi, karena itu perlu adanya payung hukum yang mengamankan informasi berklasifikasi. Sebagaimana tugas fungsi Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi Gorontalo yaitu dalam rangka peningkatan aplikasi, muatan layanan publik, pemanfaatan jaringan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta menjamin keamanan informasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka pelaksanaan urusan persandian untuk menjamin keamanan informasi daerah melalui kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk keamanan informasi Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo berbasis elektronik dan non elektronik.

o. Kebudayaan

Pencapaian pembangunan di bidang budaya dan adat istiadat juga ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai salah satu instrumen yang telah dirilis sejak tahun 2018 untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan didasarkan pada 7 dimensi yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Dimana IPK Provinsi Gorontalo sejak 2018-2021 bergerak secara dinamis dari 49,86 ditahun 2018, kemudian meningkat menjadi 50,57 di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 51,49, meskipun kemudian di tahun 2021 terjadi penurunan dengan perolehan sebesar 47,14.

Dari hasil capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat beberapa dimensi yang pencapaiannya belum maksimal antara lain ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya, sedangkan untuk dimensi budaya literasi dan gender pencapaiannya lebih tinggi dari angka nasional. Jika dibandingkan dengan

provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo berada di posisi ke 5 setelah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

Pembangunan Seni Budaya pada dasarnya ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan seni dan budaya daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Gorontalo memiliki beraneka ragam budaya daerah yang sangat kental dengan adat istiadat Provinsi Gorontalo. Kebudayaan daerah tersebut meliputi tarian, lagu daerah, alat musik tradisional, upacara keagamaan, rumah adat dan pakaian adat, yang masih dijaga kelestariannya.

p. Perpustakaan

Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 Berdasarkan UU No. 43 tahun 2007 disebutkan bahwa Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. Sedangkan fungsi perpustakaan sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dinyatakan bahwa perpustakaan mempunyai fungsi yang strategis sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa. Konsekuensi dari fungsi–fungsi tersebut, berbagai program dan kegiatan telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yakni program Pembinaan Perpustakaan dan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno melalui Pelestarian Karya Cetak dan bibliografi/katalog induk daerah (BID/KID) yang tersedia pada perpustakaan umum daerah.

Semakin mudahnya akses informasi melalui media internet, semakin tergerusnya budaya baca dikalangan masyarakat. Oleh karenanya Dalam rangka meningkatkan minat baca di Provinsi Gorontalo, Dinas perpustakaan dan Kearsipan tahun 2023 terus mengembangkan pelayanan kepada masyarakat melalui pengembangan layanan jasa perpustakaan dan informasi, pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan yang dilakukan antara lain dengan Gerakan Gorontalo Gemar Membaca dan pengembangan kapasitas perpustakaan. Dari upaya tersebut, menunjukkan jumlah pemustaka yang mengunjungi perpustakaan tahun 2024 meningkat sebanyak 8.760 pemustaka dibanding tahun sebelumnya sebanyak 6.550 pemustaka. Pemustaka dibagi dalam 2 kategori yaitu kategori Masyarakat/Umum sebanyak 2.190 pemustaka dan kategori pelajar sebanyak 6.570 pemustaka.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Berdasarkan laporan IPLM Perpustakaan Nasional RI, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 70,39 naik menjadi sebesar 77,46 pada tahun 2024

sedangkan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat pada tahun 2023 sebesar 64,59 turun menjadi sebesar 62,43.

q. Arsip

Arsip merupakan bagian yang terpenting dalam suatu organisasi pemerintah daerah. Menurut pasal 1 ayat Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan, Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam rangka mendukung kegiatan *e-government* dalam reformasi birokrasi, maka pengelolaan arsip harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan tata cara dan kaidah yang berlaku. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses mulai dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan warkat menurut system tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi pemerintah daerah, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan lembaga pemerintah daerah dalam pengelolaan dan pelayanan arsip kepada pengguna arsip di lingkungannya berdasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Untuk memenuhi prinsip pelayanan publik yang cepat, mudah, murah, transparan dan akuntabel, maka layanan kearsipan tahun 2023, daerah didesain sedemikian hingga rancangan system layanan kearsipan tersebut mampu memenuhi harapan masyarakat dan memiliki daya guna serta hasil guna.

Kebijakan strategis pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pengelolaan kearsipan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kearsipan melalui penerapan aplikasi SRIKANDI dalam proses surat menyurat. Tujuan penerapan arsip berbasis digital yakni untuk mengurangi pemakaian kertas dalam pengelolaan arsip, pengadministrasian arsip secara digital, serta mengurangi tumpukan arsip.

2.3.3. Fokus Layanan Urusan pilihan

a. Kelautan dan perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 963.844 Ha atau 9.638.44 Km² yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

Di sektor Perikanan dan Kelautan sampai dengan tahun 2024 menunjukkan capaian hasil yang relatif baik. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi terhadap produksi perikanan tangkap yang mencapai 120.059 ton atau menurun dibanding produksi tahun 2023 sebesar 136.579 ton. Sementara untuk produksi perikanan budidaya menurun mencapai 50.358 ton tahun 2024, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 44.863. Pertumbuhan produksi

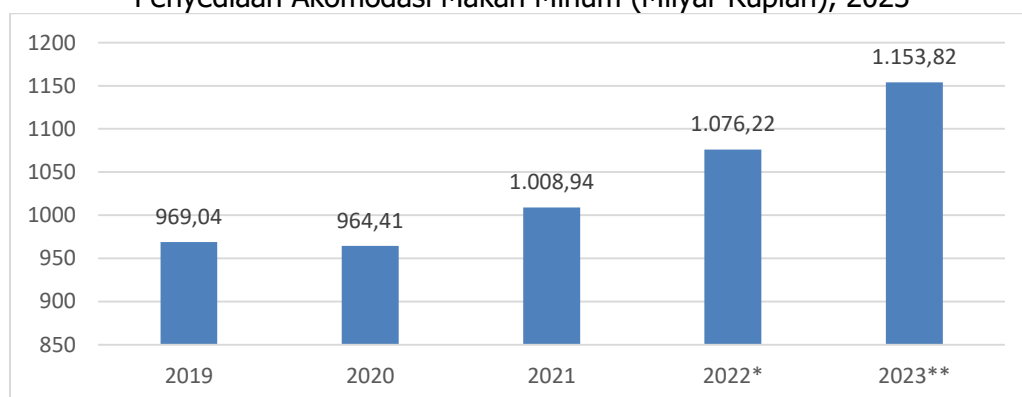
perikanan yang signifikan tersebut, memberikan pengaruh juga terhadap rata-rata pendapatan nelayan per bulannya. Dimana pada tahun 2022 pendapatan nelayan dapat mencapai Rp. 4,4 Juta/Bulan. Kegiatan perikanan budidaya juga memegang peranan yang sangat strategis selain perikanan tangkap dalam pembangunan perikanan di Provinsi Gorontalo. Akan tetapi, tingginya kontribusi produksi perikanan tangkap terhadap total produksi perikanan, tidak dibarengi dengan total produksi perikanan budidaya yang masih rendah dan laju persentase pertumbuhannya yang masih di bawah target. Produksi perikanan budidaya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2021. Rata-rata laju pertumbuhan hanya sekitar 4,76% dari target pertumbuhan 9% per tahun yang ditetapkan. Penurunan produksi perikanan budidaya ini, berdampak pada capaian Nilai Tukar Nelayan di Provinsi Gorontalo. Bila dilihat dari tingkat pencapaian NTN-Pi, pada tahun 2023 menurun sebesar 95,69.

b. Pariwisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi yang cukup penting dan mempunyai andil yang besar dalam memacu pembangunan. Perkembangan sektor pariwisata akan membawa dampak terhadap perkembangan disektor lainnya seperti perdagangan, akomodasi, jasa-jasa bahkan sektor pertanian dan industry sehingga mampu memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi ditunjang dengan keadaan geografis pegunungan dan panorama alam yang memukau merupakan kekayaan alam yang tak ternilai bagi potensi pariwisata untuk mewujudkan pariwisata Gorontalo yang mendunia.

Untuk mengembangkan sector pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik masyarakat, swasta dan pemerintah itu sendiri. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, informasi lokasi wisata, akses jalan, serta akomodasi yang mendukung pariwisata. Selain itu perlu diperhatikan juga factor keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

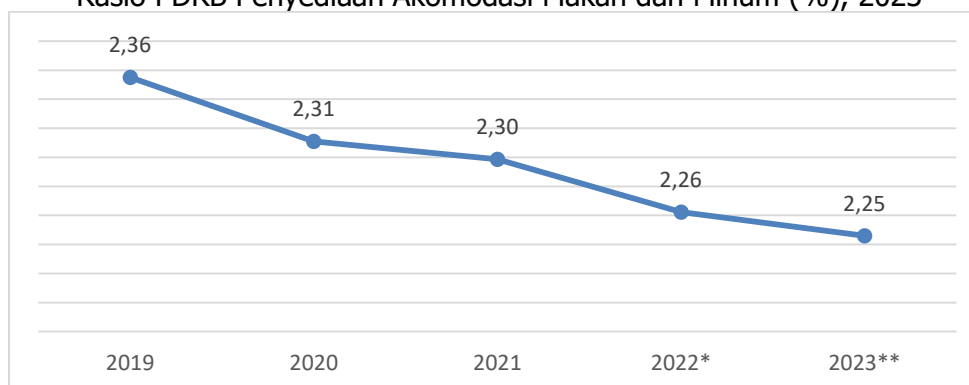
Grafik 2.46
Penyediaan Akomodasi Makan Minum (Milyar Rupiah), 2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Grafik 2.47

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%), 2023



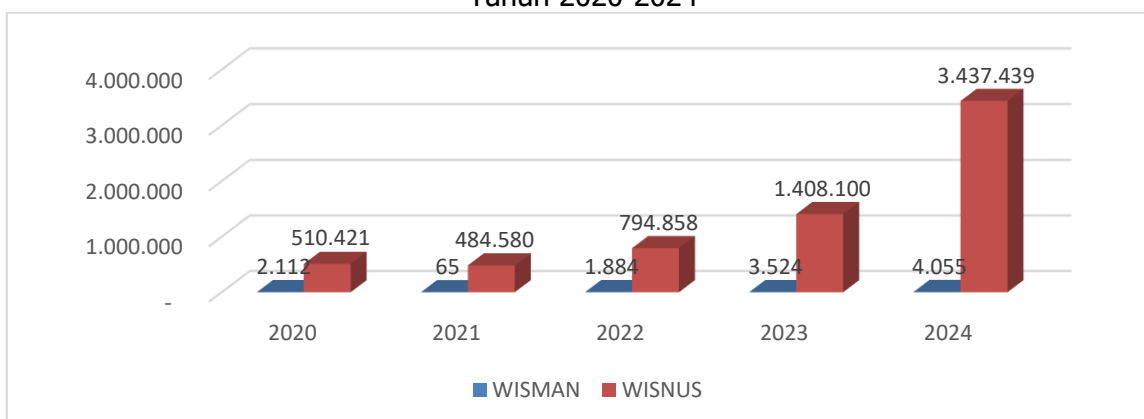
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa penyediaan Akomodasi dan Makan Minum di Provinsi Gorontalo terus mengalami peningkatan. Pertumbuhan sektor akomodasi didorong oleh adanya pelaksanaan *event-event* daerah maupun pusat yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo, sedangkan sektor makan minum disebabkan menjamurnya pembukaan rumah makan dan warung kopi sebagai sarana buat masyarakat untuk berkumpul bersama teman maupun keluarga. Namun jika dilihat dari rasio sektor pembentuk PDRB selama 5 tahun terakhir, penyediaan akomodasi dan makan minum mengalami penurunan dibanding dengan kontribusi sektor lainnya.

Kebijakan pembangunan urusan kepariwisataan Provinsi Gorontalo diarahkan melalui pengembangan dan pemanfaatan potensi-potensi wisata secara maksimal, melalui Program Pemasaran Pariwisata, Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Grafik 2.48

Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara dan Wisatawan Nusantara, Tahun 2020-2024



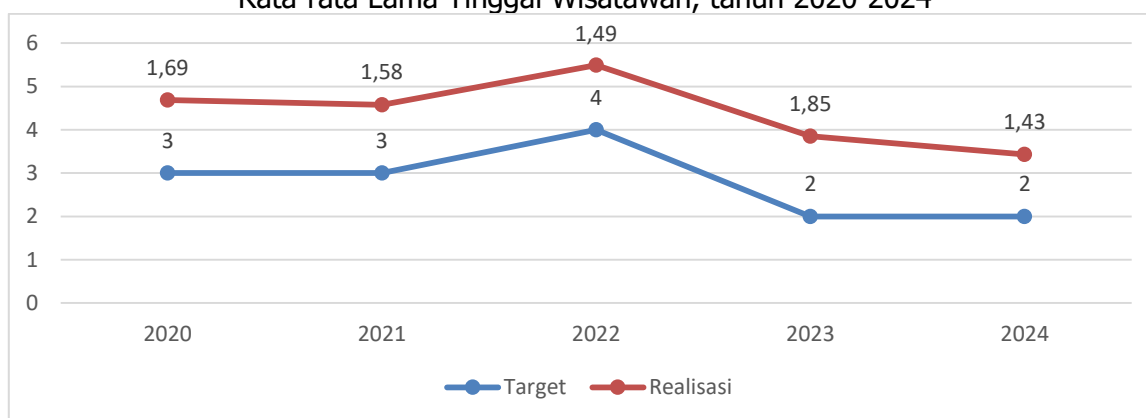
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2024

Tahun 2022 sektor pariwisata telah bangkit kembali dari keterpurukan akibat adanya pandemi covid-19 pada awal bulan Maret 2020. Pemulihan sektor pariwisata di tahun 2023 ditunjukkan dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan Manca Negara dan Nusantara dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 56,44%. Hal ini disebabkan adanya event-event

daerah yang baru dilaksanakan antara lain *International Whale Shark Day*, *International Maleos Day*, *Gorontalo Art and Creative Festival*, selain itu dengan adanya peningkatan promosi pariwisata Gorontalo melalui media sosial memudahkan bagi wisatawan dalam mendapatkan informasi. Adanya *Direct Flight* beberapa negara seperti Cina dan Singapura ke Manado memberikan imbas secara tidak langsung terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Provinsi Gorontalo.

Grafik 2.49

Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan, tahun 2020-2024



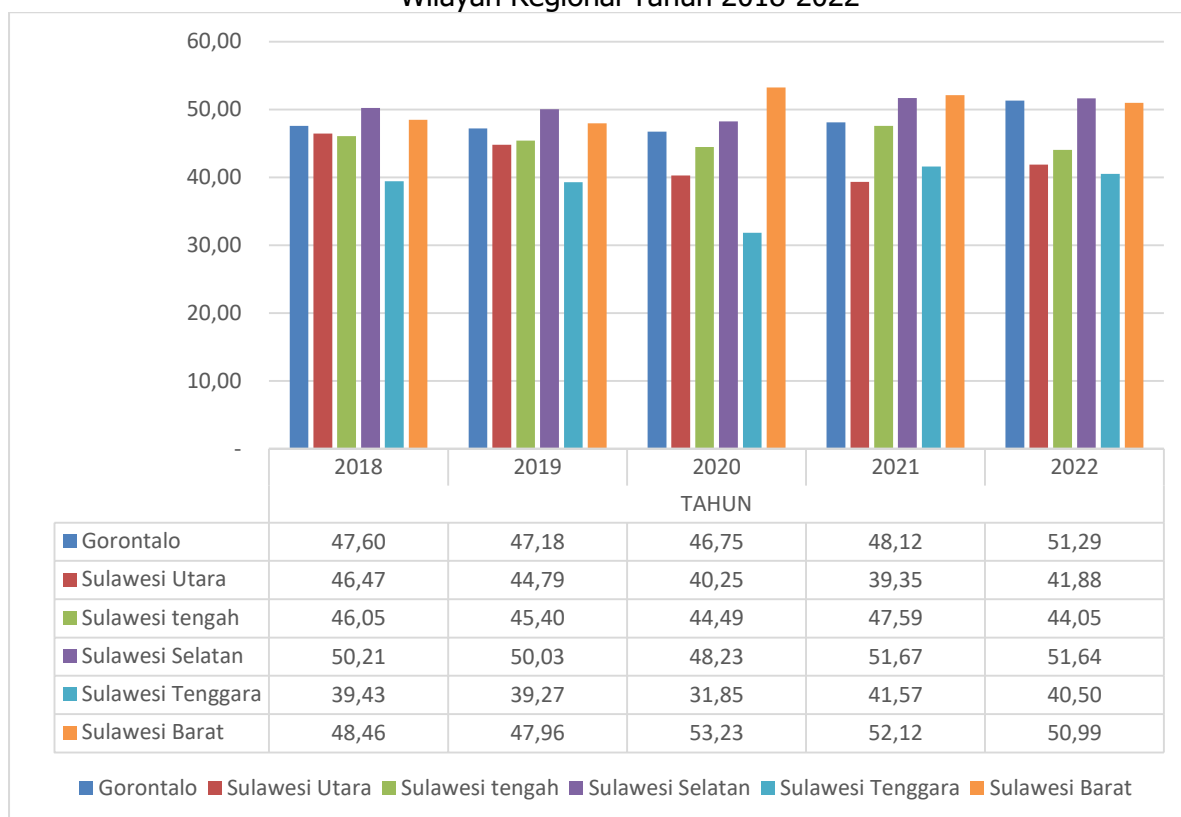
Sumber: Dinas Pariwisata Provinsi Gorontalo, 2024

Tren *length of stay* wisatawan di Provinsi Gorontalo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,42 poin dari capaian tahun sebelumnya yaitu 1,85 hari. Hal ini disebabkan oleh pelaksanaan *event* daerah yang masih parsial antara *event* yang satu dan lainnya. Selain itu, belum tersedianya paket wisata yang terintegrasi dengan pelaksanaan *event* di daerah. Dari target rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara dan nusantara di Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebanyak 2 hari hanya terealisasi sebesar 1,43 hari atau sebesar 71,50%.

c. Pertanian

Komoditi unggulan tanaman pangan Gorontalo adalah Padi dan Jagung dengan tingkat kontribusi terhadap PDRB diatas 30 persen. Salah satu faktor yang mendorong peningkatan produksi tanaman pangan khususnya jagung adalah kebijakan penganggaran pada sektor-sektor unggulan Provinsi Gorontalo. Pada sektor pertanian misalnya terdapat bantuan benih tanaman, bibit sapi, brigde alsintan dan bajak gratis dan lain sebagainya. Tujuan dari kebijakan ini adalah peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berimplikasi pada penurunan angka kemiskinan khususnya kemiskinan pada sektor pertanian. Dalam 5 (lima) tahun terakhir produktivitas tanaman ini cenderung fluktuatif.

Grafik 2.50
Perbandingan Produktivitas (Ku/Ha) Padi Gorontalo dengan Wilayah Regional Tahun 2018-2022

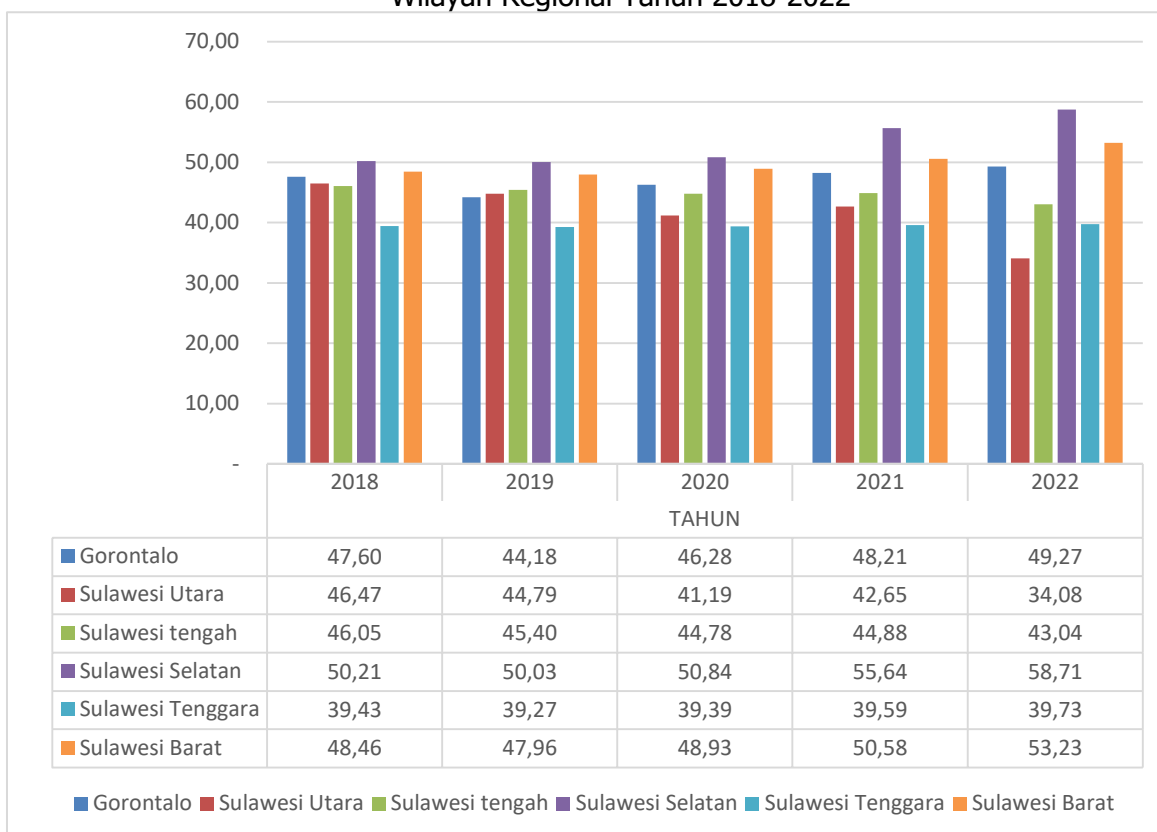


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah) 2024

Berdasarkan tabel diatas, produktivitas tanaman padi di Gorontalo pada tahun 2020 sampai dengan 2022 atau 3 (tiga) tahun terakhir terus menalami kenaikan. Di tahun 2022 Provinsi Gorontalo menempati posisi tertinggi kedua setelah Sulawesi Selatan. Secara kualitas, beras produksi Gorontalo juga masih kalah bersaing dengan beras dari luar Gorontalo bahkan di pasar lokal. Penyebabnya dalah minimnya fasilitas pasca panen seperti RMU modern yang menghasilkan beras premium.

Selanjutnya, tanaman pangan yang menjadi unggulan Gorontalo adalah jagung. Produksi jagung Gorontalo sempat meroket tembus diangka 1,8 Juta Ton di Tahun 2019 dengan produktivitas 44,18. peringkat terbawah ke 2 wilayah regional sulawesi setelah Sulawesi Tenggara. Lebih jelasnya perbandingan produktivitas tanaman jagung wilayah regional disajikan dalam grafik berikut:

Grafik 2.51
Perbandingan Produktivitas (Ku/Ha) Jagung Gorontalo dengan Wilayah Regional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah) 2024

Berdasarkan tabel diatas, selang 3 tahun terakhir produktivitas kita terus mengalami peningkatan namun masih dibawah 5 ton per hektar yaitu hanya 4,9 ton per ha di tahun 2022. Jika membandingkan dengan wilayah lain disulawesi dimana komoditi unggulannya bukan jagung, tingkat produktivitasnya masih lebih tinggi. Menurunnya kualitas lahan atau unsur hara tanah, tingginya serangan hama, dan infrastruktur irigasi serta kualitas benih ini sangat mempengaruhi produktivitas tanaman jagung.

d. Kehutanan

Kerusakan hutan juga menjadi perhatian yang serius dalam penanganannya. Hingga tahun 2022 luas lahan kritis dalam kawasan sebesar 90.580,07 Ha sementara di luar kawasan sebesar 134.857,93 Ha sehingga total lahan kritis 225.438 Ha. Kerusakan terbesar berada di wilayah Kabupaten Gorontalo dengan luas 135.992 Ha. Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang kehutanan, kawasan hutan dibagi ke dalam kelompok hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat dikonversi. Hutan Produksi (HP) merupakan hutan yang dapat dieksploitasi dengan perlakuan cara tebang pilih maupun dengan cara tebang habis. Hutan produksi terbatas merupakan hutan yang hanya dapat dieksploitasi dengan cara tebang pilih. Hutan Produksi Terbatas (HPT) merupakan hutan

yang dialokasikan untuk produksi kayu dengan intensitas rendah. Hutan produksi terbatas ini umumnya berada di wilayah pegunungan di mana lereng-lereng yang curam mempersulit kegiatan pembalakan.

Secara umum luas Kawasan Hutan di Provinsi Gorontalo adalah seluas 764.979,50 Ha, yang terdiri dari Kawasan Suaka/Pelestarian Alam (KSA/KPA) seluas 196,522,43 Ha, Hutan Lindung (HL) seluas 202.348,47 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 90.092,06 Ha, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 252.663,75 Ha, dan Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 23.352,81 Ha, serta Area Penggunaan Lainnya (APL) seluas 438.505,48 Ha.

e. Energi dan Sumber Daya Mineral

Pembangunan rendah karbon merupakan salah satu strategi transisi menuju ekonomi hijau dan Pembangunan berkelanjutan. Pembangunan rendah karbon juga menjadi tulang punggung menuju ekonomi hijau untuk mencapai visi Indonesia maju 2045 dan mencapai nol emisi pada 2060. Ekonomi hijau dan Pembangunan rendah karbon akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan sosial dengan tetap menjaga kualitas lingkungan. Pembangunan Rendah Karbon dapat diwujudkan dengan melakukan transisi menuju ekonomi hijau. Namun, masih banyak tantangan yang harus dihadapi dan diperlukan kesepakatan yang solid dari semua pihak. Oleh karena itu, perlu dilakukan kolaborasi dan komunikasi yang intensif antara berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan proses transisi menuju ekonomi hijau dapat dilakukan dengan baik.

Dalam mengukur capaian sasaran ini adalah dengan membandingkan jumlah realisasi pemanfaatan energi dari sektor EBT dengan jumlah total pemanfaatan energi. Pada tahun 2024, tercatat data bauran energi sebagai berikut: Capaian porsi EBT 12,35%, minyak bumi sebesar 53,14%, gas bumi sebesar 13,64% dan batubara sebesar 20,87%. Realisasi kontribusi EBT sebesar 18,77% pada bauran energi daerah Provinsi Gorontalo ini telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED), bahkan melampaui target tahun 2023 sebesar 11,76%.

Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang listrik sebesar 34,96%. Indikator kinerja program tersebut dicapai dengan membandingkan jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik dan jumlah rumah tangga sasaran yang belum berlistrik. Tercatat Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang belum berlistrik sebanyak 7.255 RTS. Jumlah rumah tangga sasaran yang mendapatkan instalasi Listrik gratis pada tahun 2024 sebanyak 65 RTS, sehingga rumah tangga sasaran yang telah terpasang Listrik sampai dengan tahun 2024 yaitu sebanyak 2.536 RTS. Hal tersebut menggambarkan capaian Persentase jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang terpasang Listrik sebesar 34,96%. Hingga tahun 2024, rasio elektrifikasi Provinsi Gorontalo sebesar 99,99%.

Selain penyediaan listrik bagi masyarakat, Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memberikan pelayanan dan pemenuhan air bersih khususnya di daerah-daerah sulit air. Pada tahun 2023, 1 (satu) dokumen konservasi Air Tanah telah disusun yaitu di cekungan

air tanah Marisa (Paguat-Patilanggio), sehingga tercatat sampai dengan tahun 2023 telah tersedia 2 (dua) data zona konservasi air tanah. Jumlah zona konservasi air tanah di Provinsi Gorontalo adalah sebanyak 7 cekungan air tanah. Hal itu menggambarkan Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah sebesar 29% atau tercapai 67,44% dari target yang ditetapkan.

f. Perdagangan

Urusan perdagangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang mempunyai peran strategis, terutama dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat. Pembangunan perdagangan sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan, mempertahankan stabilitas ekonomi dalam mengendalikan inflasi dan mengamankan neraca pembayaran Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan; sektor keuangan; sektor perhubungan dan telekomunikasi.

Peran perdagangan semakin penting dalam perekonomian baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini terlihat dari peningkatan kontribusi PDRB sektor perdagangan, hotel dan restoran dan kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, pertambangan dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Pembangunan bidang perdagangan difokuskan untuk peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui beberapa program kegiatan diantaranya : Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Program Pengembangan Ekspor, dan Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen.

Komoditi produk ekspor dari tahun ke tahun berfluktuatif, pada tahun 2024 ada delapan Jumlah komoditi dengan nilai ekspor berjumlah \$52.967.332,45, dengan negara tujuan Korea Selatan, Jepang, Cina, Eropa, Saudi Arabia, Philipina, Singapura, dan Malaysia dengan ekspor komoditi terbanyak adalah molases, wood palet, santan beku, minyak mentah, kelapa parut, jagung, ikan dan kepiting.

g. Perindustrian

Kebijakan Pembangunan perindustrian difokuskan pada Peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah, lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Pembangunan urusan perindustrian menjadi sangat penting karena kontribusinya terhadap pencapaian sasaran pembangunan ekonomi sangat besar karena kemampuannya dalam peningkatan

nilai tambah yang tinggi, serta sebagai pemicu kegiatan ekonomi lain yang berdampak ekspansif atau meluas ke berbagai sektor jasa, penyediaan bahan baku, transportasi, distribusi atau perdagangan, pariwisata dan sebagainya.

Oleh karenanya penting untuk mendorong Pembangunan sektor industri, yang dimulai dari Pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM). Adapun kegiatan yang dilakukan diantaranya Kegiatan pelatihan pengembangan WUB, fasilitasi tempat usaha, bahan dan peralatan, Listrik bagi IKM pangan, Bimtek penyuluhan keamanan pangan, fasilitasi kemasan untuk IKM pangan, fasilitasi sertifikat halal bagi IKM pangan, sosialisasi aplikasi/web Sistem Informasi Industri (SIINAS) serta fasilitasi pendampingan, konsultasi perizinan khusus sektor industry untuk memberikan kemudahan para IKM dan industry menengah dalam mendapatkan informasi serta pengurusan perizinan khususnya sektor Perindustrian.

Rasio PDRB industri pengolahan Menurut lapangan Usaha pada Tahun 2023 sebesar 1.335,46 dan pada tahun 2024 terus meningkat sebesar 1.381,62 (milyar rupiah).

h. Transmigrasi

Penyelenggaraan urusan transmigrasi mempunyai peran penting dalam pembangunan Nasional, khususnya dalam upaya pengembangan wilayah, pemerataan Pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan transmigrasi merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih terisolir atau tertinggal yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitarnya.

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu Provinsi tujuan transmigran. Terdapat 7 kawasan pemukiman transmigrasi Provinsi Gorontalo meliputi Kimtrans Bukit Aren dengan total 158 KK dan Kimtrans Ayumolingo sebanyak 275 KK yang berlokasi di Kabupaten Gorontalo, Kimtrans Pangea SP3 sebanyak 150 KK dan Kimtrans Lito SP 1 sebanyak 186 KK yang berlokasi di Kabupaten Boalemo, Kimtrans Sandalan di Kabupaten Pohuwato yang dihuni oleh 165 KK, dan Kimtrans Motihelumo di Kabupaten Gorontalo Utara sebanyak 134 KK. Sedangkan 4 lokasi lainnya yaitu Puncak, Marisa, Pangea SP4, Pangea SP1 termasuk UPT pembinaanya telah diserahkan ke kabupaten bersangkutan. Tahun 2024, tercatat masyarakat transmigrasi yang dikembangkan sebanyak 230 KK dan jumlah masyarakat transmigrasi binaan sebanyak 635 KK.

2.3.4. Fokus Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan daerah disusun untuk menjamin keterkaitan, keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo Dilaksanakan Kebijakan Perencanaan Di Provinsi Gorontalo dilaksanakan untuk mengintensifkan penerapan pendekatan HITS dalam formulasi perencanaan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun di tingkat OPD, Meningkatkan sinergi perencanaan dan penganggaran, memastikan pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah, mengembangkan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan seluruh pemangku kepentingan. Untuk menunjang hal tersebut, program yang dilaksanakan yaitu : Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dibutuhkan koordinasi antar instansi pemerintah serta partisipasi seluruh pelaku pembangunan dan masyarakat untuk mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran. Dalam pelaksanaannya, koordinasi tersebut diwadahi dalam sebuah mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga nasional yang dilaksanakan setiap tahun untuk mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan yang kemudian dituangkan dalam dokumen rencana kerja pemerintah untuk pemerintah pusat dan rencana kerja pembangunan daerah provinsi/kab/kota. Selain itu, optimalisasi sinkronisasi antar dokumen perencanaan daerah mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, Renja OPD hingga penyusunan dokumen Penganggaran KUA PPAS dan APBD.

Kualitas Perencanaan Pemerintah Daerah menggambarkan kondisi perencanaan di Pemerintah Daerah. Dari hasil penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) 2024 Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mendapat nilai 84,36 dengan predikat Baik. Penilaian IPPN Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk menilai kualitas perencanaan setiap pemerintah Daerah yang ditunjukkan dengan adanya Sinergi antar dokumen perencanaan, Kualitas Perencanaan dan Keterhubungan antara Rencana dengan Kinerja. Dalam Sistem Perencanaan Nasional, hirarki perencanaan tertinggi yaitu tingkat Nasional wajib menjadi acuan dan didukung pencapaiannya oleh masing-masing Pemerintah Daerah. Dalam skala Provinsi, wujud perencanaan pembangunan daerah yaitu RPJMD, yang disusun berdasarkan RPJMN, wajib menjadi acuan dalam penyusunan RKPD maupun Renstra dan Renja OPD.

b. Keuangan

1) Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Terkait hal tersebut, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo terus berupaya memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaan pendapatan dalam rangka

peningkatan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Tahun 2024, pendapatan asli daerah berkontribusi sebesar 27,46% terhadap pendapatan daerah dengan realisasi sebesar Rp524.448.862.639,00, meningkat 2,44 dari tahun 2023. Meskipun mengalami peningkatan dari sisi kontribusi, perlu menjadi perhatian bahwa rendahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah menggambarkan kondisi kemandirian fiskal daerah yang masih rendah karena masih sangat bergantung pada dana transfer ke daerah. Uraian pendapatan daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan komponen yang memberikan kontribusi terbesar dalam pendapatan asli daerah. Pada tahun 2024, pajak daerah berkontribusi sebesar 85,69 persen terhadap PAD. Pada komponen penyusun pajak daerah, pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terbesar yakni mencapai 30,97 persen dari total keseluruhan pajak daerah, sementara terendah yaitu pajak air permukaan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 0,05 persen dari total pajak daerah. Sementara itu, untuk realisasi komponen PAD tertinggi yakni pada realisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 110,96 persen.

2) Retribusi Daerah

Pada tahun 2024, realisasi retribusi daerah adalah sebesar Rp 54.066.708.700,00 atau 110,15 persen dari target realisasi. Penerimaan retribusi daerah berasal dari retribusi jasa umum, dengan realisasi sebesar Rp52.873.350.572,00 atau sebesar 114,57 dari target, dan retribusi jasa usaha dengan realisasi sebesar Rp1.193.358.128,00 atau sebesar 40,63% dari target.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan berasal dari bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah sebagai dividen atas penyertaan modal pada BUMD, dengan realisasi sebesar Rp11.580.368.337,00, atau terealisasi sebesar 113,32 persen dari target yang ditetapkan.

4) Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah terrealisasi sebesar Rp9.354.296.471,00 atau tercapai sebesar 47,72 persen dari target. Realisasi ini merupakan realisasi terendah dari komponen PAD.

Upaya Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam rangka optimalisasi pendapatan pajak daerah diantaranya : Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pembayaran secara online melalui E-Samsat dan SAMOLNAS; Melaksanakan Kerjasama dengan Ditlantas Polda Pemerintah Kabupaten/Kota melalui Razia kendaraan bermotor, *door to door*, samsat keliling, warkop samsat dan *samsat night*; serta memberikan kemudahan informasi pembayaran pemberi PKB melalui Super PKB (Surat Pemberitahuan Jatuh Tempo PKB).

2) Nilai Opini BPK

Pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo terus mengedepankan aspek akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Dari upaya yang dilakukan tersebut, kinerja pengelolaan keuangan pemerintah Provinsi tahun 2023 berhasil menjaga predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tabel 2.43

Nilai Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Provinsi Gorontalo
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber : Badan Keuangan Daerah, 2023

Pemerintah Provinsi Gorontalo mendapatkan penghargaan dari Kementerian Keuangan RI berkat keberhasilannya meraih opini pemeriksaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2013 secara berturut-turut sampai dengan tahun 2024. Hal ini karena Pemerintah Provinsi Gorontalo terus memantapkan dan meningkatkan komitmennya dalam pelaksanaan pembangunan daerah, mulai dari Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Program Kegiatan, Peningkatan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah dalam perwujudan *Good Governance and Clean Governance*.

Selain itu, Penilaian BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah juga ditunjang dengan pengelolaan aset. Badan Keuangan Provinsi Gorontalo terus memperbaiki pengelolaan aset Provinsi Gorontalo, hingga tahun 2024 persentase aset yang dikelola dengan baik sebesar 100 persen.

c. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan Pengembangan (Litbang) berperan penting dalam proses pengambilan kebijakan. Hasil Kajian penelitian dalam bentuk konsep, model, scenario, maupun pilihan kebijakan yang tepat, dapat menjadi rekomendasi dalam mengatasi berbagai masalah dalam pembangunan. Penelitian dan pengembangan yang menjadi fungsi penunjang pemerintahan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Gorontalo, melalui Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Berbagai hasil kajian penelitian yang dihasilkan dalam mendukung pembangunan Provinsi Gorontalo. Beberapa output yang dihasilkan ditahun 2024 antara lain:

- Penyusunan Dokumen Rencana Induk Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJ-PID) Provinsi Gorontalo 2025-2030
- Penyusunan Police Brief "Model Pengembangan Integrasi Tanaman Pangan-Ternak Berbasis Teknologi & Ekosistem Hilirisasi dalam meningkatkan struktur social pada masyarakat di Provinsi Gorontalo".

- Kajian Identifikasi UMKM Potensial dalam Mendukung Upaya Promosi Kawasan Geopark Gorontalo.
- Laporan Pelaksanaan Fasilitas Penyusunan Rinduk untuk Pengembangan Geopark
- Laporan pelaksanaan fasilitas pengembangan geopark Gorontalo dan pelaksanaan rencana aksi kerjasama Provinsi Gorontalo dan Ehime Prefektur

Hasil Penelitian yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi arahan dalam pelaksanaan perencanaan dan evaluasi Pembangunan Provinsi Gorontalo, Tahun 2024 jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan sebanyak 4 Kajian dan jumlah inovasi dan teknologi yang termanfaatkan sebanyak 2 Inovasi.

d. Pengawasan

Dalam peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian intern adalah efektivitas "peran" aparat "pengawasan intern" pemerintah (APIP). Pelaksanaan pengawasan intern lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo yang dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Gorontalo mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban.

Adapun program yang dilakukan dalam upaya mengoptimalkan fungsi pengawasan internal lingkup Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui Program Penyelenggaraan Pengawasan serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.

Upaya tersebut dilakukan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Government*). Inspektorat daerah sebagai aparat pengawasan internal pemerintah berperan sebagai *quality assurance* yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif, baik dari sisi administrative maupun pengelolaan keuangan. Titik berat pelaksanaan tugas pengawasannya adalah melakukan Tindakan preventif yaitu mencegah terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan oleh OPD.

Dari segi pengendalian dan pengawasan internal pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Kapabilitas SPIP dan Indeks Maturitas SPIP Provinsi Gorontalo berada pada level 3, Manajemen Risiko Indeks pada level 3 dan Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi pada level 3.

Salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan melaksanakan pengajuan unit kerja sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Tahun 2024 terdapat 2 (dua) unit kerja pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah berkomitmen menjadi Zona Integritas WBK WBBM.

e. Pendidikan Dan Pelatihan

Dalam rangka optimalisasi kinerja Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan, maka dilakukan peningkatan kompetensi baik secara struktural maupun fungsional. Dalam menjalankan fungsinya, Badan pendidikan dan pelatihan melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai bentuk upaya peningkatan profesionalisme aparatur, peningkatan kompetensi SDM Aparatur, serta meningkatkan kualitas kelembagaan diklat dengan kegiatan diantaranya :

1. Kegiatan pengembangan kompetensi teknis meliputi Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum.
2. Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional meliputi Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar, Pelaksanaan Kerjasama Antar Lembaga, serta Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan dan Prajabatan.

Adapun faktor-faktor penunjang *output* pada kegiatan ini adalah penyusunan *Human Capital Development Plan* (HCDP), pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan, dan pelaksanaan kerja sama penyelenggaraan pengembangan kompetensi dengan K/L/D.

Terkait penyusunan dokumen HCDP, BPSDM Provinsi Gorontalo telah menyusun dokumen tersebut berdasarkan pengumpulan data dari ASN Pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah dianalisis dan diolah menjadi sebuah dokumen perencanaan pengembangan kompetensi yang menentukan target prioritas ASN yang membutuhkan pengembangan kompetensi berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

BPSDM Provinsi Gorontalo telah melakukan re-akreditasi sebagai penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS dengan hasil memperoleh nilai 91,011 dengan predikat "A". Predikat "A" yang diperoleh merupakan perolehan yang sama juga ketika pelaksanaan reakreditasi sebelumnya, sehingga perolehan ini menunjukkan kapasitas BPSDM Provinsi Gorontalo dalam menjaga kualitas penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS.

f. Kepegawaian

Pengelolaan dan manajemen kepegawaian dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pengembangan ASN, layanan kesejahteraan dan pembinaan ASN, serta pengelolaan dan pelayanan manajemen kepegawaian. Badan Kepegawaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk melakukan manajemen pengelolaan kepegawaian berupa pelayanan

kenaikan pangkat, pensiunan, pengangkatan jabatan, pelayanan mutasi, pengelolaan data dan pengembangan sistem pelayanan manajemen ASN, manajemen arsip kepegawaian daerah.

Pelaksanaan urusan penunjang Pemerintahan bidang Kepegawaian dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan sasaran yaitu percepatan reformasi birokrasi.

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo melaksanakan Program Kepegawaian Daerah dengan kegiatan diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian ASN melalui koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK, fasilitasi Lembaga profesi serta pengelolaan system informasi kepegawaian.
2. Kegiatan mutasi dan promosi ASN meliputi pelantikan pejabat Esselon I dan II, SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun dan pengelolaan promosi ASN.
3. Kegiatan pengembangan kompetensi ASN berupa pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN melalui bantuan studi belajar dan izin belajar.
4. Kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur meliputi kenaikan gaji berkala, karpeg, karis/karsu, SKP Tahunan, Taspen, Taperum, Cuti, Satya Lencana, KPE, dan TKD bagi ASN dan Pelayanan Pembinaan dan Penanganan Kasus Pelanggaran Disiplin ASN.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Pasal 1, sistem merit didefinisikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Dari hasil penilaian (evaluasi) Indeks sistem merit Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah 327 dengan predikat sangat baik dan predikat kualitas pengisian JPT baik.

g. Kesekretariatan Daerah

1) Nilai SAKIP dan Indeks Reformasi Birokrasi

Perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung jawaban yang jelas dan teratur dan efektif yang disebut dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Sejak tahun 2019 hingga 2024 Nilai SAKIP Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori B. Nilai SAKIP tahun 2024 mencapai 68,88 atau Predikat B. Penilaian ini menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya sudah cukup memadai, serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Gorontalo sudah menunjukkan hasil yang baik.

Tabel 2.45

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2021-2024

Indikator	2.1.1.2 Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Nilai SAKIP	68,05	67,63	68,66	68,88
Predikat	B	B	B	B

Sumber : Menpan-RB, 2024

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Gorontalo yang diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas serta berorientasi pada kepuasan masyarakat telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat serta mewujudkan reformasi birokrasi yang baik di Provinsi Gorontalo. Pada tahun 2024, capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo dengan Kategori BB. Hasil evaluasi tahun 2024 "tidak diperbandingkan" dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya karena berdasarkan Peraturan Menteri PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi tahun 2020-2024 dan peraturan turunannya, terdapat perubahan kerangka logis, komponen, indikator, bobot dan kriteria penilaian yang signifikan.

Selanjutnya dari sisi tata Kelola pemerintahan, yang ditunjukkan dengan nilai MCP atau *Monitoring Center for Prevention* oleh Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Provinsi Gorontalo sebesar 81,7 persen, meningkat dibanding tahun 2023 sebesar 81,50 persen namun masuk kategori Zona Hijau karena berada diatas 70%. Penilaian MCP meliputi tujuh area perubahan, yakni perencanaan dan penganggaran APBD, perizinan, pengadaan barang dan jasa, pengawasan APIP, Manajemen ASN, Manajemen Aset serta Optimalisasi Pajak Daerah dan Pengelolaan Dana Desa. Nilai MCP Provinsi Gorontalo berada diatas rata-rata MCP Nasional yakni sebesar 65 persen.

Tabel 2.46

Nilai MCP Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

No	Area Intervensi	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
1	Perencanaan dan Penganggaran APBD	100	92,09	73,88
2	Pengadaan Barang dan Jasa	94,46	82,86	100
3	Perizinan	100	99,08	100
4	Pengawasan APIP	89,31	77,48	65,20
5	Manajemen ASN	83,47	63,16	83,93
6	Optimalisasi Pajak Daerah	73,63	73,89	73,69
7	Manajemen Aset Daerah	77,96	85,09	73,01
TOTAL		89,72	82,51	81,50

Sumber : Korsupgah KPK RI, 2023

Tahun 2024 Pemerintah Provinsi Gorontalo Provinsi Gorontalo juga mencatatkan prestasi gemilang dengan meraih kategori A sebagai Zona Hijau kualitas tertinggi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi kepatuhan tahun 2024 yang dilakukan oleh Ombudsman Gorontalo, Provinsi Gorontalo memperoleh nilai 90,41. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjaga kualitas pelayanan publik yang prima.

Salah satu perwujudan semangat reformasi birokrasi di pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) melalui *E-Procurement* pemerintah melaksanakan penguatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Provinsi Gorontalo terus membenahi kualitas pengelolaan barang dan jasa dengan hasil capaian Indeks Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang menunjukkan hasil yang terus meningkat mencapai 65,90 pada tahun 2022 dibanding capaian tahun 2021 pada angka 62,14.

2) Evaluasi LPPD

LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah kepada pemerintah pusat. Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah, untuk itu Kemendagri menetapkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) untuk masing-masing urusan. Pemerintah daerah harus mengisi realisasi capaian masing-masing indikator yang telah ditetapkan tersebut. Dari upaya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.47
Hasil Evaluasi LPPD Provinsi Gorontalo Tahun 2021-2023

Indikator	Evaluasi LPPD (Tahun)		
	2021	2022	2023
Kategori	Optimal	<i>n/a</i>	2,8779 (sedang)

Sumber : Biro Pemerintahan Provinsi Gorontalo, 2023

3) Sekretariat DPRD

Dalam meningkatkan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, serta menunjang peran DPRD dalam pembangunan Daerah, maka sekretariat DPRD tahun 2024 ini memfasilitasi legislative dalam menyelesaikan 5 (lima) Rancangan Perda dan telah disahkan menjadi Perda.

Selain itu, dalam rangka peningkatan kapasitas DPRD melalui Bimtek yang diikuti 45 anggota DPRD, penyelenggaraan hubungan Masyarakat melalui Kerjasama dengan Pihak Media cetak dan media elektronik, kegiatan Rapat-rapat Paripurna, Paripurna Istimewa dan semua kegiatan DPRD. Sedangkan kegiatan penyerapan dan penghimpunan aspirasi Masyarakat

untuk menjangkau aspirasi Masyarakat di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD dilaksanakan 3 kali kegiatan reses, dan 96 kali kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

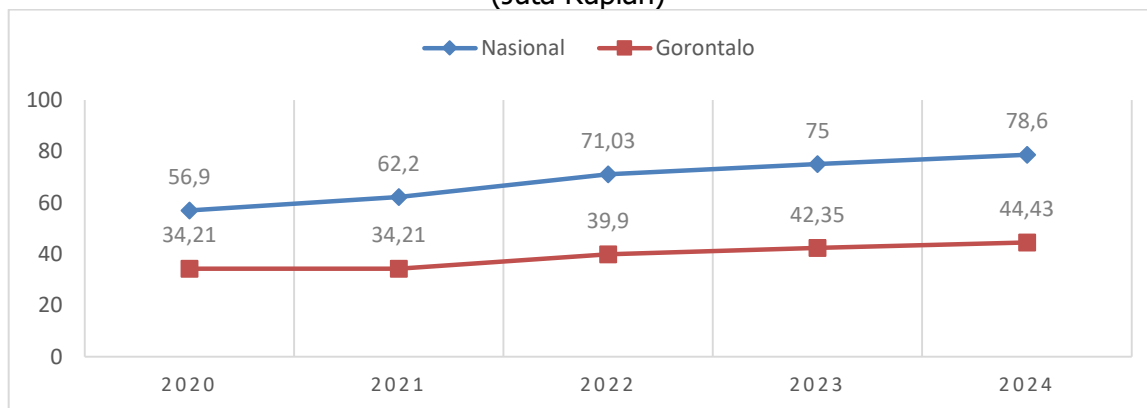
2.3.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro yang diukur berdasarkan indikator pendapatan / perkapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2024 mencapai 44,43 Juta Rupiah, meningkat 4,9 persen dibanding tahun 2023. Rata-rata PDRB perkapita Provinsi Gorontalo selang tahun 2020-2024 sebesar 39,02 juta rupiah. Meningkatnya PDRB perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan di Provinsi Gorontalo relatif meningkat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Grafik 2.52
PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2020 s/d 2024
(Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Jika dilihat dari grafik diatas PDRB perkapita Provinsi Gorontalo, trend PDRB perkapita rata-rata meningkat 0,06 persen setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo masih sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi PDRB Perkapita Gorontalo masih berada dibawah rata-rata Nasional, berada pada posisi 6 terendah secara Nasional, dan pada posisi 2 terendah secara regional Sulawesi setelah Sulawesi Barat.

b. Indeks Inklusi Keuangan

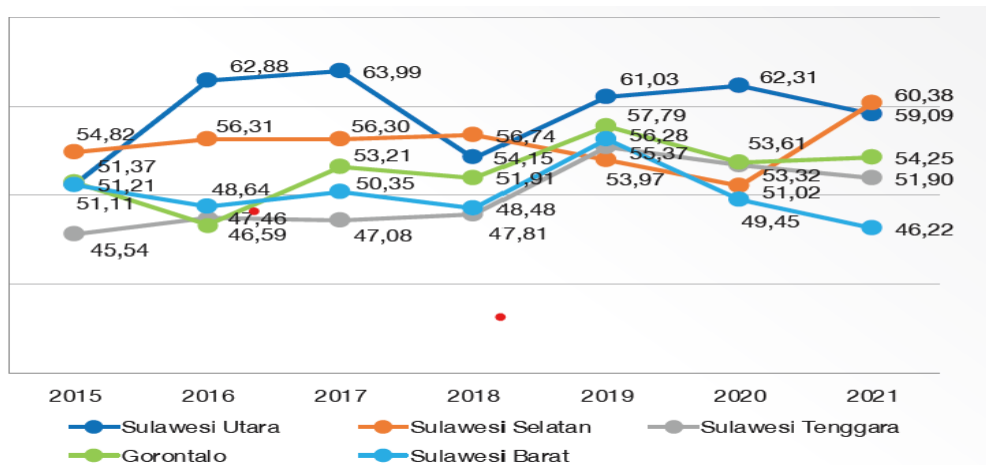
Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai *enabler* dalam pembangunan nasional. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2022 capaian Provinsi Gorontalo baru mencapai 85. Tingkat Inklusi Keuangan Provinsi Gorontalo adalah sebesar 88,57. Nilai ini lebih baik dari rata-rata nasional (85). Provinsi Gorontalo juga sekaligus menjadi Provinsi dengan nilai inklusi keuangan tertinggi di wilayah SULAMPUA.

c. Indeks Ekonomi Hijau

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/ Bappenas telah mengembangkan dan meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia di tingkat nasional. Indeks Ekonomi Hijau nasional ini terdiri dari 16 (enam belas) indikator di bawah 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ke-16 indikator tersebut antara lain luas tutupan hutan, bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) primer, kualitas air, kualitas udara, penurunan G kumulatif, penurunan tutupan lahan gambut, intensitas emisi, intensitas energi final, GNI/kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sektor industri, produktivitas tenaga kerja sektor jasa, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Grafik 2.53

Indeks Ekonomi Hijau Ekoregion Sulawesi



Sumber: Capaian dan Progres Ekonomi Hijau Provinsi 2015-2021 Kementerian PPN/Bappenas RI, 2022

Dari hasil perhitungan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi pada periode 2015-2021, Provinsi Gorontalo memiliki capaian nilai Indeks Ekonomi Hijau sebesar 54,25 (kategori baik tier 1). Bila dilihat tren Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Gorontalo bergerak fluktuatif setiap tahunnya, namun tetap berada pada kategori baik tier 1, lebih baik dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara di

tahun 2021. Bila ditelaah lebih detail, beberapa nilai komposit masih diperlukan sejumlah intervensi yang lebih mendukung dan masif untuk meningkatkan performa diantaranya pada pilar lingkungan (kualitas air dan kualitas udara), pilar ekonomi (intensitas emisi dan intensitas energi final) serta pilar sosial (penanggulangan kemiskinan dan tingkat pengangguran).

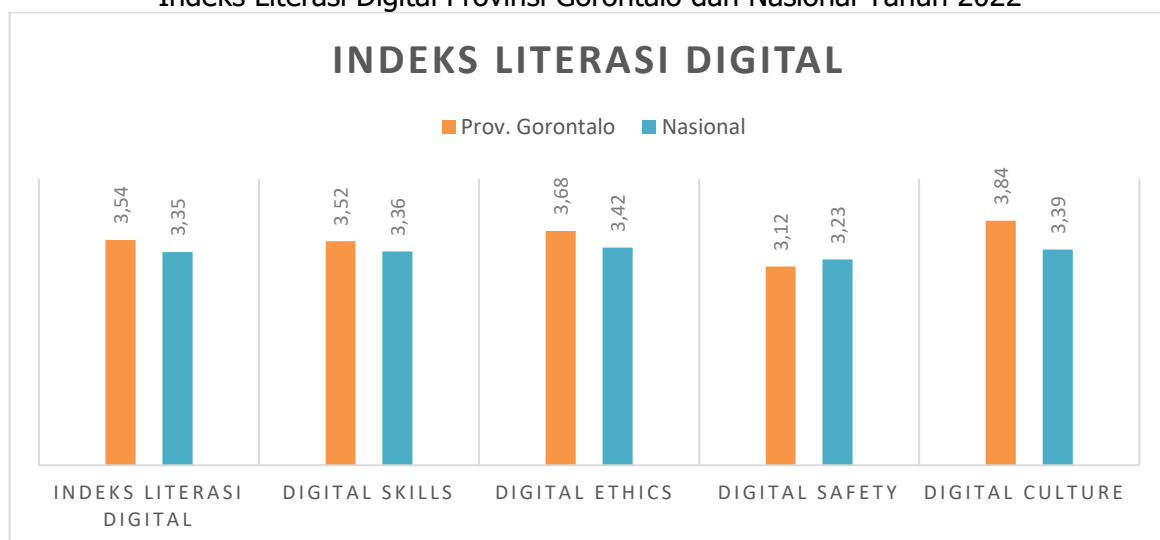
2.3.2. Fokus Sumber Daya Manusia

a. Indeks Literasi Digital

Literasi digital berhubungan dengan kecakapan (*life skill*) karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital. Terdapat 4 (empat) kecakapan literasi digital yang perlu diperkuat meliputi Keterampilan Digital, Budaya Digital, Etika Digital, dan Keamanan Digital. Hasil pemetaan literasi digital Indonesia merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan tingkat kecakapan dan pengetahuan digital, sekaligus memberikan gambaran kondisi dan peluang di setiap wilayah Tanah Air.

Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Gorontalo pada 2022 sebesar 3.35 lebih rendah 0.19 poin dibandingkan capaian literasi digital nasional dan cenderung menurun jika dibandingkan capaian ILD Provinsi Gorontalo pada 2021 yakni 3.61. Dari 4 (empat) kecakapan digital, skor tertinggi untuk Gorontalo berada pada aspek keamanan digital dan yang terendah adalah budaya digital kesadaran masyarakat Gorontalo untuk tidak mengunggah data pribadi ke media sosial sudah relatif baik. Namun masih perlu lebih berhati-hati agar terhindar dari berbagai kemungkinan serangan siber (*cyber attack*).

Grafik 2.54
Indeks Literasi Digital Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2022



Sumber: Survey Literasi Digital Kemenkominfo RI

2.3.3. Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur

Rencana Tata Ruang Wilayah diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan di berbagai sektor/bidang, serta mengakomodasikan pembagian peran dengan kabupaten/kota dan bersifat saling melengkapi serta selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). RPJPD Provinsi

Gorontalo tahun 2025 memuat berbagai agenda pembangunan untuk mencapai tujuan sebagai Provinsi Mandiri di Indonesia dengan berbagai indikator yang telah ditetapkan pada tahun 2025. Dalam RPJPD diamanatkan bahwa penataan ruang Gorontalo pada tahun 2025 diharapkan dapat mewujudkan pemerataan pembangunan antarwilayah di Gorontalo, sehingga tidak terdapat lagi daerah tertinggal di seluruh wilayah Gorontalo. Seluruh masyarakat Gorontalo dapat menikmati sarana dan prasarana baik dasar maupun yang bersifat pelayanan wilayah perkotaan dan perdesaan. Penyelenggaraan Penataan Ruang dilaksanakan melalui koordinasi yang mantap dan sistematis baik dalam pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, di semua tingkat pemerintahan (Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota) didukung dengan infrastruktur data spasial yang mutakhir.

Kemantapan daya dukung lingkungan Gorontalo harus tetap terjaga secara konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestari tetap dilanjutkan melalui perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, memelihara fungsi dan kualitas infrastruktur alam, infrastruktur buatan, serta sarana dan prasarana lingkungan yang terbangun.

Peningkatan kualitas dan kuantitas jaringan infrastruktur transportasi yang handal dan terintegrasi, berkembangnya sistem transportasi massal (Mass Rapid Transport), mantapnya pemenuhan kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan, tersedianya jaringan irigasi yang berkelanjutan, mantapnya pelayanan telekomunikasi, terpenuhinya kebutuhan air bersih dan sanitasi serta terpenuhinya kebutuhan rumah bagi masyarakat diharapkan dapat diwujudkan pada akhir tahun rencana. Hal ini dibutuhkan untuk penciptaan Gorontalo sebagai daerah tujuan utama investasi skala nasional dan internasional.

Penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan penataan ruang yang berkelanjutan, mendukung daya saing daerah, dan berkeadilan, serasi, serta mampu memwadahi perkembangan wilayah dan aktivitas perekonomiannya dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Hal tersebut diarahkan untuk mengendalikan perkembangan kota-kota besar dan metropolitan sehingga menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi melalui penyediaan ruang-ruang investasi beserta dukungan sistem transportasi massal yang efisien dan ramah lingkungan.

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang, serta harapan penataan ruang Gorontalo 20 tahun ke depan, maka tujuan penataan ruang Gorontalo 2043 adalah :

"Mewujudkan tatanan ruang wilayah Provinsi Gorontalo yang berkelanjutan dalam rangka optimalisasi sumber daya alam berbasis pertanian, perikanan, dan pariwisata serta peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur melalui inovasi dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang maju, unggul, sejahtera, dan handal".

Muatan startegis dalam rencana tata ruang wilayah yaitu:

1. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia, terdiri atas:
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, yaitu KSN Kawasan Gorontalo – Paguyaman – Kwandang
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yaitu KSN Danau Limboto dan KSNT Ekoregion Laut Sulu - Sulawesi
2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yaitu KSN Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara.
3. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, terdiri atas :
 - a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :
 - 1) KSP Pariwisata Botumoito di Kabupaten Boalemo dan Laut;
 - 2) KSP Pariwisata Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut;
 - 3) KSP Pertanian Terpadu Paguyaman-Wonosari di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo;
 - 4) KSP Pertanian Terpadu Randangan dan sekitarnya di Kabupaten Pohuwato;
 - 5) KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut; dan
 - 6) KSP Industri Terpadu Tibawa-Pulubala di Kabupaten Gorontalo
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu KSP Geopark Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, dan Laut.

2.3.4. Fokus Iklim Berinvestasi

a. Indeks Demokrasi

Kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki hubungan yang berbanding lurus. Asumsinya bahwa semakin tinggi kesadaran politik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik dapat diukur dengan melihat capaian Indeks Demokrasi di suatu wilayah. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberties*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*).

Pembangunan sosial dan politik diarahkan pada peningkatan kesadaran sosial dan politik demi terwujudnya masyarakat yang harmonis dan dinamis. Pada periode pembangunan 2020 Indeks Demokrasi provinsi Gorontalo mencapai nilai pada Kategori Baik. Namun kemudian pada tahun 2021 Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo kembali mengalami penurunan. Capaian Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo tentunya dipengaruhi oleh pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada di beberapa periode tahun yang berbeda. Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Gorontalo jika dibandingkan dengan capaian Provinsi di Pulau Sulawesi berada di Posisi keempat setelah Provinsi Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dengan Aspek Lembaga Demokrasi yang capaiannya perlu ditingkatkan kedepannya.

b. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah dan telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017 hingga 2021. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yang dielaborasi ke dalam 12 pilar daya saing. Pengukuran IDSD 2022 ini mencakup 34 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Provinsi Gorontalo memiliki skor IDSD hamper setara skor nasional yakni sebesar 3,43. Tiga pilar yang memiliki skor lebih tinggi dari nasional adalah pilar institusi, stabilitas ekonomi makro, pasar produk, pasar tenaga kerja dan kapabilitas inovasi. Provinsi Gorontalo perlu berupaya lebih keras untuk meningkatkan skor pada pilar infrastruktur, adopsi TIK, kesehatan, keterampilan, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi. Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo memiliki rata-rata skor IDSD 2,83 yang berada dibawah skor provinsi.

c. Indeks Inovasi Daerah

Untuk mendorong tingkat daya saing dan optimalisasi otonomi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri mengukur tingkat inovasi di suatu daerah, melalui indeks inovasi daerah.

Daya saing saat ini menjadi salah satu parameter dalam konsep kota berkelanjutan. Tingkat daya saing suatu daerah juga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan. Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Kinerja inovasi daerah baru dapat diukur melalui indikator Indeks inovasi Daerah pada tahun 2018, namun dalam dokumen perencanaan, kebijakan pemerintah terkait pengembangan inovasi, menciptakan nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat sudah terdapat program dan kegiatan yang menunjang untuk pencapaian target inovasi daerah.

Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2020-2024 cenderung meningkat dari tahun ketahun. Provinsi Gorontalo saat ini berada di peringkat ke-24 dari 38 provinsi dalam skor Indeks Inovasi Daerah (IID) Tahun 2023 dengan nilai 44,63 dengan predikat inovatif. Nilai tersebut diperoleh dari 34 inovasi yang telah dilaporkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo pada tahun 2023. Jumlah tersebut masih perlu ditingkatkan baik inovasi dari pemerintah daerah maupun partisipasi masyarakat.

Tabel 2.34

Hasil analisis gambaran umum kondisi daerah
Terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan
Provinsi Gorontalo

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Kinerja					Interpretasi Belum tercapai (<), Sesuai (=), melampaui (>)
		2020	2021	2022	2023	2024	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	-0,02	2,41	4,04	4,50	4,13	
1.2	Inflasi	0,81	2,59	5,15	3,88	2,87	
1.3	Indeks Gini	0,408	0,408	0,418	0,417	0,413	
1.4	Pendapatan Perkapita	34,21	34,21	39,9	42,35	44,43	
1.5	Kemiskinan (%)	15,22	15,61	15,42	15	13,87	
Fokus Kesejahteraan Sosial							
1.6	IPM	69,51	69,82	70,62	71,25	72,01	
1.7	Indeks Pembangunan Gender (%)	0,456	0,443	0,411	0,411		
ASPEK PELAYANAN UMUM							
Fokus Layanan Urusan Wajib							
PENDIDIKAN							
1.8	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	7,82	7,90	8,02	10	8,29	
1.9	Harapan Lama Sekolah	13,08	13,11	13,12	13,16	13,17	
1.10	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kelompok Umur 16-18	71,43	71,20	71,68	71,70	72,70	
1.11	Persentase Satuan pendidikan berakreditasi minimal B SMA/SMK (%)						
1.12	Persentase penduduk penyandang disabilitas yang bersekolah						
KESEHATAN							
1.13	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	68,07	68,19	68,51	68,83	69,09	
1.14	Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)		29	23,8	26,9		
PEKERJAAN UMUM							
1.15	Kondisi Mantap Jalan	54,38	58	60,05	70,23	66,12	
1.16	Persentase Kinerja Irigasi Kewenangan Provinsi						
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN RAKYAT							

1.17	Persentase Luasan Kawasan Kumuh (%)						
1.18	Persentase Cakupan Air minum Layak	94,16	94,57	96,16	96	96,13	
1.19	Persentase Cakupan Sanitasi Layak	75,68	78,58	79,82	81,72	82,99	
TRANTIBUNLINMAS							
1.20	Indeks Risiko Bencana	126,64	123,06	120,61	116,71		
SOSIAL							
1.21	Cakupan penerima penjaminan pemeliharaan kesehatan (UHC)	83,3	89,86	94,7	96,6	97,1	≤
1.22	Cakupan masyarakat miskin yang mendapatkan Bantuan sosial (%)						
TENAGA KERJA							
1.23	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,28	3,01	2,58	3,06	3,13	
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK							
1.24	Kemiskinan perdesaan						
1.25	Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)						
PANGAN							
1.26	Indeks Ketahanan Pangan	80,4	80,52	80,35	81,63	81,95	
LINGKUNGAN HIDUP							
1.27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	75,66	77,32	79,79	79,52	78,5	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							
1.28	Kemiskinan perdesaan						
1.29	Peningkatan Status Desa dari desa maju menjadi desa mandiri (kawasan Strategis Provinsi/Lokasi Prioritas)						
PERHUBUNGAN							
1.30	Rasio Konektivitas Antar Wilayah (%)			0,553	0,553		
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
1.31	Nilai Maturitas SPBE					4,13	
1.32	Indeks Pembangunan Statistik						
PENANAMAN MODAL							
1.33	Realisasi PMA/PMDN (milyar)	1.656	2.143	2.590	5.515		
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							
1.34	Indeks Pembangunan Pemuda				53,83		
PERPUSTAKAAN							
1.35	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat				70,39	77,46	
ARSIP							
1.36	Nilai Pengawasan Kearsipan						
Fokus Layanan Urusan Pilihan							

KELAUTAN DAN PERIKANAN							
1.37	Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTN-Pi)				95,69		
PARIWISATA							
1.38	Kontribusi PDRB sektor Pariwisata						
PERTANIAN							
1.39	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB						
1.40	Nilai Tukar Petani (NTP)	99,43	105,59	103,34	106,17	109,05	
1.41	Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP)	100,94	108,51	105,92	109,21		
KEHUTANAN							
1.42	Penurunan Emisi GRK				1.407,27		
ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL							
1.43	Rasio Elektrifikasi			99,7	99,9		
PERDAGANGAN							
1.44	Nilai Ekspor (Juta USD)		41.807	51.971	55.176		
INDUSTRI							
1.45	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB			4,56	4,42		

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Kinerja Keuangan Daerah Tahun 2019 – 2023

Pengelolaan Keuangan Daerah yang mencakup penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah mengacu pada Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 Daerah tentang Perbendaharaan Negara, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Secara periodik untuk mengatur penyusunan APBD tahun selanjutnya, selalu dikeluarkan Permendagri tentang Penyusunan APBD di tahun n-1.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari Pengelolaan pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah maka asas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen pemerintah daerah Provinsi Gorontalo adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk Masyarakat.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan APBD Provinsi Gorontalo meliputi pencapaian kinerja Pendapatan Daerah, Perkembangan Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut 3.1 berikut di bawah. Pertimbangan pencantuman tahun anggaran 2021 – 2025 mengingat pada 2019 – 2020 terjadi pandemi Covid-19 yang menyebabkan terjadi anomali struktur, penganggaran dan kebijakan baik di nasional maupun di daerah sehingga jika dimasukkan akan terjadi deviasi yang signifikan terhadap analisa, tren dan proyeksi keuangan. Selain itu pada saat disusunnya dokumen ini, KUA-PPAS APBD Provinsi Gorontalo tahun 2025 sudah selesai dilaksanakan dan sementara pada tahapan evaluasi Ranperda APBD Provinsi Gorontalo tahun 2025 sehingga keakuratan nominal dan angka pada tahun 2025 akurat.

Tabel 3.1
APBD Provinsi Gorontalo 2021 – 2025

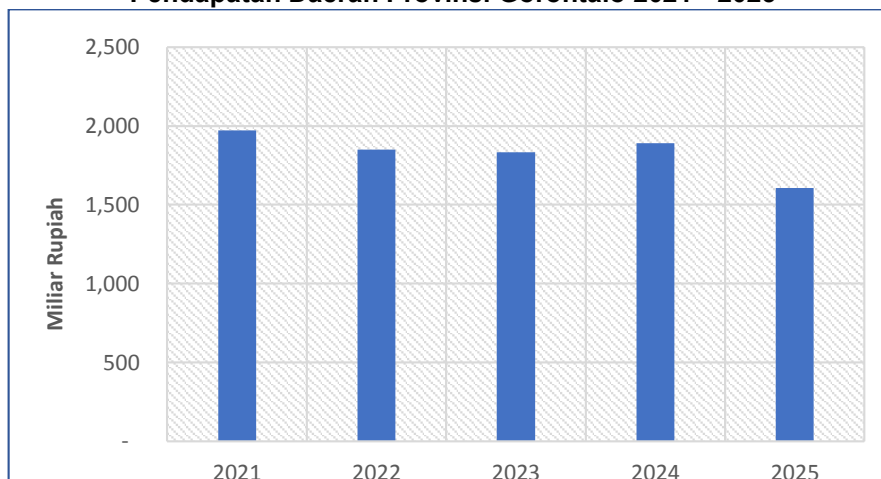
Kode	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata Pertumbuhan
4	Pendapatan Daerah	1.972.986.602.792	1.848.593.656.988	1.832.296.976.495,00	1.892.294.926.120	1.604.862.942.755	(4,78)
4.1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	510.804.052.687	510.337.164.774	491.989.218.495,00	503.192.709.120	403.362.796.755	(5,31)
4.1.1	Pajak Daerah	400.748.368.370	440.543.999.280	429.888.172.626,00	437.626.291.107	357.187.785.655	(2,27)
4.1.2	Retribusi Daerah	5.743.128.705	5.003.122.986	7.185.681.722,00	35.895.605.572	35.423.011.100	107,24
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.092.544.065	5.590.830.014	5.456.586.737,00	10.219.035.031	5.000.000.000	10,90
4.1.4	Lain - Lain PAD Yang Sah	99.220.011.547	59.199.212.494	49.458.777.410,00	19.451.777.410	5.752.000.000	(46,97)
4.2	Pendapatan Transfer	1.458.904.411.530	1.334.494.317.475	1.337.018.578.000,00	1.388.003.873.000	1.201.100.146.000	(4,50)
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.458.904.411.530	1.334.494.317.475	1.337.018.578.000,00	1.388.003.873.000	1.201.100.146.000	(4,50)
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah						
4.3	Lain - Lain Pendapatan Yang Sah	3.278.138.575	3.762.174.739	3.289.180.000,00	1.098.344.000	400.000.000	(32,00)
4.3.1	Pendapatan Hibah	2.831.202.111	3.264.864.061	1.289.180.000,00	598.344.000		(49,70)
4.3.2	Dana Darurat						
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan	446.936.464	497.310.678	2.000.000.000,00	500.000.000	400.000.000	54,61
5	Belanja Daerah	1.866.246.072.483	1.947.925.731.695	1.854.056.189.424,00	1.972.605.147.763	2.808.586.854.350	12,08
5.1	Belanja Operasi	1.470.920.270.891	1.402.021.362.981	1.397.041.304.439,00	1.533.845.929.581	1.404.293.427.175	(0,92)
5.1.1	Belanja Pegawai	625.036.929.705	637.738.706.092	684.344.820.456,00	772.951.235.115	794.605.626.529	6,27
5.1.2	Belanja Barang Jasa	613.532.982.176	704.473.302.179	597.838.120.038,00	617.562.396.179	582.076.087.599	(0,69)
5.1.3	Belanja Bunga		1.469.490.961	2.533.516.850,00	6.349.012.047	5.466.406.276	69,70
5.1.4	Belanja Subsidi						
5.1.5	Belanja Hibah	206.777.069.075	44.486.371.678	90.698.097.095,00	129.715.636.240	16.912.306.771	(4,64)
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	25.573.289.935	13.853.492.071	21.626.750.000,00	7.267.650.000	5.233.000.000	(21,03)
5.2	Belanja Modal	176.342.548.971	318.331.031.108	218.803.281.733,00	191.425.047.880	73.561.909.133	(6,21)
5.2.0	Belanja Modal	176.342.548.971	318.331.031.108	218.803.281.733,00	191.425.047.880	73.561.909.133	(6,21)
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.703.054.982	16.716.126.244	37.000.000.000,00	41.673.877.482	5.000.000.000	11,51
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	16.703.054.982	16.716.126.244	37.000.000.000,00	41.673.877.482	5.000.000.000	11,51
5.4	Belanja Transfer	202.280.197.638	210.857.211.362	201.211.603.252,00	205.660.292.820	160.072.223.203	(5,07)
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	200.830.197.638	210.857.211.362	200.886.603.252,00	205.410.292.820	159.822.223.203	(4,92)
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	1.450.000.000		325.000.000,00	250.000.000	250.000.000	(41,03)
6	Pembiayaan Daerah	129.046.607.347	328.097.890.035	21.759.212.929,00	80.310.221.643	38.064.616.756	69,34
6.1	Penerimaan Pembiayaan	139.046.607.347	351.512.274.969	56.601.497.652,00	97.245.604.887	60.000.000.000	25,60
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	134.277.026.084	235.787.137.656	56.601.497.652,00	97.245.604.887	60.000.000.000	8,28
6.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	4.769.581.263	115.725.137.313				
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000.000	23.414.384.934	34.842.284.723,00	16.935.383.244	21.935.383.244	40,27
6.2.2	Penyerahan Modal Daerah	10.000.000.000	10.590.830.014	5.000.000.000,00		5.000.000.000	(48,96)
6.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		12.823.554.920	29.842.284.723,00	16.935.383.244	16.935.383.244	29,82

Sumber : SIKD djpk.kemenkeu.go.id

a. Pendapatan Daerah

Struktur APBD Provinsi Gorontalo secara umum terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Untuk memahami kinerja keuangan daerah sebagai hasil dari pelaksanaan APBD maka diperlukan adanya analisis terhadap kinerja pendapatan daerah. Analisis tersebut meliputi jenis pendapatan daerah yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan kemampuan keuangan daerah sebagai sumber pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Pendapatan Daerah dapat didefinisikan sebagai hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan. Secara garis besar pertumbuhan realisasi pendapatan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam periode 2021 - 2025 secara umum adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1
Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo 2021 - 2025

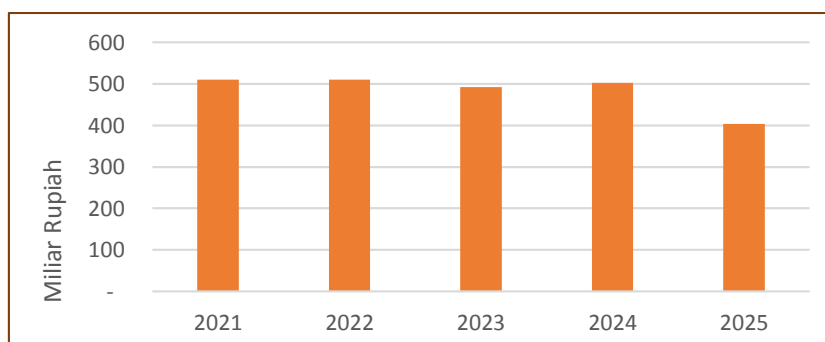


Sumber : SIKD djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Pendapatan Daerah diperoleh dari berbagai sumber penerimaan yaitu, Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain – lain pendapatan yang sah. Dari tren didapatkan bahwa baik secara keseluruhan total maupun hampir seluruh komponen penyusun pendapatan mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena terjadi ke stagnan an Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam menggali sumber pendapatan keuangan baru untuk bisa masuk dalam kas daerah serta menurunnya dana transfer ke daerah baik itu DAU maupun DAK dari tahun ke tahun. Kebijakan Blok Grant dan Spesific Grant pada alokasi DAU merupakan bentuk reformasi kebijakan pemberian DAU kepada daerah Otonom baik Provinsi maupun Kabupaten dan Kota.

Secara umum kebijakan DAU Block Grant dan Spesific Grant meminimalisir keleluasaan Pemerintah Daerah untuk mengelola DAU yang digunakan untuk mendanai program dan kegiatan di daerah, terutama bagi Pemda yang kemampuan fiskal nya rendah seperti Provinsi Gorontalo. Rata – rata jika dilihat dari tahun 2021 Pendapatan Transfer yang didalamnya masuk DAU, DAK dan DBH mengalami penurunan rata – rata sebesar 4,78% selama 5 tahun, yang semula pada angka 1,458 T pada tahun 2021, untkk tahun 2025 berada pada angka 1,2 T. Hal ini disebabkan antara lain koefisien DAU yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Pusat serta perubahan kebijakan DAK yang setiap tahun berubah tergantung penentuan Lokasi Prioritas dan Menu DAK yang diperoleh Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Gambar 3.2
Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo 2021 - 2025



Sumber : SIKD djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Sejak tahun 2021 PAD Provinsi Gorontalo terus mengalami penurunan, yang semula pada angka 510 Miliar, pada 2025 turun menjadi 403 miliar. Hal ini disebabkan antara lain mulai berlakunya Undang – Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah yang mengatur Opsen PKB dan BBN-KB dan langsung ditransfer ke rekening kas daerah masing – masing Pemerintah Kabupaten / Kota tanpa menunggu Dana Bagi Hasil dari Provinsi sehingga besaran pendapatan yang terhitung berkurang sebesar 100 M pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Selama ini PAD di Provinsi Gorontalo didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor.

Implementasi desentralisasi fiskal masih menyisahkan berbagai isu strategis yang perlu ditangani secara komprehensif, beberapa isu tersebut antara lain adanya ketimpangan keuangan antara vertikal maupun horizontal, adanya gap pelayanan public antara daerah yang maju dan daerah tertinggal, besarnya ketrgantungan pemerintah daerah kepada dana transfer karena belum optimalnya pendapatan asli daerah serta pelaksanaan anggaran yang belum berkualitas. Berdasarkan hal tersebut pemerintah pusat mencoba mengurangi permasalahan diatas dengan melahirkan Undang Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, akan tetapi hal tersebut malah berpengaruh negatif terhadap penentuan target pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Adanya rasionalisasi terhadap penerimaan retribusi daerah dari 32 jenis menjadi 18 jenis yang dapat dipungut oleh pemerintah daerah, dimana obyek penerimaan retribusi yang selama ini banyak menyumbangkan pendapatan yang sangat signifikan dari penerimaan obyek retribusi malah dilakukan rasionalisasi sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan dari sektor retribusi.

Pendapatan dari sektor pajak daerah mengalami perubahan obyek dari 5 obyek pajak menjadi 7 obyek pajak akan tetapi tergantung keadaan wilayah kita. Bagi daerah tertentu obyek pajak tambahan tersebut akan menjadi primadona didalam penerimaan yang bersumber dari pajak daerah, akan tetapi bagi daerah lain ini potensinya sangat kecil yaitu Pajak Alat Berat dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Aturan mengenai Opsen pajak yang menjadikan pajak kendaraan bermotor dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor sebagai pengganti belanja bagi hasil bagi, menjadikan proyeksi pendapatan pajak dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor menurun didalam APBD pemerintah provinsi, sedangkan obyek pajak bea balik nama kendaraan bermotor ke dua yang selama ini menjadi salah satu obyek penerimaan didalam UU HKPD telah dihapus pula.

Penerapan opsen pajak berpengaruh signifikan pada penerimaan pendapatan daerah khususnya dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor. Sehingga pemerintah daerah harus berupaya dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dalam bentuk sinergi dengan kabupaten dan kota.

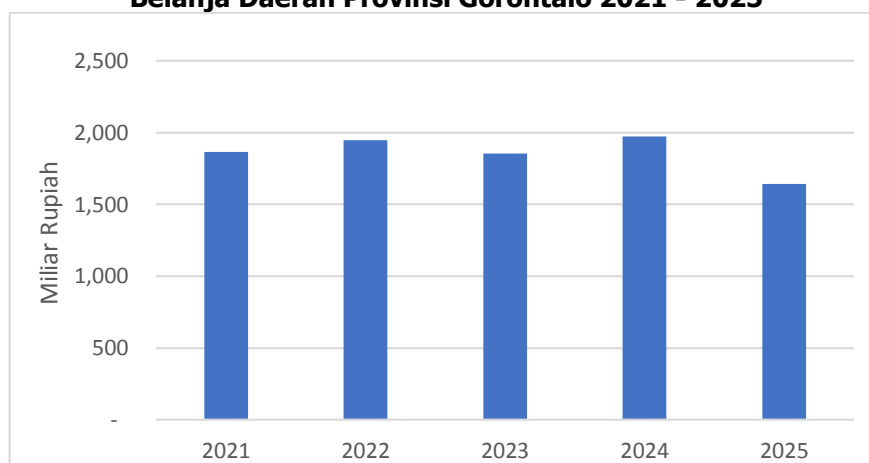
b. Belanja Daerah

Sejak tahun 2021 terjadi perubahan nomenklatur pada Belanja Daerah, yang semula terbagi menjadi belanja tidak langsung yang terdiri atas Belanja tidak langsung, Belanja Pegawai

Tidak Langsung, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, sedangkan Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai Langsung, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal. Nomenklatur Belanja berubah menjadi Belanja Operasi yang terdiri atas Belanja Operasi, Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial, kemudian Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan belanja Transfer menjadi kode belanja induk tersendiri.

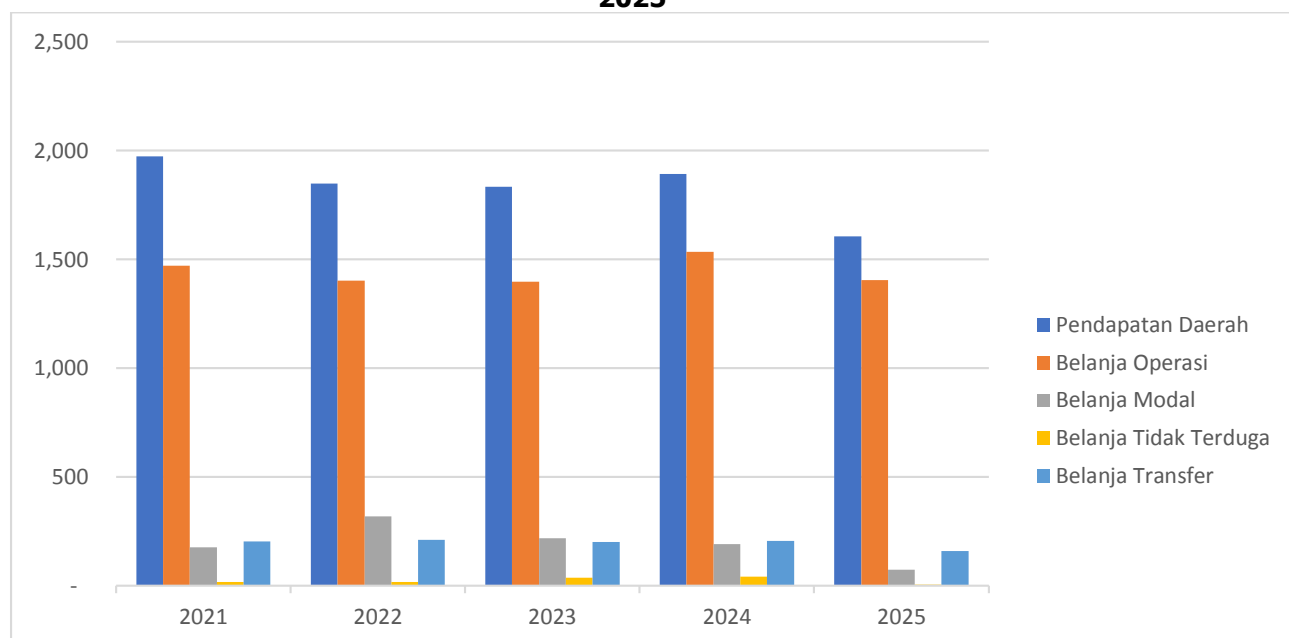
Secara umum besaran belanja daerah Provinsi Gorontalo mengalami penurunan rata – rata sebesar 2,69% yang pada tahun 2024 mencatatkan nominal tertinggi pada periode 2021 – 2025 sebesar 1,97 Trilyun dan menurun menjadi 1,642 Trilyun pada 2025. Capaian Belanja Daerah Provinsi Gorontalo 2021 – 2025 dapat dilihat pada gambar 3.2 berikut di bawah.

Gambar 3.3
Belanja Daerah Provinsi Gorontalo 2021 - 2025



Sumber : SIKD djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

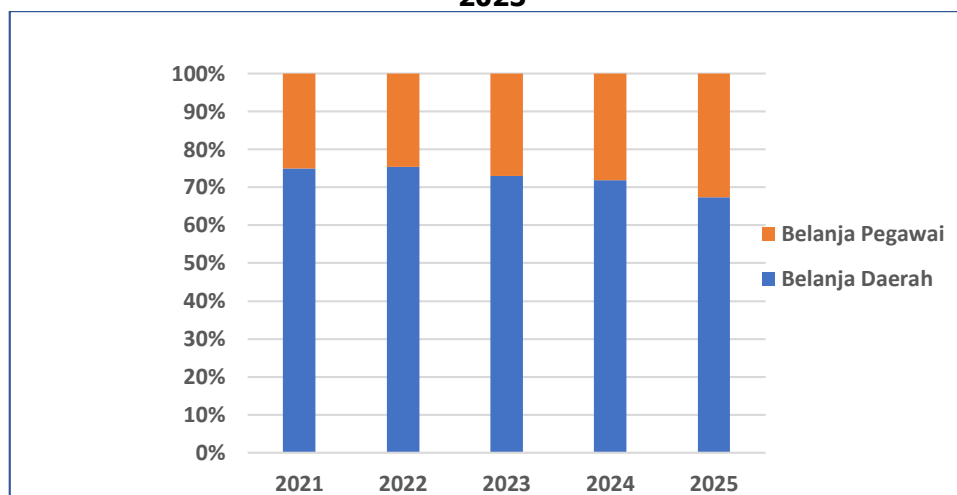
Gambar 3.4
Proporsi Komponen Belanja Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo 2021 - 2025



Sumber : SIKD djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Belanja Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2021 – 2025 didominasi oleh Belanja Operasi, kemudian Belanja Modal, Belanja Transfer dan terakhir Belanja Tidak Terduga. Secara umum proporsi Belanja Operasi memiliki persentase 85% terhadap Pendapatan Daerah, sedangkan belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga total 15% sisanya.

Gambar 3.4
Proporsi Belanja Pegawai terhadap Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo 2021 - 2025



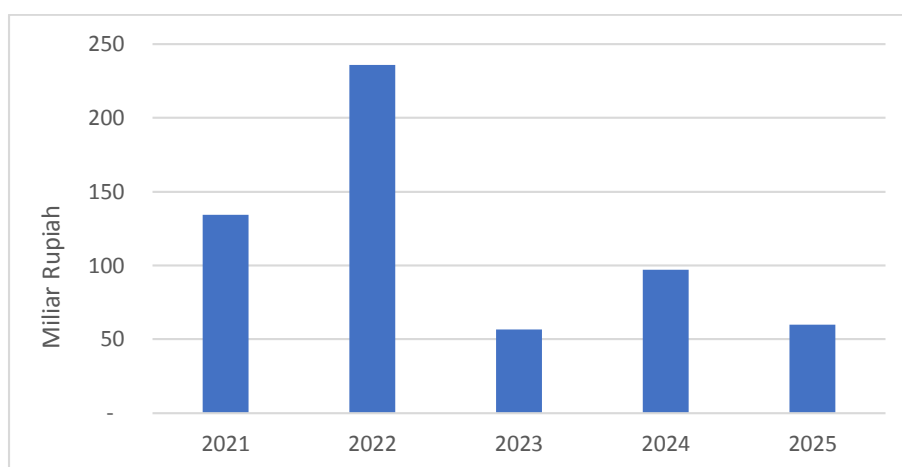
Sumber : SIKD djpk.kemenkeu.go.id (diolah)

Komponen Belanja Pegawai mengalami tren kenaikan sepanjang 2021 – 2025, yang semula pada 2021 masih berada pada 26%, naik menjadi 32% pada 2025. Hal ini disebabkan oleh beban belanja pegawai yang setiap tahunnya meningkat rata – rata 2,5% dibandingkan tahun sebelumnya dan tidak diimbangi dengan meningkatnya kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Gorontalo. Hal ini harus segera disikapi mengingat amanat dari Undang – Undang HKPD nomor 1 Tahun 2022 adalah Belanja Pegawai maksimal 30% dari Belanja Pemerintah Daerah agar bisa menjamin pendanaan untuk program dan kegiatan yang berorientasi kepada kesejahteraan Masyarakat. Di sisi lain Belanja Modal selama ini tren nya terus menurun, jauh timpang dengan proporsi belanja operasi yang ada.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan Pembiayaan Netto. Apabila terjadi surplus maka pembiayaan berarti transaksi keuangan dalam bentuk pemanfaatan surplus, sedangkan apabila terjadi defisit anggaran maka pembiayaan berarti transaksi keuangan daerah untuk menutup defisit daerah. Kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo selang 2021 – 2025 bervariasi dengan kondisi utama penggunaan Dana Pinjaman PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) pada 2021 dan 2022 masing – masing 4,7 M dan 115 M. Selain itu pembiayaan juga didapatkan dari Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) yang pada tahun 2022 mencatatkan nominal tertinggi sebesar 237 M yang diakibatkan pencairan Dana PEN yang tertunda yang baru bisa dimulai di akhir tahun. Berikut grafik untuk bisa melihat penggunaan Silpa dari tahun 2021 – 2025.

Gambar 3.5
Realisasi Silpa (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya) 2021 - 2025



Selain Silpa, komponen lain dalam pembiayaan untuk pengeluaran adalah Penyertaan Modal Daerah dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo. Tercatat Pemerintah Provinsi Gorontalo menyertakan modal daerah ke Bank SulutGo masing – masing 10 M pada tahun 2021 dan 2022 dan 5 M pada 2023 dan 2025. Sedangkan pembayaran cicilan pokok utang rutin dilakukan sejak tahun 2022 dengan besaran rata – rata kurang lebih 17 M per tahun.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset kewajiban dan ekuitas dana pada waktu tertentu. Komponen yang termasuk dalam neraca yakni asset, kewajiban dan ekuitas dana. Asset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan untuk pemeliharaan sumber-sumber daya.

3.1.2.1 Perkembangan Neraca Daerah

Maksud dari kewajiban yakni utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan keluarnya aliran sumber daya ekonomi pemerintahan. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya akan datang. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah.

Terkait dengan hal tersebut, perlu dilihat perkembangan Neraca Pemerintah Provinsi Gorontalo seperti pada tabel 3.8. dalam tabel tersebut jumlah aset untuk tahun 2019 sebesar Rp2.326.599.624.058,46 dan pada tahun 2023 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp2.525.461.941.112,24. Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Provinsi Gorontalo mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2023. Klasifikasi aset meliputi aset lancar dan aset non lancar. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos investasi jangka pendek antara lain

deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan. Aset non lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Klasifikasi kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SiLPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Kenaikan aset untuk periode 2019 sampai 2023 sebesar 49,00% dan dari total aset tahun 2023 sebagian besar merupakan aset tetap sebesar Rp6.905.534.251.652,60. Jumlah kewajiban tahun 2019 sebesar Rp71.965.132.927,63 dan pada tahun 2023 sudah mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp157.271.423.034,25. kenaikan rata-rata kewajiban untuk periode tahun 2019 sampai 2023 adalah sebesar 82,25%, sementara tahun 2020 dan 2021 merupakan kewajiban jangka pendek yaitu pembayaran utang pinjaman PEN. Tabel rata-rata pertumbuhan neraca daerah provinsi Gorontalo tahun 2019–202 dapat dilihat pada tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2023

Uraian	TA. 2019	TA. 2020	%	TA. 2021	%	TA. 2022	%	TA. 2023	%	%
ASET										
ASET LANCAR										
Kas di Kas Daerah	60.270.196.229,25	119.815.770.623,37	98,80	170.342.645.530,60	42,17	213.144.082.755,17		153.839.933.323,84		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-		32.124.086,00		-		-		
Kas di Bendahara Penerimaan	63.500,00	-		-		-		-		
Kas di Bendahara BLUD	-	8.404.568.964,00		53.991.499.787,00	542,41	14.090.678.958,50		15.085.201.009,45		
Kas di Bendahara BOS	3.433.882.791,00	6.482.238.354,00	88,77	36.421.959.777,00	461,87	1.656.677.251,00		1.544.780.419,00		
Kas Lainnya	23.165.592,00	87.277.404,00	276,75	87.277.404,00	-	1.070.779,00		501.721.917,40		
Piutang Pajak	34.708.288.566,04	33.490.075.778,04	- 3,51	33.490.075.778,04	-	35.017.225.611,04		34.096.555.899,04		
Penyisihan Piutang Pajak	21.212.547.044,35	26.013.011.965,58	22,63	-		-		-		
Piutang Pajak Netto	13.495.741.521,69	7.477.063.812,46	- 44,60	33.490.075.778,04	347,90	35.017.225.611,04		34.096.555.899,04		
Piutang Retribusi	5.315.818.319,00	5.376.413.325,00	1,14	307.075.550,00	- 94,29	315.321.925,00		5.316.427.193,00		
Penyisihan Piutang Retribusi	5.071.383.951,10	5.075.192.918,64	0,08	-		-		-		
Piutang Retribusi Netto	244.434.367,90	301.220.406,36	23,23	307.075.550,00	1,94	315.321.925,00	2,69	5.316.427.193,00	1.586,03	403,47
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-		5.679.904.143,00		-		5.316.427.193,00		
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	-		18.154.064.099,12		18.433.473.093,76		15.362.861.290,50		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-		439.243.816,00		439.243.816,00		1.950.426.816,00		
Penyisihan Piutang	-	-		39.400.772.660,29		37.678.745.462,11		37.117.190.761,83		
Belanja Dibayar Dimuka	781.221.540,74	758.854.408,29	- 2,86	215.951.590,73	- 71,54	6.507.841.002,00		371.966.954,00		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-		-		30.403.062.485,72		371.966.954,00		
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-		-		-		-		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	-	-		-		-		-		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	6.048.388.025,12	5.988.827.911,12	- 0,98	-		-		-		
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	3.770.016.919,39	4.787.936.259,79	27,00	-		-		-		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto	2.278.371.105,73	1.200.891.651,33	- 47,29	-		-		-		
Piutang Lainnya	10.784.131.703,23	13.219.240.122,00	22,58	4.360.945.942,00	- 67,01	-		-		
Peysihan Piutang Lainnya	1.141.425.638,22	3.524.631.516,30	208,79	-		-		-		
Piutang Lainnya Netto	9.642.706.065,01	9.694.608.605,70	0,54	-		-		-		
Persediaan	19.502.079.190,00	30.186.893.684,00	54,79	22.616.387.942,00	- 25,08	30.403.062.485,72	34,43	23.089.091.713,44	-	32,70
Jumlah Aset Lancar	109.671.861.903,32	176.004.818.949,51	60,48	306.738.382.785,20	74,28	282.329.932.215,08	7,96	293.592.584.490,50	3,99	
INVESTASI JANGKA PANJANG										
Investasi Nonpermanen	-	-		-		-		-		
Pinjaman Jangka Panjang	-	-		-		-		-		
Investasi Nonpermanen Lainnya	-	-		47.585.350.000,00		-		-		
Investasi Permanen	53.433.565.031,90	62.533.107.556,66	17,03	-		-		-		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	53.433.565.031,90	62.533.107.556,66	17,03	24.947.757.556,65	- 60,10	82.866.184.791,51		84.868.463.498,63		
Investasi Permanen Lainnya	-	-		-		-		-		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	53.433.565.031,90	62.533.107.556,66	17,03	72.533.107.556,65	15,99	82.866.184.791,51	14,25	84.868.463.498,63	2,42	12,42
ASET TETAP										
Tanah	378.890.436.497,30	384.820.383.172,30	1,57	390.304.573.862,30	1,43	82.866.184.791,51		378.558.233.660,30		
Peralatan dan Mesin	539.416.214.458,55	643.647.458.832,55	19,32	696.268.882.870,59	8,18	759.894.005.787,92		810.729.044.002,92		
Gedung dan Bangunan	858.281.184.133,49	925.583.304.055,15	7,84	943.758.648.822,66	1,96	1.045.912.257.499,30		1.063.163.484.634,85		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.633.705.436.226,57	1.677.447.631.010,27	2,68	1.712.205.533.802,04	2,07	1.768.998.652.294,02		1.931.972.967.759,31		
Aset Tetap Lainnya	59.604.543.479,01	67.458.188.793,01	13,18	67.710.226.675,87	0,37	84.267.600.523,22		92.064.554.210,22		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.610.099.619,00	18.830.280.100,00	62,19	70.598.658.796,00	274,92	97.979.724.723,00		57.646.960.635,14		
Akumulasi Penyusutan	1.371.771.486.739,68	1.572.235.391.023,65	14,61	1.567.516.382.581,65	- 0,30	1.878.867.729.278,30		2.157.985.267.689,35		
Jumlah Aset Tetap	2.109.736.427.674,24	2.145.551.854.939,63	1,70	2.313.330.142.247,81	7,82	1.961.040.696.340,67	15,23	6.492.120.512.592,09	231,05	56,34
DANA CADANGAN										
Dana Cadangan	-	-		-		-		-		
Jumlah Dana Cadangan										
ASET LAINNYA										
Tagihan Jangka Panjang	-	-		4.252.266,67		-		-		
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	4.299.166,67	4.299.166,67	-	-	- 100,00	4.252.266,67	#DIV/0!	-	100,00	#DIV/0!
Penyisihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	46.900,00	46.900,00	-	-	- 100,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	4.252.266,67	4.252.266,67	-	-	- 100,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	250.186.000,00	250.186.000,00	-	120.923.233,33	- 51,67	120.923.233,33	-	120.923.233,33	-	
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain - Kemitraan dengan Pihak III	129.262.766,67	129.262.766,67	-	-	- 100,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Netto	120.923.233,33	120.923.233,33	-	-	- 100,00	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	
Aset Tak Berwujud	9.446.379.643,00	9.475.133.643,00	0,30	9.549.209.643,00	0,78	609.292.000,00	- 93,62	631.181.569,00	3,59	
Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	8.601.938.263,00	9.079.255.123,00	5,55	9.051.511.923,00	- 0,31	-	- 100,00	-	#DIV/0!	
Aset Tak Berwujud Netto	844.441.380,00	395.878.520,00	- 53,12	497.697.720,00	25,76	-	-	-	#DIV/0!	
Aset Lain-lain	52.846.451.469,00	52.635.008.274,00	- 0,40	55.473.908.031,30	5,39	33.554.520.011,13		34.831.767.838,05		
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	58.298.900,00	58.298.900,00	-	-		-		-		
Aset Lain-lain Netto	52.788.152.569,00	52.576.709.374,00	- 0,40	-		-		-		
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	-	-		-		2.589.904.687,00		4.173.559.000,00		
Jumlah Aset Lainnya	53.757.769.449,00	53.097.763.394,00	- 1,23	56.096.941.251,30	5,65	33.675.443.244,46	- 39,97	34.952.691.071,38	3,79	7,94
PROPERTI INVESTASI										
Properti Investasi Tanah	-	-		-		-		680.062.500,00		
Properti Investasi Gedung dan Bangunan (neto)	-	-		-		-		9.964.230.486,00		
Konstruksi Dalam Pengerjaan Properti Investasi	-	-		-		-		-		
Jumlah Properti Investasi								10.644.292.986,00		
JUMLAH ASET	2.326.599.624.058,46	2.437.187.544.839,80	4,75	2.748.698.573.840,96	12,78	2.359.912.256.591,72	- 14,14	6.905.534.251.652,60	192,62	49,00
KEWAJIBAN										
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK										
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	965.419.425,63	512.829.261,00	- 46,88	548.378.547,00	6,93	126.694.416,00		65.741.857,00		
Utang Pinjaman	-	-		-		15.388.263.080,00		1.282.352.668,00		
Utang Bunga	-	-		-		491.475.900,00		586.757.029,00		
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-		-		7.056.409.685,00		18.346.665.181,00		
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-		-		378.400.000,00		283.800.000,00		
Utang Beban	70.972.158.020,00	52.690.161.704,20	- 25,76	2.197.229.369,00	- 95,83	16.489.169.464,87		42.336.649.749,55		
Utang Jangka Pendek Lainnya	27.555.482,00	2.028.431.235,00	7.261,26	2.381.050.456,20	17,38	11.017.802.159,00		2.636.812.165,20		
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	71.965.132.927,63	55.231.422.200,20	- 23,25	5.126.658.372,20	- 90,72	50.948.214.703,87	893,79	65.538.078.650,25	28,64	202,11
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG										
Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	-	-		-		-		-		
Utang Dalam Negeri - Pinjaman PEN	-	23.442.236.737,00		28.211.818.000,00	20,35	108.668.727.628,00	285,19	91.733.344.384,00	15,58	72,49
Premium (Diskonto) Obligasi	-	-		-		-		-		
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-		-		-		-		
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		23.442.236.737,00		28.211.818.000,00	20,35	108.668.727.628,00	285,19	91.733.344.384,00	- 15,58	72,49
JUMLAH KEWAJIBAN	71.965.132.927,63	78.673.658.937,20	9,32	33.338.476.372,20	- 57,62	159.616.942.331,87	378,78	157.271.423.034,25	- 1,47	82,25
EKUITAS	2.254.634.491.130,83	2.366.918.454.866,61	4,98	2.365.013.022.197,02	- 0,08	2.511.279.322.055,31	6,18	2.368.190.518.077,99	- 5,70	1,35
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2.326.599.624.058,46	2.445.592.113.803,81	5,11	2.398.351.498.569,22	- 1,93	2.670.896.264.387,18	11,36	2.525.461.941.112,24	- 5,45	2,28

Sumber data

Anggaran pemerintah daerah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana kerja keuangan tahunan Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) tahun yang disusun secara jelas dan spesifik serta merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah dalam bentuk alokasi dana. Kebijakan anggaran pendapatan sebagaimana yang telah digariskan dalam RPMD Provinsi Gorontalo tahun 2019–2023 yakni mendorong peningkatan pengelolaan keuangan daerah dengan target kinerja yaitu pengelolaan penerimaan PAD yang akuntabel, tersedianya perda tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah serta peningkatan PAD yang signifikan. Untuk itu dilakukan upaya-upaya meningkatkan pendapatan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas layanan publik yang lebih efektif dan maksimal sehingga masyarakat merespon secara positif produk layanan publik yang ditawarkan ke masyarakat.
2. Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD.
3. Meningkatkan system koordinasi dan informasi kepada pemerintah pusat dengan memberikan data yang cepat, tepat dan akurat sehingga beroleh dana perimbangan yang memadai.
4. Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara rutin mulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi.

Pemerintah Provinsi Gorontalo menetapkan target kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana tabel 3.15, sedangkan realisasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah tahun 2023-2026 dapat dilihat pada tabel 3.16.

Tabel 3.15
Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2019-2023

No	Uraian	Realisasi TA. 2019 - 2023 dan Target TA. 2024					
		TA. 2019 (Rp)	TA. 2020 (Rp)	TA. 2021 (Rp)	TA. 2022 (Rp)	TA. 2023 (Rp)	TA. 2024 (Rp)
1	Pendapatan	1.941.076.769.545,85	1.862.646.444.965,92	1.968.370.374.668,08	1.757.290.537.108,00	1.872.487.105.528,68	1.498.314.404.941,00
2	Pencairan Dana Cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	61.120.945.087,49	62.738.723.094,62	134.277.026.084,37	-	199.014.777.167,67	155.510.722.775,00
	Total Penerimaan	2.002.197.714.633,34	1.925.385.168.060,54	2.102.647.400.752,45	1.757.290.537.108,00	2.071.501.882.696,35	1.653.825.127.716,00
	Dikurangi :						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	789.499.212.626,75	805.643.206.905,30	822.196.681.711,17	839.175.368.145,41	822.196.681.711,17	839.175.368.145,41
	Kapasitas Riil	1.212.698.502.006,59	1.119.741.961.155,24	1.280.450.719.041,28	918.115.168.962,59	1.249.305.200.985,18	814.649.759.570,59

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah perlahan diarahkan ke bentuk *money follow program*. Belanja daerah disusun dengan pendekatan program yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Sementara dari sisi struktur, kebijakan belanja daerah diupayakan berimbang antara pendapatan dan belanja. Selisih antara pendapatan dan belanja ditutup dengan pembiayaan daerah. Pada sisi pembiayaan daerah dilakukan melalui penggunaan SiLPA tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD tahun berikutnya.

3.2.1 Proporsi Penggunaan Anggaran

1.2.1 Proporsi/Rasio Penggunaan Anggaran

Sebagai salah satu bahan yang digunakan untuk memperkirakan kapasitas keuangan daerah di masa yang akan datang yakni dengan melihat realisasi kebijakan belanja daerah yang telah dilaksanakan selama periode lalu. Penyajian secara *series* data proporsi realisasi dan anggaran belanja daerah untuk mengukur tingkat realisasi belanja yang telah dilaksanakan pemerintah sebagaimana sajian tabel 3.21 dibawah ini.

Tabel 3.17
Perkembangan Prosentase Realisasi Belanja
Provinsi Gorontalo Tahun 2019 – 2023

No.	Uraian	2019 (Rp)	2020 (Rp)	%	2021 (Rp)	%	2022 (Rp)	%	2023 (Rp)	%	2024 (Rp)	%	Rata-rata pertumbuhan (%)
	BELANJA	1.939.458.991.538,72	1.804.550.378.713,17	6,96	1.834.700.516.350,85	1,67	1.947.925.731.695,20	6,17	1.900.595.987.883,66	2,43	1.421.060.427.618,00	25,23	0,39
A	Belanja Operasi	1.498.377.121.331,41	1.347.858.356.980,81	10,05	1.439.357.233.290,37	6,79	1.402.021.362.981,22	2,59	1.475.863.473.693,15	5,27	1.157.016.347.929,00	21,60	0,15
1	Belanja Pegawai	724.616.535.883,00	722.372.799.447,00		625.036.929.705,00		637.738.706.092,20		657.826.026.577,00		588.437.841.346,00		
2	Belanja Barang	449.360.525.132,41	346.068.767.943,81		581.954.863.475,37		704.473.302.179,40		700.268.455.177,15		433.859.211.041,00		
3	Belanja Hibah	255.828.176.500,00	265.722.699.740,00		206.792.150.175,00		44.486.371.677,62		85.797.138.870,00		119.053.169.011,00		
4	Belanja Bantuan Sosial	68.571.883.816,00	13.694.089.850,00		25.573.289.935,00		13.853.492.071,00		24.878.511.324,00		10.226.126.860,00		
5	Belanja Bunga						1.469.490.961,00		7.093.341.745,00		5.439.999.671,00		
B	Belanja Modal	280.120.727.914,31	199.795.684.855,36	28,68	176.360.030.440,48	11,73	318.331.031.107,98	80,50	230.302.490.856,51	27,65	94.249.171.927,00	59,08	3,11
1	Belanja Modal Tanah	15.710.537.405,00	9.942.249.625,00		6.068.182.962,00		10.039.248.350,00		-		-		
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.780.122.390,00	77.322.775.251,00		62.665.381.688,34		97.127.670.674,91		57.681.672.265,00		27.643.321.263,00		
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	56.243.969.289,97	59.826.323.953,66		37.780.849.607,51		61.497.516.707,95		42.838.898.903,91		39.578.680.695,00		
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	122.957.818.902,34	44.392.411.333,70		69.123.653.299,77		143.809.154.618,12		121.110.943.553,60		22.453.394.069,00		
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	8.428.279.927,00	8.311.924.692,00		721.962.882,86		5.857.440.757,00		8.670.976.134,00		4.573.775.900,00		
C	Belanja Tak Terduga	1.316.964.750,00	46.581.241.989,00	3,437,02	16.703.054.982,00	64,14	16.716.126.244,00	0,08	991.984.875,00	94,07	1.116.306.870,00	12,53	819,72
1	Belanja Tak Terduga	1.316.964.750,00	46.581.241.989,00		16.703.054.982,00		16.716.126.244,00		991.984.875,00		1.116.306.870,00		
D	Belanja Transfer	159.644.177.543,00	210.315.094.888,00	31,74	202.280.197.638,00	3,82	210.857.211.362,00	4,24	193.438.038.459,00	8,26	168.678.600.892,00	12,80	5,97
1	Belanja Bagi Hasil	157.669.805.172,00	190.579.789.660,00		200.830.197.638,00		210.857.211.362,00		191.718.038.459,00		166.178.600.892		
2	Belanja Bantuan Keuangan	1.974.372.371,00	19.735.305.228,00		1.450.000.000,00		-		1.720.000.000,00		2.500.000.000,00		

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Pada tabel 3.18 tersebut, tergambar perkembangan realisasi belanja terhadap anggaran belanja dari tahun 2019 hingga 2023. Antara tahun 2019 s.d 2023 realisasi belanja pemerintah Provinsi Gorontalo telah maksimal dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat sebagai daerah

Selanjutnya akan diukur rasio aktivitas belanja pegawai dan rasio aktivitas belanja modal. Rasio aktivitas pegawai untuk menakar keefektivan biaya pada belanja pegawai yang terdapat pada tabel 3.18 dibawah ini:

Tabel 3.18
Rasio Belanja Pegawai Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2019-2023

TAHUN	Belanja Pegawai (Rp)	Total Belanja (Rp)	RASIO (%)
2019	724.616.535.883,00	1.939.458.991.538,72	37,36
2020	722.372.799.447,00	1.804.550.378.713,17	40,03
2021	625.036.929.705,00	1.834.700.516.350,85	34,07
2022	637.738.706.092,20	1.947.925.731.695,20	32,74
2023	657.826.026.577,00	1.900.595.987.883,66	34,61

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Dengan nilai rasio yang diperoleh seperti pada tabel diatas tergambar bahwa belanja yang dikeluarkan pemerintah daerah untuk membiayai pegawai masih efektif dimana pada tahun 2017 sebesar 35,89% dari total belanja.

Berikutnya diukur rasio belanja modal terhadap total belanja sebagaimana pada tabel 3.19 di bawah :

Tabel 3.19
Rasio Belanja Modal Pemerintah Provinsi Gorontalo
Tahun 2019 – 2023

TAHUN	Belanja Modal (Rp)	Total Belanja (Rp)	RASIO (%)
2019	280.120.727.914,31	1.939.458.991.538,72	14,44
2020	199.795.684.855,36	1.804.550.378.713,17	11,07
2021	176.360.030.440,48	1.834.700.516.350,85	9,61
2022	318.331.031.107,98	1.947.925.731.695,20	16,34
2023	230.302.490.856,51	1.900.595.987.883,66	12,12

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa belanja modal walaupun belum sesuai dengan apa yang diharapkan namun dari sisi besaran realisasi belanja modal relatif besar dibanding belanja lainnya. Untuk tahun 2023 mengalami penurunan antara lain disebabkan hal tersebut juga disebabkan semakin meningkatnya kebutuhan pemerintah dalam menjalankan belanja untuk memenuhi pelayanan langsung kepada masyarakat melalui belanja barang dan jasa seperti hibah dan bansos berupa barang.

Hambatan lainnya terkait dengan realisasi anggaran belanja daerah yang belum menyentuh besaran 100% disebabkan antara lain sering terlambatnya pedoman pelaksanaan dan pencairan dana alokasi khusus, datangnya pedoman dana alokasi khusus berkisar pada triwulan ke II, sehingga pada akhirnya sangat mempengaruhi penyerapan anggaran belanja daerah. Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa, penyerapan anggaran dari sisi besaran (jumlah) meningkat dari tahun ke tahun yang mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana dan berjalan dengan baik

Untuk mendapatkan gambaran tentang porsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Pemerintah Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 3.20 dibawah ini :

Tabel 3.20
Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Gorontalo Tahun 2019 – 2021

No.	Uraian	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	354.035.021.434,00	380.581.815.562,00	359.532.830.197,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	193.476.695.037,00	220.545.383.802,00	145.673.228.727,00
3	Objektif Lainnya ASN	-	-	93.954.524.989,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	-	-	24.469.762.440,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	-	-	121.463.704,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH	6.020.400.000,00	6.207.000.000,00	-
7	Belanja Pemungutan Pajak Daerah	8.452.275.402,00	6.608.868.723,00	-
8	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	43.279.334.000,00	32.896.906.300,00	-
9	Belanja Makanan dan Minuman	25.548.867.543,00	20.672.568.784,00	26.663.838.475,00
10	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.507.862.350,00	822.135.656,00	2.061.005.760,00
11	Belanja Pakaian Kerja	994.730.590,00	271.321.100,00	52.545.000,00
12	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu	2.139.756.000,00	710.055.000,00	3.731.164.936,00
13	Belanja Honorarium PNS	-	-	10.399.458.000,00
14	Belanja Perjalanan Dinas	125.628.483.861,00	77.007.510.645,00	102.757.653.410,00
15	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	-	169.530.000,00	255.090.256,00
16	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	1.085.156.000,00	549.253.000,00	910.550.646,00
17	Belanja Jasa Perawatan/Pemeriksaan	851.259.448,00	3.590.250.345,00	-
18	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaaan Alat Angkutan Darat Bermotor	8.435.880.235,00	3.336.509.184,00	5.108.929.525,00
19	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaaan Alat Kantor	1.688.531.476,00	1.324.879.949,00	1.576.829.726,00
20	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaaan Alat Rumah Tangga	6.159.050.464,00	19.065.621.652,00	3.905.121.460,12
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaaan Komputer	18.514.537.912,00	21.044.706.062,00	6.255.484.000,13
22	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaaan Meja dan Kursi Kerja	1.548.591.500,00	1.453.864.120,00	1.140.323.725,00
23	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pegadaaan Alat Komunikasi	309.637.800,00	248.300.000,00	283.407.000,00
	TOTAL	800.676.071.052,00	797.106.479.884,00	788.853.211.976,25

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa realisasi belanja untuk pemenuhan aparatur masih berada dibawah belanja publik. Prosentase/ proporsi belanja publik dan aparatur akan diuraikan lebih jelas pada sub bagian berikut (proporsi penggunaan anggaran/ tabel 3.22).

Dari sisi kebijakan penggunaan anggaran, antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, Pemerintah Provinsi Gorontalo berusaha mengambil kebijakan agar proporsi belanja untuk publik lebih besar dari belanja untuk pemenuhan aparatur, rasio ini dapat dicapai antara lain karena adanya kebijakan moratorium penerimaan PNSD sehingga sejak tahun 2013 pertumbuhan PNSD menurun seiring dengan pegawai yang mutasi antar daerah, pensiun maupun meninggal dunia. Namun memasuki tahun 2017 hal tersebut sulit untuk dipertahankan karena mulai dilaksanakannya ketentuan dalam UU No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang mengatur tentang urusan/kewenangan pemerintah provinsi untuk tenaga kependidikan SMA/SMK, ketenagakerjaan dan kehutanan.

Belanja untuk kegiatan pelayanan publik selain dilihat dari besarnya proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat jugadari segi sasaran penggunaan belanja. Analisis Proporsi Penggunaan Anggaran untuk belanja menunjukkan bahwa pengeluaran belanja untuk aparatur proporsinya dari tahun 2014-2016 menunjukkan peningkatan yang masih dalam batas kewajaran, dengan prosentase tahun 2014 sebesar 30,93%, 2015 sebesar 32,56% dan tahun 2016 sesuai hasil pemeriksaan BPK RI sebesar 24,44%. Secara rinci Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Provinsi Gorontalo Tahun 2014–2016 dapat dilihat pada tabel 3.21 berikut.

Tabel 3.21
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Gorontalo Tahun 2019 – 2021

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase Belanja Aparatur	Prosentase Belanja Publik
		(a)	(b)	(c) = (a) / (b) x 100%	(d) = (100) - (b)
1	Tahun anggaran 2019 (n-3)	800.676.071.052,00	1.939.458.991.538,72	41,28	58,72
2	Tahun anggaran 2020 (n-2)	797.106.479.884,00	1.814.550.378.713,17	43,93	56,07
3	Tahun anggaran 2021 (n-1)**)	788.853.211.976,25	1.844.700.516.350,85	42,76	57,24

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

3.2.2 Analisis Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk "menutup defisit" atau "memanfaatkan surplus" anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran sering disebut sebagai penerimaan pembiayaan. Sebaliknya, pembiayaan yang dilakukan untuk memanfaatkan surplus disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Dengan kata lain pembiayaan menunjukkan penerimaan maupun pengeluaran kas yang akan dibayar kembali atau diterima kembali.

Dalam kondisi terjadi surplus maupun defisit sebagai hasil perhitungan total pendapatan dibandingkan dengan total belanja maka pemerintah akan dihadapkan pada kebijakan:

- 1) untuk memanfaatkan surplus dalam pengeluaran pembiayaan untuk menghasilkan manfaat yang optimal dan atau
- 2) untuk mencari sumber penerimaan pembiayaan untuk menutupi defisit.

Selanjutnya dalam keadaan surplus kebijakan pengeluaran pembiayaan yang ditempuh dapat berupa :

- 1) Pembentukan dana cadangan;
- 2) Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- 3) Pembayaran pokok utang; dan
- 4) Pemberian pinjaman daerah.

Pada situasi defisit maka kebijakan penerimaan pembiayaan yang ditempuh dapat berupa:

- 1) Penggunaan silpa;
- 2) Pencairan dana cadangan;
- 3) Hasil penjualan kekayaan negara yang dipisahkan;
- 4) Penerimaan pinjaman daerah; dan
- 5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Pada tabel 3.22 di bawah ini dapat dipotret perkembangan realisasi pembiayaan daerah Provinsi Gorontalo dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa realisasi pembiayaan daerah sebagian besar dari SiLPA yang mengalami peningkatan yang disebabkan oleh pelampauan realisasi pendapatan asli daerah dan adanya efisiensi belanja daerah. Pertumbuhan pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel 3.22 berikut.

Tabel 3.22
Rata – Rata Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2019–2023

No	Uraian	JUMLAH									Rata-Rata Pertumbuhan
		2019	2020	%	2021	%	2022	%	2023	%	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	61.120.945.087,49	86.180.959.831,62	41,00	139.046.607.347,37	61,34	351.512.274.969,04	152,80	228.765.815.327,67	- 34,92	55,06
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	61.120.945.087,49	62.738.723.094,62	2,65	134.277.026.084,37	114,03	235.787.137.656,04	75,60	228.765.815.327,67	- 2,98	47,32
6.1.2	Pencairan dana cadangan										
6.1.3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan										
6.1.4	Penerimaan pinjaman daerah	-	23.442.236.737,00	-	4.769.581.263,00		115.725.137.313,00	-	-	100,00	50,00
3.1.5	Penerimaan kembali pemberian pinjaman										
6.2	Pengeluaran pembiayaan	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00		23.414.384.934,00	-	29.751.038.160,00	27,06	-
6.2.1	Pembentukan dana cadangan										
6.2.2	Penyertaan modal (investasi) daerah	-	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00		10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-
6.2.3	Pembayaran pokok utang						12.823.554.920,00		19.751.038.160,00		
6.2.4	Pemberian pinjaman daerah										
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	61.120.945.087,49	76.180.959.831,62	24,64	129.046.607.347,37	69,39	328.097.890.035,04	154,25	199.014.777.167,67	- 39,34	52,23
	SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN BERKENAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam RPD Tahun 2023-2026 perlu dihitung dan dianalisis pembiayaan daerah Provinsi Gorontalo selama kurun waktu dimaksud. Analisis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Selama periode tersebut, analisis pembiayaan daerah pertama dilakukan melalui analisis sumber penutup defisit riil anggaran. Analisis ini dilakukan untuk memberi gambaran masa lalu tentang kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah. Analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.23 berikut.

Tabel 3.23
Penutup Defisit Riil Anggaran
Tahun 2021 - 2023

Uraian	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
Realisasi Pendapatan Daerah	1.968.370.374.668,08	1.848.593.656.987,83	1.872.487.105.528,68
Dikurangi :			
Belanja Daerah	1.834.700.516.350,85	1.947.925.731.695,20	1.900.595.987.883,66
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	23.414.384.934,00	29.751.038.160,00
Defisit Riil	123.669.858.317,23	- 122.746.459.641,37	- 57.859.920.514,98
Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	134.277.026.084,37	235.787.137.656,04	228.765.815.327,67
Pencairan dana cadangan	-	-	-
Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	4.769.581.263,00	115.725.137.313,00	-
Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah	228.765.815.327,67	351.512.274.969,04	228.765.815.327,67
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	- 105.095.957.010,44	- 474.258.734.610,41	- 286.625.735.842,65

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo (data diolah)

Berdasarkan tabel analisis diatas, kemudian disusun tabel analisis untuk mengetahui gambaran komposisi penutup defisit riil yang dapat dilihat dari komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran sebagaimana Tabel 3.24.

Tabel 3.24
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Gorontalo (Audited)

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil		
		Tahun 2021 (%)	Tahun 2022 (%)	Tahun 2023 (%)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	108,58	- 192,09	- 395,38
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-
3	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	3,86	- 94,28	-
5	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan	- 84,98	386,37	495,38

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Setelah diperoleh komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran dilakukan analisis realisasi sisa lebih perhitungan anggaran, yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran. Dengan mengetahui SiLPA realisasi anggaran periode sebelumnya, dapat diketahui kinerja APBD tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur. Gambaran masa lalu terkait komposisi realisasi anggaran SiLPA Pemerintah Daerah dapat dilihat melalui Tabel 3.25.

Tabel 3.25
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Provinsi Gorontalo

Uraian	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Rata-rata pertumbuhan
	Tahun 2021 (Rp)	% dari SILPA	Tahun 2022 (Rp)	% dari SILPA	Tahun 2023 (Rp)	% dari SILPA	
Jumlah SILPA	134.277.026.084,37		62.738.723.094,62		134.277.026.084,37		
Pelampauan penerimaan PAD	134.277.026.084,37	100,00	-	-	76.979.035.180,25	57,33	78,66
Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-	-	-	-	-	-	-
Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-	-	-	-	-	-	-
Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	-	-	62.738.723.094,62	100,00	57.297.990.904,12	42,67	71,33
Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-	-	-
Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan hal tersebut maka, prediksi untuk tahun 2023 sampai dengan tahun 2026 diprediksi pertumbuhan rata-rata saldo kas neraca daerah akan mengalami penurunan. Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran dapat dilihat pada tabel 3.27 dibawah ini.

Tabel 3.27
Proyeksi Sisa Lebih (Riil) Pembiayaan Anggaran

No.	Uraian	Tahun 2023	Tingkat pertumbuhan (%)	Proyeksi				
				Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)
1	Saldo kas neraca daerah	170.971.636.669,69	- 10,00	70.093.298.913,36	63.089.002.213,36	56.769.725.239,71	51.080.834.969,07	45.959.292.731,13
	dikurangi:							
2	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	65.741.857,00	- 23,44	50.331.913,36	50.331.913,36	34.921.969,71	19.512.026,07	4.102.082,43
3	Kegiatan lanjutan	-						
	Sisa lebih (riil) pembayaran anggaran	170.905.894.812,69	- 10,00	70.042.967.000,00	63.038.670.300,00	56.734.803.270,00	51.061.322.943,00	45.955.190.648,70

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

3.3 Kerangka Pendanaan

Untuk mewujudkan suatu keadaan yang membawa kepada adanya pembiayaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah), tidak lain ditujukan untuk membawa masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, mau tidak mau perlu didukung dengan ketersediaan dana yang cukup. Pajak dan retribusi merupakan salah satu sumber penerimaan yang penting disamping sumber-sumber penerimaan lainnya yang lebih mencerminkan kekuatan ekonomi masyarakat dan sekaligus tingkat kepatuhan/kepedulian masyarakat dalam pembangunan negara. Memang sumber penerimaan dapat berasal dari pemanfaatan sumber daya alam, optimalisasi aset atau melalui pinjaman, namun semua hal tersebut memiliki keterbatasan karena sumber daya alam dapat habis, optimalisasi aset tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dengan baik oleh masing-masing

daerah (mengingat manajemen asset belum sepenuhnya berjalan dengan baik), apalagi jika mengandalkan dari pinjaman.

Oleh karena itu jika pemerintah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu adanya upaya untuk mendorong optimalisasi pajak melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi. Ekstensifikasi pajak yang dimaksud antara lain melalui perluasan basis pajak yang ada.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Tahun 2025 – 2029

Proyeksi pendapatan dan belanja daerah dengan memperhatikan pencapaian realisasi lima tahun terakhir sebagaimana dijelaskan diatas dan arah kebijakan pendapatan dan belanja yang akan ditempuh lima tahun ke depan.

Arah kebijakan yang perlu diambil dalam melaksanakan upaya-upaya peningkatan pendapatan daerah melalui penggalan potensi dan penyuluhan kepada masyarakat perlu disertai dengan tertib administrasi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian pula peningkatan kualitas pelayanan publik yang dilaksanakan secara profesional melalui peningkatan kompetensi aparatur daerah, kualitas kinerja layanan lembaga serta penyederhanaan prosedur pengelolaan pendapatan daerah menuju terpenuhinya kepuasan pelayanan publik. Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah yang berorientasi pada kepuasan pelayanan publik.

Sementara belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar dibidang pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Dalam struktur APBD, anggaran belanja menempati posisi yang sentral karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Besarnya anggaran belanja akan sejalan dengan besarnya anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah.

Untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD kita juga mengenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus. Dalam prakteknya, anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi berimbang karena adanya anggaran pembiayaan.

Selain diarahkan untuk membiayai program pembangunan, belanja daerah juga diarahkan untuk membiayai belanja tidak langsung berupa pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, belanja barang dan jasa untuk operasional kegiatan pemerintahan daerah maupun kegiatan pemeliharaan rutin lainnya. Disamping itu terdapat pula jenis belanja lainnya yang bersifat bantuan keuangan, bantuan sosial maupun hibah serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut maka, proyeksi anggaran pendapatan belanja daerah Tahun 2025 s/d Tahun 2029 Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada Tabel 3.28 berikut.

Tabel 3.30
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2025 s/d Tahun 2029

URAIAN	APBD TA. 2024	APBD TA. 2025	PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH				
			2025	2026	2027	2028	2029
PENDAPATAN DAERAH	1.892.294.926.120,00	1.757.621.115.800,00	1.757.621.115.800,00	1.828.455.342.270,68	1.873.595.184.819,21	1.929.490.220.104,72	1.990.517.882.791,19
<i>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</i>	<i>503.192.709.120,00</i>	<i>403.422.053.800,00</i>	<i>403.422.053.800,00</i>	<i>450.107.454.770,68</i>	<i>473.449.339.772,96</i>	<i>499.236.145.568,88</i>	<i>526.673.725.126,19</i>
Pendapatan Pajak Daerah	437.626.291.107,00	357.247.042.700,00	357.247.042.700,00	389.555.489.686,68	409.911.519.120,86	431.379.513.745,37	454.022.969.404,53
Pendapatan Retribusi Daerah	35.895.605.572,00	35.423.011.100,00	35.423.011.100,00	45.525.565.084,00	49.719.340.652,10	54.319.999.823,51	59.367.786.921,66
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.219.035.031,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
Lain-lain PAD yang Sah	19.451.777.410,00	5.752.000.000,00	5.752.000.000,00	4.026.400.000,00	2.818.480.000,00	2.536.632.000,00	2.282.968.800,00
Pendapatan Transfer	1.388.003.873.000,00	1.353.799.062.000,00	1.353.799.062.000,00	1.377.947.887.500,00	1.399.745.845.046,25	1.429.854.074.535,84	1.463.444.157.665,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	18.660.996.000,00	32.433.889.000,00	32.433.889.000,00	38.920.666.800,00	46.704.800.160,00	56.045.760.192,00	67.254.912.230,40
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.006.766.241.000,00	1.031.935.398.000,00	1.031.935.398.000,00	1.057.733.782.950,00	1.084.177.127.523,75	1.116.702.441.349,46	1.150.203.514.589,95
Dana Alokasi Khusus (DAK)	354.893.754.000,00	282.726.745.000,00	282.726.745.000,00	268.590.407.750,00	255.160.887.362,50	242.402.842.994,38	230.282.700.844,66
Dana Insentif Fiskal (DIF)	7.682.882.000,00	6.703.030.000,00	6.703.030.000,00	6.703.030.000,00	6.703.030.000,00	6.703.030.000,00	6.703.030.000,00
Pendapatan Bantuan Keuangan dari Pemda Kab./Kota kepada Pemerintah Provinsi	-	-	-	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	8.000.000.000,00	9.000.000.000,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.098.344.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
Pendapatan Hibah	598.344.000,00	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	500.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
BELANJA DAERAH	1.972.605.147.763,00	1.805.728.699.556,00	1.805.728.699.556,00	1.869.558.629.326,68	1.908.394.604.845,21	1.958.616.159.803,72	2.014.537.690.195,89
<i>Belanja Operasi</i>	<i>1.533.845.929.581,00</i>	<i>1.472.022.894.443,00</i>	<i>1.472.022.894.443,00</i>	<i>1.540.621.455.890,37</i>	<i>1.603.253.593.481,07</i>	<i>1.670.993.324.795,10</i>	<i>1.744.312.120.614,99</i>
Belanja Pegawai	772.951.235.115,00	826.755.857.780,00	826.755.857.780,00	847.424.754.224,50	860.136.125.537,87	873.038.167.420,94	886.133.739.932,25
Belanja Barang dan Jasa	617.562.396.179,00	618.367.263.087,00	618.367.263.087,00	667.630.865.464,31	718.294.076.893,05	773.862.610.713,49	834.825.389.177,28
Belanja Bunga	6.349.012.047,00	5.854.466.805,00	5.854.466.805,00	4.204.849.829,00	3.141.989.882,00	2.085.924.475,00	1.016.269.987,00
Belanja Hibah	129.715.636.240,00	15.812.306.771,00	15.812.306.771,00	16.049.491.372,57	16.290.233.743,15	16.534.587.249,30	16.782.606.058,04
Belanja Bantuan Sosial	7.267.650.000,00	5.233.000.000,00	5.233.000.000,00	5.311.495.000,00	5.391.167.425,00	5.472.034.936,38	5.554.115.460,42
Belanja Modal	191.425.047.880,00	138.932.603.498,00	138.932.603.498,00	163.864.950.233,31	140.068.788.161,14	122.550.611.805,62	105.153.346.377,90
Belanja Modal Tanah	4.741.312.400,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.200.000.000,00	2.420.000.000,00	2.662.000.000,00	2.928.200.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.542.050.178,00	36.241.062.820,00	36.241.062.820,00	36.784.678.762,30	37.152.525.549,92	37.524.050.805,42	37.899.291.313,48
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	76.248.345.202,00	41.713.503.670,00	41.713.503.670,00	53.817.787.429,18	43.952.331.897,75	39.062.212.727,49	31.159.868.259,31
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	70.609.699.100,00	58.802.237.008,00	58.802.237.008,00	70.882.289.041,83	56.359.230.838,47	43.113.030.900,83	32.971.936.498,94
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	233.641.000,00	175.800.000,00	175.800.000,00	180.195.000,00	184.699.875,00	189.317.371,88	194.050.306,17
Belanja Modal Aset Lainnya	50.000.000,00	-	-	-	-	-	-
Belanja Tidak Terduga	41.673.877.482,00	34.209.475.410,00	34.209.475.410,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Belanja Tidak Terduga	41.673.877.482,00	34.209.475.410,00	34.209.475.410,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Belanja Transfer	205.660.292.820,00	160.563.726.205,00	160.563.726.205,00	160.072.223.203,00	160.072.223.203,00	160.072.223.203,00	160.072.223.203,00
Belanja Bagi Hasil	205.410.292.820,00	159.822.223.203,00	159.822.223.203,00	159.822.223.203,00	159.822.223.203,00	159.822.223.203,00	159.822.223.203,00
Belanja Bantuan Keuangan	250.000.000,00	741.503.002,00	741.503.002,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00
TOTAL SURPLUS/(DEFISIT)	(80.310.221.643,00)	(48.107.583.756,00)	(48.107.583.756,00)	(41.103.287.056,00)	(34.799.420.026,00)	(29.125.939.699,00)	(24.019.807.404,70)
PEMBIAYAAN DAERAH							
<i>Penerimaan Pembiayaan</i>	<i>97.245.604.887,00</i>	<i>70.042.967.000,00</i>	<i>70.042.967.000,00</i>	<i>63.038.670.300,00</i>	<i>56.734.803.270,00</i>	<i>51.061.322.943,00</i>	<i>45.955.190.648,70</i>
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.245.604.887,00	70.042.967.000,00	70.042.967.000,00	63.038.670.300,00	56.734.803.270,00	51.061.322.943,00	45.955.190.648,70
Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-	-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	16.935.383.244,00	21.935.383.244,00	21.935.383.244,00	21.935.383.244,00	21.935.383.244,00	21.935.383.244,00	21.935.383.244,00
Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal Daerah	-	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00	16.935.383.244,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN NETTO	80.310.221.643,00	48.107.583.756,00	48.107.583.756,00	41.103.287.056,00	34.799.420.026,00	29.125.939.699,00	24.019.807.404,70
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN (SILPA)	-	-	-	0,00	(0,00)	-	0,00

Sumber data : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Tahun 2025-2029 merupakan periode pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 dalam upaya mewujudkan Visi Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan. Provinsi Gorontalo telah melaksanakan pembangunan dan upaya pemajuan daerah yang turut berkontribusi terhadap pembangunan nasional, akan tetapi masih terdapat permasalahan dan tantangan dari berbagai dimensi pembangunan. Masalah yang dihadapi Provinsi Gorontalo dipengaruhi faktor eksternal dan internal yang merupakan dinamika dan dampak perkembangan baik di level daerah, nasional maupun global. Permasalahan-permasalahan tersebut timbul karena belum optimal dalam mengatasi kelemahan dan peluang yang belum dimanfaatkan dengan baik dan berkelanjutan.

4.1. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

Sesuai hasil evaluasi dalam Gambaran Umum kondisi eksisting Provinsi Gorontalo yang telah disajikan dalam Bab 2, bahwa pembangunan di Provinsi Gorontalo terus berkembang dan mengalami kemajuan namun disisi lain masih terdapat permasalahan dan tantangan yang berdampak signifikan sehingga harus ditindaklanjuti dan diselesaikan dengan kebijakan dan program strategis yang terencana, sinergis dan berkelanjutan. Permasalahan pembangunan di Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:

4.1.1 Aspek Ekonomi

a. Daya saing dan produktifitas ekonomi daerah rendah

- Produktifitas ekonomi relatif rendah, kontribusi PDRB terhadap PDB hanya 0,2 persen.
- Kurangnya diversifikasi ekonomi, struktur ekonomi Provinsi Gorontalo dari sisi lapangan usaha masih didominasi sektor primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 38 persen, sedangkan sektor manufaktur hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4% terhadap struktur PDRB;
- Proses produksi bersifat parsial, upaya hilirisasi sektor-sektor perekonomian khususnya disektor pertanian terkendala akses teknologi dan inovasi yang dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam hal pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk;
- Kapasitas dan kualitas SDM terbatas, penguasaan iptek, inovasi dan adaptasi teknologi belum memadai sehingga produk/ jasa yang dihasilkan belum memiliki nilai tambah dan berdaya saing;
- Manajemen kemitraan dan distribusi pemasaran produk baik ekspor maupun perdagangan antar pulau yang cenderung masih belum optimal.

b. Koperasi dan UMKM belum memberikan Kontribusi Signifikan bagi penciptaan nilai tambah

- Pelaku usaha sebagian besar masih berskala mikro (94,5%)
- Rendahnya kontribusi koperasi sector produksi
- Kurangnya penerapan standar sertifikasi teknologi dan inovasi pada koperasi, wirausaha dan UMKM
- Rendahnya kemitraan UMKM dalam rantai nilai industri
- Belum optimalnya ekosistem usaha, kualitas sdm terhadap diversifikasi produk melalui adaptasi teknologi dan inovasi masih terbatas, manajemen koperasi, pemasaran dan perluasan bidang usaha koperasi serta belum masifnya penerapan koperasi berbasis syariah.

c. Produktifitas dan Daya Saing tenaga kerja rendah.

- Sebagian pekerja yang baru memasuki pasar kerja berada di sektor yang memiliki kontribusi rendah terhadap PDRB, dengan upah rendah dan sedikit kesempatan untuk mengembangkan karir, sehingga kurang motivasi untuk meningkatkan produktivitas.
- Kesempatan kerja terbatas, serapan tenaga kerja terbesar disumbang oleh kelompok angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SD sebesar 47,67 persen.
- Tenaga kerja masih didominasi pada sektor informal 61,45 persen dan serapan tenaga kerja masih didominasi sektor pertanian 30,18 persen (tahun 2024), dengan tingkat upah yang relatif kecil..
- Usia muda (15-24) tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Provinsi Gorontalo atau NEET (*Not Employment, Education and Training*) masih cukup tinggi tahun 2024 sebesar 21,89 persen.
- Adanya kecenderungan ketidaksesuaian antara keterampilan kerja yang dimiliki dengan kebutuhan pasar.
- Kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja Laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi.

d. Tingkat produktivitas dan daya saing sektor pertanian dan perkebunan belum optimal.

- Produktivitas komoditi di sektor pertanian belum optimal. Dari sisi kualitas dan harga produk pertanian disebabkan oleh berkurangnya kemampuan/ kualitas lahan dan minimnya sarana dan prasarana produksi yang berbasis teknologi tepat guna.
- Kapasitas SDM petani dan penyuluh belum optimal dalam perkembangan inovasi dan adaptasi teknologi pertanian

- Belum maksimalnya infrastruktur jaringan irigasi dan kualitas air untuk pengairan akibat cemaran limbah pertambangan di hulu dan sedimentasi karena bencana banjir.
- Dampak perubahan iklim dan sistem pengendalian hama yang belum optimal mempengaruhi mutu produk pertanian dan menjadi penyebab terjadinya gagal panen. Diversifikasi komoditi belum dikembangkan dengan maksimal khususnya komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diminati oleh pasar internasional.
- Capaian Nilai Tukar Petani dari tahun 2013 hingga 2023 rata-rata 103,12.
- Akses terhadap teknologi, permodalan serta kelembagaan yang mendukung usaha petani belum optimal.

e. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat

- Ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato, sedangkan Ketersediaan pangan terkecil terdapat di Kota Gorontalo, dan kebutuhan pangan terbesar yaitu di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 294,134,501,750 Kkal. Beberapa wilayah memiliki kebutuhan pangan terbesar, namun ketersediaan pangan yang cukup rendah.
- Pola distribusi pangan rendah sehingga masyarakat yang tinggal di daerah rawan pangan sulit mengakses pangan.

f. Kontribusi pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian daerah

- Pengelolaan kawasan wisata strategis di Provinsi Gorontalo belum optimal, minimnya ketersediaan infrastruktur sarana prasarana di lokasi destinasi, amenities yang terbatas dan belum sesuai dengan standard tujuan wisata mancanegara. Belum adanya paket wisata dengan atraksi menarik dan mempengaruhi lama tinggal wisatawan, aksesibilitas ke lokasi destinasi yang belum optimal, SDM pariwisata masih belum memadai.
- Pengelolaan Produk wisata belum dikembangkan sesuai dengan karakteristik potensi daerah serta promosi sektor pariwisata masih digarap secara konvensional dan parsial.
- Ekonomi Kreatif belum optimal

g. Kondisi infrastruktur dan konektivitas masih belum optimal

- Kondisi infrastruktur seperti jalan, irigasi masih belum optimal, kondisi mantap jalan provinsi tahun 2024 masih di angka 66,1 persen. Panjang jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 137,31 Km, dan rusak ringan sebesar 12,09 Km. Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa

penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya tumbuh rata-rata 0,12 persen.

- Kondisi Daerah Irigasi/DI kewenangan Provinsi untuk jaringan irigasi saluran primer dan sekunder dengan panjang 137.713,58 M dalam kondisi Baik (B) 30,19 %, Rusak Sedang (RS) 35,09 sementara Rusak Berat (RB) 34,72 %
- Konektivitas antar wilayah masih rendah, belum terbukanya beberapa ruas jalan di antaranya Marisa – Tolinggola, Tapa-Atinggola dan beberapa jalur strategis lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi.

h. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.

Implementasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut, serta belum adanya observasi dalam pengelolaan tentang potensi *blue carbon* dipesisir. Tantangan lainnya masih belum optimalnya pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sarana prasarana perikanan masih belum memadai dan belum dikelola dengan baik. Belum optimalnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi di perairan Gorontalo. *Illegal* dan *over fishing* masih tinggi sebab rendahnya sistem pengawasan kelautan. Tingkat kesejahteraan nelayan yang diukur dengan Nilai Tukar Nelayan masih rendah.

i. Energi terbarukan dan efisiensi energi belum optimal

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer tahun 2023 di angka 12,35 persen berada sedikit diatas target yang ditetapkan dalam Rencana Umum Energi Daerah (RUED), tahun 2023 yaitu 11,76%.

j. Perkembangan teknologi digitasi, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.

Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah. Selain itu kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TIK berupa jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan TIK juga diperhadapkan pada tantangan dalam mengadopsi teknologi, serta penerapan teknologi berbasis *Artificial Intelligence*. Kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi riset dan inovasi serta keamanan siber belum memadai.

k. Penataan perkotaan, penanganan kawasan perumahan dan permukiman masih belum optimal.

Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, lingkungan hunian, prasarana sarana umum (PSU) serta peran serta masyarakat untuk penanganan kawasan kumuh dan kondisi permukiman belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Akibatnya di satu sisi telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi

namun di sisi lain pertumbuhan kawasan kumuh semakin meningkat. Layanan SPM bidang Perumahan yg menjadi kewajiban pemerintah daerah yakni pembangunan rumah bantuan bagi korban bencana dan fasilitasi bantuan rumah bagi warga yang rumahnya harus direlokasi akibat program Pemerintah belum mencapai level yg diharapkan.

4.1.2 Aspek Sosial

a. Akses dan Kualitas layanan pendidikan belum merata

- Rata-rata lama sekolah untuk penduduk 15 tahun ke atas rendah (tahun 2024: 8,64)
- Tingginya angka putus sekolah (tahun 2023: 458 SD/MI)
- Layanan pendidikan belum merata, Kualitas Pendidikan masih rendah belum capaian mencapai standar kompetensi minimum pada asesment tingkat nasional
- Kualitas, kuantitas dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan masih terbatas
- Ketersediaan sarana prasarana pendidikan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal belum optimal;
- Kesadaran masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak pendidikan anak usia sekolah masih rendah;
- Kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah satuan pendidikan terakreditasi masih belum optimal, terutama pada jenjang pendidikan khusus dan SMK;
- Pendidikan karakter, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan belum optimal

b. Pelayanan kesehatan belum optimal

- Sarana dan Prasarana layanan kesehatan belum optimal, Rumah Sakit Ainun masih bersatatus Tipe C;
- Umur Harapan Hidup Provinsi Gorontalo tahun 2023 adalah 70,73 lebih rendah dari capaian nasional yaitu 73,93;
- Tingginya angka penyakit menular dan tidak menular seperti Tuberkulosis, HIV Aids, Demam Berdarah;
- Tingginya Angka keluhan penyakit di angka 35,35 pada tahun 2023. keluhan penyakit lebih tinggi dialami oleh Perempuan sebesar 37,27% sedangkan laki-laki sebesar 33,45%.
- Angka Kematian Ibu dan bayi masih tinggi dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya.
- Prevalensi stunting masih tinggi berada di atas rata-rata nasional (26,9%, 2023) urutan 12 secara nasional.
- Belum optimalnya sistem layanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan minimal

- Belum optimalnya sistem ketahanan Kesehatan dari sisi Ketersediaan dan distribusi obat dan alat kesehatan;
- Ketersediaan dan pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) pada fasilitas layanan kesehatan dan menjangkau seluruh wilayah khususnya daerah terpencil.
- Keterbatasan akses terhadap makanan bergizi dan seimbang
- Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat masih rendah
- Akses terhadap sanitasi aman dan air bersih masih rendah

c. Tingkat kemiskinan dan kesenjangan pendapatan

- Provinsi Gorontalo berada di urutan ke-5 sebagai provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi secara nasional. Tahun 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo masih berada diangka 15,15 persen, di tahun 2024 mengalami penurunan 0,58% dan berada diangka 13,87%;
- Karakteristik penduduk miskin Provinsi Gorontalo memiliki tingkat partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah cenderung rendah. Mayoritas bekerja di sektor pertanian dengan rata-rata kepala keluarga penduduk miskin berada pada usia produktif;
- Pengelolaan data sosial ekonomi yang terintegrasi untuk penetapan sasaran penerima program belum optimal;
- Tahun 2023 Gini Ratio masih berada diangka 0,417, diatas rata-rata nasional dan tertinggi diwilayah Sulawesi. Kondisi ketimpangan terbesar berada di daerah perkotaan. Rata-rata peningkatan pengeluaran perkapita perbulan wilayah perkotaan sebesar 11,63 persen, sementara peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diwilayah pedesaan tidak sebesar wilayah perkotaan yaitu hanya sebesar 4,40 persen. Kesenjangan pendapatan ini disebabkan antara lain ketidakmerataan pembangunan, aktivitas ekonomi, aksesibilitas, kualitas SDM.

d. Kesetaraan Gender belum optimal

Indeks Ketimpangan gender tahun 2023 diangka 0,391 berada dibawah IKP nasional yang artinya lebih kecil ketimpangannya namun beberapa dimensi dalam IKG masih rendah yaitu pada dimensi kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan yaitu partisipasi perempuan di politik dan pengambilan keputusan serta dimensi pasar tenaga kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan rendah, kontribusi perempuan terhadap pendapatan rendah. Penyebabnya antara lain keterbatasan perempuan dalam pengambilan keputusan, beban ganda yang menyebabkan perempuan terjebak dalam pekerjaan informal dengan upah rendah dan mengurangi kemampuan mereka untuk mandiri secara ekonomi.

e. Kualitas keluarga, Perlindungan dan Pemenuhan hak kepada Perempuan, anak dan pemuda serta kelompok rentan belum optimal.

- Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat, yang didominasi oleh KDRT dan kekerasan seksual.
- Perkawinan Anak tinggi (tahun 2023 : 10,91)
- Tingginya angka perceraian (tahun 2023: 2.430)
- Indeks Perlindungan Anak masih rendah (tahun 2023: 63,22)
- Indeks Pembangunan Pemuda (2023:53,83), presentase NEET (2024: 21,89)
- Belum optimalnya layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Penyandang Disabilitas dan Lansia yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Provinsi, serta cakupan layanan perlindungan dan pemberdayaan sosial masih rendah.

f. Penerapan Nilai Agama dan Budaya belum optimal

Pengaruh budaya global, akses teknologi dan informasi, perilaku masyarakat yang semakin individualis, pergeseran karakter, pola pikir, moral yang pranatanya mempengaruhi nilai agama dan budaya dalam masyarakat.

4.1.3 Aspek Lingkungan Hidup

a. Menurunnya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Daya dukung lahan menurun seiring dengan alih fungsi lahan yang terus terjadi, aktifitas pertambangan dalam jangka panjang berimplikasi pada hilangnya habitat keanekaragaman hayati. Hasil analisis perkembangan antar waktu Peta jasa ekosistem penyediaan air Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan kinerja jasa ekosistem penyedia air sebesar 20% dari total luas Provinsi Gorontalo sementara wilayah yang jasa ekosistem pengaturan tata air berkategori sedang dan rendah terjadi peningkatan di semua wilayah kabupaten/kota.

b. Kualitas Lingkungan Hidup Belum Optimal

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup /IKLH Provinsi Gorontalo tahun 2024 diangka 78,5 menurun dibandingkan tahun 2023 diangka 79,52 masih termasuk pada kategori BAIK. Kualitas air di Provinsi Gorontalo berada pada kondisi cemar ringan dan cemar sedang. Penurunan kualitas air disebabkan oleh limbah yang mengalir ke badan sungai yang berasal dari aktifitas pertambangan, industri, pertanian, perkebunan dan limbah domestik rumah tangga. Selain itu kualitas udara mengalami penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya kepemilikan kendaraan.
- Kerentanan daya dukung ekosistem laut akibat meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Pengelolaan pesisir dan laut yang tidak berkelanjutan menyebabkan berkurangnya ekosistem terumbu karang dan berkurangnya luasan kawasan mangrove.

- Emisi GRK di Gorontalo cenderung mengalami kenaikan. Dalam kurun waktu enam tahun, kenaikan emisi GRK di Gorontalo mencapai 1.019,75 Gg CO₂e. Urutan sektor penyumbang emisi GRK pada tahun 2022 adalah sektor pertanian, sektor energi, sektor limbah.

c. Pengurangan luasan dan pendangkalan Danau Limboto

Danau Limboto telah ditetapkan menjadi salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Berdasarkan data selang Tahun 2000-2015 luas Danau Limboto berkurang sebesar 1.076 ha atau dengan rata-rata penyusutan sebesar 71,73 ha atau 1,79% pertahunnya. Selain itu terjadinya penurunan kualitas air di Danau Limboto yang disebabkan pada tingginya sedimentasi dan proses eutrofikasi yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogen dan fosfor didalam perairan. Hal lainnya Pertumbuhan enceng gondok yang semakin tidak terkendali yang menyebabkan pendangkalan danau. Aktifitas masyarakat dihilu sungai dan wilayah sekitar yang memanfaatkan danau sebagai sumber mata pencaharian menyebabkan kondisi danau terus mengalami penurunan.

d. Terdapat hutan dan lahan kritis

Luas lahan kritis yang tersebar di dalam kawasan sebesar 90.580,07 Ha sementara di luar kawasan sebesar 134.857,93 Ha. Total lahan kritis tahun 2022 sebesar 225.438 Ha. Luasan lahan kritis lebih besar berada pada wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo. Aktifitas pemanfaatan lahan pertanian yang tidak cerdas iklim juga berada dilahan miring yang semakin tidak terkendali, berdampak pada kondisi dan struktur lahan yang jika tidak diantisipasi menyebabkan kerusakan lahan, erosi dan sedimentasi yang semakin meningkat.

e. Cakupan sanitasi dan air minum layak dan aman masih rendah

- Presentasi Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi diangka 81,72 persen masih terdapat 19,28 persen masyarakat belum memiliki sarana sanitasi layak. Sedangkan cakupan akses sanitasi aman hanya 4,14 persen jauh dibawah target nasional 15 persen tahun 2024.
- Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap akses air minum layak selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan di tahun 2022 diangka 94, 19 meningkat menjadi 96.00 persen pada tahun 2023, namun masih berada dibawah target nasional akses air minum layak 100 persen ditahun 2024. Cakupan akses air minum aman masih rendah, tahun 2023 hanya mencapai 8,3 persen dibawah target nasional 15 persen tahun 2024.

f. Pengelolaan Sampah dan limbah belum optimal.

Optimalisasi TPA Talumelito masih rendah, TPST belum beroperasi maksimal, rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memilah sampah, kelembagaan pengelolaan sampah dan sarana prasarana yang belum memadai. Pengelolaan limbah B3 di Provinsi Gorontalo juga belum dikelola secara mandiri.

g. Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim masih tinggi.

- Indeks Resiko Bencana diangka 116,71 (Irbi, 2023) atau kategori Sedang
- Prioritas Penanganan Resiko Bencana dari tingkat kerentanan berdasarkan kelas resiko adalah bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, tanah longsor, tsunami, gempa bumi dan kekeringan.
- Tata kelola kebencanaan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana, belum optimal
- Sarana prasarana mitigasi bencana termasuk sistem peringatan dini bencana dan infrastruktur resiliens terhadap bencana masih rendah dan masih kurangnya literasi masyarakat yang inklusif terkait kesiapsiagaan bencana.

4.1.4 Tata Kelola Pemerintahan

a. Kapasitas Fiskal Rendah

Kapasitas Fiskal Daerah ada di kategori rendah dengan angka 1,421 tahun 2023. Sedikit mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sejak tahun 2021 pendapatan transfer cenderung menurun, adanya perubahan kebijakan Dana Transfer Daerah untuk *specific grant* dan *block grant*. Belanja pegawai lima tahun terakhir rata-rata meningkat di tahun 2023 mencapai 684.344.820.456. Perlu kebijakan untuk optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah.

b. Pelaksanaan tata kelola pemerintahan belum optimal

- Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2023 dengan Predikat BB. Namun capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang masih berada pada predikat B.
- Akses pelayanan public belum optimal
- Penerapan sistem merit belum optimal, khususnya standar kompetensi jabatan
- Indeks Profesionalitas ASN juga masih berada pada kategori Sedang.
- Pembangunan zona integritas yang belum maksimal, ditandai dengan belum adanya OPD yang mendapat predikat WBK/WBBM.
- Indeks Inovasi Daerah kategori kurang inovatif (2018-2020), ditahun 2021-2022 mengalami peningkatan dan masuk dalam kategori inovatif. Namun daya saing inovasi pembangunan daerah belum berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah.

c. Kapasitas Lembaga Demokrasi yang belum optimal

Capaian Indeks Demokrasi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 Jika dilihat dari ketiga aspek penyusunnya, Nilai aspek kebebasan dan kesetaraan IDI di Provinsi Gorontalo sudah berada pada kategori tinggi masing-masing sebesar 81,68 dan 83,32. Namun, pada aspek kapasitas lembaga demokrasi, capaian Provinsi Gorontalo masih berada pada kategori sedang dengan nilai sebesar 73,43.

4.2 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Sustainable Development Goals atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs/TPB) merupakan komitmen untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi segenap masyarakat dengan prinsip tidak ada satupun yang tertinggal. Panduan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di Indonesia berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Provinsi Gorontalo telah berkomitmen untuk terlibat dalam upaya pencapaian target pembangunan berkelanjutan yang telah diperkuat dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan serta Rencana Aksi Daerah SDGs/TPB Provinsi Gorontalo

Terdapat 17 Tujuan dan 259 indikator pada metadata 2 (dua) yang digunakan untuk mengukur ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hasil evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo yang dilakukan oleh Sekretariat SDGs Provinsi Gorontalo menemukan bahwa 50 indikator diantaranya telah tercapai. Kemajuan yang cukup baik terdapat pada pilar hukum dan tata kelola, 29,41 persen indikator yang telah tercapai. Sementara itu, masih terdapat 37 indikator yang memerlukan perhatian khusus dan perlu percepatan agar kembali *on track*.

Pilar sosial yang perlu mendapatkan perhatian antara lain adalah indikator kemiskinan. Meski menurun, namun menunjukkan tren perlambatan. Indikator lainnya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) dan juga prevalensi stunting. Adapun pada pilar ekonomi, isu yang menjadi tantangan antara lain adalah persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET), di Provinsi Gorontalo menunjukkan peningkatan. Kondisi kemandirian fiskal juga menjadi tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah. Pencapaian target pada pilar lingkungan hidup mengalami permasalahan diantaranya pada pemenuhan layanan dasar air minum. Degradasi lahan juga menjadi persoalan yang perlu untuk diberikan perhatian karena menyebabkan bencana. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya intensitas kejadian bencana di Provinsi Gorontalo seiring dengan meningkatnya luasan lahan kritis.

Dari hasil identifikasi tersebut, terdapat 12 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan prioritas yang perlu menjadi fokus yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.1
Hasil Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	
TPB 1	Tanpa Kemiskinan
TPB 2	Tanpa Kelaparan
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak
TPB 8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi
TPB 10	Berkurangnya kesenjangan
TPB 11	Kota dan Permukiman berkelanjutan
TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab
TPB 13	Penanganan Perubahan Iklim
TPB 14	Ekosistem Laut
TPB 15	Ekosistem Darat
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029

Selain isu dari analisis ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terdapat juga isu lingkungan yang didasari 6 muatan KLHS yang terdiri atas kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kinerja layanan jasa ekosistem, perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup, efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim, tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Berdasarkan 6 muatan KLHS tersebut diperoleh isu antara lain :

1. Kerusakan kawasan danau Limboto
2. Kerusakan ekosistem pesisir
3. Kerusakan hutan dan alih fungsi lahan
4. Bencana Alam
5. Penurunan kualitas dan kuantitas air
6. Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

4.2.2 Penelaahan Terhadap Isu Pembangunan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029

1. Tingkat produktivitas rendah di tengah persaingan global
2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia
3. Pergeseran struktur kelas masyarakat
4. Kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif
5. Krisis lingkungan
6. Geopolitik dan geoekonomi
7. Tata Kelola dan Akuntabilitas Pemerintah

4.2.3 Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo, beberapa isu penataan ruang yaitu berupa :

1. Alih Fungsi Lahan
2. Degradasi Lahan
3. Illegal Logging
4. Pencemaran Lingkungan
5. Banjir
6. Kerusakan sumber daya laut dan pesisir
7. Pendangkalan Danau Limboto
8. Pertambangan Tanpa Izin
9. Kemiskinan

4.2.4 Penelaahan terhadap RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045

Pelaksanaan Periode I RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 merupakan pelaksanaan penguatan pondasi transformasi pembangunan, pada tahap ini target pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,7 persen per tahun. Tahapan awal ini diwujudkan melalui; Transformasi social focus pada pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan social. Transformasi Ekonomi Fokus Pada Penguatan proses hilirisasi berbasis Sumberdaya Alam (SDA) serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Transformasi tata Kelola focus pada kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan focus pada memperkuat supremasi hukum dan stabilitas daerah. Ketahanan social Budaya dan Ekologi Fokus pada penguatan ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan pelaksanaan pembangunan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

RPJMD 2025 - 2029 merupakan tahapan pembangunan 5 (lima) tahunan yang pertama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Periode pertama dari tahapan RPJPD ini sangat penting dalam mewujudkan Visi Jangka Panjang Gorontalo 2025 - 2045, yaitu **Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan**. Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 diarahkan pada pencapaian tujuan dan harapan masyarakat Gorontalo sebagai **Provinsi Madani 2045**. Penyebutan Provinsi Madani berdasarkan kultur dan falsafah hidup masyarakat Gorontalo yang memiliki adab dalam membangun, memaknai dan menjalankan kehidupannya. Visi pembangunan tersebut diukur melalui tingkat kemajuan peradaban, dan keberlanjutan pembangunan dan lingkungan yang ingin dicapai. Berdasarkan hal tersebut, diberikan penjelasan makna visi untuk membentuk kesamaan pandangan dan pemahaman tentang substansi filosofis yang terkandung, agar semua pemangku pembangunan dapat bersinergi memberikan kontribusi dalam pencapaiannya.

Maju diartikan bahwa di tahun 2045 Provinsi Gorontalo mencapai masyarakat yang Sejahtera, Produktif dan Inovatif. *Sejahtera* adalah masyarakat Gorontalo semakin makmur dengan menurunnya kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran semakin kecil, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial. *Produktif*, yaitu pengelolaan sumber daya alam untuk perekonomian yang kompetitif, sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu dan teknologi, meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana, pemerintahan yang professional dan berakhlak, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya investasi dengan keamanan dan ketertiban daerah yang terus terjaga. *Inovatif*, yaitu Pembangunan Gorontalo yang mengedepankan strategi pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi untuk mewujudkan daya saing daerah.

Berkelanjutan dimaksudkan Pembangunan di Provinsi Gorontalo menerapkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan sosial yang adil, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta didukung oleh tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kualitas hidup masyarakat meningkat ditandai

dengan kesehatan yang merata, pendidikan tinggi, lingkungan pemukiman yang bersih dan nyaman, bebas polusi udara air, suara, sampah dan kondisi daratan dan lautan yang tetap lestari dan terjaga dengan baik.

Review RPJPD 2025 – 2045. Rumusan Rencana Pembangunan Daerah dalam RPJMD 2025-2045 tidak boleh terlepas dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2024.

Terwujudnya Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, yang dirumuskan dalam lima sasaran visi yaitu : Peningkatan Pendapatan Perkapita, Kemiskinan menurun, menurunnya ketimpangan, Peningkatan Daya Saing Daerah, Meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas emisi GRK.

Sasaran Pertama, Peningkatan Pendapatan Perkapita Daerah dalam rangka mendukung Sasaran Visi Indonesia Emas dalam mewujudkan Pendapatan Negara Setara dengan Negara Maju. Sasaran visi tersebut diwujudkan dalam pencapaian PDRB perkapita rata-rata 177,62 – 223,84 (Rp. Juta), peningkatan Indeks Ekonomi Biru (*Blue Economy Development Index*) mencapai 69,53 (nilai indeks) serta Peningkatan Kontribusi PDRB industri Pengolahan rata-rata 6,00 – 7,14 persen, melalui peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian berbasis Sumber Daya Alam, serta penciptaan hilirisasi berbasis SDA melalui implementasi teknologi informasi, inovasi, inklusi dan berkelanjutan.

Sasaran Kedua, Peningkatan ekonomi yang inklusif diharapkan dapat mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan **Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang**. Sasaran visi tersebut diwujudkan melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 0,10 – 1,10 %, ratio gini turun menjadi 0,349-0,400, serta kontribusi PDRB Provinsi terhadap Nasional mencapai 0,18 – 0,3 %.

Sasaran Ketiga, Peningkatan Peran Daerah dalam Skala Regional dan Nasional, yang diwujudkan dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing daerah dalam mendukung peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Perwujudan dari sasaran visi tersebut diupayakan melalui penguatan inovasi yang adaptif dan peran aktif daerah dalam membangun dimensi-dimensi pembangunan serta kolaborasi dan kerjasama multipihak baik skala Nasional maupun

Internasional yang diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah yang ditargetkan mencapai 4,5 - 5,0 (indeks).

Sasaran keempat, **Peningkatan daya saing sumber daya manusia** diwujudkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata, adil dan inklusif melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi dan inovasi dan kreativitas. Sasaran visi keempat akan dicapai melalui peningkatan Indeks Modal Manusia mencapai 0,71 ditahun 2045.

Sasaran kelima, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang dicapai melalui upaya **Penurunan Intensitas emisi GRK menuju net zero emisi**. Sasaran visi kelima Gorontalo diwujudkan melalui intensitas Emisi GRK sebesar 98,77% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 87,77 di tahun 2045. Dalam RPJPD ada 3 (tiga) misi pembangunan daerah. Ketiga misi tersebut diupayakan pencapaiannya melalui berbagi arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Selanjutnya, dalam rangka perwujudan Visi Pembangunan 2045, Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan maka ditetapkan 8 Misi (Agenda Pembangunan) yang selaras dengan Misi Pembangunan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 Misi Pembangunan terdiri atas : (1) Mewujudkan Transformasi Sosial, (2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi, (3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola, (4) Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah (5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi (6) Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, (7) Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan ke (8) Mewujudkan kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas. 8 Misi Pembangunan tersebut dikemas kedalam 3 kerangka pembangunan yaitu : 1. Transformasi menuju Gorontalo Madani 2045, 2. Landasan Transformasi dan 3. Kerangka Implementasi dan Transformasi.

Reviu RPJMN 2025-2029. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pembangunan daerah tidak terlepas dari tujuan pembangunan nasional, sebagaimana telah digariskan dalam pembukaan Undang–Undang Dasar Tahun 1945 yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk itu dilakukan penelaahan terhadap RPJMN Tahun 2025 – 2029 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor ... Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029. Hal ini selanjutnya telah didukung dengan kebijakan sinkronisasi periodisasi dokumen perencanaan jangka panjang dan jangka menengah daerah yang telah sama periodisasinya dari pusat hingga daerah.

Sebagaimana Rancangan Awal RPJMN 2025 – 2029, Visi pembangunan untuk 5 (lima) tahun adalah **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"**. Visi ini mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045 yang akan diwujudkan melalui Astha Cita 8 Misi Pembangunan yaitu :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur

Dari hasil review terhadap RPJPD 2025-2045 dan Rancangan RPJMN 2025-2045, maka ditetapkan Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Gorontalo untuk tahun 2025-2029 sebagai berikut ;

5.1 Visi Pembangunan

Dengan memperhatikan arahan RPJPD 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, serta mempertimbangkan permasalahan pembangunan serta isu dan tantangan pembangunan, Gubernur Gorontalo telah menetapkan Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 adalah:

“Gorontalo Maju dan Sejahtera”

Visi Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 tersebut mengandung 2 (dua) unsur penting, yaitu :

Gorontalo Maju, adalah kondisi daerah yang maju, yang ditandai dengan posisi dan keadaan yang lebih baik dan lebih maju dari kondisi saat ini yang diukur dengan peningkatan daya saing produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan, serta meningkatnya kualitas dan ketersediaan infrastruktur dasar serta kualitas sumberdaya manusia.

Gorontalo Sejahtera, yaitu 1) Kondisi daerah yang sejahtera, ditandai dengan meningkatnya Indeks Modal Manusia (IMM), Peningkatan Ekonomi, Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita, penurunan persentase kemiskinan dan penurunan angka pengangguran; 2) Terus membaiknya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance & clean government), dan terciptanya masyarakat berbudaya, beriman dan bertaqwa dengan menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban untuk keberlangsungan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan predikat Opini Pengelolaan Keuangan WTP, terbaik dalam penilaian laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) dan terus memperoleh predikat sebagai daerah teraman.

5.2 Misi Pembangunan tahun 2025-2029

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi “Gorontalo Maju dan Sejahtera” maka ditetapkan 5 (lima) Misi pembangunan, yaitu:

1. Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan
2. Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia
3. Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat
4. Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas
5. Menjadikan “Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah” sebagai spirit pembangunan dan kehidupan masyarakat.

5.3 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sementara Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Berdasarkan arahan visi dan misi di atas serta agenda pembangunan dengan mempertimbangkan arahan dalam Rancangan Awal RPJMN 2025-2029, maka tujuan dan sasaran untuk pencapaian keberhasilan pembangunan Provinsi Gorontalo pada tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut;

5.3.1 Tujuan Pembangunan Daerah

Tujuan pembangunan daerah tahun 2025-2029 difokuskan pada *Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan, Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan.*

Tujuan pertama yakni Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan akan dicapai melalui 2 strategi yakni menciptakan sumber pertumbuhan baru pada sisi produksi (supply side) yang merata dan meningkatkan sisi permintaan (demand side) didukung oleh sektor rill, eksternal, fiskal, dan keuangan. Untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru pada sisi produksi (supply side) yang merata akan didorong melalui : peningkatan produktivitas sektor unggulan daerah, mendorong pembangunan industry pengolahan untuk mendukung hilirisasi, pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta peningkatan aktivitas wisatawan bernilai tambah tinggi dan pengembangan ekonomi kreatif. Selanjutnya untuk meningkatkan sisi permintaan (demand side) didukung oleh sektor rill, eksternal, fiskal, dan keuangan akan didorong melalui upaya :

menjaga konsumsi masyarakat melalui peningkatan peran kelas menengah dan produktivitas tenaga kerja, mendorong investasi berkualitas berbasis potensi unggulan daerah, peningkatan ekspor dan perdagangan antar pulau serta mendorong partisipasi swasta.

Tujuan ini diukur dengan indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB perkapita, dan Indeks Daya Saing Daerah.

Tujuan kedua yaitu penurunan kemiskinan dan kesenjangan akan dilakukan melalui strategi utama yakni pemberdayaan ekonomi berkelanjutan & Inovatif, perlindungan sosial yang Integratif, adaptif dan inklusif, peningkatan akses pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, transportasi, pangan dan penyediaan rumah bagi masyarakat miskin) serta program kewilayahan, konektivitas, pasar kerja, dan lainnya. Tujuan ini diukur dengan indikator Tingkat Kemiskinan dan Rasio Gini.

Tujuan pembangunan ketiga yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia akan dilaksanakan melalui strategi utama yakni peningkatan layanan dasar, peningkatan modal manusia, peningkatan modal sosial budaya. Untuk peningkatan layanan dasar difokuskan pada : percepatan wajib belajar 13 tahun, penuntasan stunting dan tuberculosis, pengembangan RS provinsi dan pengembangan pelayanan kesehatan bergerak dan daerah sulit akses, restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru, tenaga medis, dan tenaga kesehatan, serta dukungan terhadap penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis. Untuk peningkatan modal manusia difokuskan pada : peningkatan sarana dan prasarana sekolah, peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan *Science, Technology, Engineering, Art and Mathematics* (STEAM) berkualitas, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta dukungan terhadap penyelenggaraan makan bergizi gratis untuk siswa dan ibu hamil. Untuk peningkatan modal sosial budaya difokuskan pada pendidikan karakter, agama dan budaya, serta pendidikan keluarga. Tujuan ini diukur dengan Indeks Modal Manusia.

Tujuan pembangunan keempat yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup merupakan salah satu tujuan pembangunan yang berfokus pada upaya memperbaiki dan menjaga kelestarian lingkungan. Tujuan ini dicapai dengan melakukan berbagai upaya seperti pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sampah yang efektif, serta peningkatan akses rumah tangga terhadap sanitasi aman dan air minum layak. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kunci, antara lain Indeks Risiko Bencana yang mencerminkan

tingkat kesiapsiagaan suatu wilayah terhadap bencana, Persentase Penurunan Emisi GRK sebagai upaya mitigasi perubahan iklim, serta efektivitas Pengelolaan Sampah untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu, indikator Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman dan Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak menjadi tolok ukur penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kesehatan lingkungan.

Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Intensitas Emisi GRK.

Tujuan pembangunan kelima adalah Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang berfokus untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan akuntabel. Sasaran utamanya adalah terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, serta hukum yang berkeadilan dan berkepastian. Untuk mencapainya, dilakukan berbagai upaya seperti reformasi hukum, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan berbasis elektronik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Keberhasilan pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator, antara lain Indeks Reformasi Hukum yang menilai kemajuan dalam menciptakan sistem hukum yang adil, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengukur pemanfaatan teknologi untuk efisiensi dan transparansi, Indeks Pelayanan Publik yang menilai kualitas layanan kepada masyarakat, dan Indeks Integritas Nasional yang mengukur tingkat integritas dan upaya pencegahan korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan ini diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi.

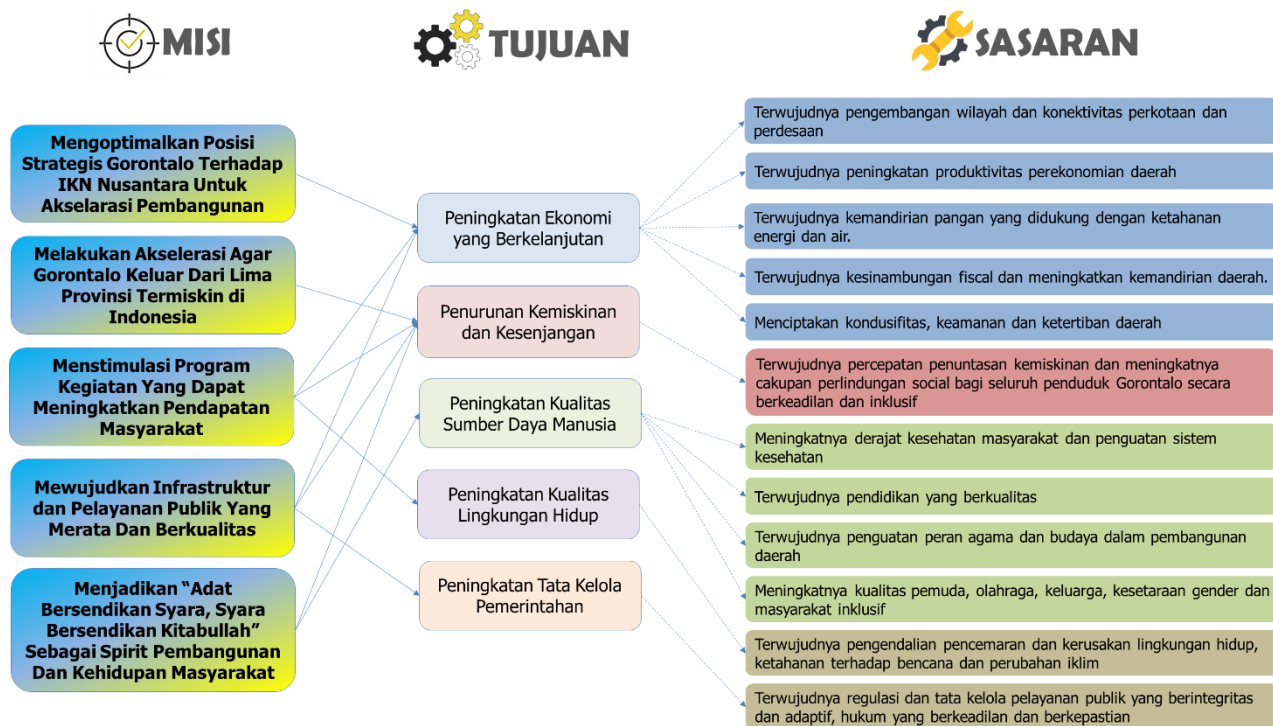
5.3.2 Sasaran Pembangunan Daerah

Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kinerja yang berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Dalam perumusannya, berdasarkan penelaahan Visi dan Misi Kepala Daerah, Rancangan Akhir RPJMN dan RPJPD Provinsi Gorontalo, ditetapkan 12 sasaran dalam RPJMD 2025-2029 sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan
- 2) Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah
- 3) Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air
- 4) Terwujudnya kesinambungan fiscal dan meningkatkan kemandirian daerah.

- 5) Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah
- 6) Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif
- 7) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan
- 8) Terwujudnya pendidikan yang berkualitas
- 9) Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah
- 10) Meningkatkan kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif
- 11) Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim
- 12) Terwujudnya regulasi dan tata kelola pelayanan publik yang berintegritas dan adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian

Keterkaitan antara Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan dapat dicermati pada bagan berikut:



Rumusan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Gorontalo 2025-2029 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Pembangunan Daerah 2025-2029

Visi : Gorontalo Maju dan Sejahtera

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
VISI : GORONTALO MAJU DAN SEJAHTERA												
MISI												
1) Mengoptimalkan posisi strategis Gorontalo Terhadap IKN Nusantara untuk akselerasi pembangunan	1. Peningkatan Ekonomi yang Berkelanjutan	Meningkatnya Daya Saing dan Peningkatan Pendapatan perkapita daerah	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,13	5,54	5,65	5,74	5,80	5,86	5,92	
			PDRB perkapita	Juta Rupiah	44.430.000	47.842.397	49.391.909	50.941.421	52.490.932	54.040.444	55.589.956	
2) Melakukan akselerasi agar Gorontalo keluar dari lima provinsi termiskin di Indonesia		1.1 Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan	Indeks Daya Saing Daerah	Skor	3,58	3,63	3,68	3,73	3,78	3,83	3,88	
			Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,24%	0,24%	0,24%	
3) Menstimulasi program kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat			Kondisi Mantap Jalan	%	66,12	68,4	70,6	71,8	72,6	73,8	75,2	
			Persentase Desa Mandiri (%)	%	28,31%	38,00%	48,81%	59,61%	70,42%	81,23%	92,03%	
4) Mewujudkan infrastruktur pelayanan publik yang merata dan berkualitas			Nilai Investasi									
			a. Penanaman Modal Asing/PMA (Juta Dollar)	Juta Dollar	23,33	73,62	75,91	78,2	80,49	82,78	85,07	
5) Menjadikan "Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah" sebagai spirit		1.2 Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	b. Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (Milyar)	Milyar	3863,73	4110,01	4371,99	4650,67	4947,11	5262,45	5597,88	
			Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD									
			- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	%	8,12	8,21	8,29	8,32	8,36	8,4	8,46	
			- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	%	0,62	0,64	0,68	0,7	0,71	0,72	0,73	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Keterangan		
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030	
pembangunan dan kehidupan masyarakat			- Rasio Kewirausahaan Provinsi	Rasio	3,38	3,62	3,83	4,17	4,25	4,54	4,62		
			- Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio	0,8	0,92	0,98	1,02	1,14	1,21	1,28		
			Persentase Lapangan Kerja yang Baik										
			- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,08	3.07-3.19	3.01-3.26	2.95 - 3.32	2.89 - 3.39	2.83 - 3.46	2.77 - 3.52		
			- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	35	38	40	42	44	46	48		
			- Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	%	69,95	71,12	71,94	72,77	73,59	74,41	75,24		
			Nilai Tukar Petani	%	109,05	109,28	109,83	110,11	110,48	111,82	112,97		
			Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	%	95,69	97,89	99,72	101,32	102,41	103,52	104,37		
			Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT)	%	104,59	105,88	106,21	106,54	106,87	107,20	107,53		
			Pengembangan Pariwisata :										
			- Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	2,29	2,30	2,33	2,34	2,36	2,38	2,40		
			- Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)	Ribu Orang	4,055	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,8		
			Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang	Hari	1,48	1,54	1,61	1,68	1,75	1,82	1,90		
			Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Bintang	%	56,59	55,09	53,48	55,96	58,52	59,07	58,97		
			Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Non-Bintang	%	17,14	18,27	20,54	20,12	19,48	20,33	21,23		
			Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	4,39	4,46	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9		
		1.3	Terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air.	Ketahanan Energi, Air dan Pangan									
				- Konsumsi Listrik per kapita (KWH)	KWH	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
				- Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	SBM/Rp Milyar	72	71	70	70	69	69	69	
				- Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Nilai	13,57	13,21	13,05	12,98	12,14	11,98	11,12	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Keterangan	
					2024	2025	2026	2027	2028	2029		2030
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	38,33	40	42	43	44	45	45	
	1.4	Terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,80%	0,80%	0,81%	0,82%	0,82%	0,83%	0,83%	
			Tingkat Inflasi (%)	%	2,87	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	
			Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	12,25%	12,67%	13,10%	13,55%	14,01%	14,49%	14,98%	
	1.5	Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	59,39	61,46	63,53	65,82	68,11	70,41	74,84	
			Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
	2. Penurunan Kemiskinan dan Kesenjangan	Menurunnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan	%	13,87	13,52	13,08	12,78	12,46	11,94	11,35	
			Rasio Gini	Rasio	0,413	0,408	0,406	0,403	0,400	0,397	0,395	
	2.1	Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	56,55	62	68	72	76	82	86	
			Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	15	16	17	18	19	20	21	
			Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	%	72,04	74,58	76,06	77,75	79,42	81,30	83,11	
	3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	Indeks Modal Manusia	Skor	0,5	0,52	0,53	0,55	0,57	0,6	0,61	
	4.1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan penguatan sistem kesehatan	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,14	71,58	71,96	72	72,46	72,87	72,99	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 KH	189,00	120,75	111,20	113,94	109,90	83,10	85,81	
			Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	24,46	22,14	19,74	18,96	17,88	15,31	13,82	
			Penanganan Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):									
			- Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	
			- Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	93,18	94,37	95,58	96,81	98,05	99,31	100,00	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	
		4.2 Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	Hasil Pembelajaran									
			a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional:									
			- Literasi Membaca	%	0,00 – 16,67	16,67 – 26,67	26,67 – 36,67	36,67 – 46,67	46,67 – 56,67	56,67 – 66,67	66,67 – 66,67	
			- Numerasi	%	0,00 – 16,67	16,67 – 26,67	26,67 – 36,67	36,67 – 46,67	46,67 – 56,67	56,67 – 66,67	66,67 – 66,67	
			b. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional untuk :									
			- Literasi Membaca	%	21,73 – 23,73	23,73 – 26,73	26,73 – 30,73	30,73 – 35,73	35,73 – 47,50	47,50 – 50,50	50,50 – 54,50	
			- Numerasi	%	14,93 – 16,93	16,93 – 18,93	18,93 – 22,93	22,93 – 26,93	26,93 – 30,93	30,93 – 34,93	34,93 – 38,93	
			Rata-rata Lama Sekolah penduduk Usia diatas 15 Tahun	Tahun	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,0	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,17	13,20	13,22	13,24	13,26	13,29	13,31	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,23%	12,09%	12,37%	12,71%	13,11%	13,36%	13,53%	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		4.3 Terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	52,48	53,57	54,12	54,67	55,24	55,81	56,38	
			Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	72,71	73,12	73,29	73,47	73,65	73,82	74,00	
		4.4 Meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	78,03	80,03	81,03	82,03	83,03	84,03	85,03	
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,36	0,34	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22	
			Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,83	61,23	63,28	65,33	67,38	69,43	71,48	
			Jumlah perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON)	Medali	13				15			Pelaksanaan PON berikutnya pada Tahun 2028
	4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	78,5	78,9	79,12	79,67	80,12	80,54	81,12	
			Intensitas Emisi GRK	%	59,58	62,33	64,55	66,72	68,19	69,25	70,12	
		4.1 Terwujudnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim	Indeks Resiko Bencana	Indeks	113,91	110,58	107,94	105,45	102,46	99,06	96,18	
			Persentase Penurunan Emisi GRK (%)									
			- Kumulatif	%	21,05	22	24	25	26	27	28,5	
			- Tahunan	%	35,1	37,2	39,6	41,2	43,5	44,9	46,2	
			Pengelolaan Sampah									
			- Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	14	16	20	22	24	26	28	
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	23	24	28	30	32	34	35	
			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,28	4,65	5,09	5,53	5,97	6,41	6,84	
			Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	96,13	96,85	97,30	97,75	98,20	98,65	99,11	

Visi/Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	5. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	77,51	78	78,50	79	79,50	80	81	
			Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,00	72,00	74,00	75,00	76,00	77,00	79,00	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai	4,13	4,16	4,18	4,20	4,22	4,24	4,26	
			Indeks Pelayanan Publik	Nilai	4,31	4,39	4,41	4,43	4,45	4,48	4,50	

5.4 Program Unggulan Pembangunan 2025-2029

Prioritas utama pembangunan adalah arahan fokus utama dalam pembangunan daerah tahun RPJMD 2025-2029. Berdasarkan Visi dan Misi dan tujuan sasaran Pembangunan serta mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang akan dihadapi pada pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029, maka program unggulan pembangunan dititikberatkan pada :

- 1) **Peningkatan Sumber Daya Manusia** yang mencakup peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan melalui peningkatan kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta peningkatan kualitas layanan dan prasarana kesehatan yang inklusif, peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, penuntasan stunting, pembangunan keluarga, peningkatan peran pemuda, prestasi olahraga serta pemajuan adat dan budaya Gorontalo dengan prinsip falsafah "Adat Bersendikan Syara, Syara Bersendikan Kitabullah".
- 2) **Usaha Mikro Kecil Menengah**, yakni penguatan peran UMKM dalam memajukan basis ekonomi masyarakat dan daerah melalui peningkatan kualitas dan produktivitas UMKM yang inklusif dengan pemanfaatan media digital.
- 3) **Agro Maritim**, focus pada pertanian dan perikanan untuk peningkatan produktivitas dan kualitas hasil melalui penguatan hilirisasi. Pertanian akan dititikberatkan pada pengamanan ketahanan pangan secara nasional dengan potensi pertanian dan peternakan di provinsi Gorontalo. Sektor perikanan fokus pada peningkatan pendapatan nelayan khususnya pada perikanan tangkap dengan skema taksi nelayan.
- 4) **Pariwisata**, menopang ekonomi daerah melalui revitalisasi dan pengembangan objek wisata potensial berstandar nasional dan internasional termasuk potensi Geopark Gorontalo.
- 5) **Infrastruktur**, pemenuhan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan konektivitas transportasi, penyediaan energi, air bersih, layanan teknologi informasi termasuk sarana prasarana di pedesaan dan kota dalam mendukung pengembangan wilayah secara adil, merata, serta berkelanjutan.

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan

Perumusan Strategi dan arah kebijakan dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi yang telah dirumuskan dan dijelaskan tujuan serta sasarannya, sehingga perlu dipertegas dengan bagaimana upaya atau cara untuk mencapai tujuan dan sasaran misi tersebut melalui arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun.

6.1.1 Sasaran Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi dan arah kebijakan sebagai berikut.

Strategi : Peningkatan konektivitas daerah

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dalam menunjang aksesibilitas perdesaan dan perkotaan
2. Fasilitasi penyediaan akses perumahan permukiman layak, terjangkau, dan berkelanjutan untuk masyarakat serta sarana prasarana dan utilitas
3. Mendorong pertumbuhan serta pengembangan pelabuhan dan bandara sebagai pintu masuk-keluar dan jalur distribusi barang & jasa
4. Pengembangan konektivitas darat dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan
5. Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi potensi wisata dan pengembangan produk unggulan berbasis daya dukung wilayah strategis
6. Dukungan pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.
7. Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.1
Indikator dan Target Sasaran 1

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,24%	0,24%	0,24%
2	Kondisi Mantap Jalan	%	66,12	68,4	70,6	71,8	72,6	73,8	75,2
3	Persentase Desa Mandiri (%)	%	28,31%	38,00%	48,81%	59,61%	70,42%	81,23%	92,03%
4	Penanaman Modal Asing/PMA (Juta Dollar)	Juta Dollar	23,33	73,62	75,91	78,2	80,49	82,78	85,07
5	b. Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN (Milyar)	Milyar	3863,73	4110,01	4371,99	4650,67	4947,11	5262,45	5597,88

6.1.2 Sasaran Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah

Strategi yang diterapkan dalam mencapai sasaran ini dibagi atas 3 strategi yaitu :

- 1) Strategi pertama adalah Peningkatan Produktivitas UMKM, IKM, Koperasi, dan Tenaga Kerja, yang akan dilakukan melalui kebijakan :
 1. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.
 2. Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah.
 3. Pengembangan Koperasi berbasis produksi dan kewirausahaan.
 4. Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.
 5. Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.
- 2) Strategi kedua yaitu Peningkatan Produktivitas Pertanian dan Perikanan yang akan dilaksanakan melalui kebijakan :
 1. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian yang modern dan berkelanjutan
 2. Peningkatan populasi sapi, kambing, unggas dan ternak lainnya
 3. Peningkatan luasan lahan pertanian (cetak sawah baru)
 4. Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian atau fasilitator pendamping
 5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
 6. Penyediaan sarana dan prasarana perikanan yang modern dan berkelanjutan
 7. Ekstensifikasi dan Intensifikasi usaha dan industri Sumber Daya Perikanan dan Kelautan
 8. Pengembangan Tempat Pendaratan dan Pelelangan Ikan
 9. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting.
- 3) Strategi ketiga yaitu Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan dilakukan melalui kebijakan:
 1. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) pariwisata seperti Botumoito, Minanga, Hiu Paus Botubarani, dan Geosite dalam Geopark Gorontalo
 2. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata dan ekonomi kreatif berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi.
 3. Pembangunan ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis riset dan inovasi untuk pengembangan lapangan kerja

4. Peningkatan kualitas promosi pariwisata

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.2
Indikator dan Target Sasaran 2

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	- Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	%	8,12	8,21	8,29	8,32	8,36	8,4	8,46
	- Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	%	0,62	0,64	0,68	0,7	0,71	0,72	0,73
	- Rasio Kewirausahaan Provinsi	Rasio	3,38	3,62	3,83	4,17	4,25	4,54	4,62
	- Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio	0,8	0,92	0,98	1,02	1,14	1,21	1,28
	- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,08	3,07-3,19	3,01-3,26	2,95 - 3,32	2,89 - 3,39	2,83 - 3,46	2,77 - 3,52
	- Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	35	38	40	42	44	46	48
	- Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	%	69,95	71,12	71,94	72,77	73,59	74,41	75,24
	Nilai Tukar Petani	%	109,05	109,28	109,83	110,11	110,48	111,82	112,97
	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	%	95,69	97,89	99,72	101,32	102,41	103,52	104,37
	Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT)	%	104,59	105,88	106,21	106,54	106,87	107,20	107,53
	- Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	2,29	2,30	2,33	2,34	2,36	2,38	2,40
	- Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	Ribu Orang	4,055	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,8
	Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang	Hari	1,48	1,54	1,61	1,68	1,75	1,82	1,90
	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Bintang	%	56,59	55,09	53,48	55,96	58,52	59,07	58,97
	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Non-Bintang	%	17,14	18,27	20,54	20,12	19,48	20,33	21,23
	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	4,39	4,46	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9

6.1.3 Sasaran terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air

Strategi yang dilakukan adalah penguatan kemandirian pangan dan ketahanan energi dan air.

Kebijakan pembangunan dalam pencapaian sasaran ini adalah:

1. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur sumber daya air
2. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai.
3. Pengembangan Flood Forecasting Warning System.
4. Perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir dari risiko abrasi.
5. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food, Energy-Water (FEW) Nexus
6. Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.3
Indikator dan Target Sasaran 3

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Konsumsi Listrik per kapita (KWH)	KWH	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
2	Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	SBM/Rp Milyar	72	71	70	70	69	69	69
3	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Nilai	13,57	13,21	13,05	12,98	12,14	11,98	11,12
4	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	38,33	40	42	43	44	45	45

6.1.4 Sasaran terwujudnya kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah

Pencapaian sasaran ini dilakukan dengan strategi peningkatan upaya extensifikasi dan intensifikasi Pendapatan daerah serta peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien.

Kebijakan yang akan dilakukan adalah:

1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui extensifikasi dan Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD).
2. Pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), *Corporate Social Responsibility* (CSR), pendanaan *Filantrophy*, jasa ekosistem pasar karbon, serta pembiayaan alternative lainnya.
3. Peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan serta optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD).
4. Penguatan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.
5. Penguatan pengendalian ekonomi dan pembangunan

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.4
Indikator dan Target Sasaran 4

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,80%	0,80%	0,81%	0,82%	0,82%	0,83%	0,83%
2	Tingkat Inflasi (%)	%	2,87	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8
3	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	12,25%	12,67%	13,10%	13,55%	14,01%	14,49%	14,98%

6.1.5 Sasaran Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui, strategi Penguatan koordinasi dan komitmen kerjasama serta gotong royong melalui kearifan lokal seperti "Mohuyula" dalam menjaga keamanan dan ketertiban daerah.

Arah Kebijakan yang dilakukan adalah :

1. Peningkatan Koordinasi dalam meningkatkan kewaspadaan, deteksi, cegah dini pada masyarakat untuk menjamin stabilitas politik, keamanan dan ketertiban dan perlindungan masyarakat.
2. Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, penguatan komunikasi publik, kesetaraan dan kebebasan.
3. Pelaksanaan komitmen kebangsaan dengan memperkuat nilai-nilai lokal, meningkatkan kerukunan beragama dengan memperhatikan inklusivitas serta penguatan karakter dan wawasan kebangsaan sesuai nilai-nilai Pancasila;
4. Penguatan ruang dialog, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat dalam pemantapan demokrasi dan penanganan konflik sosial.
5. Mendorong peningkatan pengawasan keamanan di wilayah laut dengan pemanfaatan teknologi.
6. Optimalisasi pemenuhan perlindungan, penegakan dan pemajuan HAM.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.5
Indikator dan Target Sasaran 5

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	59,39	61,46	63,53	65,82	68,11	70,41	74,84
2	Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang

6.1.6 Sasaran Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif

Strategi yang dilakukan adalah :

- 1) Strategi pertama adalah Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan inklusif, dengan kebijakan:
 1. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif
 2. Pendekatan pemanfaatan satu data tunggal sosial ekonomi sebagai *baseline* data sasaran penerima manfaat

3. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk kelompok rentan seperti perempuan kepala keluarga, lansia, dan disabilitas.
 4. Peningkatan kapasitas keluarga miskin, terutama yang memiliki anak, penyandang disabilitas, dan/atau lansia
 5. Peningkatan cakupan jaminan kesehatan
- 2) Strategi kedua yaitu kolaborasi penanggulangan kemiskinan daerah melalui perencanaan, pendanaan, dan intervensi yang sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dengan kebijakan :
1. Penguatan fungsi dan peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi dan Kabupaten Kota dalam penanggulangan kemiskinan daerah
 2. Optimalisasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi melalui penguatan komitmen bersama antara provinsi dan kabupaten/kota dalam pendanaan dan penentuan sasaran intervensi program
 3. Pengendalian dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan daerah
 4. Memperkuat evaluasi rencana APBD Kabupaten/Kota dalam mendukung sinergi pembangunan
- 3) Strategi ketiga yaitu Pemenuhan akses hunian layak dan penanganan pemukiman kumuh, dengan arah kebijakan:
1. Penyediaan akses perumahan layak, terjangkau, dan berkualitas untuk masyarakat miskin
 2. Penanganan kawasan kumuh

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.6
Indikator dan Target Sasaran 6

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	56,55	62	68	72	76	82	86
2	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	15	16	17	18	19	20	21
3	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	%	72,04	74,58	76,06	77,75	79,42	81,30	83,11

6.1.7 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penguatan Sistem Kesehatan

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi peningkatan upaya promotif, preventif, kuratif serta pembudayaan perilaku hidup sehat.

Kebijakan pembangunan yang dilakukan adalah:

1. Penguatan dan pengembangan upaya promosi kesehatan
2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak.

3. Percepatan penurunan stunting dan percepatan eliminasi penyakit tidak menular dan menular seperti HIV AIDS, tuberkulosis, malaria (ATM) melalui pendekatan integrasi multisektor.
4. Gerakan Konsumsi Pangan yang beragam bergizi seimbang dan aman (B2SA)
5. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (*mobile health services*), khususnya untuk daerah kepulauan dan daerah terpencil dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam.
6. Peningkatan sarana dan prasana rumah sakit
7. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan Kesehatan termasuk pengembangan kompetensi
8. Pengembangan dan pengolahan system air limbah.*

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.7
Indikator dan Target Sasaran 7

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,14	71,58	71,96	72	72,46	72,87	72,99
2	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 KH	189,00	120,75	111,20	113,94	109,90	83,10	85,81
3	Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	24,46	22,14	19,74	18,96	17,88	15,31	13,82
4	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
5	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	93,18	94,37	95,58	96,81	98,05	99,31	100,00
6	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50	99,50

6.1.8 Sasaran Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas

Untuk mencapai sasaran tersebut dilakukan melalui strategi Peningkatan dan pemerataan akses, mutu dan kualitas pendidikan, dengan penerapan kebijakan sebagai berikut :

1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
2. Pencegahan dan penanganan anak tidak sekolah
3. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antar daerah
4. Penguatan kualitas pendidikan vokasi dan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi yang sesuai dengan potensi unggulan daerah
5. Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif
6. Penyediaan dan peningkatan akses pendidikan
7. Penyediaan dan peningkatan layanan Sekolah Luar Biasa (SLB)
8. Peningkatan kualitas literasi masyarakat
9. Dukungan terhadap Program Hasil Terbaik Cepat Memberi Makan Bergizi Gratis

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.8
Indikator dan Target Sasaran 8

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional:								
1	- Literasi Membaca	%	0,00 – 16,67	16,67 - 26,67	26,67 - 36,67	36,67 - 46,67	46,67 - 56,67	56,67 - 66,67	66,67 - 66,67
2	- Numerasi	%	0,00 – 16,67	16,67 - 26,67	26,67 - 36,67	36,67 - 46,67	46,67 - 56,67	56,67 - 66,67	66,67 - 66,67
	Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional untuk :								
3	- Literasi Membaca	%	21,73 – 23,73	23,73 – 26,73	26,73 – 30,73	30,73 – 35,73	35,73 – 47,50	47,50 – 50,50	50,50 – 54,50
4	- Numerasi	%	14,93 – 16,93	16,93 – 18,93	18,93 – 22,93	22,93 – 26,93	26,93 – 30,93	30,93 – 34,93	34,93 – 38,93
5	Rata-rata Lama Sekolah penduduk Usia diatas 15 Tahun		8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,0
6	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,17	13,20	13,22	13,24	13,26	13,29	13,31
7	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,23%	12,09 %	12,37 %	12,71 %	13,11 %	13,36 %	13,53 %

6.1.9 Sasaran terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah

Kebijakan ini akan dicapai melalui strategi pembangunan agama dan budaya melalui pelestarian budaya, pemeliharaan sejarah dan cagar budaya, dan pelayanan keagamaan, adat dan budaya dengan arah kebijakan :

1. Peningkatan potensi warisan budaya melalui perlindungan, pemanfaatan, dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat
2. Penguatan kerukunan antar etnis dan agama.
3. Dukungan terhadap pendidikan keagamaan serta sarana dan prasarana keagamaan diantaranya pembangunan Islamic Center Provinsi Gorontalo.
4. Pengembangan pendidikan karakter sejak dini.

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.9
Indikator dan Target Sasaran 9

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	52,48	53,57	54,12	54,67	55,24	55,81	56,38
2	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	72,71	73,12	73,29	73,47	73,65	73,82	74,00

6.1.10 Sasaran meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif

Sasaran ini akan dicapai melalui 2 (dua) strategi yaitu :

- 1) Strategi pertama adalah Peningkatan ketahanan keluarga, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan daerah. Strategi ini akan dicapai dengan kebijakan antara lain :
 1. Peningkatan peran keluarga untuk mendukung penguatan moral masyarakat
 2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
 3. Pemberdayaan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
 4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah
- 2) Strategi kedua yaitu Peningkatan peran pemuda dalam pembangunan dan peningkatan prestasi olahraga dengan kebijakan pembangunan antara lain :
 1. Pemberdayaan pemuda dalam pembangunan daerah
 2. Pengembangan sistem pembinaan olahraga
 3. Pengembangan lembaga dan organisasi olahraga

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.10
Indikator dan Target Sasaran 10

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,36	0,34	0,32	0,29	0,27	0,24	0,22
2	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	57,83	61,23	63,28	65,33	67,38	69,43	71,48
3	Jumlah perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON)	Jumlah	13				15		

6.1.11 Sasaran Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

- (1) Strategi pertama yang akan dilakukan dalam pencapaian sasaran ini adalah Mendorong pembangunan infrastruktur pelayanan publik yang berkelanjutan, dengan kebijakan:
 1. Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.
 2. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang)
 3. Pembinaan dan advokasi pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota
 4. pengendalian bahan dan limbah berbahaya dan beracun

5. Pemenuhan dan penyediaan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
 6. Penguatan lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
- (2) Strategi kedua untuk pencapaian sasaran ini, yakni peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pemanfaatan SDA, termasuk energi berbasis lingkungan serta Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pascabencana. Kebijakan pembangunan yang dilaksanakan:
1. Penyediaan infrastruktur pemerintahan daerah yang berketahanan bencana dan iklim serta inklusif
 2. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim.
 3. Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas.
 4. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim.
 5. Pengendalian rencana tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi
 6. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)
 7. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan
 8. Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan Masyarakat.
 9. Pengelolaan hutan di luar kawasan hutan negara dan daerah aliran sungai (DAS) yang berkelanjutan

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.11
Indikator dan Target Sasaran 11

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Resiko Bencana	Indeks	113,91	110,58	107,94	105,45	102,46	99,06	96,18
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)								
2	- Kumulatif	%	21,05	22	24	25	26	27	28,5
3	- Tahunan	%	35,1	37,2	39,6	41,2	43,5	44,9	46,2
	Pengelolaan Sampah								
4	- Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	14	16	20	22	24	26	28
5	- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	23	24	28	30	32	34	35
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,28	4,65	5,09	5,53	5,97	6,41	6,84
8	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	96,13	96,85	97,30	97,75	98,20	98,65	99,11

6.1.12 Sasaran terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian

Strategi yang akan dilaksanakan yaitu dengan penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi, peningkatan manajemen aparatur sipil negara (ASN) yang professional, transparan, kompetitif untuk pelayanan publik dan pembangunan, peningkatan kualitas pengawasan dan penegakan produk hukum daerah.

Kebijakan yang akan dilaksanakan adalah :

1. Optimasi, harmonisasi dan peningkatan layanan hukum dan kualitas produk hukum daerah.
2. Peningkatan kualitas penyusunan perencanaan dan kebijakan Pemerintahan, pelaksanaan, serta pengawasan pembangunan daerah
3. Penguatan manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah serta penguatan implementasi Satu Data Indonesia (SDI)
4. Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan kompetensi SDM
5. Peningkatan kualitas manajemen ASN berbasis sistem merit
6. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan peningkatan kualitas pelayanan publik
7. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan barang dan jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.
8. Peningkatan kepatuhan penyelenggaraan manajemen kearsipan

Pencapaian Sasaran ini akan diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

Tabel 6.12
Indikator dan Target Sasaran 12

No	Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70,00	72,00	74,00	75,00	76,00	77,00	79,00
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,13	4,16	4,18	4,20	4,22	4,24	4,26
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,31	4,39	4,41	4,43	4,45	4,48	4,50

6.2 Kebijakan Pengembangan Wilayah

Pengembangan kawasan merupakan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, maka ditetapkan kawasan strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi.

A. Kawasan Strategis Nasional

- (1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Gorontalo – Paguyaman – Kwandang
- (2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. KSN Danau Limboto, dan
 - b. KSN Teintegrasi Ekoregion Laut Sulu - Sulawesi
- (3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yaitu :
 - a. KSN Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara

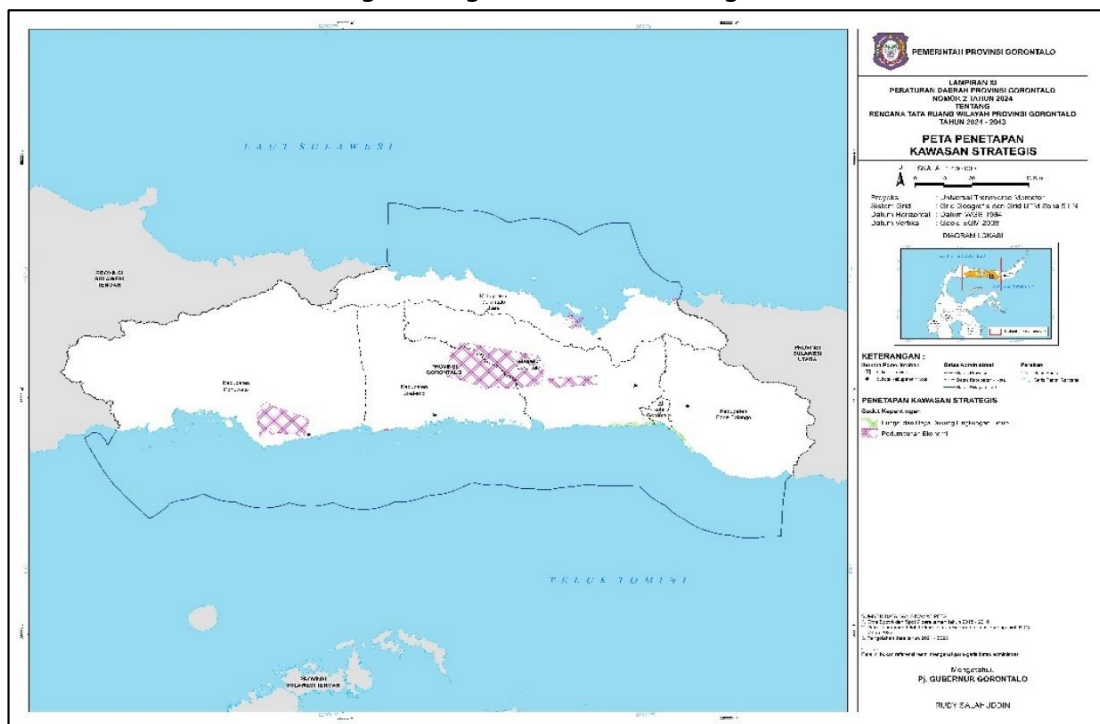
B. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas :

- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - a. KSP Pariwisata Botumoito di Kabupaten Boalemo dan Laut
 - b. KSP Pariwisata Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut;
 - c. KSP Pertanian Terpadu Paguyaman – Wonosari di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo;
 - d. KSP Pertanian Terpadu Randangan dan sekitarnya di Kabupaten Pohuwato
 - e. KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut;
 - f. KSP Industri Terpadu Tibawa Pulubala di Kabupaten Gorontalo

Gambar 6.1

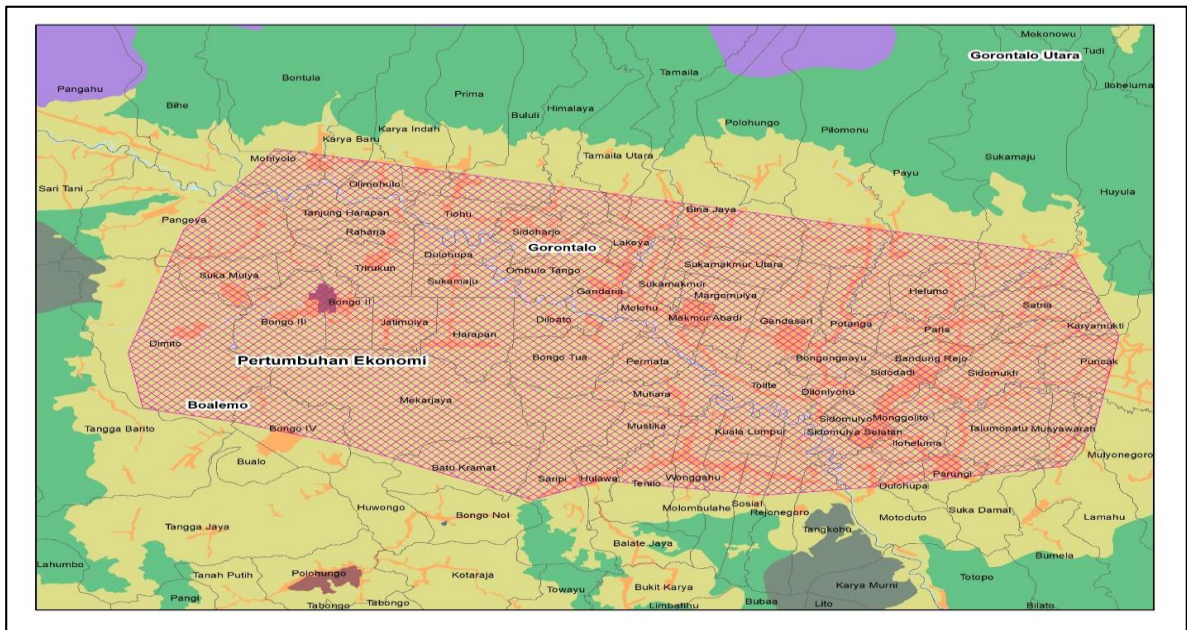
Peta Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi



Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2023-2024

Gambar 6.2

KSP Pertanian Terpadu Paguyaman – Wonosari Kab. Boalemo



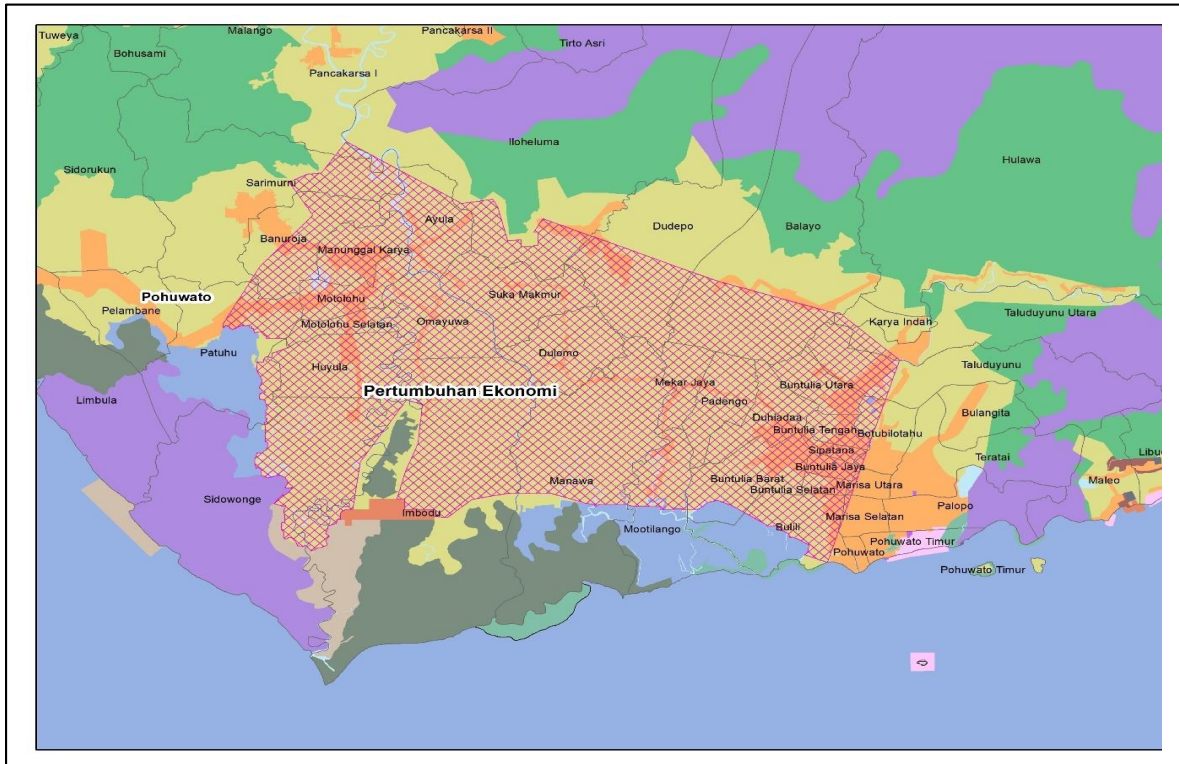
Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2023-2024

Wilayah Paguyaman – Wonosari menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang cukup potensial untuk dikembangkan, yang didukung dengan ketersediaan lahan yang masih memadai. Pengembangan kawasan strategis Provinsi (KSP) Pertanian, Terpadu Paguyaman – Wonosari di Kabupaten Boalemo, dikembangkan melalui upaya :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lahan pertanian berkelanjutan;
2. Peningkatan kapasitas sarana prasarana pertanian seperti jaringan irigasi;
3. Mengembangkan fasilitas penunjang pertanian melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan;
4. Mengembangkan industri pertanian berbasis pada agrobisnis;
5. Pengembangan sistem pertanian terpadu yang terintegrasi;
6. Pengembangan sarana prasarana pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian.

Gambar 6.3

KSP Pertanian Terpadu Randangan di Pohuwato



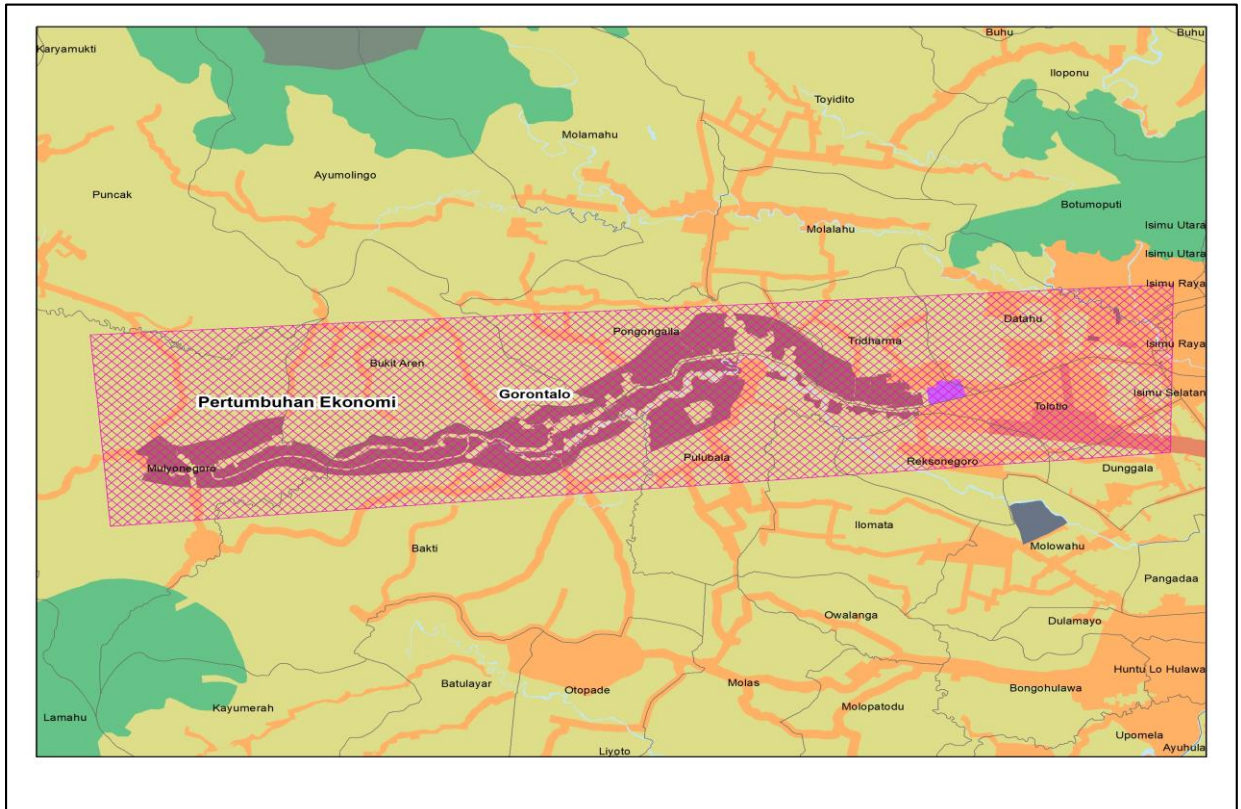
Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2023-2024

Kawasan randangan ditetapkan sebagai salah satu KSP Pertanian karena memiliki produksi pertanian sangat potensial ditunjang dengan Bendungan Randangan yang dapat mengairi areal persawahan teknis seluas 8.963 Ha. Komoditi potensial di kawasan randangan diantaranya Padi, Jagung, Kelapa, Sawit dan Kakao. Pengembangan kawasan strategis Provinsi (KSP) Pertanian Terpadu Randangan di Kabupaten Pohuwato, dikembangkan melalui upaya :

1. Peningkatan kapasitas sarana prasarana pertanian seperti jaringan irigasi;
2. Pengembangan sistem pertanian terpadu yang terintegrasi;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lahan pertanian berkelanjutan;
4. Mengembangkan fasilitas penunjang pertanian melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan;
5. Mengembangkan industri pertanian berbasis pada agrobisnis;
6. Pengembangan sarana prasarana pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian.

Gambar 6.4

KSP Industri Terpadu Tibawa – Pulubala Kab. Gorontalo



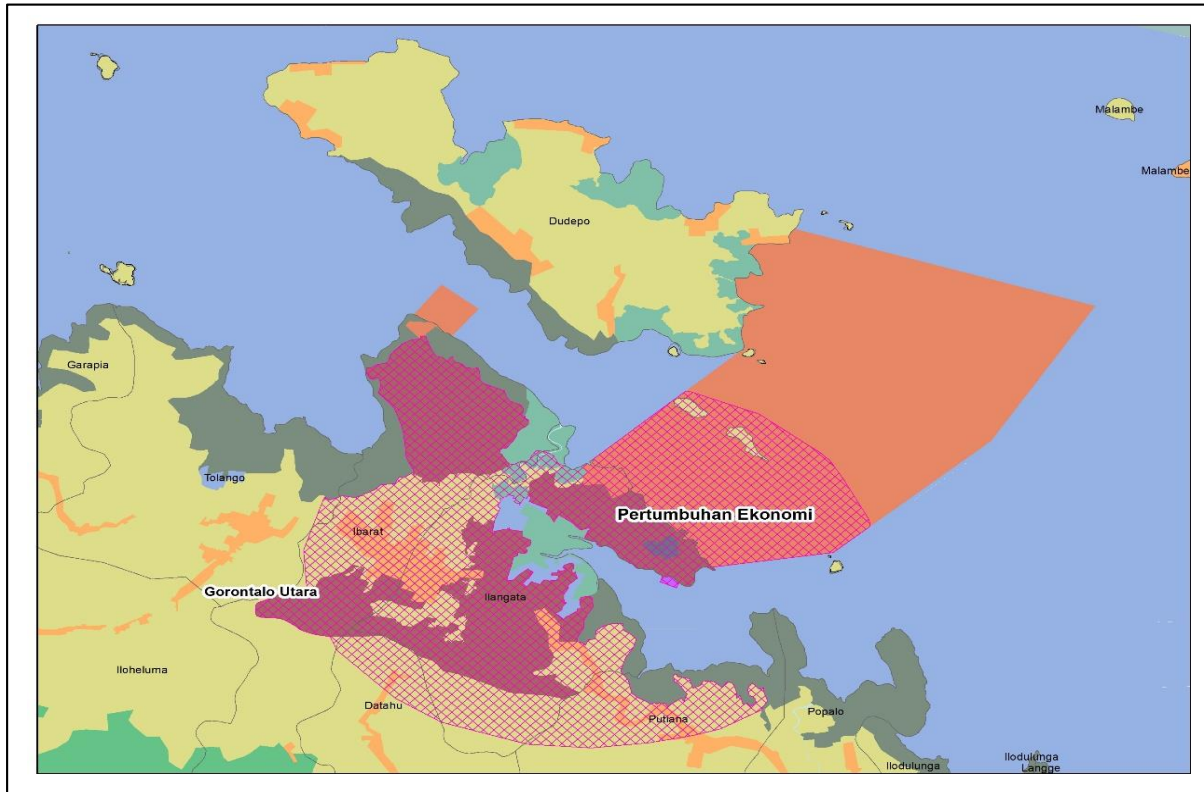
Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2023-2024

Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Tibawa – Pulubala di Kabupaten Gorontalo, diupayakan melalui :

1. Pengembangan simpul-simpul Transportasi untuk menunjang kegiatan industri.
2. Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah hulu dan hilir industri.
3. Pembangunan sarana prasarana pergudangan bahan baku maupun barang hasil produksi untuk mendorong ekspor.
4. Ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai.
5. Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk.
6. Pengembangan Teknologi dalam meningkatkan kualitas produk.
7. Memperluas kerjasama industri melalui peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor.
8. Peningkatan ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri.

Gambar 6.5

KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kab. Gorontalo Utara dan Laut

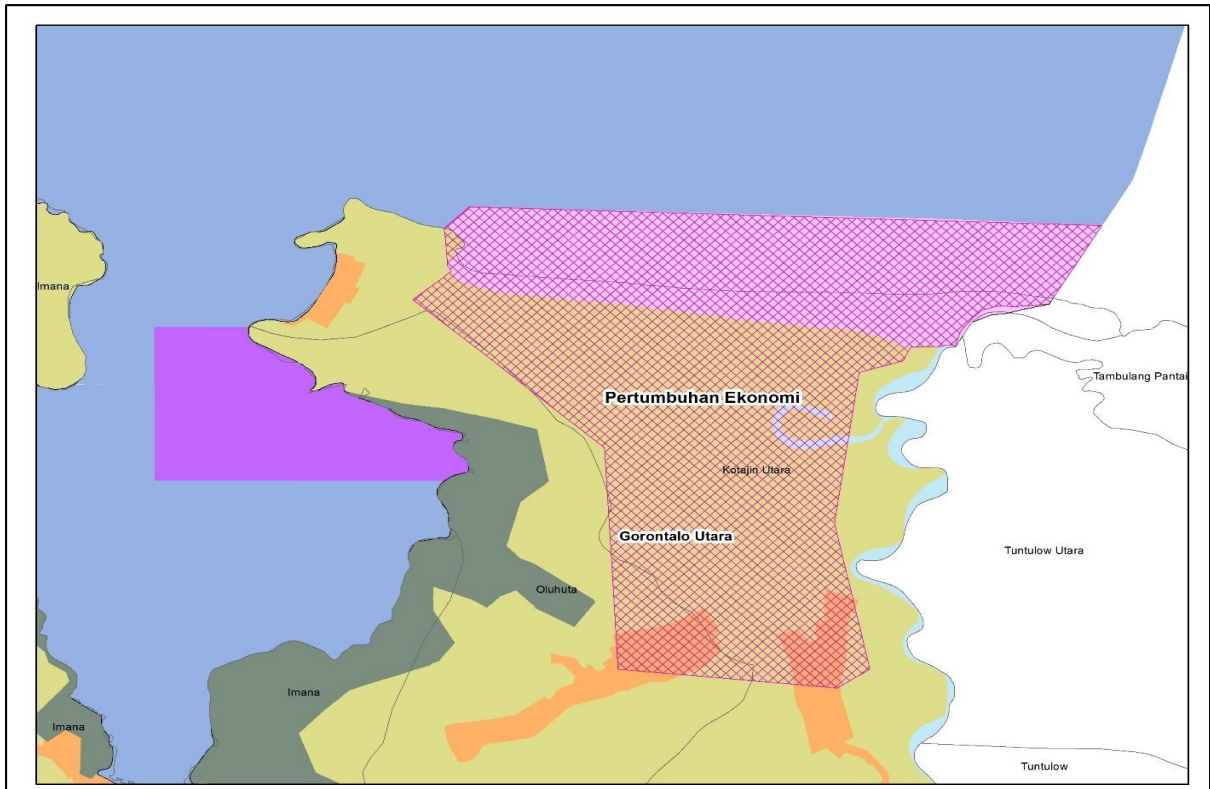


Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2023-2024

Kawasan strategis Provinsi (KSP) Terintegrasi Anggrek berada di Kabupaten Gorontalo Utara dan Wilayah Laut pesisir utara Pulau Sulawesi. KSP Terintegrasi Anggrek menjadi sangat strategis sebagai pendorong utama percepatan pembangunan Gorontalo. KSP Provinsi berada dikawasan Pelabuhan Anggrek sebagai jalur transportasi laut, dengan akses mudah ke jalur perdagangan internasional utama, yang ditunjang dengan potensi agribisnis yang kuat dengan produk unggulan pertaniannya. Pengembangan kawasan strategis Anggrek diupayakan melalui (1) Peningkatan sarana dan prasarana melalui skema pendanaan alternatif (KPBU), dan (2) Pengembangan aksesibilitas dalam menunjang konektivitas logistik.

Gambar 6.6

KSP Pariwisata Minanga di Kab. Gorontalo Utara dan Laut



Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2043

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kawasan sangat potensial karena memiliki garis pantai yang cukup panjang di wilayah Laut Sulawesi, serta berada di jalur trans Sulawesi. Pengembangan KSP Minanga diupayakan melalui :

1. Membangun dan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas di kawasan Pariwisata yang memperhatikan aspek keberlanjutan.
 2. Mendorong peningkatan 3 A (Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi) di kawasan pariwisata.
 3. Mendorong sarana prasarana infrastruktur dasar di kawasan pariwisata yang dapat menunjang kegiatan wisata seperti jalan, drainase dan sebagainya.
 4. Mendorong investasi sektor pariwisata dalam penyediaan sarana pokok, penunjang dan pelengkap pariwisata (*tourisme superstructures*).
 5. Mendorong peningkatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menunjang pariwisata.
- (2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu KSP Geopark Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo dan Laut. KSP Geopark dimaksudkan untuk peningkatan konservasi dan preservasi terhadap sumber daya alam berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah kegiatan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan ekonomi, peningkatan kegiatan pariwisata edukasi terhadap sumber daya geologi.

6.2.1. Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota

Isu strategis pengembangan wilayah kabupaten dan kota di provinsi Gorontalo yaitu, belum optimalnya konektivitas darat, tingkat kemiskinan cukup tinggi di pedesaan sebesar 21,62% pada tahun 2024, dan hanya kota Gorontalo yang tingkat Kemiskinan dibawah rata-rata provinsi. Isu lainnya adalah persebaran penduduk yang tidak merata serta daerah perkotaan dengan kemajuan pembangunan yang pesat memiliki daya tarik kuat untuk dijadikan tempat penduduk bermigrasi. Data empiris menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Gorontalo terpusat di Kota Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 79,59 kilometer persegi kepadatan penduduk mencapai 2.510 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kesejahteraan dan pendidikan dimana Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan hanya kota Gorontalo yang angkanya berada di atas rata-rata Provinsi Gorontalo. Dari sisi perekonomian memperlihatkan bahwa sumber penghasilan utama dari sector primer, Gini Ratio di wilayah pedesaan pada tahun 2024 tercatat sebesar 0,402, sedangkan di wilayah perkotaan tercatat sebesar 0,400. Kemandirian fiscal sangat rendah, dimana Rasio kapasitas fiscal kab/kota masuk kategori rendah dan sangat rendah, kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo Utara kategori sedang. Seringnya terjadi bencana banjir dan longsor di beberapa wilayah kabupaten dan kota juga menjadi perhatian dalam pembangunan daerah kedepannya. Kebijakan pembangunan untuk kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

1. Kota Gorontalo

Tabel 6.13

Prediksi Capaian Indikator Makro Kota Gorontalo

No	Uraian	Target 2029
1.	Tingkat Kemiskinan	4,83 – 5,83 Persen
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Rata-rata 5,71 Persen
3.	Tingkat Pengangguran	3-4 Persen

Arah pengembangan Wilayah Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi, diarahkan sebagai *Sentra Perdagangan dan Jasa*.

Tabel 6.14

Indikasi Intervensi Pembangunan dan Pendanaan di Kota Gorontalo

No.	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
1	Pengembangan sarana prasarana wilayah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo
2	Pengembangan dan fasilitasi infrastruktur transportasi, seperti Fasilitasi Penyelesaian Pembangunan GORR Segmen 3	APBN/APBD Provinsi
3	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi, seperti Jl. Beringin, Jl. Brigjen Piola Isa, Jl. Moh. Tayeb Gobel	APBD Provinsi
4	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Geopark dan Peti Kemas dan Pergudangan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo

5	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo
6	Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi dengan Sumber Energi Baru Terbarukan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo
7	Peningkatan layanan pendidikan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo
8	Peningkatan layanan kesehatan seperti layanan Laboratorium Kesehatan Daerah	APBD Provinsi
9	Pengembangan Kawasan Perkotaan, seperti Kawasan Kota Tua, Perdagangan dan Jasa, dan Permukiman	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo
10	Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial untuk pengurangan kemiskinan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo
11	Optimalisasi pengelolaan Persampahan, Limbah B3, dan Sanitasi Perkotaan	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo
12	Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi/ digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan	APBD Provinsi/ APBD Kota Gorontalo
13	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo
14	Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Sarana Prasarana Olah Raga, Seni dan Budaya	APBN/APBD Provinsi/APBD Kota Gorontalo

2. Kabupaten Gorontalo

Tabel 6.15
Prediksi Capaian Indikator Makro Kabupaten Gorontalo

No	Uraian	Target 2029
1.	Tingkat Kemiskinan	13,55 – 14,55
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,40 – 5,00 %
3.	Tingkat Pengangguran	1,36

Pengembangan kewilayahan di Kabupaten Gorontalo sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi, didorong sebagai **Sentra Pengolahan Berbasis Sumber Daya Alam serta pusat konektivitas antar wilayah**, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

Tabel 6.16

Indikasi Intervensi Pembangunan dan Pendanaan di Kabupaten Gorontalo

No.	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
1	Dukungan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Limboto	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
2	Pengembangan Kawasan Terpadu Industri Terpadu Tibawa – Pulubala, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Geopark Gorontalo.	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
3	Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tibawa, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Limboto dan Tolangohula	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
4	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi seperti Isimu – Batudaa, Tenilo – Iluta, Pilohayanga – Dulamayo Selatan, Pangadaa – Bakti	APBD Provinsi
5	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air, seperti Daerah Irigasi Huludupitango, Daerah Irigasi Bongo, Daerah Irigasi Buliya, Daerah Irigasi Pilohayanga	APBD Provinsi
6	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
7	Fasilitasi Pengembangan Terminal Tipe A Isimu dan Pembangunan Terminal Tipe B Limboto	APBN dan APBD Provinsi
8	Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Bilato	APBN
9	Fasilitasi pengembangan Bandar Udara Djalaludin untuk Percepatan Embarkasi Haji	APBN dan APBD Provinsi
10	Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Jaringan Telekomunikasi	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
11	Fasilitasi pengembangan dan penerapan Sumber Energi Baru Terbarukan	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
12	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
13	Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Hutan Produksi	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
14	Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman.	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
15	Pengembangan Kawasan Pariwisata seperti Pendaratan Soekarno, Pentadio Resort, juga Desa Wisata seperti Desa Bongo	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorontalo
16	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Tibawa-Pulubala, Kawasan Pertahanan dan Keamanan	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
17	Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo
18	Peningkatan layanan Pendidikan termasuk pendidikan vokasi	APBN/APBD Provinsi/ APBD Kabupaten Gorontalo

19	Peningkatan layanan Kesehatan seperti Pengembangan Rumah Sakit Ainun Habibie serta penuntasan Stunting	APBN/APBD Provinsi/ Kabupaten Gorontalo	APBD
20	Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial untuk pengurangan kemiskinan	APBN/APBD Provinsi/ Kabupaten Gorontalo	APBD
21	Pengembangan TPA Talumelito, Pembangunan dan Pengembangan Limbah B3	APBN dan APBD Provinsi	
22	Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi / digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan.	APBD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo	APBD
23	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan.	APBN/ APBD Provinsi dan Kabupaten Gorontalo	APBD

3. Kabupaten Bone Bolango

Tabel 6.17

Prediksi Capaian Indikator Makro Kabupaten Bone Bolango

No	Uraian	Target 2029
1.	Tingkat Kemiskinan	12,33 – 13,33
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,53 – 6,00 persen
3.	Tingkat Pengangguran	2,09

Pengembangan kewilayahan Kabupaten Bone Bolango akan berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi sebagai **Sentra Pengolahan Sumber Daya Alam dan Mineral serta Jasa Pendidikan**, yang diarahkan pada :

Tabel 6.18

Indikasi Intervensi Pembangunan dan Pendanaan di Kabupaten Bone Bolango

No.	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Geopark Gorontalo	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
2	Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Bone Raya dan Suwawa	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
3	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi seperti Gorontalo – Suwawa – Tulabolo, Kabila – Tapa, Tapa – Atinggola,	APBD Provinsi
4	Fasilitasi Penyelesaian Pembangunan GORR Segmen 3.	APBN
5	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api	APBN
6	Pengembangan Pelabuhan Perikanan.	APBN dan APBD Provinsi
7	Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi Sumber Energi Baru Terbarukan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
8	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Alur Pipa Air Bersih, Bangunan Pengendali Banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air).	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten

9	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
10	Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi.	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
11	Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
12	Kawasan Pariwisata, seperti Olele, Botubarani, dan Lombongo	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
13	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk penuntasan Stunting	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
14	Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial untuk pengurangan kemiskinan	APBN/ APBD Provinsi/ APBD Kabupaten
15	Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi / digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan.	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
16	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan.	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Gorontalo
17	Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Sarana Prasarana Olah Raga, Seni dan Budaya.	APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

4. Kabupaten Gorontalo Utara

Tabel 6.19
Prediksi Capaian Indikator Makro Kabupaten Gorontalo Utara

No	Uraian	Target 2029
1.	Tingkat Kemiskinan	14,88 – 15,88
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,83 – 6,00
3.	Tingkat Pengangguran	4,64

Pengembangan kewilayahan di Kabupaten Gorontalo Utara akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana dalam mendukung peran dan fungsi Kabupaten Gorontalo Utara sebagai **Sentra Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan Internasional** dalam mendorong ekonomi maritim, yaitu:

Tabel 6.20

Indikasi Intervensi Pembangunan dan Pendanaan di Kabupaten Gorontalo Utara

No.	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
1	Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Pariwisata Minanga, KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut;	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
2	Fasilitasi Pengembangan PKSN Kwandang dan Anggrek, PKW Kwandang, PKL Atinggola, dan Tolinggula	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
3	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi, seperti Labano – Tologio, Tolinggula Ulu – Cempaka Putih	APBD Provinsi
4	Pengembangan Pelabuhan Pengumpul dan Pengumpan, Pelabuhan Terminal Khusus, Pelabuhan Perikanan	APBN
5	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api	APBN
6	Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi Sumber Energi Baru Terbarukan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
7	Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air seperti Daerah Irigasi Tolinggula	APBD Provinsi
8	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
9	Fasilitasi Penyediaan Air Baku	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
10	Fasilitasi perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
11	Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
12	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk penuntasan Stunting	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
13	Penguatan Perlindungan Sosial untuk pengurangan kemiskinan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
14	Optimalisasi pengelolaan Persampahan dan Sanitasi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
15	Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi / digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan.	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
16	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

5. Kabupaten Boalemo

Tabel 6.21
Prediksi Capaian Indikator Makro Kabupaten Boalemo

No	Uraian	Target 2029
1.	Tingkat Kemiskinan	16,00 - 16,09
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,61 – 5,00
3.	Tingkat Pengangguran	1,60

Pengembangan kewilayahan Kabupaten Boalemo sebagai daerah pusat pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri dan Pariwisata dikawasan Teluk Tomini, sehingga diarahkan sebagai **Sentra Pengolahan Pertanian dan Pengembangan Pariwisata**, yang diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut:

Tabel 6.22
Indikasi Intervensi Pembangunan dan Pendanaan di Kabupaten Boalemo

No.	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
1	Pengembangan KSP Pariwisata Botumoito, KSP Geopark Gorontalo, KSP Pertanian Terpadu Paguyaman-Wonosari	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
2	Pengembangan PKW Tilmuta, PKL Paguyaman	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
3	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi seperti Tangkoku – Pentadu, Molombulahe – Bubaa	APBD Provinsi
4	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api	APBN
5	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Terminal Khusus, Pelabuhan Perikanan	APBN / APBD Provinsi
6	Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi Sumber Energi Baru Terbarukan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
7	Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air seperti Daerah Irigasi Tabulo – Latula	APBD Provinsi
8	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
9	Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
10	Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
11	Pengembangan Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

12	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk penuntasan Stunting	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
13	Penguatan Perlindungan Sosial untuk pengurangan kemiskinan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
14	Optimalisasi pengelolaan Persampahan dan Sanitasi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
15	Pembangunan Infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

6. Kabupaten Pohuwato

Tabel 6.23

Prediksi Capaian Indikator Makro Kabupaten Pohuwato

No	Uraian	Target 2029
1.	Tingkat Kemiskinan	14,41 - 15,41
2.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,96 – 4,25
3.	Tingkat Pengangguran	4,20

Pengembangan wilayah di Kabupaten Pohuwato, sebagai wilayah potensial disektor pertanian, perikanan dan pertambangan, yang didukung dengan jalur transportasi darat dan udara, sehingga Kabupaten Pohuwato diarahkan sebagai **Sentra Pengolahan Pertanian, Perkebunan dan Pertambangan** yang didorong melalui :

Tabel 6.24

Indikasi Intervensi Pembangunan dan Pendanaan di Kabupaten Pohuwato

No.	Indikasi Intervensi Pembangunan	Indikasi Pendanaan
1	Pengembangan KSP Pertanian Terpadu Randangan dan sekitarnya	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
2	Pengembangan PKL Marisa dan Popayato	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
3	Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi seperti Wonggarasi – Taluditi - Randangan, Akses Bandara Imbodu	APBD Provinsi
4	Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api	APBN
5	Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan (Pelabuhan Marisa)	APBN
6	Pengembangan Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Terminal Khusus, Pelabuhan Perikanan	APBN
7	Fasilitasi Pengembangan Bandar Udara Pohuwato	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
8	Fasilitas dan Pengembangan Sistem Jaringan Energi Sumber Energi Baru Terbarukan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
9	Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Alur Pipa Air Bersih, Bangunan Pengendali Banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air)	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

10	Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3)	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
11	Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
12	Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Kawasan Industri Pagueat, Kawasan Transportasi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
13	Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk penuntasan Stunting	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
14	Penguatan Perlindungan Sosial untuk pengurangan kemiskinan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
15	Optimalisasi pengelolaan Persampahan dan Sanitasi	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
16	Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten
17	Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa padang lamun dan mangrove di Tanjung Panjang	APBN/ APBD Provinsi dan APBD Kabupaten

6.3 Program Pembangunan Daerah

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Gorontalo, maka dirumuskan program pembangunan daerah Provinsi Gorontalo untuk pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel 6.25

Indikasi Program Perangkat Daerah Disertai Kebutuhan Pendanaan
RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikasi Program
1	6.1.1 Sasaran Terwujudnya pengembangan wilayah dan konektivitas perkotaan dan perdesaan	Program Pengembangan Permukiman Program Penataan Bangunan Gedung Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Program Penyelenggaraan Jalan Program Pengembangan Jasa Konstruksi Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Pertanahan Program Pengembangan Perumahan Program Kawasan Permukiman Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Program Pengelolaan Pelayaran
2	6.1.2 Sasaran Menciptakan kondusifitas, keamanan dan ketertiban daerah	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
3	6.1.3 Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penguatan Sistem Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Program Akreditasi Pelayanan Kesehatan Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
4	6.1.4 Sasaran Terwujudnya Pendidikan yang Berkualitas	Program pengelolaan pendidikan Program Pengembangan Kurikulum Program pendidik dan tenaga kependidikan Program pengendalian perizinan pendidikan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Program Pembinaan Perpustakaan Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Program Kesejahteraan Rakyat Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
5	6.1.5 Sasaran Terwujudnya percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatnya cakupan perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	Program Pemberdayaan Sosial Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Bencana Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Program Pengendalian Penduduk Program Pembinaan Keluarga Berencana

Tabel 6.25

Indikasi Program Perangkat Daerah Disertai Kebutuhan Pendanaan
RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikasi Program
6	6.1.6 Sasaran Terwujudnya peningkatan produktivitas perekonomian daerah	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Program Pengendalian Izin Usaha Industri Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Program Pengembangan Ekspor Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Program Pendidikan dan Latihan Koperasi Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Program Pengembangan UMKM Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Penempatan Tenaga Kerja Program Hubungan Industrial Program Pengawasan Ketenagakerjaan Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Promosi Penanaman Modal Program Pelayanan Penanaman Modal Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
7	6.1.7 Sasaran terwujudnya kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Penanganan Kerawanan Pangan Program Pengawasan Keamanan Pangan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Program Penyuluhan Pertanian Program Pengelolaan Aspek Kegeologian Program Pengelolaan Mineral dan Batubara Program Pengelolaan Energi baru Terbarukan Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pengelolaan Energi Terbarukan
8	6.1.8 Sasaran terwujudnya kesinambungan fiscal dan meningkatkan kemandirian daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Program perekonomian dan pembangunan

Tabel 6.25

Indikasi Program Perangkat Daerah Disertai Kebutuhan Pendanaan
RPJMD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029

No	Sasaran	Indikasi Program
9	6.1.9 Sasaran terwujudnya Regulasi dan tata Kelola Pelayanan Publik yang berintegritas dan Adaptif, hukum yang berkeadilan dan berkepastian	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Program Penyelenggaraan Pengawasan Program Penyelenggaraan Statistik Sektor Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Program Pengelolaan Arsip Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Program pengembangan Sumberdaya Manusia Program Penataan Desa Program Peningkatan Kerjasama Desa Program Administrasi Pemerintahan Desa Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Program Pendaftaran Penduduk Program Pencatatan Sipil Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan Program Kepegawaian Daerah Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Program Penataan Organisasi Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah Program kebijakan administrasi pembangunan Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang dan jasa Program Pelayanan Penghubung
10	6.1.10 Sasaran Terwujudnya Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional Program Perencanaan Hutan Program Pengelolaan Hutan Program Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Program Pengelolaan DAS Program Perencanaan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Peracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan Program Penanggulangan Bencana
11	6.1.11 Sasaran terwujudnya penguatan peran agama dan budaya dalam pembangunan daerah	Program Pengembangan Kebudayaan Program Pengembangan Kesenian Tradisional Program Pembinaan Sejarah Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya Program Pengelolaan Permuseuman
12	6.1.12 Sasaran meningkatnya kualitas pemuda, olahraga, keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Program Perlindungan Perempuan Program Peningkatan Kualitas keluarga Program Perlindungan Khusus Anak Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Visi dan misi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2029 akan diimplementasikan melalui kerangka pendanaan dan program pembangunan daerah. Program pembangunan daerah dirumuskan berdasarkan urusan pemerintahan dan kewenangan daerah yang telah dibagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Nomenklatur program pembangunan daerah mempedomani program pembangunan daerah pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang selanjutnya dilakukan pemutakhiran sesuai kebutuhan melalui Keputusan menteri Dalam Negeri. Terkait pemutakhiran, jika terjadi perubahan program maka akan diakomodir dan disesuaikan pada RKPD tahun berkenaan

Program pembangunan daerah selanjutnya disertai dengan kerangka pendanaan yang merupakan indikasi kebutuhan anggaran mulai tahun 2026 hingga tahun 2030. Pencatuman tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan daerah yaitu pijakan penyusunan RKPD Tahun 2030 yang akan menjadi tanggung jawab kepala daerah periode 2030-2034.

Berikut diuraikan program dan kerangka pendanaan pembangunan daerah serta penanggungjawab program berdasarkan perangkat daerah pengampu urusan sebagaimana pada tabel 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah

Kode	Kapasitas Riil / Belanja	Proyeksi				
		Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Kapasitas Rill Keuangan	1,861,491,177,233.80	2,038,099,278,001.00	2,238,716,919,564.58	2,467,042,049,783.97	2,727,675,649,872.06
2	BELANJA	1,861,491,177,233.80	2,038,099,278,001.00	2,238,716,919,564.58	2,467,042,049,783.97	2,727,675,649,872.06
2.1	Belanja Tidak Langsung	1,113,799,570,073.86	1,204,398,033,895.93	1,304,492,890,271.17	1,415,158,281,156.74	1,537,616,354,140.64
2.1.1	Belanja Pegawai	625,216,269,803.29	683,653,398,065.79	747,552,473,056.97	817,424,006,893.93	893,826,227,761.82
2.1.3	Belanja Bunga					
2.1.4	Belanja Subsidi					
2.1.5	Belanja Hibah	307,021,117,951.32	318,415,981,000.69	330,233,756,013.84	342,490,139,057.34	355,201,408,745.76
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2,184,173,914.34	2,268,481,068.99	2,356,042,404.22	2,446,983,528.47	2,541,434,898.58
2.1.7	Belanja Bagi Hasil	164,510,270,463.11	186,461,713,855.72	211,858,170,864.36	241,268,450,417.41	275,358,362,300.88
2.1.8	Belanja Bantuan Keuangan	9,867,737,941.80	8,598,459,904.74	7,492,447,931.79	6,528,701,259.58	5,688,920,433.61
2	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
2.2	Belanja Langsung	747,691,607,159.94	833,701,244,105.07	934,224,029,293.41	1,051,883,768,627.23	1,190,059,295,731.42
2.2.1	Belanja Pegawai	50,909,208,438.45	56,765,476,574.97	63,609,923,369.56	71,621,199,860.03	81,029,365,797.80
2.2.2	Belanja Modal	272,744,466,865.93	304,119,237,358.59	340,788,143,618.24	383,708,302,904.34	434,112,253,026.37
2.2.3	Belanja Barang dan Jasa	424,037,931,855.56	472,816,530,171.50	529,825,962,305.61	596,554,265,862.86	674,917,676,907.24

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
1.01. PENDIDIKAN																			
	Program pengelolaan pendidikan	APM																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Satuan Pendidikan Berakreditasi Minimal B																	
		Persentase Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah dan Diklus																	
		Persentase Angka Partisipasi Murni Pendidikan Menengah dan Diklus																	
	Program Pengembangan Kurikulum	Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah dan Khusus																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pendidik dan tenaga kependidikan	Rasio Guru Per Siswa																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program pengendalian perizinan pendidikan	Manajemen Kelembagaan Pendidikan Menengah dan Diklus																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Bahasa dan Sastra																		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Akuntabilitas kinerja Dikbudpora																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN (1.01)																			
1.02. KESEHATAN																			
DINAS KESEHATAN																			
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio Daya tampung RS Rujukan /Daya Tampung RS Meningkat																	
		Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi / RS rujukan Provinsi terakreditasi bertambah																	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana/Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana terlaksana sesuai tahapan penerapan CPM																	
		Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang terdampak dan berisiko pada Situasi KLB Provinsi /Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang terdampak dan berisiko pada Situasi KLB Provinsi sesuai tahapan implemantasi penerapan SPM																	

**TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO**

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target Rp			
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia kesehatan	Rasio Daya tampung RS Rujukan /Daya Tampung RS Meningkat Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi / RS rujukan Provinsi terakreditasi bertambah Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana/Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana terlaksana sesuai tahapan penerapan CDM Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang terdampak dan berisiko pada Situasi KLB Provinsi /Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang terdampak dan berisiko pada Situasi KLB Provinsi sesuai tahapan impelemtansi penerapan SPM																	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat, Kesehatan dan Makanan Minuman	Rasio Daya tampung RS Rujukan /Daya Tampung RS Meningkat Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi / RS rujukan Provinsi terakreditasi bertambah Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana/Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana terlaksana sesuai tahapan penerapan CDM Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang terdampak dan berisiko pada Situasi KLB Provinsi /Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang terdampak dan berisiko pada Situasi KLB Provinsi sesuai tahapan impelemtansi penerapan SPM																	Dinas Kesehatan
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rasio Daya tampung RS Rujukan /Daya Tampung RS Meningkat Jumlah RS Rujukan Provinsi yang terakreditasi / RS rujukan Provinsi terakreditasi bertambah Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana/Pelayanan Kesehatan Bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana terlaksana sesuai tahapan penerapan CDM Persentase Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang terdampak dan berisiko pada Situasi KLB Provinsi /Pelayanan Kesehatan Bagi Orang yang terdampak dan berisiko pada Situasi KLB Provinsi sesuai tahapan impelemtansi penerapan SPM																	Dinas Kesehatan

**TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO**

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Program Akreditasi Belakangan Kesehatan																		Dinas Kesehatan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Money dan Delaoran																	Dinas Kesehatan
	RSUD dr. Ainun Habibie																		
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Masyarakat	Persentase Meningkatnya sarana dan prasarana fasilitas Kesehatan RSUD dr. Hasi Ainun Habibie Provinsi Gorontalo																	RSUD dr. Ainun Habibie
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Meningkatnya ketersediaan dan kualitas SDM pada fasilitas Kesehatan provinsi RSUD Ainun Habibie																	RSUD dr. Ainun Habibie
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Meningkatnya kualitas tata kelola layanan Kesehatan di fasilitas kesehatan provinsi RSUD dr. Hasi Ainun Habibie																	RSUD dr. Ainun Habibie
	JUMLAH URUSAN KESEHATAN (1.02)																		
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
	DINAS PU DAN PENATAAN RUANG																		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Luasan irigasi yang ditingkatkan, direhabilitasi dan dipelihara (Ha) Panjang pengaman Pantai yang dibangun dan dipelihara Panjang pengaman Sungai yang dibangun dan dipelihara																	DINAS PUPRKP
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perwedaan Air Minum	Jumlah koordinasi, fasilitasi, pembinaan dan pengelolaan air minum																	DINAS PUPRKP
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Prosentase kapasitas Sistem Air Limbah Domestik Regional yang dapat terlayani																	DINAS PUPRKP
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Jumlah Drainase yang dibangun pada kawasan strategis provinsi																	DINAS PUPRKP
	Program Pengembangan Permukiman	Jumlah Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi																	DINAS PUPRKP
	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah bangunan milik pemerintah yang dibangun dan direhabilitasi untuk kepentingan strategis																	DINAS PUPRKP
	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Jumlah penataan Bangunan dan Lingkungan yang di kelola pada Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kotasarana																	DINAS PUPRKP
	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Provinsi dan Jalan Strategis Provinsi dalam kondisi baik																	DINAS PUPRKP
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli																	DINAS PUPRKP
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Rencana penataan Ruang Kawasan strategis Provinsi																	DINAS PUPRKP
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo	Persentase peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Organisasi																	DINAS PUPRKP

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Gorontalo (UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan)	Persentase peningkatan kompetensi SDM dan kapasitas pengelolaan Sumberdaya Organisasi																	UPTD Balai Pengujian Material Jalan dan Bangunan
UPT TPA Talumelito																			
	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Jumlah sarana dan prasarana TPA Regional dalam kondisi baik																	UPT TPA Talumelito
JUMLAH URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																			
1.04 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																			
	Program Pengembangan Perumahan	Persentase terhadap kebutuhan pelayanan dasar pada pemenuhan kecukupan																	DINAS PUPRKP
	Program Kawasan Permukiman	Persentase terhadap penataan kawasan permukiman dan peningkatan kualitas permukiman kumuh provinsi																	DINAS PUPRKP
	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)																		DINAS PUPRKP
	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN (BEPDU KWTM)																		DINAS PUPRKP
JUMLAH URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN																			
1.05 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, LINMAS DAN																			
	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/WVIP																	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran																	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparatur serta perencanaan, Monev dan Pelaporan																	Dinas Satpol PP, Linmas dan Kebakaran
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparatur serta perencanaan, Monev dan Pelaporan																	BPBD
	Program Penanggulangan Bencana	Prororsi masyarakat yang berperan dalam pengurangan resiko bencana																	BPBD
JUMLAH URUSAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN																			

TABEL 7.1
**INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
 PROVINSI GORONTALO**

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.06 SOSIAL																			
DINAS SOSIAL																			
	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase (%) PSKS perorangan yang diberdayakan																	Dinas Sosial
		Persentase (%) kelembagaan sosial yang diberdayakan																	
		Persentase (%) penyelenggaraan UGB/PUB yang terdih atur.																	
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Jumlah warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani																	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase (%) anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas dan gelandangan, pengemis yang meningkat keberfungsian sosialnya melalui rehabilitasi sosial dasar ditalam naati.																	Dinas Sosial
	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat aksesnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar																	Dinas Sosial
		Jumlah keluarga miskin dan rentan yang meningkat produktifitas sosial ekonominya																	Dinas Sosial
		Persentase (%) ketepatan sasaran penerima program																	Dinas Sosial
		Jumlah fakir miskin yang mampu mengembangkan bantuan stimulan																	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Jumlah korban bencana dan sosial yang terlayani dan ditangani																	Dinas Sosial
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase (%) penanaman dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan dan kesetiakawanan sosial																	Dinas Sosial
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparatur serta perencanaan, Monev dan Belanjaan																	Dinas Sosial
JUMLAH SOSIAL (1.06)																			
2 URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																			
2.07 TENAGA KERJA																			
DINAS TENAGA KERJA, ESDM DAN TRANSMIGRASI																			
	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA																		
	Program Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih																	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase jumlah pencari kerja yang di tempatkan																	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
	Program Hubungan Industrial	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui perjanjian bersama																	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Persentase pelanggaran hukum di bidang norma ketenagakerjaan yang ditangani																	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
JUMLAH URUSAN TENAGA KERJA (2.07)																			

**TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO**

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN																			
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN																			
	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase (%) anggaran responsif gender Persentase (%) partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi Persentase (%) lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Perempuan	Persentase (%) penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas keluarga	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang memperoleh penguatan dan pembenahan																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Persentase (%) lembaga pemerintah /non pemerintah yang memanfaatkan data SIGA																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Persentase (%) kabupaten/kota dengan peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Perlindungan Khusus Anak	Jumlah anak korban kekerasan yang memperoleh layanan komprehensif kewenangan provinsi																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparatur serta perencanaan, Monev dan Belanja																	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PANGAN																			
2.09 PANGAN																			
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Penyediaan infrastruktur kemandirian pangan																	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Tingkat Kecukupan Konsumsi Protein (kkal/kan/hari) Tingkat Kecukupan Konsumsi Energi (kkal/kan/hari) Persentase Cadangan Pangan Pemerintah daerah yang tersedia																	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan																	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase PSAT yang memenuhi syarat Keamanan Pangan dan Mutu Pangan																	Dinas Ketahanan Pangan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP																	Dinas Ketahanan Pangan
JUMLAH URUSAN PANGAN (2.09)																			

**TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO**

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030				
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.10	PERTANAHAN																	
	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	Jumlah Penyediaan Bidang Tanah untuk Kepentingan Umum yang tersertifikat																Dinas PUPRKP
	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN																	Dinas PUPRKP
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Jumlah lokasi Tanah yang dilaksanakan Penyelesaian ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan																Dinas PUPRKP
	Program Penanganan Konflik, Sengketa dan Perkara Perantaraan	Jumlah penyelesaian Konflik Sengketa dan Perkara Perantaraan																Dinas PUPRKP
	JUMLAH URUSAN PERTANAHAN (2.10)																	
2.11	LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																	
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP																	Dinas LH & Kehutanan
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/JATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP																	Dinas LH & Kehutanan
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)																	Dinas LH & Kehutanan
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)																	Dinas LH & Kehutanan
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)																	Dinas LH & Kehutanan
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN Masyarakat HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH																	Dinas LH & Kehutanan
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																	Dinas LH & Kehutanan
	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT																	Dinas LH & Kehutanan
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP																	Dinas LH & Kehutanan
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN																	Dinas LH & Kehutanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi																	Dinas LH & Kehutanan
	JUMLAH URUSAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN																	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.12 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL																		
	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Kepemilikan dokumen kependudukan																Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Pencatatan Sipil	Persentase terwujudnya pelayanan pencatatan sipil																Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelola administrasi kependudukan																Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN																	Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Pelaporan																Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
JUMLAH URUSAN KEPENDUDUKAN DAN CAPIL (2.12)																		
2.13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
	Program Penataan Desa	Persentase penyelenggaraan penataan desa																Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang meningkat kerjasamanya																Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase desa/kelurahan yang meningkat kualitasnya																Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Terwujudnya lembaga kemasyarakatan, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat yang lebih produktif dan mandiri																Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemberdayaan Masyarakat Desa
JUMLAH URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
2.14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA																		
	Program Pengendalian Penduduk	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif																Dinas Kesehatan
	Program Pembinaan Keluarga Berencana	Persentase PUS yang menjadi peserta KB Aktif																Dinas Kesehatan
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)																	Dinas Kesehatan
JUMLAH URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA																		

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
2.15 PERHUBUNGAN																			
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Kapasitas keselamatan transportasi																	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Pelayaran	Persentase peningkatan kinerja pelayanan transportasi																	Dinas Perhubungan
	PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN																		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Manpower dan Pelanggaran																	Dinas Perhubungan
JUMLAH URUSAN PERHUBUNGAN (2.15)																			
2.16 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN PERSANDIAN																			
	Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	Meningkatnya Ketersediaan Informasi pelaksanaan Program Kegiatan Pemerintah Daerah																	Diskominfo dan Statistik
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Aplikasi Informatika																	Diskominfo dan Statistik
JUMLAH URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (2.16)																			
2.17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH																			
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM																		Diskumperindag
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi Berprestasi																	Diskumperindag
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI																		
	Program Pendidikan dan Latihan Koperasi	Jumlah Koperasi Aktif & Jumlah Koperasi berprestasi																	Diskumperindag
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi dan UMKM yang mengakses nermodalan																	Diskumperindag
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah UMKM yang di bina/Naik Kelas																	Diskumperindag
	Program Pengembangan UMKM	Jumlah UMKM yang di bina																	Diskumperindag
	PROGRAM PENGUATAN BADANHIKUM KOPERASI																		
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase peningkatan penataan lembaga, penguatan manajemen ASN, penguatan akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, penatausahaan keuangan dan pengawasan																	Diskumperindag
JUMLAH URUSAN KOPERASI DAN UMKM (2.17)																			
2.18 PENANAMAN MODAL																			
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Jumlah data dan dokumen potensi investasi																	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal																		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen Promosi Investasi																	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Izin dan Non Izin yang diterbitkan																	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase kegiatan usaha yang mendapat pembinaan dan pengawasan penanaman modal																	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi																		Dinas Penanaman Modal dan PTSP
JUMLAH URUSAN PENANAMAN MODAL (2.18)																			

**TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO**

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.19	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA																	
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saling Kepemudaan	Persentase Pemuda yang mengikuti pelatihan dan seleksi naskahbraka. Peningkatan Peran Kepemudaan																Dinas Pemuda dan Olahraga
	Program Pengembangan Daya Saling Keolahragaan	Persentase Atlet Berprestasi di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional																Dinas Pemuda dan Olahraga
	PROGRAM PENGEMBANGKAPASITAS KEPRAMUKAAN																	Dinas Pemuda dan Olahraga
	JUMLAH URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA (2.19)																	
2.20	STATISTIK																	
	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatnya ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah																Diskominfo dan Statistik
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan, pengawasan dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi																Diskominfo dan Statistik
	JUMLAH URUSAN STATISTIK (2.20)																	
2.21	PERSANDIAN																	
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Optimalisasi Pelaksanaan Keamanan Informasi																Diskominfo dan Statistik
	JUMLAH URUSAN PERSANDIAN (2.21)																	
2.22	KEBUDAYAAN																	
	Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan, Taman Budaya, Tradisi Budaya, dan Lembaga Adat.																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase partisipan ketahanan sosial dan ketahanan budaya																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Persentase Cagar Budaya dan Fasilitas Tenaga Cagar Budaya																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	Program Pengelolaan Permuseuman	Penyelenggaraan Museum Provinsi (Persentasi Jumlah Kunjungan ke Museum)																Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	JUMLAH URUSAN KEBUDAYAAN (2.22)																	
2.23	PERPUSTAKAAN																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase meningkatnya urusan pemerintahan daerah provinsi																Dinas Kearsipan dan Perustakaan
	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase meningkatnya pembinaan perpustakaan																Dinas Kearsipan dan Perustakaan
	Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Persentase meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno																Dinas Kearsipan dan Perustakaan
	PROGRAM AKREDITASI PERPUSTAKAAN DAN SERTIFIKASI PUSTAKAWAN																	Dinas Kearsipan dan Perustakaan
	JUMLAH URUSAN PERPUSTAKAAN (2.23)																	
2.24	KEARSIPAN																	
	Program Pengelolaan Arsip	Persentase meningkatnya pengelolaan arsip provinsi																Dinas Kearsipan dan Perustakaan
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Persentase meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip																Dinas Kearsipan dan Perustakaan
	PROGRAM PERIZINAN/PENGUNAAN ARSIP	Persentase meningkatnya pembinaan perpustakaan																Dinas Kearsipan dan Perustakaan
	PROGRAM AKREDITASI DAN SERTIFIKASI	Persentase meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno																Dinas Kearsipan dan Perustakaan
	JUMLAH URUSAN KEARSIPAN (2.24)																	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3	URUSAN PILIHAN																	
3.25	URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN																	
	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil	Presentase kawasan konservasi, pesisir dan jasa kelautan yang dikelola (%)																Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Nilai produktivitas produksi perikanan tangkap per tahun (%)																Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun (%)																Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	Presentase Optimalisasi pengawasan SDKP di 2 (dua) wilayah Perairan Provinsi Gorontalo (Teluk Tomini dan Laut Sulawesi)																Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai persentase (%) produktivitas Hasil perikanan yang berdaya saing Per Tahunannya																Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Peningkatan Petaaan Lembaga, Penguatan Manajemen ASN, Penguatan Akuntabilitas kinerja, kualitas perencanaan, Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan																Dinas Kelautan dan Perikanan
	UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda (UPTD-PPI)																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	Persentase pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah																Dinas Kelautan dan Perikanan
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tenda)	Persentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)																Dinas Kelautan dan Perikanan
	UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda (UPTD-PPI)																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	Persentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran & Ketersediaan sarana/ prasarana																UPTD-PPI Gentuma
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma)	Persentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)																UPTD-PPI Gentuma
	UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda (UPTD-PPI)																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)	Persentase pelayanan Jasa Administrasi perkantoran & Ketersediaan sarana/ prasarana																UPTD-PPI Tilamuta
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap (UPTD Pelabuhan Perikanan Tilamuta)	Persentase sarana penunjang dan pelayanan kepelabuhanan (%)																UPTD-PPI Tilamuta
	UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut & Payau																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)	Terselenggaranya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut & Payau
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya (UPTD Balai Perikanan Budidaya Laut & Payau)	Nilai produktivitas produksi perikanan budidaya laut dan payau per tahun (%)																UPTD-Balai Pengembangan Budidaya Perikanan Laut & Payau
	UPTD Balai Pengujian, Penerapan Mutu, dan Diversifikasi																	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (UPTD BP2MDPP)	Terselenggaranya pelayanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																UPTD-BP2MDPP
	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (UPTD BP2MDPP)	Nilai persentase produktivitas Hasil perikanan yang berdaya saing Per Tahunannya (%)																UPTD-BP2MDPP
	JUMLAH URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (3.25)																	

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.26	PARIWISATA																		
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah Obyek Wisata Yang Dikembangkan																	Dinas Pariwisata
	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen dan Laporan Pengembangan Promosi Pemasaran Pariwisata																	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah subsektor industri kreatif yang difasilitasi																	Dinas Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang berkemampuan																	Dinas Pariwisata
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran, Kualitas Dokumen Perencanaan dan Keuangan, dan Sumber Daya Aparatur																	Dinas Pariwisata
JUMLAH URUSAN PARIWISATA (3.26)																			
3.27	PERTANIAN																		
	DINAS PERTANIAN																		
	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peredaran Pupuk Bersubsidi																	Dinas Pertanian
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produksi Jagung 2%/tahun																	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah ternak/hewan yang diobati dan/atau divaksin Jumlah Rekomendasi Pemasukan/Pengeluaran Ternak dan/atau Produk Ternak Jumlah target unit usaha/produk peternakan																	Dinas Pertanian
	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Jumlah Area Pertanian yang dikendalikan akibat serangan OPT dan terkena Dampak Perubahan Iklim (DPI)																	Dinas Pertanian
	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN																		
	Program Penyuluhan Pertanian	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Penyuluh ASN dan PPPK Terinformasinya desiminasi pertanian kepada pelaku utama/pelaku usaha serta penyuluh pertanian Terbentuknya kelembagaan kooperasi petani yang mandiri																	Dinas Pertanian
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Money dan Pelaporan																	Dinas Pertanian
JUMLAH URUSAN PERTANIAN (3.27)																			
3.28	KEHUTANAN																		
	PROGRAM PERENCANAAN HUTAN																		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN																		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA																		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN																		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)																		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
JUMLAH URUSAN KEHUTANAN (3.28)																			

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp.	
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.29	ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL																	
	Program Pengelolaan Aspek Geologi	Persentase ketersediaan data zona konservasi dan pemanfaatan air tanah																Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan Mineral dan Batubara	Persentase kegiatan usaha pertambangan yang melaksanakan kegiatan pertambangan yang baik dan benar																Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
	PROGRAM MINYAK DAN GAS BUMI																	Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan Energi baru Terbarukan	Persentase pengelolaan energi terbarukan																Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Persentase jumlah Rumah tangga sasaran yang mendapat sambungan listrik																Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
	Program Pengelolaan Energi Terbarukan	Persentase pengelolaan energi terbarukan																Dinas Tenaga Kerja ESDM dan Transmigrasi
	JUMLAH URUSAN ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL (3.29)																	
3.30	PERDAGANGAN																	
	Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan																	Diskuperindag
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																	
	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Jumlah Perdagangan antar Pulau																Diskuperindag
	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Ekspor																Diskuperindag
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DAIRI AN NFGFRI																	
	UPTD Balai Pemantapan Sertifikasi Mutu Barang																	
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Jumlah Perdagangan antar Pulau																UPTD Balai Pemantapan Sertifikasi Mutu Barang
	JUMLAH URUSAN PERDAGANGAN (3.30)																	
3.31	PERINDUSTRIAN																	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah IKM yang Dibina																Diskuperindag
	Program Pengendalian Izin Usaha Terevisi																	Diskuperindag
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Data Informasi IKM																Diskuperindag
	JUMLAH URUSAN PERINDUSTRIAN (3.31)																	
3.32	TRANSMIGRASI																	
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI																	Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan pembangunan dikawasan transmigrasi																Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi
	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	Persentase peningkatan masyarakat transmigrasi pada tahap pemantapan																Dinas Tenaga Kerja, ESDM, dan Transmigrasi
	JUMLAH URUSAN KETRANSMIGRASI (3.32)																	

**TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO**

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp.		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																			
4.01 SEKRETARIAT DAERAH																			
BIRO ORGANISASI																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah provinsi	Terlaksananya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi																	Biro Organisasi
	Program Penataan Organisasi	Terlaksananya penataan organisasi provinsi dan peningkatan Kahi/Kota																	Biro Organisasi
BIRO PEMERINTAHAN & KESEJAHTERAAN RAKYAT																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Peningkatan layanan Penunjang urusan Pemerintahan																	Biro Pemerintahan & Kesra
	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Peningkatan Pelayanan dan Fasilitasi Tugas Pemerintahan dan Otonomi Daerah																	Biro Pemerintahan & Kesra
	Program Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan layanan dan Fasilitasi pelayanan dasar, non pelayanan dasar dan pembinaan mental spritual																	Biro Pemerintahan & Kesra
BIRO HUKUM																			
	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah yang disusun dan Pendampingan Kasus Terkait Penyelenggara Pemerintah dan Bantuan Bagi Masyarakat																	Biro Hukum
	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Belanjaan																	Biro Hukum
BIRO PENGENDALIAN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN																			
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Belanjaan																	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
	Program perekonomian dan pembangunan	Persentase peningkatan aktivitas pengendalian ekonomi																	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
	Program kebijakan administrasi pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dana APBD, APBN provinsi dan kabupaten/kota																	Biro Pengendalian Ekonomi dan Pembangunan
BIRO PENGADAAN																			
	Program kebijakan dan pelayanan pengadaan barang/jasa	Jumlah dokumen pengadaan barang/jasa Provinsi Gorontalo																	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur serta Perencanaan Monev dan Belanjaan																	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
PIMPINAN SETDA																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	Biro Umum
BIRO UMUM																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	Biro Umum
JUMLAH URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (4.01)																			
4.02 SEKRETARIAT DPRD																			
	Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Administrasi Umum Sekretariat DPRD Provinsi	Persentase Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Persentase Peningkatan layanan administrasi, Sarana Prasarana dan SDM Aparatur																	Sekretariat DPRD
JUMLAH URUSAN SEKRETARIAT DPRD (4.02)																			

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN																			
5.01 PERENCANAAN																			
BAPPPEDA																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase Dukungan Manajemen Urusan Pemerintahan																	BAPPPEDA
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Pelaksanaan																	BAPPPEDA
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Kesesuaian RKPd dengan RPJMD serta Persentase Kesesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD																	BAPPPEDA
JUMLAH URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN (5.01)																			
5.02 KEUANGAN																			
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penetapan APBD dan LKPD																	Badan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Ketepatan waktu penyampaian laporan barang milik daerah																	Badan Keuangan Daerah
	Program Pengelolaan Pendanaan Daerah	Persentase pertumbuhan PAD																	Badan Keuangan Daerah
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan administrasi pemerintahan																	Badan Keuangan Daerah
JUMLAH URUSAN KEUANGAN (5.02)																			
5.03 KEPEGAWAIAN DAERAH																			
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	Badan Kepegawaian Daerah
	Program Kepegawaian Daerah	Indeks Sistem Merit																	Badan Kepegawaian Daerah
JUMLAH URUSAN KEPEGAWAIAN DAERAH (5.03)																			
5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN																			
	Program pengembangan Sumberdaya Manusia	Persentase SDM aparatur yang mengikuti pengembangan kompetensi melalui diklat, bimtek, workshop, seminar, Coaching, kursus, penataran, sosialisasi, orientasi, dan jalur pengembangan kompetensi klasikal yang sejenis																	Badan Pengembangan SDM
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan																	Badan Pengembangan SDM
JUMLAH URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (5.04)																			
5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN																			
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Hasil Riset yang ditindaklanjuti																	BAPPPEDA
JUMLAH URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (5.05)																			
5.06 PENGELOLAAN PERBATASAN																			
PROGRAM PENGELOLAAN PERBATASAN																			
JUMLAH URUSAN PENGELOLAAN PERBATASAN (5.06)																			
5.07 PENGELOLAAN PENGHUBUNG																			
BADAN PENGHUBUNG																			
	Program Pelayanan Penghubung	Persentase pelaksanaan pelayanan penghubung																	Badan Penghubung
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	Badan Penghubung
JUMLAH URUSAN PENGELOLAAN PENGHUBUNG (5.07)																			

TABEL 7.1
INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
PROVINSI GORONTALO

No. Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan program Prioritas	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Kondisi Indikator Kinerja pada	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Indikator Kinerja pada akhir RPJMD (2030)		SKPD Penanggung Jawab	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		Target	Rp		
				Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN																			
6.01 INSPEKTORAT DAERAH																			
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan BPK																	Inspektorat
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Jumlah OPD yang Menerapkan Zona Integritas Menuju WBK dan WBRM																	Inspektorat
JUMLAH URUSAN INSPEKTORAT DAERAH (6.01)																			
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM																			
8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK																			
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase capaian Penguatan Wasbang dan Cinta Tanah Air serta Nilai-Nilai Pancasila																	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan peran partai politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase Peningkatan Partisipasi Pemilih																	Badan Kesbangpol
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Massa																	Badan Kesbangpol
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Partisipasi Ketahanan Sosial dan Budaya																	Badan Kesbangpol
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase Penanganan Konflik yang Terdeteksi																	Badan Kesbangpol
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Layanan Administrasi, Sarana Prasarana, SDM aparaturnya serta perencanaan, Monev dan Belanja																	Badan Kesbangpol
JUMLAH URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK (8.01)																			

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan alat ukur pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Indikator kinerja terdiri atas Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

Ukuran pencapaian indikator kinerja pada level pemerintah daerah Provinsi melingkupi hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator pencapaian kinerja program (outcome). Pengukuran kinerja daerah dirumuskan dan ditetapkan dalam target kinerja pembangunan yang akan menjadi bahan evaluasi terhadap keberhasilan pencapaian kinerja pembangunan daerah dalam periode jangka menengah daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada RPJMD 2025-2029 berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030, dimana tahun 2030 merupakan tahun transisi yang pada pelaksanaannya menjadi tanggungjawab kepala daerah periode berikutnya.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Gorontalo 2025-2030

Indikator	Kondisi Awal (2024)	Baseline (2025)	Target Capaian				
			2026	2027	2028	2029	2030
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,13	5,54	5,65	5,74	5,80	5,86	5,92
Indeks Gini (Rasio)	0,413	0,408	0,406	0,403	0,400	0,397	0,395
Inflasi (Nilai)	2,87	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8
Pendapatan Perkapita (Juta Rp)	44,43	47,84	49,39	50,94	52,49	54,04	55,58
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,08	3.07-3.19	3.01-3.26	2.95 - 3.32	2.89 - 3.39	2.83 - 3.46	2.77 - 3.52
Persentase Kemiskinan (%)	13,87	13,52	13,08	12,78	12,46	11,94	11,35
Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	72,01	72,47	73,01	73,58	74,16	74,73	75,30
Indeks Modal Manusia	0,5	0,52	0,53	0,55	0,57	0,6	0,61
Intensitas emisi GRK (%)	59,58	62,33	64,55	66,72	68,19	69,25	70,12

Tabel 8.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2030

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Baseline) 2024	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
				Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
	Ketahanan Energi									
	Konsumsi Listrik per kapita (KWH)	KWH	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700	
	Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	SBM/Rp Milyar	72	71	70	70	69	69	69	
	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	Nilai	13,57	13,21	13,05	12,98	12,14	11,98	11,12	
	Ketahanan Air dan Pangan									
	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	%	38,33	40	42	43	44	45	45	
	Indeks Resiko Bencana	Nilai	116,02	110,58	107,94	105,45	102,46	99,06	96,18	
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Nilai	78,5	78,9	79,12	79,67	80,12	80,54	81,12	
	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)									
	· Kumulatif	%	21,05	22	24	25	26	27	28,5	
	· Tahunan	%	35,1	37,2	39,6	41,2	43,5	44,9	46,2	
	Pengelolaan Sampah									
	· Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	%	14	16	20	22	24	26	28	
	· Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	%	23	24	28	30	32	34	35	
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	4,28	4,654	5,092	5,53	5,968	6,406	6,844	

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Baseline) 2024	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
				Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Layak	%	96,13	96,85	97,30	97,75	98,20	98,65	99,11	
	Persenyawaan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak		82,99	84,91	86,64	88,38	90,11	91,84	93,57	
II	ASPEK KESEJAHTERAAN RAKYAT									
	Pendidikan									
	Hasil Pembelajaran									
	a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional untuk :									
	- Literasi Membaca	%	0,00 – 16,67	16,67 - 26,67	26,67 - 36,67	36,67 - 46,67	46,67 - 56,67	56,67 – 66,67	66,67 - 66,67	
	- Numerasi	%	0,00 – 16,67	16,67 - 26,67	26,67 - 36,67	36,67 - 46,67	46,67 - 56,67	56,67 – 66,67	66,67 - 66,67	
	b. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional untuk :									
	- Literasi Membaca	%	21,73 – 23,73	23,73 – 26,73	26,73 – 30,73	30,73 – 35,73	35,73 – 47,50	47,50 – 50,50	50,50 – 54,50	
	- Numerasi	%	14,93 – 16,93	16,93 – 18,93	18,93 – 22,93	22,93 – 26,93	26,93 – 30,93	30,93 – 34,93	34,93 – 38,93	
	Rata-rata Lama Sekolah penduduk Usia diatas 15 Tahun	Nilai Rata-Rata	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	9,0	
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	Tahun	13,2	13,2	13,2	13,2	13,3	13,3	13,3	
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	12,23%	12,09%	12,37%	12,71%	13,11%	13,36%	13,53%	
	Kesehatan									

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Baseline) 2024	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
				Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,14	71,58	71,96	72	72,46	72,87	72,99	
	<i>Kesehatan Ibu dan Anak</i>									
	• Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Per 100.000 KH	189	121	111	114	110	83	86	
	• Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	24,46	22,14	19,74	18,96	17,88	15,31	13,82	
	<i>Penanganan Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):</i>									
	• Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	%	95	95	95	95	95	95	95	
	• Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	%	93,18	94,37	95,58	96,81	98,05	99,31	100,00	
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
	Sosial									
	Tingkat Kemiskinan	%	13,87	13,52	13,08	12,78	12,46	11,94	11,35	
	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	%	15	16	18	20	22	24	26	
	Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	%	72,04	74,58	76,06	77,75	79,42	81,30	83,11	
	Pertanian									
	Nilai Tukar Petani	%	109,05	109,28	109,83	110,11	110,48	111,82	112,97	
	Nilai Tukar Nelayan/Pembudidaya (NTNP)	%	95,69	97,89	99,72	101,32	102,41	103,52	104,37	
	Nilai Tukar Petani Subsektor Peternakan (NTPT)	%	104,59	105,88	106,21	106,54	106,87	107,20	107,53	

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Baseline) 2024	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
				Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	53,02	53,57	54,12	54,67	55,24	55,81	56,38	
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Nilai	72,71	73,12	73,29	73,47	73,65	73,82	74,00	
	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Nilai	78,03	80,03	81,03	82,03	83,03	84,03	85,03	
	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Nilai	0,363	0,340	0,316	0,292	0,268	0,244	0,220	
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
	Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	%	0,25%	0,25%	0,25%	0,25%	0,24%	0,24%	0,24%	
	Kondisi Mantap Jalan	%	66,12	68,4	70,6	71,8	72,6	73,8	75,2	
	Persentase Desa Mandiri (%)		28,31%	38,00%	48,81%	59,61%	70,42%	81,23%	92,03%	
	Nilai Investasi :									
	a. Penanaman Modal Asing (PMA)	Miliar Rp	23,3	73,62	75,91	78,2	80,49	82,78	85,07	
	b. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	Miliar Rp	3863,73	4110,01	4371,99	4650,67	4947,11	5262,45	5597,88	
	Produktivitas UMKM, Koperasi									
	· Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	%	8,12	8,21	8,29	8,32	8,36	8,4	8,46	
	· Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	%	0,62	0,64	0,68	0,7	0,71	0,72	0,73	
	· Rasio Kewirausahaan Provinsi	Rasio	3,38	3,62	3,83	4,17	4,25	4,54	4,62	
	· Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Rasio	0,8	0,92	0,98	1,02	1,14	1,21	1,28	
	Persentase Lapangan Kerja yang Baik									
	· Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	%	3,08	3.07-3.19	3.01-3.26	2.95 - 3.32	2.89 - 3.39	2.83 - 3.46	2.77 - 3.52	

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Baseline) 2024	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
				Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	• Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	%	35	38	40	42	44	46	48	
	• Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	%	69,95	71,12	71,94	72,77	73,59	74,41	75,24	
	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	%	56,55	62	68	72	76	82	86	
	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Rasio	4,39	4,46	4,5	4,6	4,7	4,8	4,9	
	Pengembangan Pariwisata :									
	• Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	2,29	2,30	2,33	2,34	2,36	2,38	2,40	
	• Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribuan Orang)	Ribu Orang	4,055	4,5	4,7	4,9	5,2	5,4	5,8	
	Rata-Rata Lama Menginap Hotel Bintang	Hari	1,48	1,54	1,61	1,68	1,75	1,82	1,90	
	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Bintang	%	56,59	55,09	53,48	55,96	58,52	59,07	58,97	
	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Kualifikasi Non-Bintang	%	17,14	18,27	20,54	20,12	19,48	20,33	21,23	
	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	%	0,80%	0,80%	0,81%	0,82%	0,82%	0,83%	0,83%	
	Tingkat Inflasi (%)	%	2,87	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	2,4 – 2,8	
	<i>Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan</i>									
	a. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	%	12,25%	12,67%	13,10%	13,55%	14,01%	14,49%	14,98%	
	b. Total Kredit/PDRB (%)	%	38,55%	38,55%	38,76%	39,00%	39,23%	39,31%	39,50%	
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	57,83	61,23	63,28	65,33	67,38	69,43	71,48	
	Jumlah perolehan medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON)	Jumlah	13				15			Pelaksanaan PON berikutnya pada Tahun 2028

No.	Aspek/Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal (Baseline) 2024	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
					Target 2025	2026	2027	2028	2029	
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM									
	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	70	72	74	76	78	79	80	
	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	%	59,39	61,46	63,53	65,82	68,11	70,41	74,84	
	Indeks Demokrasi Indonesia	Kategori	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	
	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	70	72	74	75	76	77	79	
	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4,13	4,16	4,18	4,2	4,22	4,24	4,26	
	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,31	4,39	4,41	4,43	4,45	4,48	4,5	

BAB IX

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2029 merupakan dokumen strategis yang memuat kebijakan pembangunan daerah untuk jangka waktu lima tahun. Dokumen ini disusun sebagai implementasi tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 yang diarahkan pada Penguatan Landasan Transformasi, dengan 5 (lima) sasaran yang ingin dicapai, yaitu (1) Peningkatan Pendapatan Perkapita Daerah, (2) Kemiskinan Menurun dan ketimpangan berkurang, (3) Peningkatan Daya Saing Daerah, (4) Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat, dan (6) Intensitas Emisi GRK menurun menuju net zero emisi. Sasaran tersebut dijabarkan dalam berbagai strategi yang dapat dilakukan selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam rangka mendukung pencapaian visi RPJPD Tahun 2025-2045 yaitu "Gorontalo Provinsi Madani, yang Maju dan Berkelanjutan".

Sebagai instrumen perencanaan, RPJMD ini menjadi panduan dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan daerah secara menyeluruh. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi sebagai pedoman pengendalian dan evaluasi untuk menilai capaian pembangunan secara berkala. RPJMD menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen turunan, seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), serta menjadi referensi untuk menciptakan sinergi antara kebijakan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Dengan demikian, RPJMD ini berperan penting dalam memastikan keberlanjutan pembangunan di berbagai sektor melalui pendekatan yang inklusif, adaptif, dan inovatif.

Sebagai dokumen perencanaan yang berakhir pada tahun 2029, RPJMD 2025-2029 tetap digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2030 untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan selama masa transisi menuju RPJMD periode berikutnya. Penyusunan RKPD 2030 harus diselaraskan dengan kebijakan strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, terutama pada isu-isu prioritas yang memerlukan kelanjutan program hingga tahun 2030. RKPD tersebut juga perlu menyesuaikan dengan dinamika ekonomi, sosial, dan lingkungan yang terjadi pada tahun terakhir masa transisi tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip yang telah dirumuskan dalam RPJMD. Dalam prosesnya, capaian kinerja RPJMD 2025-2029 dijadikan referensi utama untuk merancang kebijakan transisi yang mendukung akselerasi pencapaian target pembangunan jangka panjang.

Pelaksanaan RPJMD 2025-2029 berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, berorientasi pada hasil, dan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Setiap program dan kegiatan harus selaras dengan visi dan misi RPJPD 2025-2045 serta dilakukan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan manfaat bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya, inklusivitas menjadi prinsip utama dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan. Selain itu, setiap kebijakan harus memperhatikan keberlanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, serta bersifat adaptif terhadap perubahan global, nasional, dan regional yang memengaruhi kondisi Gorontalo. Dengan pedoman dan prinsip-prinsip tersebut, RPJMD 2025-2029 diharapkan mampu menjadi landasan yang kokoh untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inovatif, dan inklusif.